



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar  
Nomor : 1 Tahun 2024  
Tanggal : 1 Agustus 2024

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

**1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

**Akuntabilitas** ~> Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

**Manajemen** ~> Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

**Transparansi** ~> Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

**Keseimbangan antargenerasi** ~> Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

**Evaluasi Kinerja** ~> Melakukan evaluasi kinerja entitas pelapor, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan spesifik laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

**2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar TA 2023 berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- z. Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kampar;
- ā. Peraturan Bupati Kampar Nomor 42 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar;
- ä. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
- ö. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kampar mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kampar disajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 dan kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Sistematika penyajian laporan keuangan daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Bab I      Pendahuluan**

1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan
2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

**Bab II     Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

1. Ekonomi makro
2. Kebijakan keuangan
3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

**Bab III    Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

**Bab IV    Kebijakan Akuntansi**

1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

**Bab V     Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar
  - a. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )
  - b. Penjelasan pos-pos Laporan Saldo Anggaran Lebih ( LPSAL )
  - c. Penjelasan pos-pos Neraca
  - d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional ( LO )
  - e. Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas ( LAK )
  - f. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE )
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas

**Bab VI    Penjelasan atas Informasi Non Keuangan**

**Bab VII   Penutup**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN**  
**PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 EKONOMI MAKRO KABUPATEN KAMPAR**

Beberapa indikator makro bidang ekonomi yang dicapai Pemerintah Kabupaten Kampar dalam periode sampai dengan data terakhir yang dapat disediakan, yaitu tahun 2023, adalah sebagai berikut :

**2.1.1 STRUKTUR EKONOMI**

Bila dilihat data distribusi persentase PDRB Kabupaten Kampar yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar, maka struktur perekonomian di Kabupaten Kampar tidak terjadi pergeseran yang berarti dari tahun 2019 hingga tahun 2023, yang lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar**  
**atas dasar harga BERLAKU menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)**  
**Tahun 2019 – Tahun 2023**

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	21.508,32	24.082,26	28.378,24	31.884,42	36.281,03
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	25.027,29	17.914,02	22.983,91	31.612,77	28.197,33
C Industri Pengolahan/Manufacturing	18.155,69	18.936,18	21.982,61	25.060,87	25.753,63
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	47,81	52,80	55,53	63,57	70,52
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	4,01	4,05	4,26	4,63	5,10
F Konstruksi/Construction	5.907,26	5.734,65	6.183,68	7.206,42	8.370,01
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2.871,41	2.548,58	2.960,36	3.490,08	3.772,65
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	262,55	255,69	277,10	352,33	397,03
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	70,89	60,57	68,82	78,24	84,93
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	311,15	336,51	361,25	393,02	425,62
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	328,94	340,28	376,53	427,50	453,05
L Real Estat/Real Estate Activities	761,45	779,21	812,03	889,67	945,01



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	2,97	2,43	2,46	2,88	3,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1.160,87	1.112,76	1.115,60	1.122,61	1.139,81
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	425,17	447,55	465,74	490,94	515,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	157,02	182,09	204,83	214,06	235,21
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	264,37	212,15	223,07	255,56	279,61
	<b>Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i></b>	<b>77.267,15</b>	<b>73.001,80</b>	<b>86.455,98</b>	<b>103.549,57</b>	<b>106.928,99</b>

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2024

**Tabel 2**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar**  
**atas dasar harga KONSTAN menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah)**  
**Tahun 2019– Tahun 2023**

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	5,73	5,18	5,83	4,77	5,55
B Pertambangan dan Pengalihan/ <i>Mining and Quarrying</i>	-5,94	-6,35	-2,97	2,94	2,56
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	9,43	-0,94	4,20	4,40	2,84
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,36	8,55	5,18	10,14	5,19
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,45	0,69	4,93	8,03	6,20
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	5,21	-3,29	3,53	8,51	8,38
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	5,21	-14,60	15,29	13,94	5,42
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,93	-8,10	5,74	19,43	5,76
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	6,57	-16,29	12,51	9,84	4,88
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	5,76	8,24	6,91	6,72	7,15
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,24	3,86	5,01	3,81	4,00
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	5,46	1,96	3,12	5,89	3,93
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	6,53	-20,32	1,53	12,66	8,82



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	4,84	-6,82	-0,58	-0,38	-0,24
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	7,69	2,97	3,36	3,97	3,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	11,11	13,36	11,31	2,45	6,93
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services/Activities</i>	9,29	-21,68	4,33	12,67	7,44
	<b>Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i></b>	<b>3,86</b>	<b>-0,90</b>	<b>3,45</b>	<b>4,83</b>	<b>4,22</b>

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2024

Dari Hasil Perhitungan PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dapat diketahui besarnya laju pertumbuhan dan struktur ekonomi Kabupaten Kampar. Bila dilihat dari angka PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha, maka telah terjadi kenaikan dari 4,83 Juta pada tahun 2022 menjadi 4,22 Juta pada tahun 2023.

**Tabel 3**  
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kampar**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2019 – Tahun 2023**

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2019	2020	2021	2022 <sup>a</sup>	2023 <sup>ab</sup>
A Perikanan, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	27,84	32,99	32,82	30,79	33,93
B Pertambangan dan Pengalihan/ <i>Mining and Quarrying</i>	32,39	24,54	26,58	30,53	26,37
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	23,50	25,94	25,43	24,20	24,08
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,06	0,07	0,06	0,06	0,07
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,005	0,006	0,005	0,004	0,005
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,65	7,86	7,15	6,96	7,83
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3,72	3,49	3,42	3,37	3,53
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	0,34	0,35	0,32	0,34	0,37
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	0,40	0,46	0,42	0,38	0,40
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,43	0,47	0,44	0,41	0,42
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,99	1,07	0,94	0,86	0,88



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,004	0,003	0,003	0,003	0,003
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence, Compulsory Social Security</i>	1,50	1,52	1,29	1,08	1,07
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	0,55	0,61	0,54	0,47	0,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,20	0,25	0,24	0,21	0,22
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,34	0,29	0,26	0,25	0,26
	<b>Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i></b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2024

**Tabel 4**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kampar**  
**Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023**

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	5,73	5,18	5,83	4,77	5,55
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-5,94	-6,35	-2,97	2,94	2,56
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	9,43	-0,94	4,20	4,40	2,84
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,36	8,55	5,18	10,14	5,19
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,45	0,69	4,93	8,03	6,20
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	5,21	-3,29	3,53	8,51	8,38
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	5,21	-14,60	15,29	13,94	5,42
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,93	-8,10	5,74	19,43	5,76
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	6,57	-16,29	12,51	9,84	4,88
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	5,76	8,24	6,91	6,72	7,15
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,24	3,86	5,01	3,81	4,00
L Real Estate/ <i>Real Estate Activities</i>	5,46	1,96	3,12	5,89	3,93
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	6,53	-20,32	1,53	12,66	8,82



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	4,84	-6,82	-0,58	-0,38	-0,24
P	Jasa Pendidikan/Education	7,69	2,97	3,36	3,97	3,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	11,11	13,36	11,31	2,45	6,93
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	9,29	-21,68	4,33	12,67	7,44
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>		<b>3,86</b>	<b>-0,90</b>	<b>3,45</b>	<b>4,83</b>	<b>4,22</b>

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2024

**Tabel 5**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2019-2023**

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household Consumption Expenditure	36.330,57	36.541,59	38.614,70	42.804,53	46.122,93
Pengeluaran Konsumsi LNPR NPISH Consumption Expenditure	467,54	474,60	488,16	539,97	598,19
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Government Consumption Expenditure	2.979,11	2.746,19	2.499,04	2.718,68	3.034,46
Pembentukan Modal Tetap Bruto Gross Fixed Capital Formation	27.736,71	28.074,55	30.512,88	34.538,98	37.087,81
Perubahan Inventori Changes in Inventories	1.601,29	1.825,87	147,63	104,32	167,36
Net Ekspor Barang dan Jasa Net Exports of Goods and Services	8.151,93	3.339,00	14.193,57	22.843,09	19.918,24
<b>Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product</b>	<b>77.267,15</b>	<b>73.001,80</b>	<b>86.455,98</b>	<b>103.549,57</b>	<b>106.928,99</b>

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2024

**Tabel 6**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2019-2023**

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household Consumption Expenditure	22.072,59	21.650,89	22.394,90	23.531,41	24.651,79
Pengeluaran Konsumsi LNPR NPISH Consumption Expenditure	290,34	286,77	290,17	304,03	317,68



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

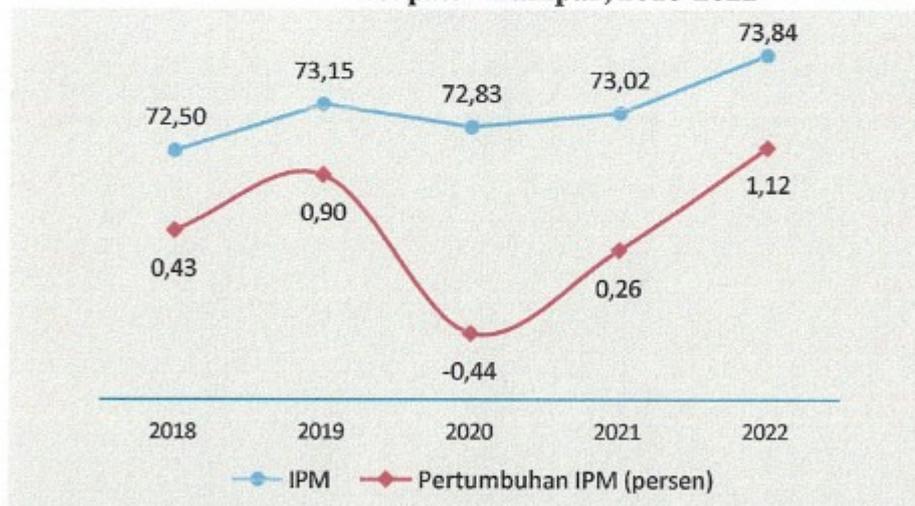
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	1.928,07	1.737,68	1.637,73	1.652,53	1.739,42
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	15.802,44	15.586,54	16.222,12	17.383,07	18.293,49
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	399,86	569,43	88,23	63,83	90,22
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	11.395,54	11.587,99	12.560,71	12.830,27	13.023,91
<b>Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i></b>	<b>51.888,83</b>	<b>51.419,30</b>	<b>53.193,86</b>	<b>55.765,14</b>	<b>58.116,51</b>

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2024

### 2.1.2 Perkembangan IPM Kabupaten Kampar

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan pendidikan yang sebelum pandemi dilakukan dengan tatap muka, sekarang dilakukan dengan virtual. Transaksi langsung dan kegiatan sosial ekonomi yang menimbulkan kerumunan juga banyak dihindari. Seluruh indikator ekonomi makro dan sosial juga mengalami tekanan yang berat, tidak terkecuali IPM.

**Gambar 1.**  
**Tren dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten Kampar, 2018-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Pada tahun 2022, IPM Kampar mengalami peningkatan yaitu mencapai 73,84. Angka ini meningkat 0,82 poin dari tahun 2021 dimana capaian pada



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

tahun tersebut sebesar 73,02. Dalam kurun waktu lima tahun, telah terjadi kenaikan IPM hingga 1,34 poin. IPM di masa pandemi COVID-19 sempat mengalami penurunan, yang disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh variabel pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Meskipun sempat mengalami penurunan, namun selama periode 2018-2022 nilai pembangunan manusia Kampar masih menunjukkan angka yang positif dengan rata-rata tumbuh di setiap tahunnya sebesar 0,45 persen per tahun.

#### **2.1.2.1 Status Pembangunan Manusia Kabupaten Kampar**

IPM yang dihitung oleh UNDP digunakan untuk melihat posisi Indonesia di tingkat global. Namun, dalam rangka memonitor capaian pembangunan manusia antarwilayah, BPS menghitung IPM pada tingkat regional, yaitu provinsi dan kabupaten/kota, baik pertumbuhannya maupun statusnya. Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia merupakan cara lain untuk melihat perkembangan pembangunan manusia. Berubahnya status pembangunan manusia dapat dijadikan indikator dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan IPM menjadi 4 kelompok yaitu:

- Sangat tinggi:  $IPM \geq 80$
- Tinggi:  $70 \leq IPM < 80$
- Sedang:  $60 \leq IPM < 70$
- Rendah:  $IPM < 50$

Sejak tahun 2012, IPM Kampar telah berstatus tinggi. Perubahan status ini merupakan akumulasi capaian tahun-tahun sebelumnya. Butuh waktu dan upaya yang cukup keras untuk meningkatkan status pembangunan manusia.

#### **2.1.2.2 Pembangunan Manusia di Kabupaten Kampar dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau**

Perbandingan IPM antar kabupaten/kota di Riau tidak mengalami banyak perubahan, Meskipun sempat mengalami penurunan di tengah pandemi, di tahun 2022 IPM Kabupaten Kampar mengalami kenaikan dan menyandang predikat “tinggi”

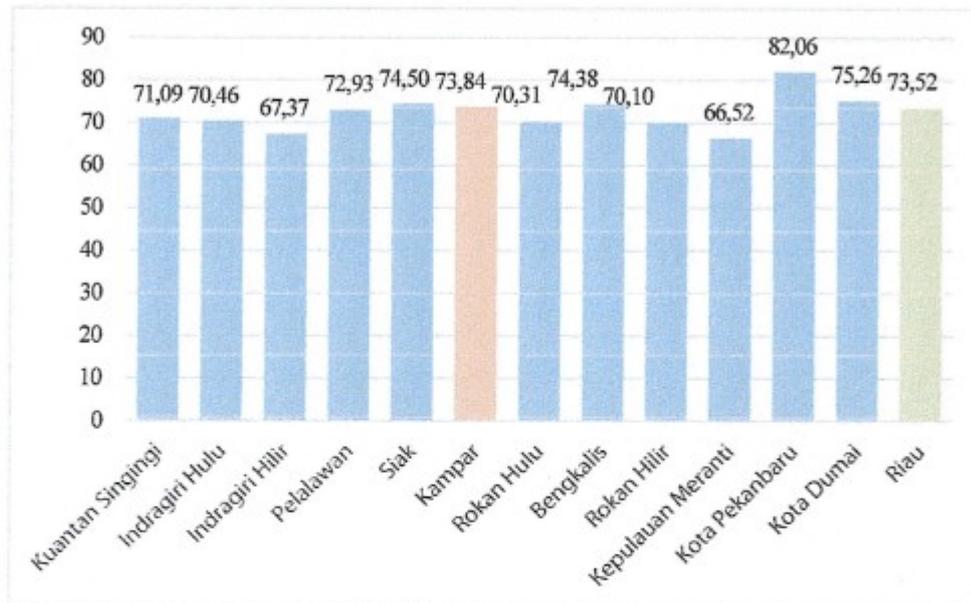


**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

dalam pembangunan manusia. Apabila dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau, Kampar berada pada posisi ke-5 setelah Kabupaten Bengkalis.

**Gambar 2**

**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2023

Peringkat IPM tertinggi tahun 2022 masih ditempati oleh Kota Pekanbaru dengan nilai IPM sebesar 82,58. Angka tersebut naik sebanyak 0,74 poin dari tahun sebelumnya. Untuk peringkat IPM terendah tahun 2022 ditempati oleh Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai IPM sebesar 66,52 poin. Untuk Kabupaten Kampar, IPM tahun 2022 menempati peringkat lima se-Riau dengan nilai IPM sebesar 73,84 poin.

Pada tahun 2022, dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, terdapat satu kota yang memiliki IPM dengan kategori "sangat tinggi", yaitu Kota Pekanbaru. Selain Kabupaten Kampar, terdapat delapan kabupaten/kota yang memiliki IPM kategori "tinggi", yaitu Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Pelalawan, Siak, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kota Dumai. Sementara dua kabupaten yang nilai IPM-nya masih berada pada kategori "Sedang", yaitu Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**Tabel 7**  
**Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Perkapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2022**

Kabupaten/Kota		Umur Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp/ Orang/ Tahun)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kuantan Singingi	68,87	13,36	8,76	10.647
2	Indragiri Hulu	70,48	12,58	8,40	10.472
3	Indragiri Hilir	68,31	12,19	7,26	10.234
4	Pelalawan	71,53	12,68	8,72	12.163
5	Siak	71,37	12,85	9,87	12.230
6	Kampar	71,12	13,59	9,39	11.394
7	Rokan Hulu	70,51	12,86	8,55	9.841
8	Bengkalis	71,50	13,16	9,71	11.857
9	Rokan Hilir	70,69	12,83	8,28	9.906
10	Kepulauan Meranti	68,09	12,84	7,88	8.246
11	Kota Pekanbaru	72,70	15,56	11,93	14.804
12	Kota Dumai	71,25	13,32	10,15	12.249
Riau		71,95	13,29	9,22	11.158

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2023

Terdapat tiga dimensi dasar yang menyusun indeks pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran perkapita.

Berdasarkan tabel 7, terlihat bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Kampar pada tahun 2022 adalah 71,12 tahun, yang artinya bayi- bayi di Kampar yang dilahirkan di tahun 2022 diharapkan dapat hidup hingga usia 71 - 72 tahun. UHH di Kampar berada pada peringkat ke-6 tertinggi dari 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Jika dilihat dari dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kampar mencapai 13,59 tahun, yang artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun di Kampar



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah hingga tingkat pendidikan Diploma II (namun tidak tamat). HLS di Kampar menempati posisi ke-2 tertinggi dari 12 Kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kampar berada pada peringkat ke-5 dengan nilai sebesar 9,39 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk di Kampar yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas X SMA (namun tidak tamat).

Pada dimensi standar hidup layak, pengeluaran perkapita Kabupaten Kampar berada pada peringkat ke-6 tertinggi dari 12 Kabupaten/kota se- Provinsi Riau, dengan nilai sebesar 11,4 juta rupiah per orang per tahun. Secara keseluruhan, nilai indikator IPM Kabupaten Kampar berada pada posisi pertengahan ke atas. Hal ini menyebabkan IPM Kabupaten Kampar menempati posisi ke-5 pada level kabupaten/kota di Provinsi Riau.

**2.1.2.3 Kesenjangan Pembangunan Manusia antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru (Kota dengan IPM Tertinggi di Provinsi Riau)**

Kecepatan pembangunan manusia setiap wilayah berbeda-beda sehingga muncul kesenjangan pembangunan manusia. Kesenjangan merupakan permasalahan yang selalu muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang umumnya terjadi karena ketidakmerataan dari distribusi program pembangunan serta ketidakmerataan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Daerah atau kawasan yang relatif lambat perkembangannya mengalami berbagai kesulitan dan akan membuat daerah atau kawasan tersebut semakin tertinggal dari daerah atau kawasan yang lain.

Perkembangan IPM Riau dari tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan, namun kemajuan ini juga tidak terlepas dari masalah kesenjangan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatasi masalah kesenjangan pembangunan termasuk pembangunan manusia, dimana pemerintah lebih berperan untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi.

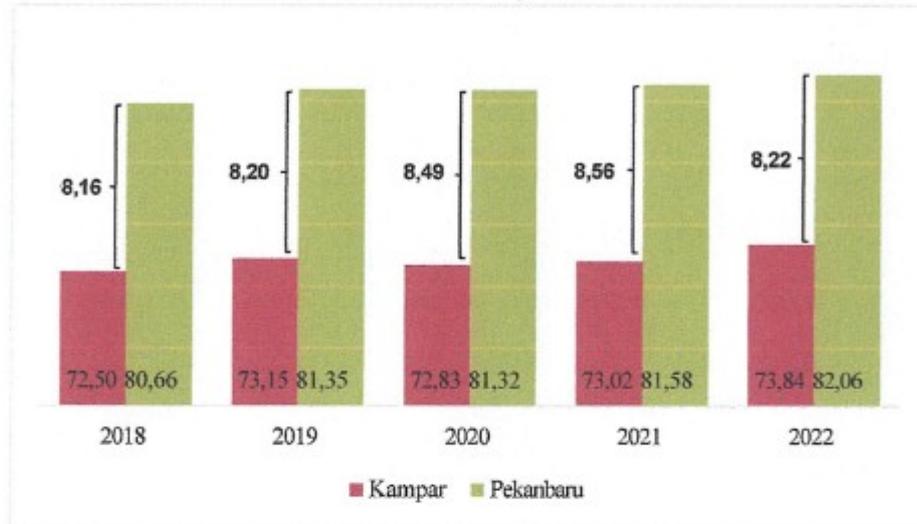
**Gambar 3**



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Selisih IPM Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2023



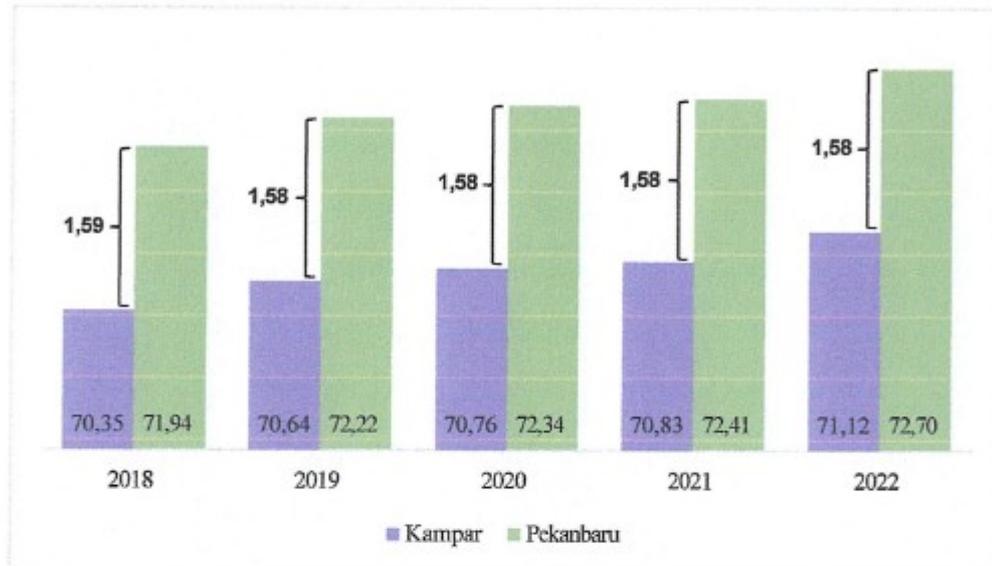
Kota Pekanbaru yang merupakan kota dengan IPM tertinggi di Provinsi Riau sudah masuk kategori “sangat tunggu” sejak tahun 2018. Sementara itu, IPM Kabupaten Kampar masih di bawah IPM Pekanbaru, Kota Pekanbaru berada pada kisaran diatas 8 poin dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya kecuali tahun 2022. Hal ini mengindikasikan tingginya kesenjangan antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru.

Kesenjangan ini dapat dimaklumi karena ekonomi Kota Pekanbaru tumbuh lebih cepat daripada Kabupaten Kampar. Ketimpangan pembangunan manusia antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru yang terjadi pada tahun 2018-2022 setidaknya masih memberikan peluang untuk menuju ke arah perbaikan. Hal ini disebabkan karena level pembangunan manusia di Kabupaten Kampar sudah tergolong tinggi.

Pada umumnya, daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang lebih rendah berpeluang untuk meningkat lebih cepat dibandingkan daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang lebih tinggi. Namun, hal tersebut dapat terjadi apabila strategi pembangunan benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pembangunan manusia.

Gambar 4

Selisih UHH Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2023

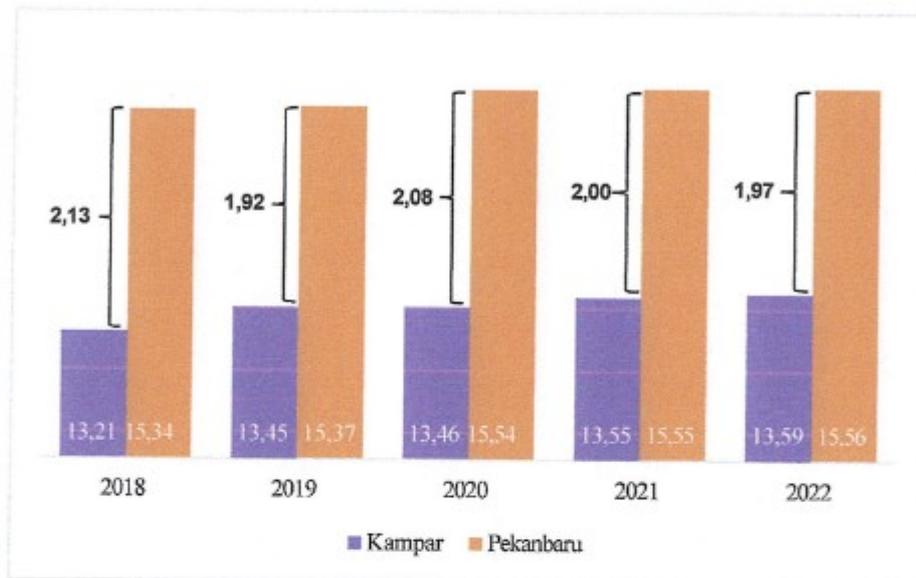
Selisih umur harapan hidup antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru cukup konstan berada di antara 1,5 – 1,6 tahun. Selama kurun waktu 2018 hingga 2022, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Kampar rata-rata tumbuh sebesar 0,27 persen per tahun. Jumlah tersebut berbeda tipis dengan pertumbuhan di Kota Pekanbaru yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,26 persen per tahun.

Kesenjangan antara Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru di bidang kesehatan sebagian besar dikarenakan fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kampar lebih sedikit dibandingkan Kota Pekanbaru. Pada tahun 2022, di Kota Pekanbaru terdapat 31 rumah sakit umum dan khusus sedangkan di Kabupaten Kampar hanya terdapat 7 rumah sakit umum dan khusus.

Kesenjangan pembangunan manusia di bidang pendidikan dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah ini merupakan salah satu indikator *input* dalam bidang pendidikan. Sementara itu, rata-rata lama sekolah merupakan indikator *output* dari sebuah proses pendidikan.

Gambar 5

Selisih HLS Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, 2018-2022



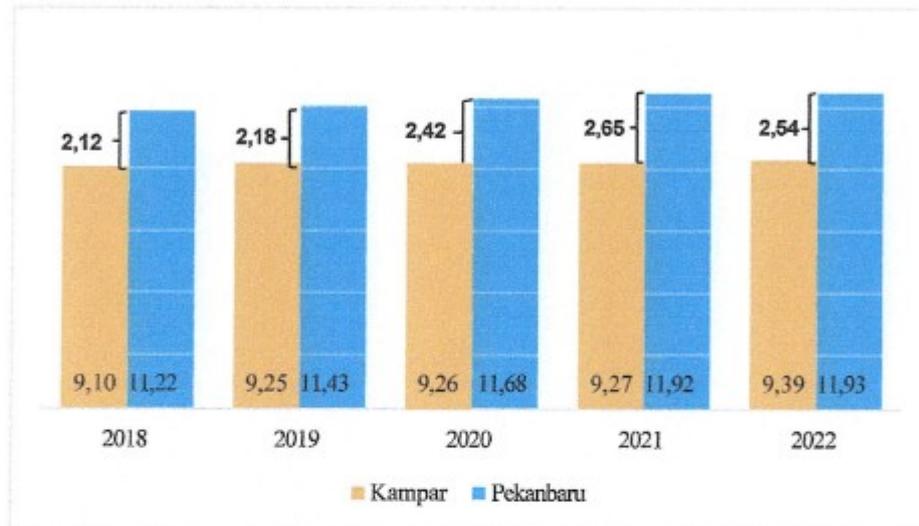
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2023

Secara umum, selama kurun waktu 2018 hingga 2022, selisih harapan lama sekolah antara Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru berkisar antara 1,92 2,13 tahun. Pada tahun 2022, harapan lama sekolah di Kota Pekanbaru mencapai angka 15,56 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah hingga tingkat pendidikan Diploma IV/ Strata I (namun tidak tamat). Sementara itu, di Kabupaten Kampar angka HLS mencapai 13,59 tahun, yang artinya artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah hingga tingkat pendidikan setara Diploma II (namun tidak tamat).

Selama periode 2018 hingga 2022, pertumbuhan Harapan Lama Sekolah di Kota Pekanbaru mencapai 1,43 persen sedangkan pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kampar hanya sebesar 2,88 persen. Angka tersebut membuktikan bahwa ketimpangan masih terjadi dan hal ini perlu menjadi perhatian terutama dalam hal ketersediaan sarana pendidikan seperti sekolah dan guru.

Gambar 6

Selisih RLS Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2023

Indikator kedua yang tercakup dalam dimensi pengetahuan adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Sama halnya dengan Harapan Lama Sekolah, terdapat ketimpangan antara Rata-rata Lama Sekolah di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Selisih antara RLS kedua kabupaten/kota berkisar antara 2,12 hingga 2,65 tahun dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali tahun 2022. Pada tahun 2018, selisih rata-rata lama sekolah sebesar 2,12 tahun dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 2,65 tahun, namun kemudian turun pada tahun 2022 menjadi 2,54 tahun.

Pada tahun 2022, Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kampar adalah 9,39 tahun, artinya secara rata-rata penduduk di Kabupaten Kampar yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas X SMA (namun tidak tamat). Sedangkan rata-rata lama sekolah di Kota Pekanbaru sudah mencapai 11,93 tahun, artinya secara rata-rata penduduk di Kota Pekanbaru yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas XII SMA (namun tidak tamat).

Selain harapan lama sekolah, pertumbuhan indikator rata-rata lama sekolah juga memiliki perbedaan yang cukup jauh. Selama periode 2018 hingga 2022, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kampar hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,19

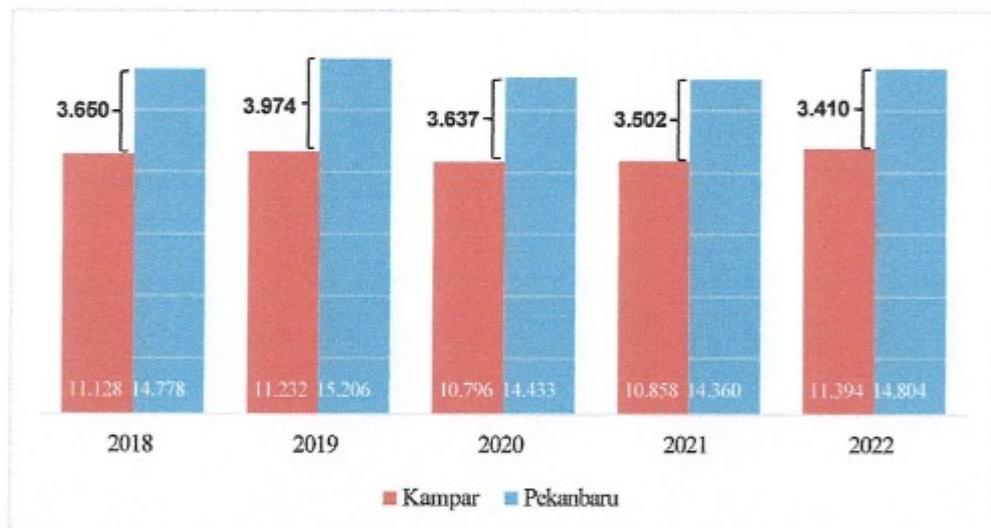


**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

persen selama lima tahun terakhir, sementara rata-rata lama sekolah di Kota Pekanbaru menunjukkan peningkatan yang lebih besar dengan pertumbuhan sebesar 6,33 persen selama lima tahun terakhir.

Dimensi standar hidup layak terlihat dari besarnya perbedaan antarkabupaten pada indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP). Kondisi perekonomian yang dinamis telah mengakibatkan tingkat kemajuan ekonomi di setiap kabupaten/kota berbeda-beda.

**Gambar 7**  
**Disparitas Pengeluaran Per Kapita Antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru (ribu rupiah/orang/tahun), 2018-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2023

Pada tahun 2022, Kota Pekanbaru menempati posisi teratas dalam capaian pengeluaran per kapita disesuaikan yaitu sebesar 14,8 juta rupiah/orang/tahun. Sementara itu, Kabupaten Kampar menempati posisi ke-6 dengan capaian sebesar 11,4 juta rupiah/orang/tahun.

Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhannya, baik Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru mengalami penurunan pengeluaran per kapita di tahun 2020. Hal tersebut diduga karena adanya pengaruh pandemi yang melanda tidak hanya di Provinsi Riau, melainkan di seluruh provinsi di Indonesia. Namun pada tahun 2021 dan 2022, Kabupaten Kampar sudah mengalami kenaikan pengeluaran per kapita berturut-turut



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

menjadi sebesar 62 ribu rupiah/orang/tahun dan 536 ribu rupiah/orang/tahun sedangkan Kota Pekanbaru mengalami penurunan pengeluaran per kapita pada tahun 2021 sebesar 73 ribu rupiah/orang/tahun kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 444 ribu rupiah/orang/tahun.

Hal penting lainnya yang perlu dijelaskan adalah *Mandatory Spending* didalam pemerintahan. *Mandatory spending* adalah pengeluaran pemerintah yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan harus dilakukan setiap tahun. *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal seperti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Dan anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Dalam APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengalokasikan dan memenuhi anggaran *Mandatory Spending*. Alokasi anggaran untuk *Mandatory Spending* tersebut diantaranya Fungsi Pendidikan sebesar Rp888.565.399.575,00 atau 31,45% dari kewajiban yang harus dialokasikan sebesar 20%. Kemudian fungsi kesehatan dialokasikan sebesar Rp401.378.102.697,00 atau 18,02% dari kewajiban yang harus dialokasikan sebesar 10%. Adapun Reliasi *Mandatory spending* di kabupaten Kampar sebagai berikut:

#### **1. Realisasi Bidang Pendidikan**

Jumlah realisasi untuk fungsi pendidikan dalam APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 Rp888.565.399.575,00 atau 31,43% dari total belanja daerah, telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

<b>Tabel 2.5 Mandatory Spending Bidang Pendidikan Tahun 2023</b>				
No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.826.856.579.502,00	888.565.399.575,00	31,43
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.826.856.579.502,00</b>	<b>888.565.399.575,00</b>	<b>31,43</b>

## 2. Realisasi Bidang Kesehatan

Jumlah alokasi realisasi dalam APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 Rp401.378.102.697,00 atau 18,02% dari total belanja daerah di luar gaji ASN telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

<b>Tabel 2.6 Belanja Mandatory Spending Bidang Kesehatan Tahun 2023</b>				
No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	2.227.999.403.713,00	255.126.983.801,00	11,45
2	Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	2.227.999.403.713,00	146.251.118.896,00	6,56
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.227.999.403.713,00</b>	<b>401.378.102.697,00</b>	<b>18,02</b>

## 3. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

Belanja Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik pemerintah kabupaten Kampar anggaran sebesar Rp2.826.856.579.502,00 terealisasi sebesar Rp558.077.882.806,00 atau sebesar 46,45% dengan rincian sebagai berikut:

<b>Tabel 2.8 Belanja Mandatory Spending Bidang infrastruktur Tahun 2023</b>				
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Infrastruktur Daerah	2.826.856.579.502,00	558.077.882.806,00	46,45
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.826.856.579.502,00</b>	<b>558.077.882.806,00</b>	<b>46,45</b>

## 4. Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa terealisasi sebesar Rp142.682.598.580,00 atau 9,00% dari Anggaran Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp1.585.610.857.417,00 dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**Tabel 2.9 Belanja *Mandatory Spending* Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun 2023**

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Badan Pengelola keuangan dan aset deah	1.585.610.857.417,00	142.682.598.580,00	9,00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.585.610.857.417,00</b>	<b>142.682.598.580,00</b>	<b>9,00%</b>

**5. Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa**

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa terealisasi sebesar Rp16.813.266.012,00 atau 9,87% dari Anggaran Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp170.326.140.967,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.10 Belanja *Mandatory Spending* Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023**

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Badan Pengelola keuangan dan aset deah	170.326.140.967,00	16.813.266.012,00	9,87%
	<b>JUMLAH</b>	<b>170.326.140.967,00</b>	<b>16.813.266.012,00</b>	<b>9,87%</b>

**2.1.3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah**

**2.1.3.1. Visi RPJPD**

Visi dan misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan pernyataan visi dan misi pembangunan daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kampar. Visi RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 dijadikan acuan dalam penyusunan RPD Kabupaten Kampar tahun 2023-2026, isu strategis pembangunan Kabupaten Kampar dan juga memperhatikan visi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Visi RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 adalah:

**Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya,  
Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun  
2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dalam penyusunan RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 diperlukan adanya konsistensi antara dengan RPJPD Kabupaten Kampar.

**2.1.3.2 Misi RPJPD Kabupaten Kampar 2005-2025**

- 1) Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.
- 2) Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan.
- 4) Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional.
- 5) Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan.

Bertitik tolak dari visi Kabupaten Kampar dalam mewujudkan negeri berbudaya, berdaya dalam lingkungan masyarakat agamis tahun 2025, maka untuk mencapai visi tersebut pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka Panjang. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan menjadi berbeda-beda. Tahapan tersebut menjadi berkesinambungan dari tahap ke tahap berikutnya untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang, sehingga atas dasar tersebut tahapan dan skala prioritas yang terkait dengan RPD Kampar tahun 2023-2026.

**2.1.3.3 Tujuan dan Sasaran**

Visi dan misi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Kampar merupakan cita-cita masyarakat Kabupaten Kampar yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2023-2026. Setiap misi memiliki makna dan pesan yang luhur untuk mewujudkan



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

Kabupaten Kampar sebagai Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPD Kabupaten Kampar selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJPD Kabupaten Kampar tahun 2005-2025 berisi sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kampar periode kelima. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan antara pembangunan jangka panjang dengan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, amanat pembangunan jangka panjang Kabupaten Kampar akan dilaksanakan secara bertahap oleh sasaran pembangunan jangka menengah.

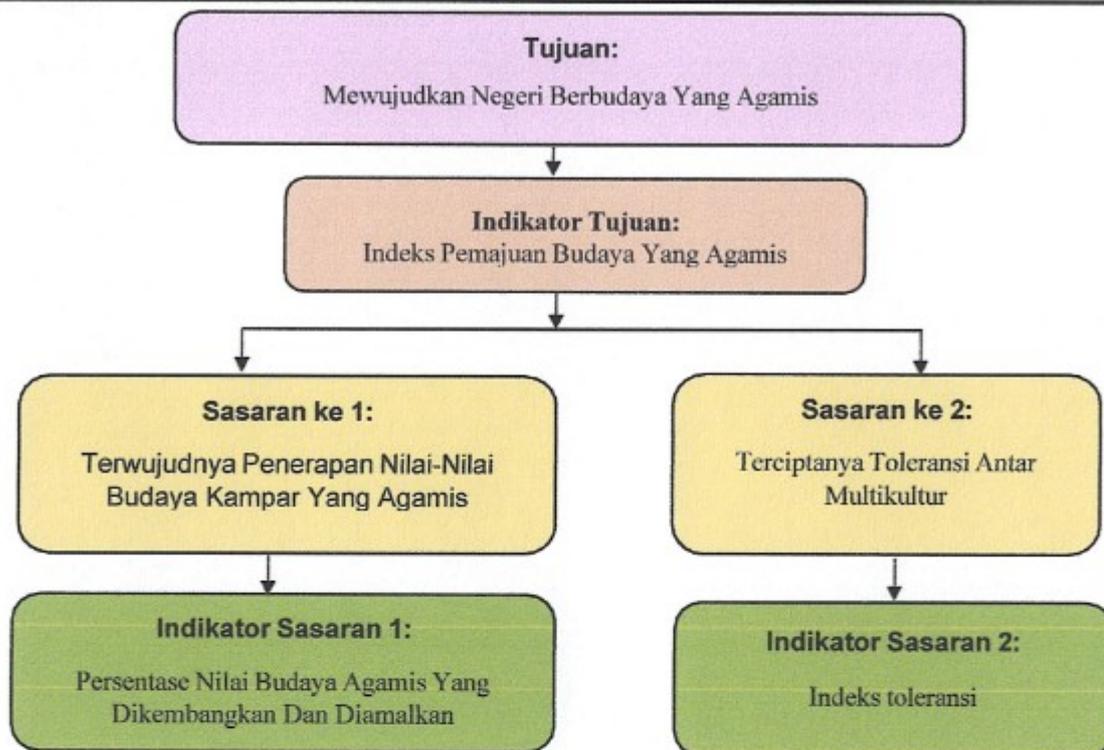
Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kampar tahun 2023-2026 merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Kampar. Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran RPD dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran (impact) yang terukur, relevan dengan apa yang akan diubah, dan ditetapkan untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.

#### **2.1.3.4 Tujuan dan Sararan pada Misi Satu RPJPD**

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi Satu (Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global) dapat dilihat pada Gambar 8 berikut.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**



Gambar 8: Penjabaran Misi Satu, Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi satu dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerjanya. Indikator kinerja tujuan dan sasaran dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

**A. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai adalah Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis dengan indicator tujuan: Indeks pemajuan budaya yang agamis.

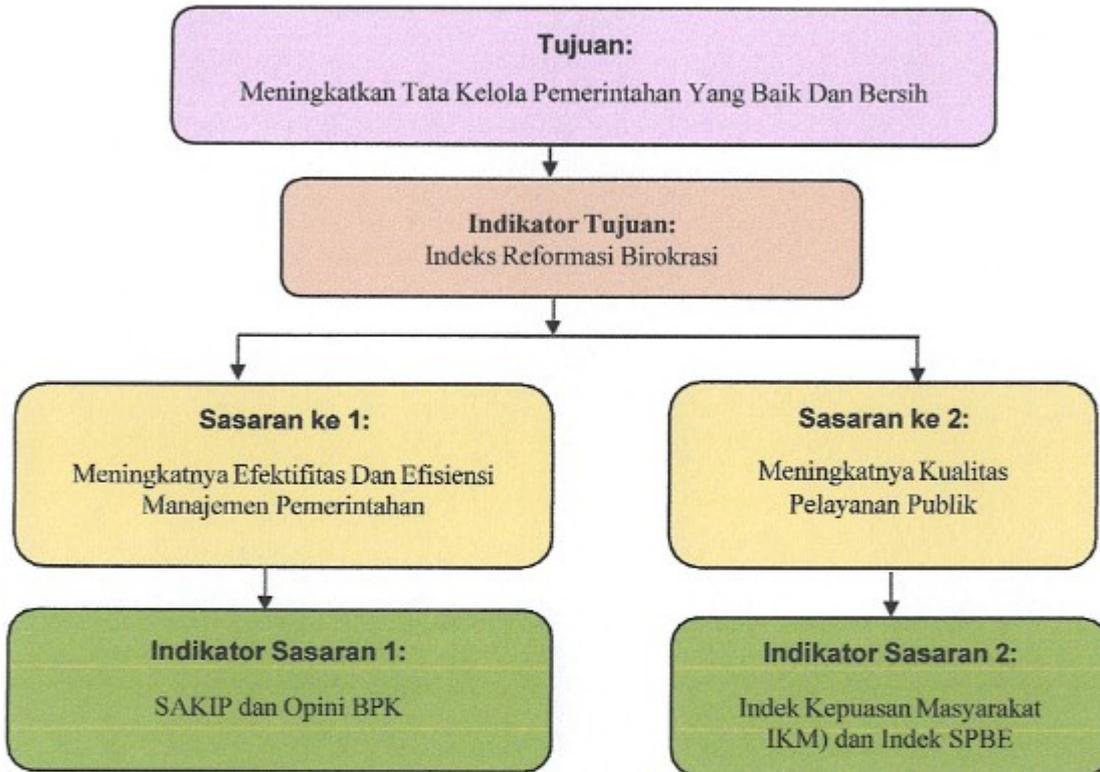
**A. Sasaran**

Untuk mencapai tujuan di atas telah ditetapkan ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu:

- a) Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis. Adapun indikator sasaran untuk menggambarkan capaian kinerja adalah Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan.
- b) Terciptanya toleransi antar multikultur. Adapun indikator sasaran untuk menggambarkan capaian kinerja adalah Indeks toleransi.

### 2.1.3.5 Tujuan dan Sararan pada Misi Dua RPJPD

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi Dua (Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat) dapat dilihat pada Gambar 9 berikut.



Gambar 9: Penjabaran Misi Dua, Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dua dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kerjanya. Indikator kinerja tujuan dan sasaran dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

#### A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan menggunakan indicator tujuan yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi.

#### B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas maka ditetapkan ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu:

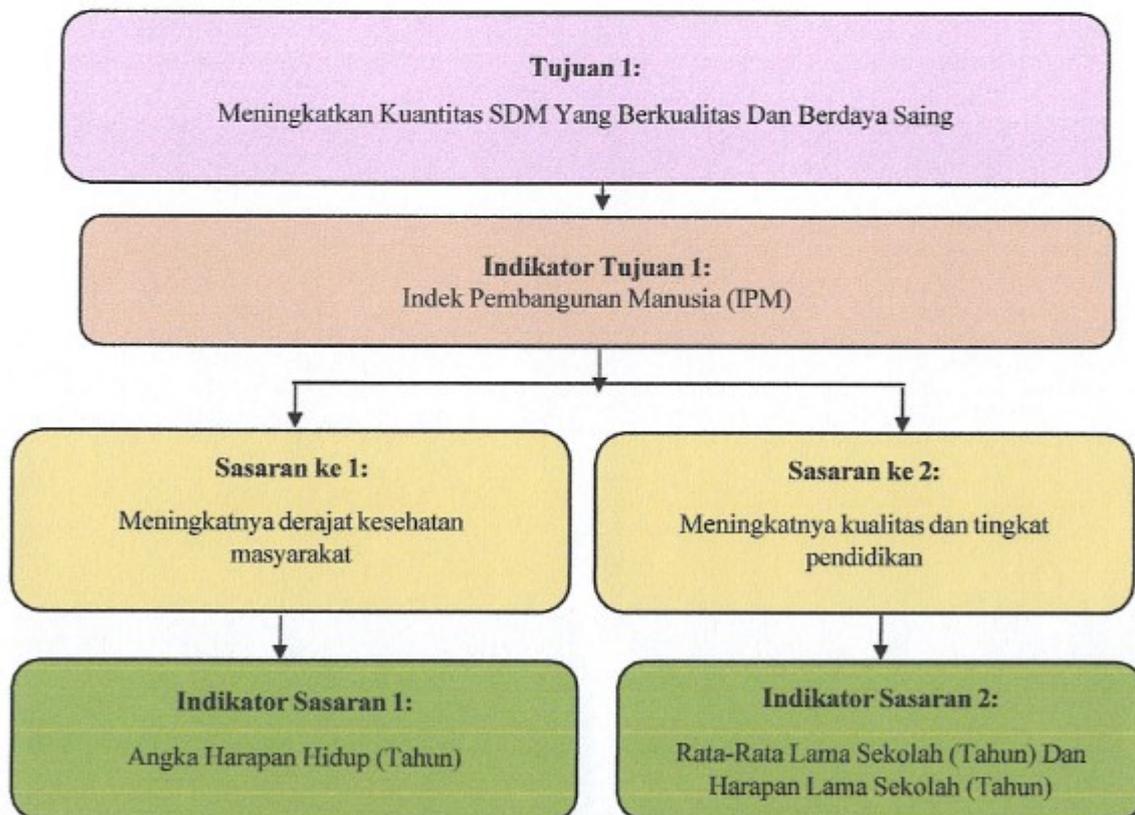


**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

- a) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Nilai SAKIP dan Opini BPK.
- b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja adalah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks SPBE.

**2.1.3.6 Tujuan dan Sararan pada Misi Tiga RPJPD**

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi Tiga (Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan). Pada Misi Tiga terdapat Tiga tujuan antara lain Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing dan Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat serat Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan dapat dilihat pada Gambar 10; 11 dan 12 berikut



Gambar 10: Penjabaran Misi Tiga, Tujuan Satu dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi tiga dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kerjanya. Indikator kinerja tujuan dan sasaran dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

**A. Tujuan**

**1) Tujuan Satu**

Tujuan satu yang ingin dicapai adalah Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing dengan indicator tujuan satu adalah: Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Sasaran**

Untuk mencapai tujuan satu di atas telah ditetapkan ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Angka harapan hidup (Tahun).
- b. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja adalah Rata-rata lama sekolah (Tahun) dan Harapan lama sekolah (Tahun).

**2) Tujuan Dua**

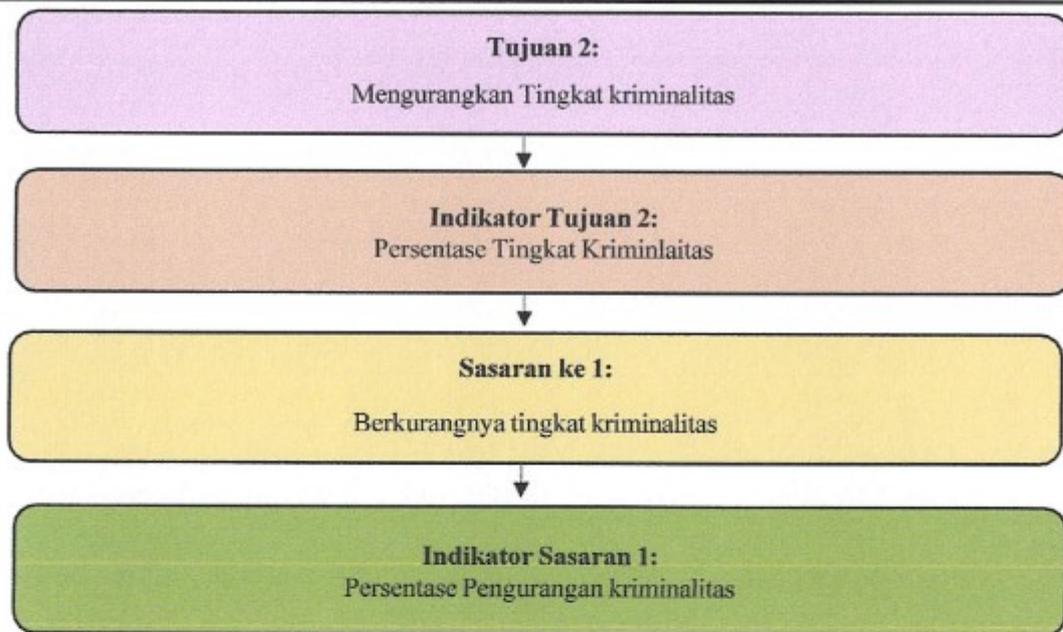
Tujuan dua yang ingin dicapai adalah Mengurangkan tingkat kriminalitas dengan indicator adalah: Persentase Tingkat Kriminlaitas.

**Sasaran:**

Untuk mencapai tujuan dua di atas telah ditetapkan ada 1 (satu) sasaran yang harus dicapai yaitu: Berkurangnya tingkat kriminalitas. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Persentase Pengurangan kriminalitas.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**



Gambar 11: Penjabaran Misi Tiga, Tujuan Dua dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

### 3) Tujuan Tiga

Tujuan tiga yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan dengan indicator tujuan satu adalah: Persentase Pengamalan Agama.

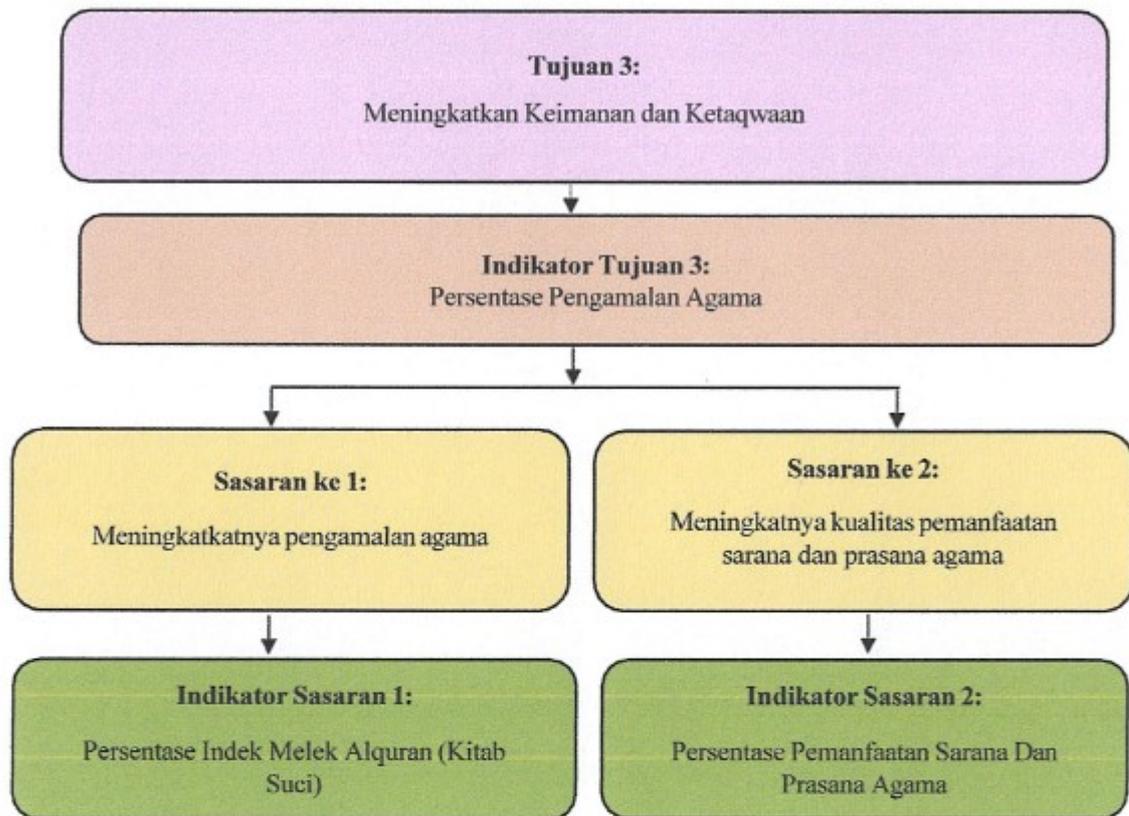
Sasaran:

Untuk mencapai tujuan tiga di atas telah ditetapkan ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu:

- a) Meningkatkan pengamalan agama. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Persentase Indeks melek Alquran (Kitab Suci).
- b) Meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana dan prasana agama Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Persentase Pemanfaatan sarana dan prasana agama



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**



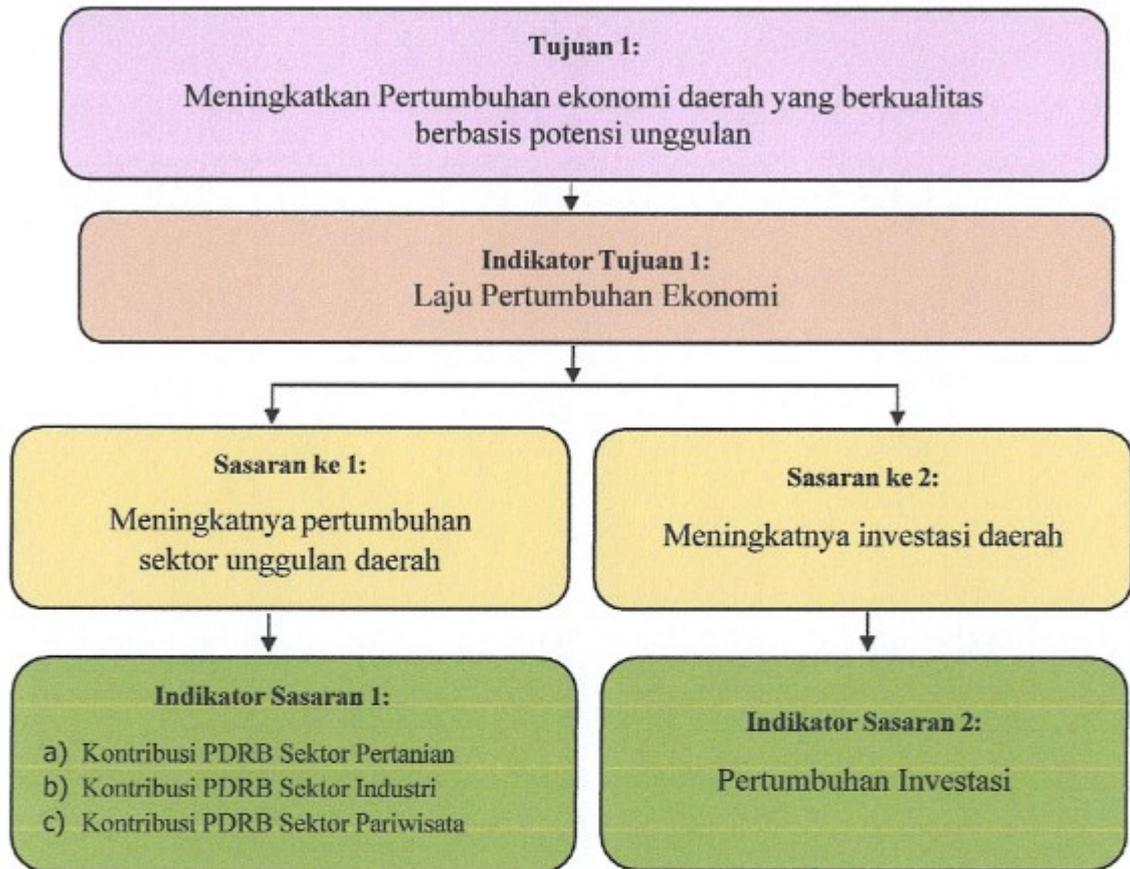
Gambar 12: Penjabaran Misi Tiga, Tujuan Tiga dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

#### 2.1.3.7 Tujuan dan Sasaran pada Misi Empat RPJPD

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi Empat (Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional). Pada Misi empat terdapat Tiga tujuan antara lain Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan dan Meningkatkan Akses Ketenagkerjaan seras Meningkatkan Daya beli masyarakat. Tujuan satu dapat dilihat pada Gambar 13 berikut.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**



Gambar 13: Penjabaran Misi Empat, Tujuan Satu dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

Tujuan

- a) Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan dengan indicator tujuan satu adalah: Laju Pertumbuhan Ekonomi.
- b) Meningkatkan Akses Ketenagkerjaan dengan indicator tujuan dua adalah Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- c) Meningkatkan Daya beli masyarakat dengan indicator tujuan tiga dengan indicator Penurunan Tingkat Kemiskinan

Sasaran

Untuk mencapai tujuan satu telah ditetapkan ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu:

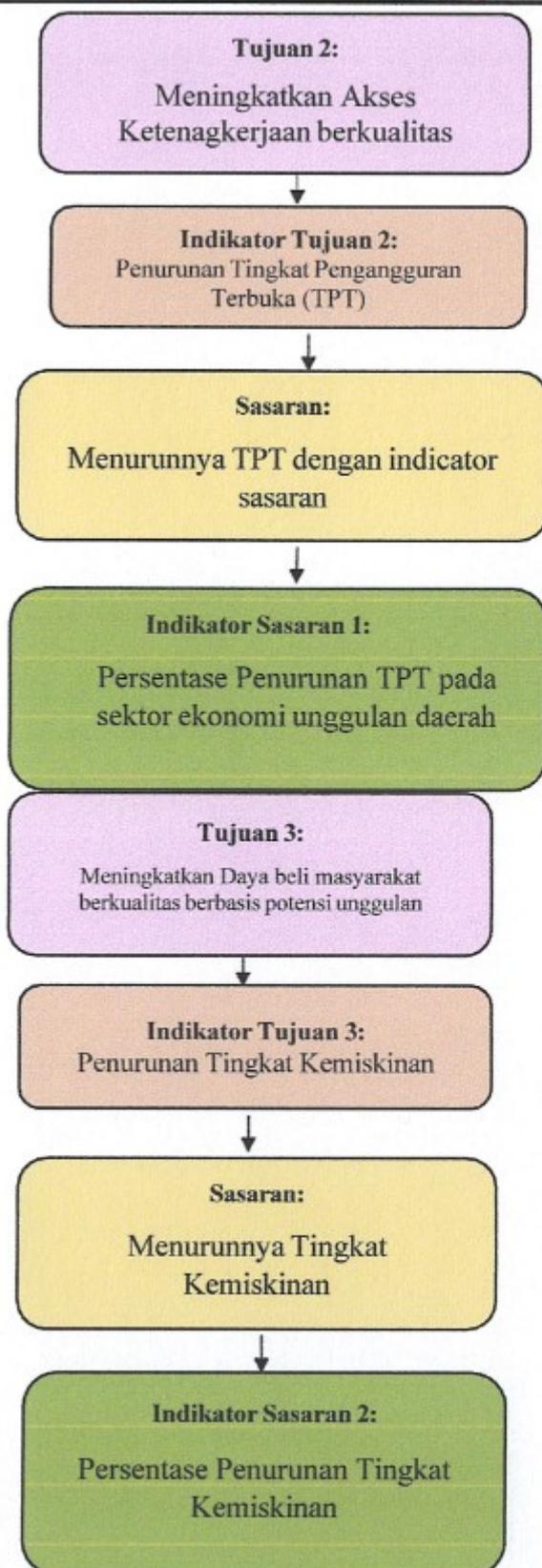
- a) Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Kontribusi PDRB Sektor Industri serta Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata.
- b) Meningkatnya investasi daerah. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Pertumbuhan Investasi.

Untuk mencapai tujuan dua telah ditetapkan satu sasaran yang harus dicapai yaitu: Menurunnya TPT dengan indicator sasaran yaitu Persentase Penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah, jelasnya dapat dilihat pada Gambar 14

Sedangkan mencapai tujuan tiga ditetapkan satu sasaran yang harus dicapai yaitu Menurunnya Tingkat Kemiskinan dengan indicator sasaran yaitu Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan, jelasnya dapat dilihat pada Gambar 14



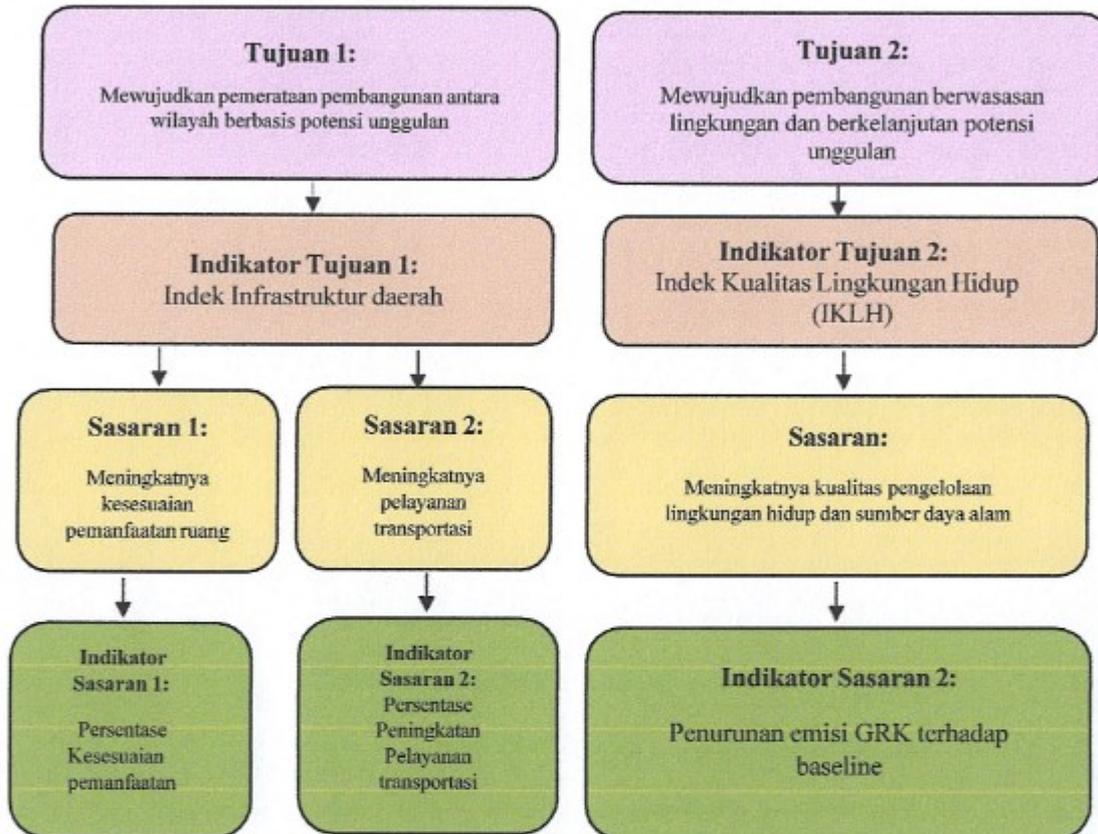
**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**



Gambar 14: Penjabaran Misi Empat, Tujuan Dua dan Tujuan Tiga dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

### 2.1.3.8 Tujuan dan Sararan pada Misi Lima RPJPD

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi Lima (Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan). Pada Misi lima terdapat dua tujuan antara lain Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah dan Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Tujuan satu dan dua dapat dilihat pada Gambar 15 berikut.



Gambar 15: Penjabaran Misi Lima, Tujuan Satu dan Dua dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

#### Tujuan

- a) Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah dengan indicator tujuan satu adalah: Indek Infrastruktur daerah.
- b) Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan indicator Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**Sasaran**

Untuk mencapai tujuan satu telah ditetapkan ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu:

- a) Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang.
- b) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Penurunan emisi GRK terhadap baseline.

**Tabel 8**  
**Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPD Kabupaten Kampar 2023-2026**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi akhir
			2021	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	
<b>Visi: Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025</b>									
<b>Misi 1: Mewujudkan Pembangunan Nilai Budaya Masyarakat Kampar Yang Menjamin Sistem Bermasyarakat Dan Bernegara Untuk Menghadapi Tantangan Global</b>									
1.1	Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis	Indeks pemajuan budaya yang agamis	NA	57,47	58,30	59,45	60,25	60,25	
1.1.1	Terwujudnya pencerapan nilai- nilai budaya Kampar yang agamis	Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamankan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.1.2	Terciptanya toleransi antar multikultur	Indeks toleransi	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai B	
<b>Misi 2: Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat</b>									
2.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	52,43	57,63	62,50	67,50	70,00	70,00	
2.1.1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	SAKIP	Nilai B	Nilai BB					
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,78	87,44	88,10	88,77	89,45	89,45	
		Indeks SPBE	C	C	C	B	B	B	



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Misi 3: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan									
3.1	Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing		Indek Pembangunan Manusia (IPM)	73,02	73,90	74,18	74,54	74,90	74,90
	3.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (Tahun)	70,83	71,04	71,19	71,34	71,49	71,49
	3.1.2	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,27	9,53	9,63	9,73	9,82	9,82
			Harapan lama sekolah (Tahun)	13,55	14,02	14,14	14,26	14,40	14,40
3.2	Mengurangi tingkat kriminalitas		Persentase Tingkat Kriminaitas	3,24	3,20	3,15	3,11	3,09	3,09
	3.2.1	Berkurangnya tingkat kriminalitas	Persentase Pengurangan kriminalitas	-0,34	-0,30	-0,25	-0,21	-0,18	-0,18
3.3	Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan		Persentase Pengamalan Agama	100	100	100	100	100	100
	3.3.1	Meningkatnya pengamalan agama	Persentase Indek meleak Alquran (Kitab Suci)	65,71	68,45	69,81	71,17	72,53	72,53
	3.3.2	Meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasana agama	Persentase Pemanfaatan sarana dan prasana agama	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Misi 4: Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional									
4.1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,45	2,21-3,46	2,47-3,47	2,56-3,48	2,62-3,49	2,62-3,49
	4.1.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (%)	34,15	34,27	34,39	34,51	34,63	34,63
			Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	31,15	31,75	32,37	33,00	33,64	33,64



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

			Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata (%)	0,94	0,95	0,96	0,98	0,99	0,99
	4.1.2	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi	4,40	2,87	3,83	4,79	5,75	4,80
4.2	Meningkatkan Akses Ketenagkerjaan		Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,27	4,20	4,13	4,06	3,99	3,99
	4.2.1	Menurunnya TPT	Persentase Penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah	-6,54	-1,72	-1,69	-1,67	-1,64	-1,64
4.3	Meningkatkan Daya beli masyarakat		Penurunan Tingkat Kemiskinan	7,82	7,51	7,25	7,04	6,88	6,88
	4.3.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan	-5,96	-3,96	-3,42	-2,88	-2,34	-2,34
<b>Misi 5: Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan</b>									
5.1	Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah		Indek Infrastruktur daerah	58,69	59,22	59,75	60,29	60,83	60,83
	5.1.1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	Na	80,42	85,31	90,21	95,10	95,10
	5.1.2	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pelayanan transportasi	Na	60,04	74,20	86,60	100,00	100,00
5.2	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,13	70,96	71,38	71,79	72,21	72,21
	5.2.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Penurunan emisi GRK terhadap baseline (GgCO2-e)	36.620,73	35.940,55	34.102,87	33.762,78	32.840,49	32.840,49



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**2.1.4 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah**

**2.1.4.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Sasaran dan target pembangunan selama periode 2023-2026 yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah Kabupaten Kampar untuk menyusun cara atau upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan dimaksud, maka dirumuskan sejumlah strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

**2.1.4.2 Strategi Pembangunan**

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 merupakan prioritas pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPd periode berkenaan. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.

**Tabel 9**  
**Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Kampar**  
**Tahun 2023 - 2026**

Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Misi 1						
Mewujudkan pembangunan nilai-nilai budaya masyarakat Kampar	Tujuan (1) = Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis	IK = indeks kemajuan budaya yang agamis	Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis	Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan	Peningkatan pelestarian, pengelolaan dan pengembangan serta pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

			Terciptanya toleransi antar multikultur	Indeks toleransi	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman
<b>Misi 2</b>						
Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset	Tujuan (2) = Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan	IK = indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	SAKIP, Opini BPK	Pengembangan manajemen pemerintahan berbasis kinerja	Mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja
dacrah dan pelayanan masyarakat	bersih		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM, Indeks SPBE	Penerapan standar pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi	Menerapkan standart pelayanan publik berbasis teknologi informasi
<b>Misi 3</b>						
Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman bertaqwa yang berwawasan kedepan	Tujuan (3.1) = Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing	IK = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Peningkatan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan	Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	Peningkatan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan
	Tujuan (3.2) Mengurangkan tingkat kriminalitas	IK= Tingkat Kriminlaitas	Berkurangnya tingkat kriminalitas	Persentase Pengurangan kriminalitas	Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat	Meningkatkan kctertiban dan keamanan masyarakat
	Tujuan (3.3) Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan	Ik= Pengamalan Agama	Meningkatkatny a pengamalan agama	Persentase Melek Kitab Suci (Alquran)	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan alquran	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Alquran
			Meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasana agama	Persentase Pemanfaatan sarana dan prasana agama	Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama
<b>Misi 4</b>						



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata, serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional, dan internasional	Tujuan (4.1) = Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan	IK = Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Kontribusi PDRB sektor pertanian, industri, pariwisata	Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)
					Peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)
					Peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan
					Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah
					Peningkatan daya tarik destinasi, pengelolaan	Meningkatkan daya tarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata
			Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan investasi	dan promosi pariwisata	
					Peningkatan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif
					Peningkatan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah
Tujuan (4.2) Meningkatkan Akses Ketenagakerjaan	IK= Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Menurunnya TPT	Persentase Penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah	Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan	
Tujuan (4.3) Meningkatkan Daya beli masyarakat	IK= Penurunan Tingkat Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penurunan tingkat kemiskinan	Peningkatan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah	
Misi 5						



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Mewujudkan pembangunan kawasan yang seimbang yang	Tujuan (5.1) = Mewujudkan pemerataan pembangunan	IK=Indek Infrastruktur daerah	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan pembangunan infrastruktur dan jaringan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringan sarana
dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan	antara wilayah		peruntukan		sarana prasarana yang merata	prasarana yang merata
					Pengembangan sistem permukiman secara terpadu	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu
			Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pelayanan transportasi	Pengembangan sistem Transportasi terpadu	Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu
	Tujuan (5.2) = Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	IK = IKLH	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Penurunan emisi GRK terhadap baseline	Peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya
				Peningkatan Pengendalian pencemaran lingkungan	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan	

**2.1.4.3 Arah Kebijakan Pembangunan**

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Setelah dirumuskan, maka setiap pernyataan arah kebijakan dipetakan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun, arah kebijakan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun, namun dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun di jabarkan dalam bentuk arah kebijakan dengan prioritas arah kebijakan menyesuaikan tema/fokus pembangunan tahun berkenaan, lebih jelas di lihat pada Tabel 10.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**Tabel 10**  
**Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026**

No	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Meningkatkan kehidupan masyarakat	Meningkatkan masyarakat	Memantapkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat
2	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman	Meningkatkan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan toleransi	Meningkatkan toleransi
3	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan	Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu	Meningkatkan kompetensi pemuda dalam memajukan teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu
4	Mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja	Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset dan pelayanan publik	Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset dan pelayanan publik	Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset dan pelayanan publik
5	Menerapkan standart pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatkan Sarana dan Prasarana IT untuk	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT	Memantapkan kualitas dan Publik pelayanan berbasis IT
6	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan berbasis IT Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan berbasis IT Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa
7	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan Pendidikan berbasis IT	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan Pendidikan berbasis IT	Memantapkan kualitas dan standarisasi pelayanan Pendidikan berbasis IT
8	Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat	Meningkatkan pelayanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat	Meningkatkan pelayanan untuk menjaga ketertiban keamanan masyarakat	Memantapkan pelayanan untuk menjaga ketertiban keamanan masyarakat
9	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Alquran	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sarana dan prasarana Alquran	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sarana prasarana Alquran	Memantapkan kualitas pendidikan Alquran



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

10	Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan jumlah pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama
11	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu	Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu	Meningkatkan kompetensi pemuda dalam memajukan teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu
12	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
13	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan
14	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
15	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) untuk pemenuhan kebutuhan lokal
16	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya) sebagai sub sector unggulan
17	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan sebagai sub sector unggulan
18	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah
19	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata berbasis IT	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata Berbasis IT	Meningkatkan dayatarik destinasi, dan kualitas pengelolaan dan promosi pariwisata berbasis IT
20	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif terutama pada sector unggulan	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif pada sector unggulan terutama sector industry pengolahan



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

21	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah
22	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan terutama berskala mikro, kecil dan menengah.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan terutama berskala mikro, kecil dan menengah.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan terutama berskala mikro, kecil dan menengah.
23	Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan pendapatan RT dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan pendapatan RT dan pengendalian inflasi daerah
24	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringan sarana prasarana yang merata	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringan jalan dan jembatan sarana prasarana yang merata	Meningkatkan rasio kondisi infrastruktur dan jaringan jalan dan jembatan sarana prasarana yang baik dan merata	Meningkatkan rasio kondisi infrastruktur dan jaringan jalan dan jembatan sarana prasarana yang baik dan merata
25	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu dengan melibatkan stakeholders terkait	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu dengan melibatkan stakeholders terkait
26	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas
27	Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu	Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu	Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu	Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu
28	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya
29	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

## **2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN KABUPATEN KAMPAR**

APBD merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, APBD mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan.

Sebagai dokumen formal pernyataan kebijakan fiskal yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif maka telah ditetapkan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023, yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kampar tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023, yang dalam pelaksanaannya mengalami sembilan kali perubahan (Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023).

Dalam penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Kampar bersama DPRD Kabupaten Kampar menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai dasar penetapan program prioritas dan target-target umum yang akan dicapai selama tahun anggaran, untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APBD.

### **1) Kebijakan di bidang Penerimaan**

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Kampar, diupayakan pendanaannya secara maksimal, salah satunya melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi serta memperlancar pungutan pajak dan retribusi serta sumber-sumber penerimaan lainnya.

Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

### **2) Kebijakan di bidang Pengeluaran**

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud.

Dalam kaitan itu, penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengalokasian Belanja Daerah dicerminkan dalam komposisi dua kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Masing-masing kelompok belanja dibagi ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja sesuai *nomenklatur* yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Kebijakan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran belanja. Kebijakan umum belanja daerah mengacu kepada prioritas pembangunan sebagaimana



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kampar maupun dokumen perencanaan terkait lainnya.

Meningkatkan pengawasan baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat sehingga dana yang tersedia dalam APBD dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

### 2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan serta memperhatikan kondisi ekonomi Kabupaten Kampar secara umum, Indikator pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2023 terangkum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023, dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel.11**  
**Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar**  
**Tahun Anggaran 2023**

*(Dalam Rupiah )*

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.805.811.127.502,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	285.540.731.945,00
4.1.01.	Pajak Daerah	156.820.690.967,00
4.1.01.06.	Pajak Hotel	1.712.100.000,00
4.1.01.06.01.	Pajak Hotel	1.712.100.000,00
4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	1.712.100.000,00
4.1.01.07.	Pajak Restoran	7.647.597.191,00
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.647.597.191,00
4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.647.597.191,00
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	0,00
4.1.01.08.02.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00
4.1.01.08.02.0001.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00
4.1.01.09.	Pajak Reklame	1.150.000.000,00
4.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.150.000.000,00
4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.150.000.000,00
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	77.123.700.000,00
4.1.01.10.01.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.575.700.000,00
4.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.575.700.000,00
4.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	75.548.000.000,00
4.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	75.548.000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
4.1.01.11.	Pajak Parkir	180.500.000,00
4.1.01.11.01.	Pajak Parkir	180.500.000,00
4.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir	180.500.000,00
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	1.805.000.000,00
4.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	1.805.000.000,00
4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	1.805.000.000,00
4.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	102.000.000,00
4.1.01.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet	102.000.000,00
4.1.01.13.01.0001.	Pajak Sarang Burung Walet	102.000.000,00
4.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.235.000.000,00
4.1.01.14.37.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	6.235.000.000,00
4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	6.235.000.000,00
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.651.298.704,00
4.1.01.15.01.	PBBP2	24.651.298.704,00
4.1.01.15.01.0001.	PBBP2	24.651.298.704,00
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	36.213.495.072,00
4.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak	36.213.495.072,00
4.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak	36.213.495.072,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	13.505.450.000,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	3.589.450.000,00
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	37.500.000,00
4.1.02.01.01.0006.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	37.500.000,00
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	248.000.000,00
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	248.000.000,00
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	350.000.000,00
4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	350.000.000,00
4.1.02.01.05.	Retribusi Pelayanan Pasar	54.000.000,00
4.1.02.01.05.0003.	Retribusi Kios	54.000.000,00
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	800.000.000,00
4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	800.000.000,00
4.1.02.01.07.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	35.000.000,00
4.1.02.01.07.0001.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	0,00
4.1.02.01.07.0002.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran	35.000.000,00
4.1.02.01.09.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.000.000,00
4.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>
<b>4.1.02.01.11.</b>	<b>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</b>	<b>700.000.000,00</b>
4.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	700.000.000,00
<b>4.1.02.01.13.</b>	<b>Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi</b>	<b>1.300.950.000,00</b>
4.1.02.01.13.0001.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.	1.300.950.000,00
<b>4.1.02.02.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.916.000.000,00</b>
<b>4.1.02.02.01.</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>1.079.500.000,00</b>
4.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan	216.000.000,00
4.1.02.02.01.0004.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	55.000.000,00
4.1.02.02.01.0006.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	808.500.000,00
<b>4.1.02.02.07.</b>	<b>Retribusi Rumah Potong Hewan</b>	<b>66.000.000,00</b>
4.1.02.02.07.0001.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	66.000.000,00
<b>4.1.02.02.09.</b>	<b>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</b>	<b>250.000.000,00</b>
4.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.000.000,00
<b>4.1.02.02.11.</b>	<b>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</b>	<b>520.500.000,00</b>
4.1.02.02.11.0001.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	200.000.000,00
4.1.02.02.11.0002.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	65.000.000,00
4.1.02.02.11.0003.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	255.500.000,00
<b>4.1.02.03.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>8.000.000.000,00</b>
<b>4.1.02.03.01.</b>	<b>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</b>	<b>0,00</b>
4.1.02.03.01.0001.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00
<b>4.1.02.03.07.</b>	<b>Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung</b>	<b>8.000.000.000,00</b>
4.1.02.03.07.0001.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.000.000.000,00
<b>4.1.03.</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>23.273.308.815,00</b>
<b>4.1.03.02.</b>	<b>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD</b>	<b>22.683.657.850,00</b>
<b>4.1.03.02.01.</b>	<b>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)</b>	<b>20.978.657.850,00</b>
4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	20.978.657.850,00
<b>4.1.03.02.02.</b>	<b>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)</b>	<b>1.555.000.000,00</b>
4.1.03.02.02.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.555.000.000,00
<b>4.1.03.02.03.</b>	<b>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)</b>	<b>150.000.000,00</b>
4.1.03.02.03.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	150.000.000,00
<b>4.1.03.03.</b>	<b>Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta</b>	<b>589.650.965,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
4.1.03.03.01.	<b>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta</b>	<b>589.650.965,00</b>
4.1.03.03.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	589.650.965,00
4.1.04.	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>91.941.282.163,00</b>
4.1.04.01.	<b>Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.02.	<b>Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.02.0002.	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00
4.1.04.01.02.0005.	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00
4.1.04.03.	<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>200.000.000,00</b>
4.1.04.03.03.	<b>Hasil dari Bangun Guna Serah</b>	<b>200.000.000,00</b>
4.1.04.03.03.0001.	Hasil dari Bangun Guna Serah	200.000.000,00
4.1.04.04.	<b>Hasil Kerja Sama Daerah</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.01.	<b>Hasil Kerja Sama Daerah</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.04.01.0001.	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00
4.1.04.05.	<b>Jasa Giro</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.05.01.	<b>Jasa Giro pada Kas Daerah</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	0,00
4.1.04.07.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>150.000.000,00</b>
4.1.04.07.01.	<b>Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah</b>	<b>150.000.000,00</b>
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	150.000.000,00
4.1.04.09.	<b>Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</b>	<b>2.500.000.000,00</b>
4.1.04.09.01.	<b>Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</b>	<b>2.500.000.000,00</b>
4.1.04.09.01.0001.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.500.000.000,00
4.1.04.11.	<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.11.01.	<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00
4.1.04.12.	<b>Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.09.	<b>Pendapatan Denda Pajak Reklame</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.09.0001.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00
4.1.04.12.16.	<b>Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.12.16.0001.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	0,00
4.1.04.14.	<b>Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.01.	<b>Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.14.01.0001.	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00
4.1.04.15.	<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.15.03.	<b>Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji</b>	<b>0,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
	<b>dan Tunjangan</b>	
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00
<b>4.1.04.15.04.</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00
<b>4.1.04.16.</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>88.791.282.163,00</b>
<b>4.1.04.16.01.</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>88.791.282.163,00</b>
4.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	88.791.282.163,00
<b>4.1.04.19.</b>	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>	<b>300.000.000,00</b>
<b>4.1.04.19.01.</b>	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>	<b>300.000.000,00</b>
4.1.04.19.01.0001.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00
<b>4.1.04.21.</b>	<b>Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.04.21.01.</b>	<b>Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.21.01.0001.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.518.170.395.557,00</b>
<b>4.2.01.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.221.270.991.417,00</b>
<b>4.2.01.01.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.983.915.009.417,00</b>
<b>4.2.01.01.01.</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>772.847.618.192,00</b>
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	344.866.669.094,00
4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	14.236.020.612,00
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	921.251.122,00
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	10.835,00
4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	362.914.201.396,00
4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	29.590.660.809,00
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00
4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	6.983.165.553,00
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	12.373.632.930,00
4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	962.005.841,00
<b>4.2.01.01.02.</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>821.729.594.000,00</b>
4.2.01.01.02.0001.	DAU	821.729.594.000,00
4.2.01.01.02.0002.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00
4.2.01.01.02.0004.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00
<b>4.2.01.01.03.</b>	<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>	<b>29.493.099.000,00</b>
4.2.01.01.03.0001.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.295.878.000,00
4.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	12.799.943.000,00
4.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.056.189.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>
4.2.01.01.03.0013.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00
4.2.01.01.03.0015.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00
4.2.01.01.03.0017.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	6.693.217.000,00
4.2.01.01.03.0031.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-	0,00
4.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0,00
4.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00
4.2.01.01.03.0037.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00
4.2.01.01.03.0040.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00
4.2.01.01.03.0055.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	416.478.000,00
4.2.01.01.03.0059.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	231.394.000,00
<b>4.2.01.01.04.</b>	<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>359.844.698.225,00</b>
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	126.813.600.000,00
4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.575.000.000,00
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	161.297.343.000,00
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.161.250.000,00
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.229.879.000,00
4.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	11.433.000.000,00
4.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.203.000.000,00
4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	40.340.790.000,00
4.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.146.044.069,00
4.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	367.252.980,00
4.2.01.01.04.0020.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	323.666.000,00
4.2.01.01.04.0022.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	594.998.176,00
4.2.01.01.04.0023.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.358.875.000,00
<b>4.2.01.02.</b>	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.01.02.01.</b>	<b>DID</b>	<b>0,00</b>
4.2.01.02.01.0001.	DID	0,00
<b>4.2.01.05.</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>231.513.488.000,00</b>
<b>4.2.01.05.01.</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>231.513.488.000,00</b>
4.2.01.05.01.0001.	Dana Desa	231.513.488.000,00
<b>4.2.01.06.</b>	<b>Insentif Fiskal</b>	<b>5.842.494.000,00</b>
<b>4.2.01.06.01.</b>	<b>Insentif Fiskal</b>	<b>5.842.494.000,00</b>
4.2.01.06.01.0001.	Insentif Fiskal	5.842.494.000,00
<b>4.2.02.</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>296.899.404.140,00</b>
<b>4.2.02.01.</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>192.501.153.932,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>
<b>4.2.02.01.01.</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>192.501.153.932,00</b>
4.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	41.898.400.738,00
4.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	38.048.895.146,00
4.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	69.850.969.454,00
4.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.297.230.042,00
4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	40.405.658.552,00
<b>4.2.02.02.</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>104.398.250.208,00</b>
<b>4.2.02.02.01.</b>	<b>Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi</b>	<b>0,00</b>
4.2.02.02.01.0001.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00
<b>4.2.02.02.02.</b>	<b>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi</b>	<b>104.398.250.208,00</b>
4.2.02.02.02.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	104.398.250.208,00
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.100.000.000,00</b>
<b>4.3.01.</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>2.100.000.000,00</b>
<b>4.3.01.01.</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</b>	<b>2.100.000.000,00</b>
<b>4.3.01.01.01.</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</b>	<b>2.100.000.000,00</b>
4.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.100.000.000,00
<b>4.3.01.05.</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.01.05.01.</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis</b>	<b>0,00</b>
4.3.01.05.01.0001.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.805.811.127.502,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.826.856.579.502,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.047.129.480.192,00</b>
<b>5.1.01.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>1.020.218.954.429,00</b>
<b>5.1.01.01.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>593.046.928.082,00</b>
<b>5.1.01.01.01.</b>	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>	<b>452.056.009.178,00</b>
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	391.344.367.125,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	60.711.642.053,00
<b>5.1.01.01.02.</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>	<b>38.806.445.974,00</b>
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	37.579.400.958,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.227.045.016,00
<b>5.1.01.01.03.</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>	<b>5.908.996.950,00</b>
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.908.996.950,00
<b>5.1.01.01.04.</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional ASN</b>	<b>35.434.118.420,00</b>
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	34.234.993.070,00
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.199.125.350,00
<b>5.1.01.01.05.</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>	<b>3.321.360.538,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.188.590.988,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	132.769.550,00
<b>5.1.01.01.06.</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>	<b>22.079.527.910,00</b>
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	21.172.813.820,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	906.714.090,00
<b>5.1.01.01.07.</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>	<b>482.374.434,00</b>
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	482.374.434,00
<b>5.1.01.01.08.</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>	<b>5.348.608,00</b>
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.251.406,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	97.202,00
<b>5.1.01.01.09.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>	<b>31.633.662.837,00</b>
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	30.841.628.854,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	792.033.983,00
<b>5.1.01.01.10.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>	<b>825.518.358,00</b>
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	801.582.821,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	23.935.537,00
<b>5.1.01.01.11.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN</b>	<b>2.493.564.875,00</b>
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.420.930.493,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	72.634.382,00
<b>5.1.01.02.</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>192.641.420.672,00</b>
<b>5.1.01.02.01.</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>	<b>155.706.320.672,00</b>
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	151.605.633.172,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.100.687.500,00
<b>5.1.01.02.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0,00
<b>5.1.01.02.03.</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN</b>	<b>30.739.100.000,00</b>
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	30.739.100.000,00
<b>5.1.01.02.04.</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN</b>	<b>6.196.000.000,00</b>
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	6.196.000.000,00
<b>5.1.01.03.</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>178.636.649.549,00</b>
<b>5.1.01.03.01.</b>	<b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah</b>	<b>7.841.034.549,00</b>
5.1.01.03.01.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	85.605.000,00
5.1.01.03.01.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	382.379.860,00
5.1.01.03.01.0009.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	57.500.000,00
5.1.01.03.01.0010.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	3.856.185.000,00
5.1.01.03.01.0011.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	9.025.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>
5.1.01.03.01.0012.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	90.250.000,00
5.1.01.03.01.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	5.100.000,00
5.1.01.03.01.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	311.750.000,00
5.1.01.03.01.0015.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.232.564.935,00
5.1.01.03.01.0016.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan BeaPerolehanHakatasTanahdan Bangunan	1.810.674.754,00
<b>5.1.01.03.02.</b>	<b>Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>675.272.500,00</b>
5.1.01.03.02.0001.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.875.000,00
5.1.01.03.02.0002.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.600.000,00
5.1.01.03.02.0005.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	40.200.000,00
5.1.01.03.02.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	57.500.000,00
5.1.01.03.02.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan RetribusiJasaUmum-PemeriksaanAlat Pemadam Kebakaran	1.750.000,00
5.1.01.03.02.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan RetribusiJasaUmum-Pengawasandan Pengendalian Menara Telekomunikasi	65.047.500,00
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	51.475.000,00
5.1.01.03.02.0022.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	12.500.000,00
5.1.01.03.02.0024.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	29.325.000,00
5.1.01.03.02.0025.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000,00
<b>5.1.01.03.03.</b>	<b>Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD</b>	<b>161.297.343.000,00</b>
5.1.01.03.03.0001.	Belanja TPG PNSD	161.297.343.000,00
<b>5.1.01.03.04.</b>	<b>Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD</b>	<b>6.642.559.500,00</b>
5.1.01.03.04.0001.	Belanja TKG PNSD	6.642.559.500,00
<b>5.1.01.03.05.</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD</b>	<b>1.680.500.000,00</b>
5.1.01.03.05.0001.	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.680.500.000,00
<b>5.1.01.03.07.</b>	<b>Belanja Honorarium</b>	<b>499.940.000,00</b>
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	442.940.000,00
5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	57.000.000,00
<b>5.1.01.04.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD</b>	<b>32.722.764.665,00</b>
<b>5.1.01.04.01.</b>	<b>Belanja Uang Representasi DPRD</b>	<b>1.039.106.478,00</b>
5.1.01.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.039.106.478,00
<b>5.1.01.04.02.</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga DPRD</b>	<b>144.023.775,00</b>
5.1.01.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.023.775,00
<b>5.1.01.04.03.</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras DPRD</b>	<b>109.063.091,00</b>
5.1.01.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.063.091,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
<b>5.1.01.04.04.</b>	<b>Belanja Uang Paket DPRD</b>	<b>86.058.000,00</b>
5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
<b>5.1.01.04.05.</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan DPRD</b>	<b>1.492.209.866,00</b>
5.1.01.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.492.209.866,00
<b>5.1.01.04.06.</b>	<b>Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD</b>	<b>124.784.100,00</b>
5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00
<b>5.1.01.04.07.</b>	<b>Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD</b>	<b>64.949.850,00</b>
5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	64.949.850,00
<b>5.1.01.04.08.</b>	<b>Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	<b>7.938.000.000,00</b>
5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
<b>5.1.01.04.09.</b>	<b>Belanja Tunjangan Reses DPRD</b>	<b>1.984.500.000,00</b>
5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00
<b>5.1.01.04.10.</b>	<b>Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	<b>535.600.009,00</b>
5.1.01.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	535.600.009,00
<b>5.1.01.04.12.</b>	<b>Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	<b>9.659.744.496,00</b>
5.1.01.04.12.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	98.106.000,00
5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.409.624,00
5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.228.872,00
5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.552.000.000,00
<b>5.1.01.04.13.</b>	<b>Belanja Tunjangan Transportasi DPRD</b>	<b>9.540.000.000,00</b>
5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.540.000.000,00
<b>5.1.01.04.14.</b>	<b>Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD</b>	<b>4.725.000,00</b>
5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	4.725.000,00
<b>5.1.01.05.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>	<b>174.451.868,00</b>
<b>5.1.01.05.01.</b>	<b>Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH</b>	<b>55.965.000,00</b>
5.1.01.05.01.0001.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00
<b>5.1.01.05.02.</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH</b>	<b>7.637.700,00</b>
5.1.01.05.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.637.700,00
<b>5.1.01.05.03.</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH</b>	<b>100.737.000,00</b>
5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
<b>5.1.01.05.04.</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH</b>	<b>7.082.676,00</b>
5.1.01.05.04.0001.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.082.676,00
<b>5.1.01.05.05.</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH</b>	<b>1.160.692,00</b>
5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.160.692,00
<b>5.1.01.05.06.</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH</b>	<b>1.120,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.1.01.05.06.0001.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00
<b>5.1.01.05.07.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH</b>	<b>1.570.320,00</b>
5.1.01.05.07.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.570.320,00
<b>5.1.01.05.08.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH</b>	<b>115.128,00</b>
5.1.01.05.08.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00
<b>5.1.01.05.09.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH</b>	<b>182.232,00</b>
5.1.01.05.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	182.232,00
<b>5.1.01.06.</b>	<b>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>993.120.000,00</b>
<b>5.1.01.06.01.</b>	<b>Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD</b>	<b>393.120.000,00</b>
5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
<b>5.1.01.06.02.</b>	<b>Belanja Dana Operasional KDH/WKDH</b>	<b>600.000.000,00</b>
5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
<b>5.1.01.99.</b>	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>	<b>22.003.619.593,00</b>
<b>5.1.01.99.99.</b>	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>	<b>22.003.619.593,00</b>
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	22.003.619.593,00
<b>5.1.02.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>910.545.958.029,00</b>
<b>5.1.02.01.</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>177.749.577.113,00</b>
<b>5.1.02.01.01.</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>176.880.604.153,00</b>
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	37.417.297.491,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	930.267.450,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.639.168.800,00
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	39.780.000,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.077.704.984,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	12.592.000,00
5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.520.056.000,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	19.226.891.740,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	738.669.552,00
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	181.020.000,00
5.1.02.01.01.0016.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	157.346.950,00
5.1.02.01.01.0019.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	223.239.100,00
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	536.013.789,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.691.067.849,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.240.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.376.075.115,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	426.477.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	90.436.000,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	774.650.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.793.951.110,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	613.513.000,00
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	20.400.000,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	279.833.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.295.621.530,00
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	344.982.100,00
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.923.468.240,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Discrahkan kepada Masyarakat	7.049.410.000,00
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	112.500.000,00
5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.172.051.077,00
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	2.267.601.300,00
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	91.912.750,00
5.1.02.01.01.0044.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.326.928.000,00
5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	280.496.000,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.916.001.726,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.824.466.650,00
5.1.02.01.01.0055.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	375.461.500,00
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.115.897.000,00
5.1.02.01.01.0059.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	46.200.000,00
5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00
5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.658.282.350,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	300.534.000,00
5.1.02.01.01.0065.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	39.000.000,00
5.1.02.01.01.0067.	Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00
5.1.02.01.01.0069.	Belanja Pakaian Teknik	0,00
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.452.400.500,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	509.688.500,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	8.010.000,00
5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00
<b>5.1.02.01.02.</b>	<b>Belanja Barang Tak Habis Pakai</b>	<b>868.972.960,00</b>
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	8.166.400,00
5.1.02.01.02.0004.	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	23.198.000,00
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	836.708.560,00
5.1.02.01.02.0012.	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	900.000,00
5.1.02.01.02.0013.	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00
<b>5.1.02.02.</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>369.511.919.686,00</b>
<b>5.1.02.02.01.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>297.885.073.795,00</b>
5.1.02.02.01.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.917.951.500,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.286.014.500,00
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	141.600.000,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.232.556.960,00
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	2.451.600.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	9.400.055.000,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	888.965.000,00
5.1.02.02.01.0012.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.233.600.000,00
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	64.546.224.000,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	42.783.667.600,00
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	183.805.000,00
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	9.717.595.604,00
5.1.02.02.01.0018.	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.451.774.720,00
5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	793.700.000,00
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.856.150.000,00
5.1.02.02.01.0021.	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	290.400.000,00
5.1.02.02.01.0022.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	664.270.000,00
5.1.02.02.01.0023.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	230.940.000,00
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	47.200.000,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	120.600.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	51.233.401.800,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	310.350.000,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.485.468.500,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.671.130.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.928.740.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	15.294.752.800,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.763.450.000,00
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	10.200.000,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	195.400.000,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.285.450.000,00
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	76.738.000,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.436.550.000,00
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	393.400.000,00
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	184.682.000,00
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	19.000.000,00
5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00
5.1.02.02.01.0053.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	450.000.000,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.013.000.000,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	32.400.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	968.087.340,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	21.500.715.011,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	815.912.500,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.380.237.210,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	157.375.000,00
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	0,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.320.600.000,00
5.1.02.02.01.0068.	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	515.108.750,00
5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up	104.255.000,00
5.1.02.02.01.0075.	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	0,00
<b>5.1.02.02.02.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>	<b>28.615.289.657,00</b>
5.1.02.02.02.0002.	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	0,00
5.1.02.02.02.0003.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.577.280.685,00
5.1.02.02.02.0004.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.990.400.000,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.731.749.080,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	80.659.892,00
5.1.02.02.02.0012.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	140.000.000,00
5.1.02.02.02.0013.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	95.200.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>
<b>5.1.02.02.03.</b>	<b>Belanja Sewa Tanah</b>	<b>326.750.000,00</b>
5.1.02.02.03.0001.	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	326.750.000,00
<b>5.1.02.02.04.</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>8.341.442.656,00</b>
5.1.02.02.04.0018.	Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya	0,00
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	7.500.000,00
5.1.02.02.04.0027.	Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	0,00
5.1.02.02.04.0034.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	313.500.000,00
5.1.02.02.04.0035.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.750.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.902.050.000,00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	261.600.000,00
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	36.000.000,00
5.1.02.02.04.0116.	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.400.000,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.913.742.000,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	45.800.000,00
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	134.000.000,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	145.900.656,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00
5.1.02.02.04.0133.	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	85.800.000,00
5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	40.000.000,00
5.1.02.02.04.0150.	Belanja Sewa Peralatan Pemancar HF/SW	20.000.000,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.220.400.000,00
5.1.02.02.04.0407.	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	192.000.000,00
<b>5.1.02.02.05.</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>5.350.049.000,00</b>
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.219.239.000,00
5.1.02.02.05.0010.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.000.000,00
5.1.02.02.05.0037.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.000.000,00
5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama	13.750.000,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	2.936.560.000,00
5.1.02.02.05.0044.	Belanja Sewa Motel	42.500.000,00
5.1.02.02.05.0045.	Belanja Sewa Flat/Rumah Susun	132.000.000,00
<b>5.1.02.02.06.</b>	<b>Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.02.06.0013.	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00
5.1.02.02.06.0131.	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	0,00
<b>5.1.02.02.07.</b>	<b>Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya</b>	<b>388.100.000,00</b>
5.1.02.02.07.0013.	Belanja Sewa Audio Visual	0,00
5.1.02.02.07.0021.	Belanja Sewa Musik Lainnya	341.600.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	40.500.000,00
5.1.02.02.07.0057.	Belanja Sewa Tanaman	6.000.000,00
<b>5.1.02.02.08.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>	<b>22.353.573.628,00</b>
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.702.886.380,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	2.254.000.000,00
5.1.02.02.08.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	30.287.400,00
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.815.000.000,00
5.1.02.02.08.0007.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-JasaDesainRekayasauntuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00
5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	3.833.000.000,00
5.1.02.02.08.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-JasaDesainRekayasauntuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	998.309.000,00
5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	1.150.000.000,00
5.1.02.02.08.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00
5.1.02.02.08.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan PenataanRuang-JasaPerencanaandan Perancangan Perkotaan	0,00
5.1.02.02.08.0016.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan PenataanRuang-JasaPerencanaandan PerancanganLingkunganBangunandan Landscape	0,00
5.1.02.02.08.0017.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan PenataanRuang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	213.536.250,00
5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.361.624.640,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.179.400.000,00
5.1.02.02.08.0020.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	3.063.296.208,00
5.1.02.02.08.0021.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.625.000.000,00
5.1.02.02.08.0023.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	127.233.750,00
<b>5.1.02.02.09.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>	<b>594.664.800,00</b>
5.1.02.02.09.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00
5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	594.664.800,00
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00
<b>5.1.02.02.10.</b>	<b>Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)</b>	<b>140.000.000,00</b>
5.1.02.02.10.0008.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	140.000.000,00
<b>5.1.02.02.11.</b>	<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>	<b>470.000.000,00</b>
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	470.000.000,00
<b>5.1.02.02.12.</b>	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>5.046.976.150,00</b>
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.479.736.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	0,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	2.516.240.000,00
5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	51.000.000,00
<b>5.1.02.03.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>65.829.903.654,00</b>
<b>5.1.02.03.01.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Tanah</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.03.01.0029.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	0,00
5.1.02.03.01.0035.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya	0,00
<b>5.1.02.03.02.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>14.985.281.476,00</b>
5.1.02.03.02.0002.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	0,00
5.1.02.03.02.0003.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	560.000.000,00
5.1.02.03.02.0009.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0011.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	0,00
5.1.02.03.02.0012.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	270.000.000,00
5.1.02.03.02.0014.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	0,00
5.1.02.03.02.0019.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Penarik	0,00
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	342.780.900,00
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	0,00
5.1.02.03.02.0034.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	0,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.121.317.191,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.436.845.575,00
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	96.258.410,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32.575.500,00
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00
5.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	18.150.000,00
5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00
5.1.02.03.02.0049.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00
5.1.02.03.02.0079.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	2.020.000,00
5.1.02.03.02.0096.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	62.645.000,00
5.1.02.03.02.0103.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00
5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	22.000.000,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	569.160.000,00
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah	7.732.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
	Tangga-Alat Pembersih	
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.654.547.000,00
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.440.000,00
5.1.02.03.02.0124.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.893.837.600,00
5.1.02.03.02.0134.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Gambar	0,00
5.1.02.03.02.0136.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	62.000.000,00
5.1.02.03.02.0137.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00
5.1.02.03.02.0138.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	5.538.000,00
5.1.02.03.02.0148.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Lainnya	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0268.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	1.075.000,00
5.1.02.03.02.0404.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	241.000.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.011.339.300,00
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	280.140.000,00
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.800.000,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	39.000.000,00
5.1.02.03.02.0479.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	12.500.000,00
5.1.02.03.02.0490.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment	19.530.000,00
5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.106.050.000,00
<b>5.1.02.03.03.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>43.162.950.013,00</b>
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	31.525.551.090,00
5.1.02.03.03.0004.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	50.000.000,00
5.1.02.03.03.0006.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00
5.1.02.03.03.0010.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.991.798.923,00
5.1.02.03.03.0012.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00
5.1.02.03.03.0025.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0,00
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	595.600.000,00
<b>5.1.02.03.04.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>7.681.672.165,00</b>
5.1.02.03.04.0003.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	2.380.761.000,00
5.1.02.03.04.0004.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota	145.200.000,00
5.1.02.03.04.0010.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	340.000.000,00
5.1.02.03.04.0023.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Lainnya	946.961.165,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.1.02.03.04.0026.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	3.400.000.000,00
5.1.02.03.04.0064.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	0,00
5.1.02.03.04.0071.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00
5.1.02.03.04.0087.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah- Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	291.000.000,00
5.1.02.03.04.0118.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	177.750.000,00
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00
<b>5.1.02.03.05.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.03.05.0057.	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman	0,00
<b>5.1.02.04.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>126.447.903.046,00</b>
<b>5.1.02.04.01.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>126.285.067.206,00</b>
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.333.218.145,00
5.1.02.04.01.0002.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.586.600.000,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.365.249.061,00
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00
<b>5.1.02.04.02.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>	<b>162.835.840,00</b>
5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	162.835.840,00
<b>5.1.02.05.</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>5.792.880.000,00</b>
<b>5.1.02.05.01.</b>	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>1.586.180.000,00</b>
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.523.100.000,00
5.1.02.05.01.0002.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	17.000.000,00
5.1.02.05.01.0004.	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00
5.1.02.05.01.0005.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00
5.1.02.05.01.0006.	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	46.080.000,00
<b>5.1.02.05.02.</b>	<b>Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>4.206.700.000,00</b>
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.206.700.000,00
<b>5.1.02.88.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>94.976.486.230,00</b>
<b>5.1.02.88.88.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>94.976.486.230,00</b>
5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.976.486.230,00
<b>5.1.02.99.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>70.237.288.300,00</b>
<b>5.1.02.99.99.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>70.237.288.300,00</b>
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.237.288.300,00
<b>5.1.04.</b>	<b>Belanja Subsidi</b>	<b>550.000.000,00</b>
<b>5.1.04.01.</b>	<b>Belanja Subsidi kepada BUMN</b>	<b>550.000.000,00</b>
<b>5.1.04.01.01.</b>	<b>Belanja Subsidi kepada BUMN</b>	<b>550.000.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.1.04.01.01.0001.	Belanja Subsidi kepada BUMN	550.000.000,00
<b>5.1.05.</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>103.269.017.734,00</b>
<b>5.1.05.01.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.05.01.01.</b>	<b>Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>0,00</b>
5.1.05.01.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00
<b>5.1.05.05.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>70.998.965.734,00</b>
<b>5.1.05.05.01.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>42.848.232.400,00</b>
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	39.645.232.400,00
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
5.1.05.05.01.0003.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.203.000.000,00
<b>5.1.05.05.02.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</b>	<b>1.327.604.000,00</b>
5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000,00
5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.227.604.000,00
<b>5.1.05.05.03.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>26.723.129.334,00</b>
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.315.200.000,00
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.407.929.334,00
<b>5.1.05.05.06.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>100.000.000,00</b>
5.1.05.05.06.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00
<b>5.1.05.06.</b>	<b>Belanja Hibah Dana BOS</b>	<b>29.721.800.000,00</b>
<b>5.1.05.06.01.</b>	<b>Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri</b>	<b>405.000.000,00</b>
5.1.05.06.01.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	405.000.000,00
<b>5.1.05.06.02.</b>	<b>Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta</b>	<b>29.316.800.000,00</b>
5.1.05.06.02.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.316.800.000,00
<b>5.1.05.07.</b>	<b>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	<b>2.548.252.000,00</b>
<b>5.1.05.07.01.</b>	<b>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	<b>2.548.252.000,00</b>
5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan	2.548.252.000,00
<b>5.1.06.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>12.545.550.000,00</b>
<b>5.1.06.01.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Individu</b>	<b>65.550.000,00</b>
<b>5.1.06.01.01.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu</b>	<b>65.550.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	65.550.000,00
<b>5.1.06.01.02.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu</b>	<b>0,00</b>
5.1.06.01.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00
<b>5.1.06.02.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>5.1.06.02.01.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga</b>	<b>20.000.000,00</b>
5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	20.000.000,00
<b>5.1.06.03.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat</b>	<b>12.460.000.000,00</b>
<b>5.1.06.03.01.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</b>	<b>12.460.000.000,00</b>
5.1.06.03.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	12.460.000.000,00
<b>5.1.06.03.02.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</b>	<b>0,00</b>
5.1.06.03.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>384.479.758.418,00</b>
<b>5.2.01.</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>1.120.279.000,00</b>
<b>5.2.01.01.</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>1.120.279.000,00</b>
<b>5.2.01.01.01.</b>	<b>Belanja Modal Tanah Persil</b>	<b>1.120.279.000,00</b>
5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.120.279.000,00
<b>5.2.02.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>59.228.102.376,00</b>
<b>5.2.02.01.</b>	<b>Belanja Modal Alat Besar</b>	<b>572.716.120,00</b>
<b>5.2.02.01.01.</b>	<b>Belanja Modal Alat Besar Darat</b>	<b>260.864.000,00</b>
5.2.02.01.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengangkat	0,00
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	260.864.000,00
<b>5.2.02.01.03.</b>	<b>Belanja Modal Alat Bantu</b>	<b>311.852.120,00</b>
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	17.500.000,00
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	36.892.120,00
5.2.02.01.03.0013.	Belanja Modal Peralatan Selam	17.460.000,00
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	240.000.000,00
<b>5.2.02.02.</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>	<b>5.886.611.000,00</b>
<b>5.2.02.02.01.</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>5.886.611.000,00</b>
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.190.000.000,00
5.2.02.02.01.0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00
5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	818.350.000,00
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	848.000.000,00
5.2.02.02.01.0005.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	270.800.000,00
5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	52.252.000,00
5.2.02.02.01.0009.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	707.209.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>
<b>5.2.02.02.03.</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor</b>	<b>0,00</b>
5.2.02.02.03.0005.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00
<b>5.2.02.03.</b>	<b>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>146.771.200,00</b>
<b>5.2.02.03.01.</b>	<b>Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin</b>	<b>42.216.600,00</b>
5.2.02.03.01.0004.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	42.216.600,00
5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00
<b>5.2.02.03.02.</b>	<b>Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin</b>	<b>101.624.200,00</b>
5.2.02.03.02.0003.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	28.575.400,00
5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	73.048.800,00
<b>5.2.02.03.03.</b>	<b>Belanja Modal Alat Ukur</b>	<b>2.930.400,00</b>
5.2.02.03.03.0001.	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00
5.2.02.03.03.0009.	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	2.930.400,00
<b>5.2.02.04.</b>	<b>Belanja Modal Alat Pertanian</b>	<b>43.685.000,00</b>
<b>5.2.02.04.01.</b>	<b>Belanja Modal Alat Pengolahan</b>	<b>43.685.000,00</b>
5.2.02.04.01.0001.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4.000.000,00
5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.340.000,00
5.2.02.04.01.0007.	Belanja Modal Alat Pasca Panen	345.000,00
5.2.02.04.01.0008.	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	30.000.000,00
5.2.02.04.01.0009.	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00
5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	6.000.000,00
<b>5.2.02.05.</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>15.841.145.570,00</b>
<b>5.2.02.05.01.</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>	<b>1.033.086.340,00</b>
5.2.02.05.01.0001.	Belanja Modal Mesin Ketik	0,00
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	442.546.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	590.540.340,00
<b>5.2.02.05.02.</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>	<b>13.710.232.990,00</b>
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	11.197.455.830,00
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	37.757.000,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	1.102.578.600,00
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	17.736.000,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.049.595.700,00
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	305.109.860,00
<b>5.2.02.05.03.</b>	<b>Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>	<b>1.097.826.240,00</b>
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	708.888.740,00
5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	291.096.500,00
5.2.02.05.03.0004.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00
5.2.02.05.03.0005.	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	20.000.000,00
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	77.841.000,00
<b>5.2.02.06.</b>	<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>3.578.903.900,00</b>
<b>5.2.02.06.01.</b>	<b>Belanja Modal Alat Studio</b>	<b>1.606.033.900,00</b>
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	218.798.000,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	280.998.000,00
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	269.890.000,00
5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	579.860.000,00
5.2.02.06.01.0005.	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	20.000.000,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	236.487.900,00
<b>5.2.02.06.02.</b>	<b>Belanja Modal Alat Komunikasi</b>	<b>1.920.100.000,00</b>
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	1.703.100.000,00
5.2.02.06.02.0002.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	0,00
5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	217.000.000,00
<b>5.2.02.06.03.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Pemancar</b>	<b>52.770.000,00</b>
5.2.02.06.03.0048.	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	52.770.000,00
<b>5.2.02.06.04.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi</b>	<b>0,00</b>
5.2.02.06.04.0004.	Belanja Modal Radar	0,00
<b>5.2.02.07.</b>	<b>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>7.879.957.001,00</b>
<b>5.2.02.07.01.</b>	<b>Belanja Modal Alat Kedokteran</b>	<b>7.458.297.001,00</b>
5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	7.058.297.001,00
5.2.02.07.01.0010.	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00
5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	400.000.000,00
<b>5.2.02.07.02.</b>	<b>Belanja Modal Alat Kesehatan Umum</b>	<b>421.660.000,00</b>
5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	421.660.000,00
<b>5.2.02.08.</b>	<b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>	<b>1.513.130.450,00</b>
<b>5.2.02.08.01.</b>	<b>Belanja Modal Unit Alat Laboratorium</b>	<b>79.570.450,00</b>
5.2.02.08.01.0011.	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	61.710.450,00
5.2.02.08.01.0056.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00
5.2.02.08.01.0064.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	17.860.000,00
<b>5.2.02.08.03.</b>	<b>Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah</b>	<b>400.000.000,00</b>
5.2.02.08.03.0007.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	0,00
5.2.02.08.03.0010.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>
5.2.02.08.03.0011.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00
5.2.02.08.03.0015.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0,00
5.2.02.08.03.0016.	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	400.000.000,00
<b>5.2.02.08.08.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica</b>	<b>1.033.560.000,00</b>
5.2.02.08.08.0006.	Belanja Modal Peralatan Umum	1.026.360.000,00
5.2.02.08.08.0015.	Belanja Modal Photo and Film Equipment	7.200.000,00
<b>5.2.02.10.</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>9.363.697.940,00</b>
<b>5.2.02.10.01.</b>	<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>	<b>8.821.134.940,00</b>
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	7.000.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	6.040.776.750,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.773.358.190,00
<b>5.2.02.10.02.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>	<b>542.563.000,00</b>
5.2.02.10.02.0001.	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	51.920.000,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	108.780.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	381.863.000,00
<b>5.2.02.11.</b>	<b>Belanja Modal Alat Eksplorasi</b>	<b>959.436.000,00</b>
<b>5.2.02.11.02.</b>	<b>Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika</b>	<b>959.436.000,00</b>
5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	959.436.000,00
<b>5.2.02.12.</b>	<b>Belanja Modal Alat Pengeboran</b>	<b>35.000.000,00</b>
<b>5.2.02.12.01.</b>	<b>Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin</b>	<b>35.000.000,00</b>
5.2.02.12.01.0003.	BelanjaModalAlatPengeboranMesin Lainnya	35.000.000,00
<b>5.2.02.15.</b>	<b>Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja</b>	<b>575.916.800,00</b>
<b>5.2.02.15.02.</b>	<b>Belanja Modal Alat Pelindung</b>	<b>0,00</b>
5.2.02.15.02.0001.	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00
5.2.02.15.02.0005.	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00
5.2.02.15.02.0006.	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00
<b>5.2.02.15.03.</b>	<b>Belanja Modal Alat SAR</b>	<b>575.916.800,00</b>
5.2.02.15.03.0004.	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	575.916.800,00
<b>5.2.02.16.</b>	<b>Belanja Modal Alat Peraga</b>	<b>999.000,00</b>
<b>5.2.02.16.01.</b>	<b>Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan</b>	<b>999.000,00</b>
5.2.02.16.01.0003.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	999.000,00
<b>5.2.02.18.</b>	<b>Belanja Modal Rambu-Rambu</b>	<b>4.798.910.000,00</b>
<b>5.2.02.18.01.</b>	<b>Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat</b>	<b>4.798.910.000,00</b>
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	4.798.910.000,00
<b>5.2.02.19.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Olahraga</b>	<b>195.170.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>
<b>5.2.02.19.01.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Olahraga</b>	<b>195.170.000,00</b>
5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	150.000.000,00
5.2.02.19.01.0006.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	45.170.000,00
<b>5.2.02.88.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS</b>	<b>5.940.821.831,00</b>
<b>5.2.02.88.88.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS</b>	<b>5.940.821.831,00</b>
5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.940.821.831,00
<b>5.2.02.99.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>	<b>1.895.230.564,00</b>
<b>5.2.02.99.99.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>	<b>1.895.230.564,00</b>
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.895.230.564,00
<b>5.2.03.</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>67.376.516.079,00</b>
<b>5.2.03.01.</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>57.769.464.079,00</b>
<b>5.2.03.01.01.</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>57.769.464.079,00</b>
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	15.621.578.900,00
5.2.03.01.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00
5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.100.000.000,00
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	12.946.956.050,00
5.2.03.01.01.0011.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00
5.2.03.01.01.0012.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Kopcrasi/Pasar	517.864.129,00
5.2.03.01.01.0029.	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00
5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	17.318.065.000,00
5.2.03.01.01.0033.	Belanja Modal Bangunan Parkir	379.000.000,00
5.2.03.01.01.0036.	Belanja Modal Taman	886.000.000,00
5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00
<b>5.2.03.03.</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Menara</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.03.03.01.</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan</b>	<b>0,00</b>
5.2.03.03.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	0,00
<b>5.2.03.04.</b>	<b>Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>9.559.052.000,00</b>
<b>5.2.03.04.01.</b>	<b>Belanja Modal Tugu/Tanda Batas</b>	<b>9.559.052.000,00</b>
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	9.130.052.000,00
5.2.03.04.01.0005.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	429.000.000,00
<b>5.2.03.99.</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>	<b>48.000.000,00</b>
<b>5.2.03.99.99.</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>	<b>48.000.000,00</b>
5.2.03.99.99.9999.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	48.000.000,00
<b>5.2.04.</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>242.693.872.952,00</b>
<b>5.2.04.01.</b>	<b>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>	<b>211.838.033.572,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>
<b>5.2.04.01.01.</b>	<b>Belanja Modal Jalan</b>	<b>106.840.625.647,00</b>
5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	88.174.579.198,00
5.2.04.01.01.0004.	Belanja Modal Jalan Kota	31.108.000,00
5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	18.634.938.449,00
<b>5.2.04.01.02.</b>	<b>Belanja Modal Jembatan</b>	<b>104.997.407.925,00</b>
5.2.04.01.02.0003.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	104.997.407.925,00
<b>5.2.04.02.</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Air</b>	<b>30.755.839.380,00</b>
<b>5.2.04.02.01.</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Air Irigasi</b>	<b>8.962.847.433,00</b>
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	8.962.847.433,00
<b>5.2.04.02.04.</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam</b>	<b>0,00</b>
5.2.04.02.04.0005.	Belanja Modal Bangunan Pengaman	0,00
<b>5.2.04.02.05.</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah</b>	<b>5.334.000,00</b>
5.2.04.02.05.0006.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	5.334.000,00
<b>5.2.04.02.06.</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku</b>	<b>0,00</b>
5.2.04.02.06.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00
<b>5.2.04.02.07.</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Air Kotor</b>	<b>21.787.657.947,00</b>
5.2.04.02.07.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.457.247.100,00
5.2.04.02.07.0004.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	2.997.000.000,00
5.2.04.02.07.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	17.333.410.847,00
<b>5.2.04.03.</b>	<b>Belanja Modal Instalasi</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.04.03.01.</b>	<b>Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku</b>	<b>0,00</b>
5.2.04.03.01.0005.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00
<b>5.2.04.04.</b>	<b>Belanja Modal Jaringan</b>	<b>100.000.000,00</b>
<b>5.2.04.04.01.</b>	<b>Belanja Modal Jaringan Air Minum</b>	<b>0,00</b>
5.2.04.04.01.0005.	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	0,00
<b>5.2.04.04.03.</b>	<b>Belanja Modal Jaringan Telepon</b>	<b>100.000.000,00</b>
5.2.04.04.03.0005.	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	100.000.000,00
<b>5.2.05.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>13.821.693.011,00</b>
<b>5.2.05.01.</b>	<b>Belanja Modal Bahan Perpustakaan</b>	<b>879.675.000,00</b>
<b>5.2.05.01.01.</b>	<b>Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak</b>	<b>831.675.000,00</b>
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	237.980.000,00
5.2.05.01.01.0003.	Belanja Modal Buku Agama	0,00
5.2.05.01.01.0006.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	14.160.000,00
5.2.05.01.01.0007.	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	19.635.000,00
5.2.05.01.01.0008.	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	0,00
5.2.05.01.01.0009.	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5.2.05.01.01.0011.	Belanja Modal Buku Laporan	559.900.000,00
<b>5.2.05.01.02.</b>	<b>Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro</b>	<b>48.000.000,00</b>
5.2.05.01.02.0001.	Belanja Modal Audio Visual	48.000.000,00
<b>5.2.05.02.</b>	<b>Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</b>	<b>974.440.000,00</b>
<b>5.2.05.02.01.</b>	<b>Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian</b>	<b>974.440.000,00</b>
5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik	974.440.000,00
<b>5.2.05.05.</b>	<b>Belanja Modal Tanaman</b>	<b>388.000.000,00</b>
<b>5.2.05.05.01.</b>	<b>Belanja Modal Tanaman</b>	<b>388.000.000,00</b>
5.2.05.05.01.0001.	Belanja Modal Tanaman	388.000.000,00
<b>5.2.05.06.</b>	<b>Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya</b>	<b>145.800.000,00</b>
<b>5.2.05.06.01.</b>	<b>Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya</b>	<b>145.800.000,00</b>
5.2.05.06.01.0003.	Belanja Modal Tanaman Koleksi	145.800.000,00
<b>5.2.05.07.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.05.07.01.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi</b>	<b>0,00</b>
5.2.05.07.01.0001.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00
<b>5.2.05.08.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tidak Berwujud</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.05.08.01.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tidak Berwujud</b>	<b>0,00</b>
5.2.05.08.01.0005.	Belanja Modal Software	0,00
<b>5.2.05.88.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS</b>	<b>11.197.186.761,00</b>
<b>5.2.05.88.88.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS</b>	<b>11.197.186.761,00</b>
5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	11.197.186.761,00
<b>5.2.05.99.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD</b>	<b>236.591.250,00</b>
<b>5.2.05.99.99.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD</b>	<b>236.591.250,00</b>
5.2.05.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	236.591.250,00
<b>5.2.06.</b>	<b>Belanja Modal Aset Lainnya</b>	<b>239.295.000,00</b>
<b>5.2.06.99.</b>	<b>Belanja Modal Aset Lainnya BLUD</b>	<b>239.295.000,00</b>
<b>5.2.06.99.99.</b>	<b>Belanja Modal Aset Lainnya BLUD</b>	<b>239.295.000,00</b>
5.2.06.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	239.295.000,00
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.448.219.800,00</b>
<b>5.3.01.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>1.448.219.800,00</b>
<b>5.3.01.01.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>1.448.219.800,00</b>
<b>5.3.01.01.01.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>1.448.219.800,00</b>
5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga	1.448.219.800,00
<b>5.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>393.799.121.092,00</b>
<b>5.4.01.</b>	<b>Belanja Bagi Hasil</b>	<b>16.813.266.012,00</b>
<b>5.4.01.01.</b>	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan</b>	<b>15.414.321.124,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
	<b>Kabupaten/Kota dan Desa</b>	
5.4.01.01.03.	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada</b>	<b>15.414.321.124,00</b>
5.4.01.01.03.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.414.321.124,00
5.4.01.02.	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa</b>	<b>1.398.944.888,00</b>
5.4.01.02.01.	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa</b>	<b>1.398.944.888,00</b>
5.4.01.02.01.0001.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.398.944.888,00
5.4.02.	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>376.985.855.080,00</b>
5.4.02.05.	<b>Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</b>	<b>376.985.855.080,00</b>
5.4.02.05.01.	<b>Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</b>	<b>0,00</b>
5.4.02.05.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00
5.4.02.05.02.	<b>Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</b>	<b>376.985.855.080,00</b>
5.4.02.05.02.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00
5.4.02.05.02.0003.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	2.789.768.500,00
5.4.02.05.02.0004.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	231.513.488.000,00
5.4.02.05.02.0005.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	142.682.598.580,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.826.856.579.502,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-21.045.452.000,00</b>
6.	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>21.045.452.000,00</b>
6.1.	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>21.045.452.000,00</b>
6.1.01.	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	<b>21.045.452.000,00</b>
6.1.01.05.	<b>Penghematan Belanja</b>	<b>15.176.709.456,00</b>
6.1.01.05.01.	<b>Penghematan Belanja-Belanja Operasi</b>	<b>15.176.709.456,00</b>
6.1.01.05.01.0007.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang	15.176.709.456,00
6.1.01.08.	<b>Sisa Belanja Lainnya</b>	<b>5.868.742.544,00</b>
6.1.01.08.01.	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD</b>	<b>5.868.742.544,00</b>
6.1.01.08.01.0001.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	5.868.742.544,00
6.1.01.08.02.	<b>Sisa Dana BOS</b>	<b>0,00</b>
6.1.01.08.02.0001.	Sisa Dana BOS	0,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>21.045.452.000,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**BAB III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan serta memperhatikan kondisi ekonomi Kabupaten Kampar secara umum, pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2023 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

**Tabel 1 Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2023**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.805.811.127.502,00</b>	<b>2.734.805.625.683,08</b>	<b>97,47</b>
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>285.540.731.945,00</b>	<b>298.626.546.420,08</b>	<b>104,58</b>
4.1.01.	<b>Pajak Daerah</b>	<b>156.820.690.967,00</b>	<b>153.800.441.758,00</b>	<b>98,07</b>
4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	1.712.100.000,00	1.130.726.006,00	66,04
4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.647.597.191,00	7.650.219.886,00	100,03
4.1.01.08.02.0001.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	14.500.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.150.000.000,00	805.846.853,00	70,07
4.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.575.700.000,00	0,00	0,00
4.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	75.548.000.000,00	79.019.804.970,00	104,60
4.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir	180.500.000,00	76.038.500,00	42,13
4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	1.805.000.000,00	1.832.497.464,00	101,52
4.1.01.13.01.0001.	Pajak Sarang Burung Walet	102.000.000,00	16.525.000,00	16,20
4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	6.235.000.000,00	6.263.533.561,00	100,46
4.1.01.15.01.0001.	PBBP2	24.651.298.704,00	21.765.548.825,00	88,29
4.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak	36.213.495.072,00	35.225.200.693,00	97,27
4.1.02.	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>13.505.450.000,00</b>	<b>12.315.324.270,00</b>	<b>91,19</b>
4.1.02.01.01.0006.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	248.000.000,00	235.487.500,00	94,95
4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	350.000.000,00	545.700.000,00	155,91
4.1.02.01.05.0003.	Retribusi Kios	54.000.000,00	84.571.000,00	156,61
4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	800.000.000,00	621.460.000,00	77,68
4.1.02.01.07.0001.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	0,00	36.790.000,00	0,00
4.1.02.01.07.0002.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran	35.000.000,00	1.110.000,00	3,17
4.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.000.000,00	15.400.000,00	24,06
4.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	700.000.000,00	956.330.000,00	136,62
4.1.02.01.13.0001.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.	1.300.950.000,00	1.418.950.000,00	109,07



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
4.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan	216.000.000,00	303.223.000,00	140,38
4.1.02.02.01.0004.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	55.000.000,00	56.275.270,00	102,32
4.1.02.02.01.0006.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	808.500.000,00	1.082.909.000,00	133,94
4.1.02.02.07.0001.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	66.000.000,00	42.850.000,00	64,92
4.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.000.000,00	142.850.000,00	57,14
4.1.02.02.11.0001.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
4.1.02.02.11.0002.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	65.000.000,00	52.402.500,00	80,62
4.1.02.02.11.0003.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	255.500.000,00	145.525.000,00	56,96
4.1.02.03.01.0001.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.07.0001.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.000.000.000,00	6.335.991.000,00	79,20
<b>4.1.03.</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>23.273.308.815,00</b>	<b>36.299.309.804,00</b>	<b>155,97</b>
4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	20.978.657.850,00	21.468.259.695,00	102,33
4.1.03.02.02.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.555.000.000,00	14.831.050.109,00	953,77
4.1.03.02.03.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	150.000.000,00	0,00	0,00
4.1.03.03.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	589.650.965,00	0,00	0,00
<b>4.1.04.</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>91.941.282.163,00</b>	<b>96.211.470.588,08</b>	<b>104,64</b>
4.1.04.01.02.0002.	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02.0005.	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	5.200.000,00	0,00
4.1.04.03.03.0001.	Hasil dari Bangun Guna Serah	200.000.000,00	35.000.000,00	17,50
4.1.04.04.01.0001.	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	0,00	1.097.368.741,00	0,00
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	150.000.000,00	292.666.909,00	195,11
4.1.04.09.01.0001.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.500.000.000,00	819.225.881,00	32,77
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	66.990.790,38	0,00
4.1.04.12.09.0001.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	0,00	197.250,00	0,00
4.1.04.12.16.0001.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	250.000,00	0,00
4.1.04.14.01.0001.	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	477.268.379,00	0,00
4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
	Negeri- Perjalanan Dinas Biasa			
4.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	88.791.282.163,00	90.679.753.010,61	102,13
4.1.04.19.01.0001.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00	154.242.052,23	51,41
4.1.04.21.01.0001.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	2.583.307.574,86	0,00
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.518.170.395.557,00</b>	<b>2.434.058.392.989,00</b>	<b>96,66</b>
<b>4.2.01.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.221.270.991.417,00</b>	<b>2.133.499.528.840,00</b>	<b>96,05</b>
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	344.866.669.094,00	270.942.704.242,00	78,56
4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	14.236.020.612,00	16.634.963.375,00	116,85
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	921.251.122,00	588.005.781,00	63,83
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	10.835,00	32.285,00	297,97
4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	362.914.201.396,00	336.183.810.354,00	92,63
4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	29.590.660.809,00	24.331.916.357,00	82,23
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	1.238.632,00	0,00
4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	6.983.165.553,00	3.797.327.995,00	54,38
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	12.373.632.930,00	46.006.349.057,00	371,81
4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	962.005.841,00	1.525.309.211,00	158,56
4.2.01.01.02.0001.	DAU	821.729.594.000,00	762.166.288.999,00	92,75
4.2.01.01.02.0002.	DAU Tambahan Dukunguan Pendanaan Kelurahan	0,00	1.600.000.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0004.	DAU Tambahan Dukunguan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	57.814.458.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0001.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.295.878.000,00	1.294.982.000,00	99,93
4.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	12.799.943.000,00	12.522.227.000,00	97,83
4.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.056.189.000,00	8.013.637.468,00	99,47
4.2.01.01.03.0013.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0015.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	6.576.489.081,00	0,00
4.2.01.01.03.0017.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	6.693.217.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0031.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0037.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0040.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0055.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	416.478.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0059.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	231.394.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	126.813.600.000,00	130.471.612.415,00	102,88



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.575.000.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	161.297.343.000,00	150.807.057.500,00	93,50
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.161.250.000,00	1.161.250.000,00	100,00
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.229.879.000,00	5.229.879.000,00	100,00
4.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	11.433.000.000,00	11.298.536.000,00	98,82
4.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.203.000.000,00	3.203.000.000,00	100,00
4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	40.340.790.000,00	43.074.619.904,00	106,78
4.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.146.044.069,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	367.252.980,00	367.252.980,00	100,00
4.2.01.01.04.0020.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	323.666.000,00	323.666.000,00	100,00
4.2.01.01.04.0022.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	594.998.176,00	594.998.176,00	100,00
4.2.01.01.04.0023.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.358.875.000,00	1.358.875.000,00	100,00
4.2.01.02.01.0001.	DID	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05.01.0001.	Dana Desa	231.513.488.000,00	231.442.855.200,00	99,97
4.2.01.06.01.0001.	Insentif Fiskal	5.842.494.000,00	4.166.186.828,00	71,31
<b>4.2.02.</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>296.899.404.140,00</b>	<b>300.558.864.149,00</b>	<b>101,23</b>
4.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	41.898.400.738,00	38.071.176.256,00	90,87
4.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	38.048.895.146,00	49.908.605.111,00	131,17
4.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	69.850.969.454,00	73.840.880.894,00	105,71
4.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.297.230.042,00	2.002.376.421,00	87,16
4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	40.405.658.552,00	32.377.575.259,00	80,13
4.2.02.02.01.0001.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02.02.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	104.398.250.208,00	104.358.250.208,00	99,96
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.100.000.000,00</b>	<b>2.120.686.274,00</b>	<b>100,99</b>
<b>4.3.01.</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>2.100.000.000,00</b>	<b>2.120.686.274,00</b>	<b>100,99</b>
4.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00
4.3.01.05.01.0001.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	20.686.274,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.805.811.127.502,00</b>	<b>2.734.805.625.683,08</b>	<b>97,47</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.826.856.579.502,00</b>	<b>2.619.084.986.875,00</b>	<b>92,65</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.047.129.480.192,00</b>	<b>1.900.788.191.664,50</b>	<b>92,85</b>
<b>5.1.01.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>1.020.218.954.429,00</b>	<b>936.576.698.454,00</b>	<b>91,80</b>
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	391.344.367.125,00	389.547.767.086,00	99,54
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	60.711.642.053,00	11.521.356.000,00	18,98
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	37.579.400.958,00	37.475.688.572,00	99,72



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.227.045.016,00	1.220.981.646,00	99,51
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.908.996.950,00	5.884.115.000,00	99,58
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	34.234.993.070,00	34.117.993.000,00	99,66
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.199.125.350,00	1.194.858.000,00	99,64
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.188.590.988,00	3.176.590.000,00	99,62
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	132.769.550,00	132.550.000,00	99,83
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	21.172.813.820,00	21.115.354.560,00	99,73
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	906.714.090,00	903.584.340,00	99,65
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	482.374.434,00	480.204.315,00	99,55
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.251.406,00	5.237.141,00	99,73
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	97.202,00	94.095,00	96,80
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	30.841.628.854,00	29.894.432.778,00	96,93
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	792.033.983,00	784.518.010,00	99,05
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	801.582.821,00	799.677.643,00	99,76
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	23.935.537,00	23.702.376,00	99,03
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.420.930.493,00	2.456.277.725,00	101,46
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	72.634.382,00	71.103.900,00	97,89
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	151.605.633.172,00	140.585.305.920,00	92,73
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.100.687.500,00	4.092.725.000,00	99,81
5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	30.739.100.000,00	28.824.328.639,00	93,77
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	6.196.000.000,00	5.983.500.000,00	96,57
5.1.01.03.01.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	85.605.000,00	34.242.000,00	40,00
5.1.01.03.01.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	382.379.860,00	378.266.915,63	98,92
5.1.01.03.01.0009.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	57.500.000,00	22.944.000,00	39,90
5.1.01.03.01.0010.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	3.856.185.000,00	3.825.397.942,00	99,20
5.1.01.03.01.0011.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	9.025.000,00	3.546.825,00	39,30
5.1.01.03.01.0012.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	90.250.000,00	89.454.990,00	99,12
5.1.01.03.01.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	5.100.000,00	743.580,00	14,58
5.1.01.03.01.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	311.750.000,00	305.392.600,00	97,96
5.1.01.03.01.0015.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.232.564.935,00	921.727.465,20	74,78
5.1.01.03.01.0016.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.810.674.754,00	1.342.825.695,17	74,16
5.1.01.03.02.0001.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.875.000,00	1.875.000,00	100,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.01.03.02.0002.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.600.000,00	11.700.000,00	75,00
5.1.01.03.02.0005.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	40.200.000,00	40.200.000,00	100,00
5.1.01.03.02.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	57.500.000,00	44.000.000,00	76,52
5.1.01.03.02.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
5.1.01.03.02.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	65.047.500,00	65.047.500,00	100,00
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	51.475.000,00	51.475.000,00	100,00
5.1.01.03.02.0022.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	12.500.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0024.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	29.325.000,00	16.550.000,00	56,44
5.1.01.03.02.0025.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000,00	298.300.000,00	74,58
5.1.01.03.03.0001.	Belanja TPG PNSD	161.297.343.000,00	147.395.066.900,00	91,38
5.1.01.03.04.0001.	Belanja TKG PNSD	6.642.559.500,00	6.642.501.400,00	100,00
5.1.01.03.05.0001.	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.680.500.000,00	1.613.750.000,00	96,03
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	442.940.000,00	396.740.000,00	89,57
5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00
5.1.01.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.039.106.478,00	1.004.010.000,00	96,62
5.1.01.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.023.775,00	81.045.000,00	56,27
5.1.01.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.063.091,00	58.764.000,00	53,88
5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00
5.1.01.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.492.209.866,00	1.455.814.500,00	97,56
5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00	118.206.900,00	94,73
5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	64.949.850,00	18.087.300,00	27,85
5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	100,00
5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00	100,00
5.1.01.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	535.600.009,00	363.841.560,00	67,93
5.1.01.04.12.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	98.106.000,00	98.106.000,00	100,00
5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.409.624,00	2.065.392,00	85,71
5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.228.872,00	6.196.176,00	85,71
5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.552.000.000,00	9.552.000.000,00	100,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.540.000.000,00	9.540.000.000,00	100,00
5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	4.725.000,00	0,00	0,00
5.1.01.05.01.0001.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	0,00	0,00
5.1.01.05.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.637.700,00	0,00	0,00
5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	0,00	0,00
5.1.01.05.04.0001.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.082.676,00	0,00	0,00
5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.160.692,00	0,00	0,00
5.1.01.05.06.0001.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07.0001.	Belanjajalan Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.570.320,00	0,00	0,00
5.1.01.05.08.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00	0,00	0,00
5.1.01.05.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	182.232,00	0,00	0,00
5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00
5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	540.000.000,00	90,00
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	22.003.619.593,00	19.484.440.067,00	88,55
<b>5.1.02.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>910.545.958.029,00</b>	<b>849.561.732.279,45</b>	<b>93,30</b>
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	37.417.297.491,00	36.568.275.550,19	97,73
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	930.267.450,00	902.214.290,00	96,98
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.639.168.800,00	8.952.958.646,00	92,88
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	39.780.000,00	39.780.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.077.704.984,00	2.018.855.900,00	97,17
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	12.592.000,00	12.560.000,00	99,75
5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.520.056.000,00	1.501.939.000,00	98,81
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	19.226.891.740,00	17.916.746.886,00	93,19
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	738.669.552,00	709.128.009,00	96,00
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	181.020.000,00	177.498.000,00	98,05
5.1.02.01.01.0016.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	157.346.950,00	155.660.600,00	98,93
5.1.02.01.01.0019.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	223.239.100,00	212.026.100,00	94,98
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	536.013.789,00	490.960.011,00	91,59
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.691.067.849,00	11.253.241.623,00	96,26
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.240.000,00	3.231.000,00	99,72
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	14.376.075.115,00	13.746.367.389,00	95,62
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	426.477.000,00	420.832.000,00	98,68



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	90.436.000,00	86.822.000,00	96,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	774.650.000,00	771.614.480,00	99,61
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.793.951.110,00	3.732.055.470,00	98,37
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	613.513.000,00	602.714.000,00	98,24
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	279.833.000,00	279.523.200,00	99,89
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.295.621.530,00	9.686.988.413,00	94,09
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	344.982.100,00	305.305.200,00	88,50
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.923.468.240,00	4.129.800.188,00	83,88
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.049.410.000,00	7.048.350.000,00	99,98
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	112.500.000,00	112.050.000,00	99,60
5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.172.051.077,00	1.094.990.000,00	93,43
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	2.267.601.300,00	2.221.867.457,00	97,98
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	91.912.750,00	36.168.000,00	39,35
5.1.02.01.01.0044.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.326.928.000,00	1.269.042.940,00	95,64
5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	280.496.000,00	252.187.050,00	89,91
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.916.001.726,00	18.636.834.236,00	89,10
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.824.466.650,00	12.759.356.140,00	99,49
5.1.02.01.01.0055.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	375.461.500,00	365.106.742,00	97,24
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.115.897.000,00	3.783.145.962,00	91,92
5.1.02.01.01.0059.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	46.200.000,00	45.600.000,00	98,70
5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.658.282.350,00	3.572.053.471,00	97,64
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	300.534.000,00	292.600.000,00	97,36
5.1.02.01.01.0065.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	39.000.000,00	38.850.000,00	99,62
5.1.02.01.01.0067.	Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0069.	Belanja Pakaian Teknik	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.452.400.500,00	1.429.829.200,00	98,45



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	509.688.500,00	498.676.750,00	97,84
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	8.010.000,00	8.010.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	8.166.400,00	5.877.400,00	71,97
5.1.02.01.02.0004.	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	23.198.000,00	23.198.000,00	100,00
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	836.708.560,00	809.460.750,00	96,74
5.1.02.01.02.0012.	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	900.000,00	900.000,00	100,00
5.1.02.01.02.0013.	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.917.951.500,00	7.831.890.000,00	87,82
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.286.014.500,00	22.791.305.000,00	93,85
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	141.600.000,00	114.800.000,00	81,07
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.232.556.960,00	4.145.891.960,00	97,95
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	2.451.600.000,00	2.401.617.245,26	97,96
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Tekaologi Informasi dan Pengelola Website	9.400.055.000,00	9.312.713.000,00	99,07
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	888.965.000,00	812.265.000,00	91,37
5.1.02.02.01.0012.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.233.600.000,00	1.001.900.000,00	81,22
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	64.546.224.000,00	63.803.003.000,00	98,85
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	42.783.667.600,00	35.353.642.815,00	82,63
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	183.805.000,00	181.405.000,00	98,69
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	9.717.595.604,00	9.576.816.921,00	98,55
5.1.02.02.01.0018.	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.451.774.720,00	2.402.261.608,00	97,98
5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	793.700.000,00	748.100.000,00	94,25
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.856.150.000,00	1.843.050.000,00	99,29
5.1.02.02.01.0021.	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	290.400.000,00	283.800.000,00	97,73
5.1.02.02.01.0022.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	664.270.000,00	661.697.500,00	99,61
5.1.02.02.01.0023.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	230.940.000,00	230.940.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	47.200.000,00	42.860.000,00	90,81
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	120.600.000,00	120.600.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	51.233.401.800,00	48.520.448.450,00	94,70
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	310.350.000,00	305.997.000,00	98,60
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.485.468.500,00	1.325.672.500,00	89,24
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.671.130.000,00	5.866.733.500,00	87,94



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.928.740.000,00	5.748.540.000,00	96,96
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	15.294.752.800,00	15.017.142.800,00	98,18
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.763.450.000,00	1.664.164.400,00	94,37
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	195.400.000,00	194.000.000,00	99,28
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.285.450.000,00	3.190.947.330,00	97,12
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	100.000.000,00	83.106.300,00	83,11
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	76.738.000,00	74.250.000,00	96,76
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.436.550.000,00	2.110.357.500,00	86,61
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	393.400.000,00	393.400.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	184.682.000,00	182.321.000,00	98,72
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	19.000.000,00	5.900.000,00	31,05
5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0053.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	450.000.000,00	281.337.520,00	62,52
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.013.000.000,00	2.999.000.000,00	99,54
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	32.400.000,00	26.682.003,00	82,35
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	968.087.340,00	813.963.935,00	84,08
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	21.500.715.011,00	20.619.360.228,00	95,90
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	815.912.500,00	746.193.500,00	91,46
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.380.237.210,00	3.432.166.329,00	78,36
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	157.375.000,00	113.356.650,00	72,03
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.320.600.000,00	814.919.337,00	61,71
5.1.02.02.01.0068.	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	515.108.750,00	427.232.000,00	82,94
5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up	104.255.000,00	11.200.000,00	10,74
5.1.02.02.01.0075.	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0002.	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0003.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.577.280.685,00	17.428.388.926,00	84,70
5.1.02.02.02.0004.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.990.400.000,00	2.804.908.400,00	93,80
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.731.749.080,00	4.614.187.734,00	97,52
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	80.659.892,00	72.132.269,00	89,43
5.1.02.02.02.0012.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	140.000.000,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.02.02.02.0013.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	95.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.03.0001.	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	326.750.000,00	312.875.000,00	95,75
5.1.02.02.04.0018.	Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	7.500.000,00	7.437.000,00	99,16
5.1.02.02.04.0027.	Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0034.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	313.500.000,00	312.109.300,00	99,56
5.1.02.02.04.0035.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.902.050.000,00	1.525.424.000,00	80,20
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	261.600.000,00	223.399.999,00	85,40
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0116.	Belanja Sewa Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.913.742.000,00	3.778.864.270,00	96,55
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	45.800.000,00	45.800.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	134.000.000,00	131.448.800,00	98,10
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	145.900.656,00	145.699.720,00	99,86
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0133.	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	85.800.000,00	85.800.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	40.000.000,00	39.869.000,00	99,67
5.1.02.02.04.0150.	Belanja Sewa Peralatan Pemancar HF/SW	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.220.400.000,00	1.153.700.000,00	94,53
5.1.02.02.04.0407.	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	192.000.000,00	192.000.000,00	100,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.219.239.000,00	1.800.386.000,00	81,13
5.1.02.02.05.0010.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5.1.02.02.05.0037.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama	13.750.000,00	13.750.000,00	100,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	2.936.560.000,00	2.382.036.705,00	81,12
5.1.02.02.05.0044.	Belanja Sewa Motel	42.500.000,00	42.500.000,00	100,00
5.1.02.02.05.0045.	Belanja Sewa Flat/Rumah Susun	132.000.000,00	129.000.000,00	97,73
5.1.02.02.06.0013.	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.06.0131.	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07.0013.	Belanja Sewa Audio Visual	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07.0021.	Belanja Sewa Musik Lainnya	341.600.000,00	240.500.000,00	70,40
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	40.500.000,00	36.500.000,00	90,12
5.1.02.02.07.0057.	Belanja Sewa Tanaman	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.702.886.380,00	2.689.379.000,00	99,50
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	2.254.000.000,00	2.245.440.100,00	99,62
5.1.02.02.08.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	30.287.400,00	15.010.000,00	49,56
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.815.000.000,00	1.808.193.050,00	99,62
5.1.02.02.08.0007.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	3.833.000.000,00	3.674.466.090,00	95,86
5.1.02.02.08.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	998.309.000,00	998.149.000,00	99,98
5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi	1.150.000.000,00	1.146.988.130,00	99,74
5.1.02.02.08.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaandan Perancangan Perkotaan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0016.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaandan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0017.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	213.536.250,00	213.536.250,00	100,00
5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.361.624.640,00	2.281.280.500,00	96,60
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.179.400.000,00	1.700.098.059,00	78,01
5.1.02.02.08.0020.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	3.063.296.208,00	2.055.729.798,00	67,11
5.1.02.02.08.0021.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.625.000.000,00	1.334.753.708,00	82,14
5.1.02.02.08.0023.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	127.233.750,00	127.233.400,00	100,00
5.1.02.02.09.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	594.664.800,00	593.314.800,00	99,77
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.10.0008.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	140.000.000,00	90.000.000,00	64,29
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	470.000.000,00	422.000.000,00	89,79
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.479.736.150,00	2.369.769.150,00	95,57
5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	2.516.240.000,00	2.355.607.556,00	93,62
5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	51.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.01.0029.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.01.0035.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0002.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0003.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	560.000.000,00	558.744.000,00	99,78
5.1.02.03.02.0009.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	100.000.000,00	93.715.000,00	93,72
5.1.02.03.02.0011.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0012.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	270.000.000,00	182.634.000,00	67,64
5.1.02.03.02.0014.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0019.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Penarik	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	342.780.900,00	328.273.400,00	95,77
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0034.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.121.317.191,00	3.029.369.067,00	97,05
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.436.845.575,00	3.004.278.700,00	87,41
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	96.258.410,00	95.855.410,00	99,58
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32.575.500,00	26.330.000,00	80,83
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	18.150.000,00	18.095.000,00	99,70
5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0049.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0079.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	2.020.000,00	2.020.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0096.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	62.645.000,00	56.175.000,00	89,67
5.1.02.03.02.0103.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	22.000.000,00	21.800.000,00	99,09



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	569.160.000,00	503.985.280,00	88,55
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	7.732.000,00	7.450.000,00	96,35
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.654.547.000,00	1.606.347.290,00	97,09
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.440.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0124.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.893.837.600,00	1.893.649.000,00	99,99
5.1.02.03.02.0134.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,danPemancar-AlatStudio-Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0136.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,danPemancar-AlatStudio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	62.000.000,00	32.000.000,00	51,61
5.1.02.03.02.0137.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0138.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	5.538.000,00	5.538.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0148.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0268.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0404.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	241.000.000,00	231.451.500,00	96,04
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.011.339.300,00	995.680.100,00	98,45
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	280.140.000,00	269.297.000,00	96,13
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0479.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	12.500.000,00	12.490.000,00	99,92
5.1.02.03.02.0490.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment	19.530.000,00	18.144.000,00	92,90
5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.106.050.000,00	1.103.393.000,00	99,76
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	31.525.551.090,00	27.184.713.824,00	86,23
5.1.02.03.03.0004.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	50.000.000,00	24.420.755,00	48,84
5.1.02.03.03.0006.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
	Kesehatan			
5.1.02.03.03.0010.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.991.798.923,00	10.925.521.922,00	99,40
5.1.02.03.03.0012.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0025.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	595.600.000,00	594.913.000,00	99,88
5.1.02.03.04.0003.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	2.380.761.000,00	2.375.298.300,00	99,77
5.1.02.03.04.0004.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	145.200.000,00	144.459.000,00	99,49
5.1.02.03.04.0010.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	340.000.000,00	339.943.357,00	99,98
5.1.02.03.04.0023.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	946.961.165,00	930.361.165,00	98,25
5.1.02.03.04.0026.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	3.400.000.000,00	2.901.189.745,00	85,33
5.1.02.03.04.0064.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0071.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0087.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	291.000.000,00	290.944.000,00	99,98
5.1.02.03.04.0118.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	177.750.000,00	175.780.590,00	98,89
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.05.0057.	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.333.218.145,00	71.641.474.396,00	87,01
5.1.02.04.01.0002.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.586.600.000,00	1.527.595.000,00	96,28
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.365.249.061,00	36.986.188.084,00	87,30
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	162.835.840,00	133.035.692,00	81,70
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.523.100.000,00	1.305.870.000,00	85,74
5.1.02.05.01.0002.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
5.1.02.05.01.0004.	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01.0005.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01.0006.	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	46.080.000,00	9.775.680,00	21,21
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.206.700.000,00	4.203.700.000,00	99,93
5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.976.486.230,00	95.196.569.720,00	100,23
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.237.288.300,00	67.128.769.204,00	95,57



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
<b>5.1.04.</b>	<b>Belanja Subsidi</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>122.000.000,00</b>	<b>22,18</b>
5.1.04.01.01.0001.	Belanja Subsidi kepada BUMN	550.000.000,00	122.000.000,00	22,18
<b>5.1.05.</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>103.269.017.734,00</b>	<b>102.176.510.903,05</b>	<b>98,94</b>
5.1.05.01.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	39.645.232.400,00	39.545.232.400,00	99,75
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.01.0003.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.203.000.000,00	3.203.000.000,00	100,00
5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.227.604.000,00	1.178.085.800,00	95,97
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.315.200.000,00	8.221.199.900,00	98,87
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.407.929.334,00	17.811.187.663,05	96,76
5.1.05.05.06.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
5.1.05.06.01.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	405.000.000,00	405.000.000,00	100,00
5.1.05.06.02.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.316.800.000,00	29.064.638.140,00	99,14
5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan	2.548.252.000,00	2.548.167.000,00	100,00
<b>5.1.06.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>12.545.550.000,00</b>	<b>12.351.250.028,00</b>	<b>98,45</b>
5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	65.550.000,00	51.250.028,00	78,18
5.1.06.01.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00
5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	20.000.000,00	0,00	0,00
5.1.06.03.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	12.460.000.000,00	12.300.000.000,00	98,72
5.1.06.03.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>384.479.758.418,00</b>	<b>324.522.994.637,50</b>	<b>84,41</b>
<b>5.2.01.</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>1.120.279.000,00</b>	<b>1.117.743.930,00</b>	<b>99,77</b>
5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.120.279.000,00	1.117.743.930,00	99,77
<b>5.2.02.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>59.228.102.376,00</b>	<b>54.246.432.888,50</b>	<b>91,59</b>
5.2.02.01.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	260.864.000,00	256.330.000,00	98,26



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	17.500.000,00	17.400.000,00	99,43
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	36.892.120,00	33.012.000,00	89,48
5.2.02.01.03.0013.	Belanja Modal Peralatan Selam	17.460.000,00	17.460.000,00	100,00
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	240.000.000,00	239.574.000,00	99,82
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.190.000.000,00	3.051.448.500,00	95,66
5.2.02.02.01.0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	818.350.000,00	748.000.000,00	91,40
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	848.000.000,00	786.587.000,00	92,76
5.2.02.02.01.0005.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	270.800.000,00	248.800.000,00	91,88
5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	52.252.000,00	36.130.500,00	69,15
5.2.02.02.01.0009.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	707.209.000,00	599.500.000,00	84,77
5.2.02.02.03.0005.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01.0004.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	42.216.600,00	39.700.000,00	94,04
5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02.0003.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	28.575.400,00	4.900.000,00	17,15
5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	73.048.800,00	53.880.000,00	73,76
5.2.02.03.03.0001.	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03.0009.	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	2.930.400,00	2.580.000,00	88,04
5.2.02.04.01.0001.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4.000.000,00	3.990.000,00	99,75
5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.340.000,00	3.300.000,00	98,80
5.2.02.04.01.0007.	Belanja Modal Alat Pasca Panen	345.000,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01.0008.	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	30.000.000,00	27.000.000,00	90,00
5.2.02.04.01.0009.	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	6.000.000,00	5.994.000,00	99,90
5.2.02.05.01.0001.	Belanja Modal Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	442.546.000,00	404.354.294,00	91,37
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	590.540.340,00	575.919.614,00	97,52
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	11.197.455.830,00	8.634.004.192,50	77,11
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	37.757.000,00	37.344.000,00	98,91
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	1.102.578.600,00	1.087.863.631,00	98,67
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	17.736.000,00	16.602.000,00	93,61
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.049.595.700,00	1.015.800.000,00	96,78
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	305.109.860,00	302.970.000,00	99,30



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	708.888.740,00	659.172.370,00	92,99
5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	291.096.500,00	275.902.436,00	94,78
5.2.02.05.03.0004.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0005.	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	20.000.000,00	19.995.000,00	99,98
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	77.841.000,00	77.139.350,00	99,10
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	218.798.000,00	216.977.000,00	99,17
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	280.998.000,00	280.850.000,00	99,95
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	269.890.000,00	268.179.870,00	99,37
5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	579.860.000,00	571.506.000,00	98,56
5.2.02.06.01.0005.	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	20.000.000,00	14.950.000,00	74,75
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	236.487.900,00	236.204.000,00	99,88
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	1.703.100.000,00	1.677.163.650,00	98,48
5.2.02.06.02.0002.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	217.000.000,00	216.703.800,00	99,86
5.2.02.06.03.0048.	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	52.770.000,00	52.598.280,00	99,67
5.2.02.06.04.0004.	Belanja Modal Radar	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	7.058.297.001,00	6.385.825.831,00	90,47
5.2.02.07.01.0010.	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	400.000.000,00	300.990.000,00	75,25
5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	421.660.000,00	410.209.000,00	97,28
5.2.02.08.01.0011.	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	61.710.450,00	60.933.450,00	98,74
5.2.02.08.01.0056.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01.0064.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	17.860.000,00	17.684.505,00	99,02
5.2.02.08.03.0007.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0010.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0011.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0015.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0016.	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	400.000.000,00	399.788.700,00	99,95
5.2.02.08.08.0006.	Belanja Modal Peralatan Umum	1.026.360.000,00	996.020.000,00	97,04
5.2.02.08.08.0015.	Belanja Modal Photo and Film Equipment	7.200.000,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	7.000.000,00	6.850.000,00	97,86
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	6.040.776.750,00	5.955.772.050,00	98,59
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.773.358.190,00	2.691.986.240,00	97,07



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.2.02.10.02.0001.	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	51.920.000,00	51.400.000,00	99,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	108.780.000,00	99.244.000,00	91,23
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	381.863.000,00	377.113.100,00	98,76
5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	959.436.000,00	953.295.000,00	99,36
5.2.02.12.01.0003.	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	35.000.000,00	34.854.000,00	99,58
5.2.02.15.02.0001.	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02.0005.	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02.0006.	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.03.0004.	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	575.916.800,00	503.294.950,00	87,39
5.2.02.16.01.0003.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	999.000,00	999.000,00	100,00
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	4.798.910.000,00	4.787.178.000,00	99,76
5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	150.000.000,00	149.118.000,00	99,41
5.2.02.19.01.0006.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	45.170.000,00	44.854.200,00	99,30
5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.940.821.831,00	5.896.476.529,00	99,25
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.895.230.564,00	1.304.760.846,00	68,84
<b>5.2.03.</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>67.376.516.079,00</b>	<b>55.491.835.674,00</b>	<b>82,36</b>
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	15.621.578.900,00	15.049.069.813,00	96,34
5.2.03.01.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.100.000.000,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	12.946.956.050,00	12.548.890.870,00	96,93
5.2.03.01.01.0011.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0012.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	517.864.129,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0029.	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	17.318.065.000,00	17.174.557.439,00	99,17
5.2.03.01.01.0033.	Belanja Modal Bangunan Parkir	379.000.000,00	378.677.815,00	99,91
5.2.03.01.01.0036.	Belanja Modal Taman	886.000.000,00	884.659.737,00	99,85
5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.03.03.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	9.130.052.000,00	8.995.592.000,00	98,53
5.2.03.04.01.0005.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	429.000.000,00	420.138.000,00	97,93
5.2.03.99.99.9999.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	48.000.000,00	40.250.000,00	83,85
<b>5.2.04.</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>242.693.872.952,00</b>	<b>200.185.637.334,00</b>	<b>82,48</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	88.174.579.198,00	55.088.236.955,00	62,48
5.2.04.01.01.0004.	Belanja Modal Jalan Kota	31.108.000,00	31.108.000,00	100,00
5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	18.634.938.449,00	18.606.393.372,00	99,85
5.2.04.01.02.0003.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	104.997.407.925,00	96.550.118.275,00	91,95
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	8.962.847.433,00	8.952.550.491,00	99,89
5.2.04.02.04.0005.	Belanja Modal Bangunan Pengaman	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.05.0006.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	5.334.000,00	5.334.000,00	100,00
5.2.04.02.06.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.07.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.457.247.100,00	1.457.247.100,00	100,00
5.2.04.02.07.0004.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	2.997.000.000,00	2.824.000.000,00	94,23
5.2.04.02.07.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	17.333.410.847,00	16.570.799.141,00	95,60
5.2.04.03.01.0005.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.01.0005.	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.03.0005.	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	100.000.000,00	99.850.000,00	99,85
<b>5.2.05.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>13.821.693.011,00</b>	<b>13.242.462.641,00</b>	<b>95,81</b>
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	237.980.000,00	237.922.000,00	99,98
5.2.05.01.01.0003.	Belanja Modal Buku Agama	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0006.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	14.160.000,00	12.690.000,00	89,62
5.2.05.01.01.0007.	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	19.635.000,00	19.635.000,00	100,00
5.2.05.01.01.0008.	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0009.	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0011.	Belanja Modal Buku Laporan	559.900.000,00	0,00	0,00
5.2.05.01.02.0001.	Belanja Modal Audio Visual	48.000.000,00	47.850.000,00	99,69
5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik	974.440.000,00	973.770.450,00	99,93
5.2.05.05.01.0001.	Belanja Modal Tanaman	388.000.000,00	387.801.240,00	99,95
5.2.05.06.01.0003.	Belanja Modal Tanaman Koleksi	145.800.000,00	145.790.000,00	99,99
5.2.05.07.01.0001.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08.01.0005.	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00
5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	11.197.186.761,00	11.200.790.711,00	100,03
5.2.05.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	236.591.250,00	216.213.240,00	91,39
<b>5.2.06.</b>	<b>Belanja Modal Aset Lainnya</b>	<b>239.295.000,00</b>	<b>238.882.170,00</b>	<b>99,83</b>
5.2.06.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	239.295.000,00	238.882.170,00	99,83
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.448.219.800,00</b>	<b>66.645.582,00</b>	<b>4,60</b>
<b>5.3.01.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>1.448.219.800,00</b>	<b>66.645.582,00</b>	<b>4,60</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga	1.448.219.800,00	66.645.582,00	4,60
<b>5.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>393.799.121.092,00</b>	<b>393.707.154.991,00</b>	<b>99,98</b>
<b>5.4.01.</b>	<b>Belanja Bagi Hasil</b>	<b>16.813.266.012,00</b>	<b>16.808.319.340,00</b>	<b>99,97</b>
5.4.01.01.03.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.414.321.124,00	15.413.749.238,00	100,00
5.4.01.02.01.0001.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.398.944.888,00	1.394.570.102,00	99,69
<b>5.4.02.</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>376.985.855.080,00</b>	<b>376.898.835.651,00</b>	<b>99,98</b>
5.4.02.05.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05.02.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05.02.0003.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	2.789.768.500,00	2.789.768.500,00	100,00
5.4.02.05.02.0004.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	231.513.488.000,00	231.442.855.200,00	99,97
5.4.02.05.02.0005.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	142.682.598.580,00	142.666.211.951,00	99,99
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.826.856.579.502,00</b>	<b>2.619.084.986.875,00</b>	<b>92,65</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(21.045.452.000,00)</b>	<b>115.720.638.808,08</b>	<b>4,82</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>21.045.452.000,00</b>	<b>21.771.162.790,96</b>	<b>103,45</b>
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>21.045.452.000,00</b>	<b>21.771.162.790,96</b>	<b>103,45</b>
<b>6.1.01.</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	<b>21.045.452.000,00</b>	<b>21.771.162.790,96</b>	<b>103,45</b>
6.1.01.05.01.0007.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	15.176.709.456,00	15.902.420.246,75	104,78
6.1.01.08.01.0001.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	5.868.742.544,00	5.868.742.544,21	100,00
6.1.01.08.02.0001.	Sisa Dana BOS	0,00	0,00	0,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>21.045.452.000,00</b>	<b>21.771.162.790,96</b>	<b>103,45</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0,00</b>	<b>137.491.801.599,04</b>	<b>0,00</b>

Dari tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa selama Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kampar mengalami Surplus sebesar **Rp115.720.638.808,08** karena realisasi pendapatan sebesar **Rp2.734.805.625.683,08** lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja yang mencapai **Rp2.619.084.986.875,00**.

#### **A. Pendapatan**

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Kampar, telah diupayakan dana secara maksimal lewat usaha peningkatan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), berupa pajak dan retribusi daerah yang menjadi tanggung jawab pengelolaan masing-masing OPD Kabupaten Kampar, dan pendapatan transfer sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kampar Tahun 2023. Pada akhir Tahun Anggaran 2023 realisasi pendapatan Kabupaten Kampar sebesar **Rp2.734.805.625.683,08**.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

**B. Belanja**

Sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan di bidang pengeluaran, pengendalian pengeluaran yang dilakukan selain melaksanakan efisiensi juga mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran serta pemborosan-pemborosan dalam segala sektor pengeluaran melalui pengawasan preventif secara proaktif sehingga seluruh pengeluaran akan mempunyai arti dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar serta dapat dipertanggungjawabkan secara nyata baik secara fisik maupun non-fisik. Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun anggaran 2023 secara keseluruhan adalah sebesar **Rp2.619.084.986.875,00**

**C. Surplus/Defisit**

Untuk Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kampar mengalami Surplus sebesar **Rp115.720.638.808,08** dari jumlah yang dianggarkan sebesar Defisit (**Rp21.045.452.000,00**) kondisi ini membawa dampak adanya selisih anggaran dan realisasi keuangan daerah sebesar **Rp94.675.186.808,00**.

**D. Pembiayaan dan Koreksi**

Untuk surplus/defisit sebesar **Rp115.720.638.808,08** Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan Pembiayaan Netto sebesar **Rp21.771.162.790,96** sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2023 menjadi sebesar **Rp137.491.801.599,04** Dengan adanya perubahan kas BOS pada tahun sebelumnya sebesar **Rp6.320.785,00**. Maka silpa setelah dikoreksi tambah menjadi sebesar **Rp137.498.122.384,04**.

**2. HAMBATAN/KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

Hambatan / kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan : 1). Lemahnya Sumber daya Manusia yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan OPD terutama Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD pada umumnya tidak menguasai peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, 2). Kurangnya Bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi peraturan tentang pengelolaan keuangan terhadap pegawai yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, 3). Perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan yang selalu berubah-ubah.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

**BAB IV**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya.

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 ini mengacu kepada: (1). Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kampar Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1 sampai dengan No.12 termasuk Pengantar SAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan; Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, dan (2) Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kampar.

**1. ENTITAS PELAPORAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah merupakan PPKD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Sebagai salah satu entitas pelaporan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPKAD Kabupaten Kampar menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 yang mencakup: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan ekuitas, (5) Neraca, (6) Laporan Arus Kas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun periode pelaporan meliputi seluruh transaksi keuangan yang terjadi selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Penyusunan laporan keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2023.

**2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset kewajiban dan ekuitas, dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan demikian,

Basis Akrual Untuk LO berarti bahwa **pendapatan** diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan **beban** diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan, pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat



## PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

kas diterima di rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah. namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### 3. BASIS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

#### a. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk dapat diakui yakni (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas yang bersangkutan; (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan dipergunakan pertimbangan aspek materialitas.

#### b. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis (*historical cost*). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### 4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### a. Akuntansi Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

Pendapatan yang dikelola oleh OPD di lingkungan Kabupaten Kampar pada umumnya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah ini meliputi:



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

(1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, serta (3) Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

PAD dinyatakan sebesar nilai realisasi yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Kas Daerah pada tahun pelaporan.

Akuntansi Pendapatan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam evaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan :

- 1) Menyediakan informasi sumber daya ekonomi; dan
- 2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektifitas perolehan pendapatan

Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi :

- 1) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- 2) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**b. Akuntansi Belanja**

Akuntansi belanja menyediakan informasi mengenai realisasi belanja dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai penggunaan sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh; dan
- 2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektifitas pengelolaan belanja dan penggunaan sumber daya.

Akuntansi belanja menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi penggunaan sumber daya ekonomi atau pengelolaan belanja yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi belanja dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi penggunaan sumber daya ekonomi atau pengelolaan belanja:

- 1) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- 2) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pengakuan**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan *definitive* oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/Pengguna Anggaran.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas belanja (penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja) dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

Dalam pelaporan keuangan, klasifikasi jenis belanja menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan khususnya PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, mengklasifikasikan belanja menurut ekonomi, yaitu pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bansos dan belanja tidak terduga, PSAP 02 juga mengklasifikasikan jenis belanja pada 4 hal, yaitu:

**1) Belanja Operasi**

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

**2) Belanja Modal**

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

**3) Belanja Lain-lain/ tidak terduga**

Adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

**4) Transfer Keluar**

Pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini dari transfer keluar kota atau kabupaten.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Pengakuan Akuntansi atas belanja barang pakai habis dan belanja modal suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- 1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual; dan
- 3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan

Perlakuan Akuntansi belanja pemeliharaan, belanja modal/kapitalisasi aset tetap atau bukan suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
  - a) Bertambah ekonomis/efisien, dan /atau
  - b) Bertambah umur ekonomis,dan/atau
  - c) Bertambah volume, dan/atau
  - d) Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan.

**c. Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

**Akuntansi Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan

- 1) Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan
- 6) Penerimaan Piutang Daerah

**Pengakuan**

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah kecuali untuk SiLPA.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

**Pengukuran**

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi pembiayaan.

**Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum Negara/daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

**Transaksi Pengeluaran Pembiayaan Berasal dari:**

- 1) Pembentukan dana cadangan;
- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Pembayaran pokok pinjaman (utang); dan
- 4) Pemberian pinjaman daerah.

**Pengakuan**

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah

**Pengukuran**

Akuntansi Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan **tidak** mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi pembiayaan.

**d. Akuntansi Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**Pengakuan Aset**

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

- 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

**Aset diklasifikasikan kedalam:**

**1) ASET LANCAR**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan

Aset lancar terdiri dari :

- a) Kas dan Setara Kas
- b) Investasi Jangka Pendek
- c) Piutang
- d) Piutang lain-lain
- e) Persediaan

**a) KAS**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, yang terdiri dari:

- (1) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang sebelumnya diterima dari Bendahara Umum Daerah setelah dipergunakan untuk pengeluaran belanja dan atas sisa tersebut per tanggal neraca belum disetor kembali ke Kas Daerah.

**Setara kas**

- (1) Simpanan di Bank dalam Bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
- (2) Investasi Jangka Pendek lainnya sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

**b) INVESTASI JANGKA PENDEK**

Investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek terdiri dari :

- (1) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Surat Utang Negara (SUN);
- (3) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- (4) Surat Perbendaharaan Negara.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**Pengakuan Investasi Jangka Pendek**

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

- (1) Kemungkinan menfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut diperoleh pemerintah daerah; dan
- (2) Nilai perolehan atau nilai ajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

**Pengukuran investasi jangka pendek**

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

**Pengakuan hasil investasi**

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

**Penilaian Investasi Jangka Pendek**

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

**c) PIUTANG**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang antara lain terdiri dari :



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

- (1) Piutang Pajak;
- (2) Piutang Retribusi;
- (3) Piutang Dana Bagi Hasil;
- (4) Piutang Dana Alokasi Umum; dan
- (5) Piutang Dana Alokasi Khusus.

**Pengakuan Piutang**

Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.

Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan. Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.

**Pengukuran Piutang**

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

**Piutang Lain-lain**

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda.

- (1) Piutang lain-lain terdiri dari :
- (2) Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran;
- (3) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
- (4) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
- (5) Piutang Dividen;
- (6) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah; dan
- (7) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

**d) PERSEDIAAN**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- (1) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- (2) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- (3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

diserahkan kepada masyarakat; dan

- (4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan antara lain terdiri dari :

- (1) Persediaan alat tulis kantor;
- (2) Persediaan alat listrik;
- (3) Persediaan material/bahan;
- (4) Persediaan benda pos;
- (5) Persediaan bahan bakar; dan
- (6) Persediaan bahan makanan pokok.

#### **Pengakuan Persediaan**

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

**Pengukuran Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar :

- (1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

**Pengungkapan Persediaan**

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :

- (1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- (2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (3) kondisi persediaan.

**2) ASET NON LANCAR**

**a) INVESTASI JANGKA PANJANG**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri dari :

- (1) Investasi Non Permanen; dan
- (2) Investasi Permanen.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

**Pengakuan Investasi Jangka Panjang**

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- (1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

**Pengukuran Investasi Jangka Panjang**

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

**(1) Investasi Non Permanen**

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi non permanen terdiri dari :

- (a) Pembelian Surat Utang Negara;
- (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (c) Dana Bergulir; dan
- (d) Investasi non permanen lainnya.

**Pengukuran Investasi Non Permanen**

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

**Pengukuran Investasi Non Permanen Dana Bergulir**

Kualitas Dana Bergulir dalam bentuk piutang dengan angsuran ditetapkan dengan 4 (empat) golongan yaitu: piutang lancar, piutang kurang lancar, piutang diragukan dan piutang macet.

Kualitas Dana Bergulir dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih ditetapkan sebagai berikut:

(a) Piutang lancar

- (1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, atau



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

(2)) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari (tiga) kali angsuran dan belum jatuh tempo.

(b) Piutang Kurang Lancar

(1)) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran dan/atau,

(2)) Umur piutang telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.

(c) Piutang Diragukan

(1)) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran dan/atau

(2)) Umur piutang telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.

(d) Piutang Macet

(1)) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran dan/atau,

(2)) Umur piutang telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan.

Berdasarkan kualitasnya, penyisihan piutang tidak tertagih untuk Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	% Penyisihan
1	Piutang Lancar	0,5 %
2	Piutang Kurang Lancar	10 %
3	Piutang diragukan	50 %
3	Piutang Macet	100 %

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

**(2) Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen terdiri dari :

(a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara; dan

(b) Investasi permanen lainnya.

**Pengukuran Investasi Permanen**

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

**Pengakuan hasil Investasi**

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

**b) ASET TETAP**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap terdiri dari :

- (1) Tanah;
- (2) Peralatan dan Mesin;
- (3) Gedung dan Bangunan;
- (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- (5) Aset Tetap Lainnya;
- (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
- (7) Akumulasi Penyusutan.

**Aset Tetap Bernilai Kecil**

Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan.

Pemerintah daerah perlu menetapkan batas untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja.

**Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap**

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini. Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya.

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dirinci sebagai berikut :

- (1) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
- (2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
- (3) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi:
  - (a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan; dan
  - (b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
- (4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
  - (a) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan
  - (b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- (5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
  - (a) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
  - (b) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

- (6) Pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- (7) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya:
  - (a) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan; dan
  - (b) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- (8) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
- (9) Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

**Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap**

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi:

- (1) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan di atas 10% dari nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut.
- (2) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:
  - (a) Alat-alat besar yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - (b) Alat angkutan yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - (c) Alat bengkel dan alat ukur yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - (d) Alat pertanian yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - (e) Alat kantor dan rumah tangga yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - (f) Alat studio dan komunikasi yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

- (g) Alat kedokteran yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - (h) Alat laboratorium yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pengeluaran untuk per satuan aset tetap lainnya berupa hewan ternak dan tanaman yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud paragraf di atas **dikecualikan** terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

#### **Pengakuan Aset Tetap**

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### **Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- (1) Biaya persiapan tempat;
- (2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- (3) Biaya pemasangan (*instalation cost*);
- (4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- (5) Biaya konstruksi; dan
- (6) Biaya kepanitiaan.

**(1) Tanah**

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

**Pengakuan Tanah**

Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

**Pengukuran Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

**Pengungkapan Tanah**

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

**(2) Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi, dan pemancar, alat kedokteran dan Kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, computer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

**Pengukuran Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

**Pengungkapan Peralatan dan Mesin**

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

**(3) Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan Gedung, monument, bangunan Menara, dan rambu-rambu.

**Pengukuran Gedung dan Bangunan**

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

**Pengungkapan Gedung dan Bangunan**

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

**(4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

**(5) Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

**Pengukuran Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

**Pengungkapan Aset Tetap Lainnya**

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

**(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

**Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

- (a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- (b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- (c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :

- (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

**Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

- (a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- (b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- (c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- (a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- (c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

**Pengungkapan Konstruksi dalam Pengerjaan**

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :

- (a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- (b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- (c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- (d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- (e) Retensi.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

**(7) Akumulasi Penyusutan**

Penyusutan didefinisikan sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun beban penyusutan.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dipergunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Pencatatan penyusutan menghadapi berbagai permasalahan. Masalah dalam akuntansi penyusutan suatu aset tetap adalah penentuan jenis aset yang disusutkan, jumlah yang dapat disusutkan, metode penyusutan dan penentuan masa manfaat keekonomian.

Dengan menyadari permasalahan tersebut, dalam mencatat dan menyajikan penyusutan, prasyarat yang harus dipenuhi adalah adanya:

- (a) Harus dapat diidentifikasi aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun;
- (b) Harus ditetapkan nilai yang dapat disusutkan; dan
- (c) Harus ditetapkan masa manfaat dan kapasitas aset tetap.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain. Penerapan penyusutan aset tetap dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan akuntansi di atas, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

**Prasyarat Penyusutan**

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah:

(a) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun:

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya, aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.

(b) Nilai yang Dapat Disusutkan

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. PSAP menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung. Selain itu, nilai perolehan pun menjadi faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Sebelum penerapan SAP, entitas pemerintah mencatat nilai aset tetap dengan pengukuran yang berbeda dengan berbagai acuan. Dengan berlakunya SAP maka penilaian aset tetap harus disesuaikan dengan pedoman yang diatur dalam Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal. Nilai wajar yang sesuai dengan SAP akan menjadi dasar dalam menentukan nilai aset tetap yang dapat disusutkan.

Di lingkungan pemerintah, aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya. Selain itu, penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya, dengan kedua alasan ini maka nilai sisa/residu tersebut diabaikan dalam menghitung penyusutan. Aset tetap masih memiliki nilai selama masih dapat dimanfaatkan, sehingga pada prinsipnya tidak dikenal nilai residu. Dengan demikian, nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*).

**(c) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap**

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang tidak terkuantifikasi dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.

Kebijakan akuntansi memilih Metode Garis Lurus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

**Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan**

Langkah ini untuk meyakinkan bahwa entitas akuntansi yang akan melaksanakan pencatatan penyusutan tidak akan memasukkan aset tetap berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan sebagai aset tetap yang akan disusutkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- (a) Dapatkan daftar aset tetap yang disajikan dalam neraca;
- (b) Identifikasi apakah neraca menyajikan pos tanah dan konstruksi pengerjaan; dan
- (c) Jika neraca menyajikan pos tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, keluarkan dari daftar aset tetap yang akan disusutkan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**Ilustrasi Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan Menurut Metode Penyusutan Garis Lurus**

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

Contoh perhitungan:

- (a) Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui:
- (1) Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp10.000.000,00.
  - (2) Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
- (b) Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 4 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Dari informasi tersebut di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga keempat adalah sebagai berikut:

- (a) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp10.000.000,00.
- (b) Penyusutan tahun pertama adalah  $Rp10.000.000,00 : 4 = Rp2.500.000,00$ .

(c) Catatan tahun pertama adalah:

Jurnal untuk mencatat penyusutan	
Beban penyusutan	Rp 2.500.000,00
Akumulasi penyusutan	Rp 2.500.000,00

(d) Catatan tahun kedua hingga keempat adalah:

Jurnal untuk mencatat penyusutan	
Beban penyusutan	Rp 2.500.000,00
Akumulasi penyusutan	Rp 2.500.000,00

**Penyajian Penyusutan**

Dari informasi tersebut di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga keempat adalah sebagai berikut:

Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas dana dalam akun beban penyusutan. Neraca menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat di ketahui.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Ilustrasi penyajian nilai perolehan aset, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap dalam neraca (dalam rupiah) sebagian adalah sebagai berikut:

Tanah		120.000.000.000,00
Peralatan dan Mesin	4.000.000.000,00	
Gedung dan Bangunan	35.000.000.000,00	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.758.500.000,00	
Aset tetap lainnya	1.656.000.000,00	
Akumulasi Penyusutan	<u>(2.430.000.000,00)</u>	
Nilai Buku Aset Tetap		50.984.500.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		<u>4.300.000.000,00</u>
Jumlah Aset Tetap		175.284.500.000,00

Walaupun aset tetap terdiri atas berbagai jenis aset yang menunjukkan nilai perolehan masing-masing, penyusutannya disajikan hanya dalam satu akun akumulasi penyusutan. Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan akumulasinya serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat**

Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan *output* dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Menurut paragraf 50 PSAP 07 pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp50.000.000,00 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp12.200.000,00. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah sebesar Rp30.000.000,00 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000,00. Perbaikan sebesar Rp12.200.000,00 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp32.200.000,00 dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp4.600.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 4 tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset 4 tahun adalah sebesar Rp8.050.000,00 per tahun.

**Penyusutan atas Aset Tetap secara Berkelompok**

Aset tetap bervariasi dalam bentuk dan nilai. Ada aset tetap yang nilai per jenis sangat besar. Misalnya, gedung berupa rumah atau kantor dengan nilai yang relatif besar. Jalan berupa jalan negara atau jalan provinsi misalnya juga memiliki nilai yang signifikan. Akan tetapi ada juga aset tetap yang jenisnya banyak tetapi nilainya relatif kecil. Misalnya, mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya.

Menghitung besarnya penyusutan untuk aset tetap yang nilai per unitnya besar dapat dilakukan dengan menghitung penyusutan setiap jenis aset tetap yang bersangkutan. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Untuk itu diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitung besarnya penyusutan jenis aset yang nilainya relatif kecil.

Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

Misalnya saldo awal perlengkapan kantor awal tahun Rp200.000.000,00 dan saldo akhir tahun Rp300.000.000,00. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp250.000.000,00. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp62.500.000,00.

**Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun**

Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penghitungan penyusutan, untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di tengah tahun digunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan satu hari. Pendekatan ini disebut pendekatan tahunan.

Entitas pemerintah yang akan memperoleh aset tetap di tengah tahun memilih pendekatan-pendekatan tahunan dalam menghitung besarnya penyusutan sesuai yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**Perubahan Estimasi dan Konsekuensinya Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi**

Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar.

Oleh karena nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) tidak ada lagi maka atas aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa nilai sisa aset tetap tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.

**c) DANA CADANGAN**

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

**d) ASET LAINNYA**

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

- (1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- (2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- (4) Aset Tidak Berwujud; dan
- (5) Aset Lain-lain.

**Tagihan Piutang Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

**Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

**Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

**Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- (1) Bangun, Kelola, Serah (BKS); dan
- (2) Bangun, Serah, Kelola (BSK).

**Bangun, Kelola, Serah (BKS)**

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

#### **Pengukuran BKS**

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

#### **Bangun, Serah, Kelola (BSK)**

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

#### **Pengukuran BSK**

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

#### **Aset Tidak Berwujud**

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi :

*Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

#### **Lisensi dan *franchise***

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

#### **Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya**

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

**Aset Lain-Lain**

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tidak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

**Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)**

Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

- (1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- (2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- (3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan
- (4) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

**Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)**

Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal yang digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- (2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- (3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- (4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

**e. Akuntansi Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:

- (1) Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- (2) Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah;
- (3) Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- (4) Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

**(1) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), terdiri dari :

- (a) Utang Taspen;
- (b) Utang Askes;
- (c) Utang PPh Pusat;
- (d) Utang PPN Pusat;
- (e) Utang Taperum; dan
- (f) Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang Bunga, terdiri dari :

- (a) Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat;
- (b) Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya;
- (c) Utang Bunga kepada BUMN/BUMD;
- (d) Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan;
- (e) Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya; dan
- (f) Utang Bunga Luar Negeri.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

Utang Pajak, terdiri dari :

- (a) Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21;
- (b) Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22; dan
- (c) Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri dari :

- (a) Utang Bank;
- (b) Utang Obligasi;
- (c) Utang Pemerintah Pusat;
- (d) Utang Pemerintah Provinsi; dan
- (e) Utang Pemerintah Kabupaten / Kota.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari :

- (a) Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III;
- (b) Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III; dan
- (c) Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.

#### **Utang Jangka Pendek Lainnya**

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

#### **Pengakuan**

Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (*Account Payable*) pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

## **(2) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutup defisit anggarannya.

Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :

- (a) Utang Dalam Negeri; dan
- (b) Utang Luar Negeri.

Utang Dalam Negeri, terdiri dari :

- (a) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan;
- (b) Utang Dalam Negeri – Obligasi;
- (c) Utang Pemerintah Pusat;
- (d) Utang Pemerintah Provinsi; dan
- (e) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

Utang Luar Negeri, terdiri atas Utang Luar Negeri Sektor Perbankan

**Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

**Kewajiban dapat timbul dari:**

- (a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- (b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- (c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- (d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

**Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**Penilaian**

Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk :

- (a) Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*); dan
- (b) Utang Pemerintah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*).

**f. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa**

**KOREKSI KESALAHAN**

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun Saldo Ekuitas Dana. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

- 1) Kesalahan yang tidak berulang; dan
- 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

- 1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- 2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain- LRA, akun aset, dan akun ekuitas yang terkait.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah. Koreksi kesalahan tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan belanja dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas, yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas, yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dana lancar dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, di samping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset dan pos ekuitas yang bersangkutan. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas dana diinvestasikan.

Koreksi kesalahan pendapatan dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas, yaitu terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan negara yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas, yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas pada aset tetap.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

**PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**PERISTIWA LUAR BIASA**

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah daerah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah daerah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut :

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**g. Laporan Keuangan Konsolidasi**

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum daerah.

**PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

- 1) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 3) Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.



## PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

### ENTITAS PELAPORAN

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan :

- 1) Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- 2) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah daerah yang diangkat atau pejabat yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- 4) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

### ENTITAS AKUNTANSI

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

### BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Contoh BLUD adalah rumah sakit.

### PROSEDUR KONSOLIDASI

Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (*reciprocal*) maupun tanpa mengeliminasinya.

Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal balik, maka nama-nama akun yang timbal balik dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada lembaga teknis pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

- 1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran lembaga teknis pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya; dan
- 2) Neraca BLUD digabungkan kepada neraca lembaga teknis pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya.

**h. Laporan Operasioal**

**RUANG LINGKUP**

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat OPD, PPKD, dan Pemda.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemda, sedangkan entitas akuntansi yaitu OPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

**MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, karena Laporan Operasional menyediakan informasi:

- 1) Mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 2) Mengenai operasional keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
- 3) Memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif;
- 4) Kepada para pengguna laporan tentang indikasi efisiensi, efektifitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya; dan
- 5) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan penyusunannya.

**PERIODE PELAPORAN**

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

- 1) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan
- 2) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat suatu Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

#### **STUKTUR LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, pos luar biasa, untung/rugi penjualan aset, dan surplus/defisit bersih, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

- 1) Nama OPD/PPKD/Pemda;
- 2) Cakupan entitas pelaporan;
- 3) Periode yang dicakup;
- 4) Mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
- 5) Satuan angka yang digunakan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO;
- 2) Beban;
- 3) Penjualan aset non lancar;
- 4) Pos luar biasa; dan
- 5) Surplus/defisit-LO.

Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

#### **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan fungsi serta klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama, yaitu berdasarkan jenis.

Entitas pelaporan dapat menyajikan rekonsiliasi antara Surplus/defisit dari Operasi menurut Laporan Operasional dengan Surplus/defisit-Anggaran menurut Laporan Realisasi Anggaran, beserta penyebab terjadinya perbedaan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **AKUNTANSI PENDAPATAN - LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Pendapatan diperoleh; dan
- 2) Pendapatan direalisasi atau dapat direalisasi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbul hak untuk menagih.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbul hak untuk menagih.

Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi jika kas telah diterima oleh pemerintah di rekening kas umum daerah.

Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.

#### **Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.**

Klasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**AKUNTANSI BEBAN - LO**

Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban;
- 2) Terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Konsumsi aset adalah saat pengeluaran dari Kas Umum Daerah kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau penggunaan aset dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Pengeluaran uang dapat dilakukan melalui bendahara umum daerah atau melalui bendahara pengeluaran. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran diakui sebagai beban pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh bendahara umum daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa adalah penyusutan dan amortisasi.

Dalam hal layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

**Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.**

Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, dan beban tak terduga.

Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*).

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL**

Sulus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Sulus/Défisit dari Kegiatan Operasional.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

**POS LUAR BIASA**

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit dari Kegiatan Operasional.

Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- 2) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- 3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**SURPLUS/DEFISIT -LO**

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

**TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING**

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

**TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA**

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang dan jasa dapat dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

**i. Akuntansi Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Kampar dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang lancar merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam 1 (satu) periode akuntansi.

Piutang tidak lancar merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas dalam kurun lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

**KLASIFIKASI**

1) Piutang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Piutang lancar, yaitu piutang yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan; dan
- b) Piutang tidak lancar (piutang jangka panjang), yaitu piutang yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan.

2) Piutang antara lain terdiri dari :

- a) Piutang Pajak;
- b) Piutang Retribusi;
- c) Piutang PAD Lainnya;
- d) Piutang Dana Bagi Hasil;
- e) Piutang Dana Alokasi Umum;
- f) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- g) Piutang Dana Penyesuaian; dan
- h) Piutang Lain-Lain.

**Pengakuan Piutang**

Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.

Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.

Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.

**Pengukuran Piutang**

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PAJAK**

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak kabupaten sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang atas pajak kabupaten timbul karena tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Tunggakan tersebut terjadi karena perbedaan penetapan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan jumlah yang telah dilunasi oleh wajib pajak. Perbedaan yang terjadi antara OPD dengan jumlah yang dilunasi oleh wajib pajak secara keseluruhan.

Masa pajak yaitu jangka waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang melewati akhir periode pelaporan.

Kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang sampai dengan akhir tahun belum dilunasi oleh wajib pajak. Dalam hal Kepala Badan Pendapatan Daerah telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), besarnya Piutang Pajak yang diakui adalah sebesar kekurangan pembayaran pokok pajak, sedangkan pendapatan dari sanksi administratif masuk dalam Pendapatan Denda Pajak.

### **KOMPONEN PIUTANG PAJAK**

Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- 7) Pajak Parkir; dan
- 8) Pajak lain-lain.

### **PENGAKUAN**

Pada dasarnya Piutang Pajak diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak, atau pada saat terbit surat keputusan tentang Piutang Pajak.

- 1) Piutang Pajak diakui ketika wajib pajak belum membayar pajak yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kampar sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.
- 2) Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi. Hal ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKP yang hingga akhir periode belum dibayar oleh WP.
- 3) Piutang Pajak diakui pada akhir periode pelaporan keuangan (tanggal 31 Desember) ketika akan disusun neraca dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Pendapatan Daerah mencatat Piutang Pajak sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

- 4) Perhitungan Piutang Pajak dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) pada akhir tahun yang belum dibayar/dilunasi.
- 5) Pada awal periode akuntansi berikutnya dilakukan jurnal balik untuk mengembalikan akun-akun Piutang Pajak menjadi nol.

#### **PENGUKURAN**

Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau SKPDKB serta dokumen lain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Piutang Pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai nominal dari Pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih.

Pemberhentian pengakuan piutang atau penghapusan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau penghapusbukuan (*write down*). Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*. Penghapusbukuan Piutang Pajak dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar tentang penghapusan Piutang Pajak. Administrasi tentang penghapusbukuan yang tidak menghapus penagihan dilakukan secara *ekstra comptabel*, bukan dalam pencatatan akuntansi.

Untuk menjaga prinsip *net realizable value* dalam pengakuan Piutang Pajak, mekanisme penghapusbukuan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

#### **PENGHAPUSBUKUAN (*WRITE DOWN*) PIUTANG PAJAK**

Penghapusbukuan Piutang Pajak ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas Piutang Pajak. Atas penghapusbukuan Piutang Pajak ini perlu dicatat secara *ekstra comptable* untuk mengadministrasikan Piutang Pajak yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas Piutang Pajak secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptable*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya.

Terdapat dua (2) metode untuk menghapus buku Piutang Pajak, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

##### **Metode Langsung**

Untuk metode penghapusan langsung, kerugian piutang baru diakui pada saat piutang dihapuskan, dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

### **Metode Tidak Langsung**

Metode tidak langsung adalah metode penghapusan piutang dengan cara membentuk penyisihan piutang tidak tertagih. Metode tidak langsung ini digunakan ketika jumlah kerugian piutang yang biasa terjadi memiliki nilai yang cukup besar dan material. Piutang PKB diakui sebesar *net realizable value*-nya. Agar nilai piutang PKB menyajikan nilai yang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka penyajian piutang dalam neraca harus disesuaikan dengan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Penetapan periode piutang yang menunggak didasarkan atas tanggal penetapan, dengan kata lain tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

#### **Akuntansi Piutang Pajak**

Pencatatan Piutang Pajak dalam neraca masuk dalam kategori jurnal penyesuaian dengan menggunakan format jurnal umum. Dasar pencatatan piutang ke dalam jurnal adalah bukti memorial yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid. bukti memorial dibuat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tentang penetapan piutang pajak beserta perhitungan penyisihan piutang tak tertagih.

#### *Pencatatan atas Timbulnya Piutang Pajak.*

Berikut ini diberikan *ilustrasi* pencatatan timbulnya piutang pajak berdasarkan karakteristik pemungutannya.

1) Pencatatan Timbulnya Piutang berdasarkan SKPD

Pada tanggal 31 Desember 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar telah melakukan pendataan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mengenai jumlah pajak hotel yang belum membayar pajak hingga jatuh tempo pembayaran. Total pajak hotel terutang adalah sebesar Rp22.500.000,00. Berdasarkan Surat Ketetapan Piutang Pajak yang diterbitkan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menerbitkan bukti memorial untuk mengakui besaran piutang pajak hotel.

2) Pencatatan Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Pajak Hotel dan Penghapusan Piutang.

Melanjutkan contoh pada nomor 1) diatas, pada neraca per 31 Desember 201 diketahui saldo penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp3.500.000,00. Pada bulan November 201 telah terbit Keputusan Bupati Kampar tentang Penghapusan Piutang sebesar Rp 1.500.000,00. Jurnal untuk mencatat pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 201 adalah:

3) Pencatatan Timbulnya Piutang berdasarkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pada tanggal 31 Desember 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas pajak restoran sebesar Rp 18.500.000,00. Berdasarkan Surat Ketetapan Piutang Pajak yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar telah menerbitkan bukti memorial untuk mengakui besaran piutang pajak restoran.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**Pengungkapan di CaLK**

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1) Pengungkapan di CaLK Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Informasi mengenai Piutang Pajak yang dituangkan dalam CaLK Badan Daerah Kabupaten Kampar minimal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang pajak;
- b) Rincian jenis piutang pajak hotel dan piutang pajak restoran berdasarkan jenis/golongan beserta saldo masing-masing piutang selama 2 tahun terakhir; dan
- c) Piutang pajak yang telah dihapuskan beserta nilainya.

2) Pengungkapan di CaLK Pemerintah Kabupaten Kampar

Informasi mengenai Piutang Pajak yang dituangkan dalam CaLK Pemerintah Kabupaten Kampar minimal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang pajak;
- b) Rincian jenis piutang pajak beserta saldo masing-masing piutang pajak selama 2 tahun terakhir;
- c) Kebijakan penyisihan piutang pajak beserta nilainya; dan
- d) Piutang pajak yang telah dihapuskan beserta nilainya.

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**

Piutang Pajak dihapuskan bila telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kampar tentang Penghapusan Piutang Pajak. Piutang Pajak dihapuskan ketika hak untuk menagih telah kedaluwarsa. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, hak menagih piutang pajak dinyatakan kedaluwarsa bila telah melampaui waktu 5 tahun sejak terutangnya pajak atau sejak terbitnya Surat Teguran dan Surat Paksa. Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur penghapusan piutang pajak daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur penghapusan piutang daerah.

Setiap tahun, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menginventarisir Piutang Pajak yang telah melampaui 5 tahun. Berdasarkan jumlah tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menyusun pengajuan penghapusan piutang pajak yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kampar. Setelah terbit Surat Keputusan tentang Penghapusan Piutang Pajak, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mencatat penghapusan tersebut dalam *ekstra comptabel* untuk mengurangi saldo piutang pajak.

Penghapusan piutang pajak yang dilakukan sebelum masa kedaluwarsa ditetapkan dengan mengacu pada kriteria yang telah digariskan dalam Peraturan Bupati Kampar tentang penghapusan piutang pajak. Lebih lanjut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar membuat Keputusan tentang kriteria penghapusan piutang sebelum batas kedaluwarsa.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG RETRIBUSI**

Retribusi dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kampar timbul karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

### **KOMPONEN PIUTANG RETRIBUSI**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi dikelompokkan berdasarkan obyeknya, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum;
- 2) Retribusi Jasa Usaha; dan
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu.

Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

### **DEFINISI RETRIBUSI**

Berikut ini disajikan definisi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Definisi tentang jenis-jenis retribusi secara lebih spesifik dijelaskan dalam peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan atas jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dikenakan atas jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

#### **PENGAKUAN**

Pada dasarnya piutang retribusi diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi.

Piutang retribusi diakui ketika wajib pajak belum membayar retribusi yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kampar sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.

Piutang retribusi diakui berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang disetarakan dengan SKRD yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember.

Piutang retribusi diakui pada akhir periode pelaporan keuangan ketika akan disusun neraca dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) mencatat piutang retribusi sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang yang diterbitkan oleh Kepala OPD.

Pada awal periode akuntansi berikutnya dilakukan jurnal balik untuk mengembalikan akun-akun Piutang retribusi menjadi nol.

#### **PENGUKURAN**

Piutang retribusi diakui sebesar nilai nominal dari obyek retribusi yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember.

Piutang retribusi dalam valuta asing disajikan dalam neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

Pemberhentian pengakuan piutang retribusi atau penghapusan piutang retribusi dilakukan ketika terjadi pelunasan atau penghapusbukuan (*write down*). Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang pajak dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar tentang penghapusan piutang retribusi. Mekanisme pencatatan penghapusbukuan dilakukan dalam *ekstra comptabel*, bukan dalam pencatatan akuntansi.

Penghapusan piutang retribusi menggunakan metode langsung.

#### **PENGHAPUSBUKUAN**

Penghapusbukuan Piutang Retribusi ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas piutang retribusi. Atas penghapusbukuan piutang retribusi ini perlu dicatat secara *ekstra comptabel* untuk mengadministrasikan piutang retribusi yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas piutang retribusi secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptabel*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya. Untuk piutang retribusi, metode yang digunakan untuk menghapus buku piutang menggunakan metode langsung, yaitu kerugian piutang retribusi baru diakui pada saat piutang dihapuskan dan penghapusan



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

### **Akuntansi Piutang Retribusi**

Pencatatan piutang retribusi dalam neraca masuk dalam kategori jurnal penyesuaian dengan menggunakan format jurnal umum. Dasar pencatatan piutang retribusi ke dalam jurnal adalah bukti memorial yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid. Berikut ini diilustrasikan pencatatan piutang retribusi.

#### **Pencatatan atas Timbulnya Piutang Retribusi**

Pada tanggal 31 Desember 2021 Dinas Tenaga Kerja telah menginventarisasi Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dan menemukan bahwa terdapat retribusi ijin perpanjangan kerja sebesar Rp25.500.000,00 yang belum dilunasi. Berdasarkan Surat Ketetapan Piutang Retribusi yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Tenaga Kerja menerbitkan bukti memorial sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal.

### **Penyajian Piutang Retribusi di Neraca**

Mayoritas piutang retribusi memiliki jangka waktu pembayaran maksimal 12 bulan, oleh karena itu piutang retribusi yang timbul akibat penunggakan pembayaran oleh wajib bayar diklasifikasikan ke dalam aset lancar. Piutang retribusi yang ditampilkan dalam neraca adalah tagihan retribusi yang harus dibayar oleh wajib bayar pada periode berikutnya. Penyajian piutang retribusi di neraca disajikan secara bruto TANPA diikuti dengan penyisihan piutang tidak tertagih mengingat penghapusan piutang retribusi menggunakan metode langsung.

### **Pengungkapan di CaLK**

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **1) Pengungkapan di CaLK OPD**

Informasi mengenai piutang retribusi yang dituangkan dalam CaLK OPD minimal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang retribusi;
- b) Rincian jenis piutang retribusi berdasarkan obyek retribusinya beserta saldo masing-masing obyek retribusi selama 2 tahun terakhir; dan
- c) Piutang retribusi yang telah dihapuskan beserta nilainya.

#### **2) Pengungkapan di CaLK Pemerintah Kabupaten Kampar**

Informasi mengenai piutang retribusi yang dituangkan dalam CaLK Pemerintah Kabupaten Kampar minimal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang retribusi;



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

- b) Rincian jenis piutang retribusi beserta saldo masing-masing Piutang Pajak selama 2 tahun terakhir; dan
- c) Piutang retribusi yang telah dihapuskan beserta nilainya.

**Penghapusan Piutang Retribusi**

Piutang retribusi dihapuskan bila telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang retribusi. Piutang retribusi dihapuskan ketika hak untuk menagih telah kedaluwarsa. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, hak menagih piutang retribusi dinyatakan kedaluwarsa bila telah melampaui waktu 3 tahun sejak terutangnya retribusi atau sejak terbitnya Surat teguran. Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur penghapusan piutang retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur penghapusan piutang daerah.

Setiap tahun, OPD menginventarisir Piutang Retribusi yang telah melampaui 3 tahun. Berdasarkan jumlah tersebut, Kepala OPD mengajukan penghapusan piutang retribusi yang ditujukan kepada Bupati Kampar. Setelah terbit Surat Keputusan tentang Penghapusan Piutang Retribusi, maka PPK-SKPD mencatat penghapusan tersebut dalam *ekstra comptabel* untuk mengurangi saldo piutang retribusi.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA**

Piutang Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar juga bersumber dari pendapatan asli daerah selain pajak dan retribusi. Pendapatan asli daerah selain pajak dan retribusi bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dasar hukum atas pemungutan pendapatan ini adalah Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar. Pada umumnya piutang ini timbul karena perikatan antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan pihak ketiga.

**KOMPONEN PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA**

Piutang pendapatan asli daerah lainnya bersumber dari 2 kategori pendapatan asli daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, yaitu:

- 1) Piutang dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  
Piutang yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah piutang dividen.
- 2) Piutang dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terdiri dari:
  - a) Piutang Hasil Penjualan Aset Milik Daerah;
  - b) Piutang Tuntutan Ganti Rugi;
  - c) Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - d) Piutang Pendapatan Denda Pajak;
  - e) Piutang Pendapatan Denda Retribusi;
  - f) Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan;
  - g) Piutang Fasilitas Sosial dan Umum;
  - h) Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

- i) Piutang Sewa;
- j) Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan;
- k) dll.

#### **DEFINISI**

Piutang dividen adalah tagihan atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN ataupun perusahaan swasta/*joint venture* yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kampar.

Piutang Hasil Penjualan Aset Milik Daerah adalah piutang yang timbul dari penjualan barang milik daerah yang diharapkan dapat diterima pembayarannya dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan tagihan atas denda yang dikenakan akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada pihak ketiga. Denda ini dikenakan karena pihak ketiga tidak memenuhi jadwal penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemberi kerja (Pemerintah Kabupaten Kampar). Termasuk dalam piutang ini adalah keterlambatan atas pembayaran sewa.

Piutang Tuntutan Ganti Rugi adalah piutang yang timbul karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah.

Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

- 2) Piutang yang timbul akibat dari Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ini dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Piutang pendapatan denda pajak merupakan sanksi administratif yang timbul akibat pembayaran pajak oleh wajib pajak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan denda pajak ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Piutang pendapatan denda retribusi merupakan piutang yang timbul akibat keterlambatan pembayaran retribusi oleh wajib bayar. Besarnya denda retribusi ini maksimal sebesar 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Piutang hasil eksekusi atas jaminan merupakan piutang yang timbul akibat tidak diselesaikannya pekerjaan seperti yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan fisik umumnya mensyaratkan adanya uang jaminan baik



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

untuk pelaksanaan pekerjaan maupun untuk pemeliharaan. Bila pihak ketiga tidak bisa memenuhi perjanjian yang telah disepakati maka berdasarkan Surat Keputusan Eksekusi yang diterbitkan oleh kepala dinas uang jaminan tersebut disetorkan ke kas daerah dan diakui sebagai pendapatan dari hasil eksekusi atas jaminan.

Piutang fasilitas sosial dan umum merupakan piutang yang timbul akibat penggunaan dan pemanfaatan fasilitas sosial dan umum oleh pihak ketiga atau kelompok masyarakat untuk kegiatan usaha atau pribadi.

Piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan piutang yang bersumber dari pemberian jasa pendidikan dan pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada pihak ketiga yang mensyaratkan adanya pembayaran dari pihak ketiga kepada penyelenggara. Pendapatan yang timbul dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini bisa berasal dari uang pendaftaran/uang masuk, biaya pendidikan dan pelatihan maupun ujian kenaikan tingkat/kelas.

Piutang pendapatan sewa merupakan piutang yang timbul sebagai kontra prestasi atas pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh OPD yang ditujukan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara menyewakan. Bentuk pemberian fasilitas/jasa ini umumnya berupa penyewaan gedung kantor, rumah dinas maupun alat-alat berat milik Pemerintah Kabupaten Kampar.

Piutang dari angsuran/cicilan penjualan merupakan piutang yang timbul dari penjualan aset milik Pemerintah Kabupaten Kampar yang pembayarannya/penyelesaiannya dilakukan secara mengangsur dalam kurun waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Piutang ini timbul dari penjualan yang pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah.

#### **PENGAKUAN**

Piutang dividen diakui bila telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen. Jadi, piutang dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta/*joint venture*.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari penjualan, kerjasama dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- 2) Jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- 4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan ini sesuai untuk jenis piutang hasil penjualan aset milik daerah, piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, piutang sewa dan piutang dari angsuran / cicilan penjualan.

Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

diakui sebagai aset lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam aset tidak lancar.

Piutang pendapatan denda pajak ditetapkan berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Wajib pajak dikenakan pajak pada  $H + n$  sejak ditetapkan sebagai pajak terutang dan diakui sebesar nominal tarif yang dikenakan pada wajib pajak yang menunggak. Periode penetapan munculnya denda pajak ini mengacu pada peraturan daerah tentang pajak daerah.

Piutang tuntutan ganti rugi diakui bila telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang menunjukkan bahwa penyelesaian TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TGR dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

#### **PENGUKURAN**

Pada dasarnya, semua piutang pendapatan asli daerah lainnya ini disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang dividen diakui sebesar jumlah lembar saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dikalikan dengan nilai dividen per lembar saham yang belum diterima pembayarannya atau kurang pembayarannya hingga tanggal 31 Desember.

Piutang yang timbul karena transaksi penjualan diakui sebesar nilai nominal sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang yang timbul karena pemberian fasilitas/jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran Piutang TGR disesuaikan dengan masa jatuh temponya:

- 1) TGR yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan diakui sebagai aset lancar berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan dan diukur berdasarkan nilai nominal yang harus dilunasi dalam 12 (dua belas) bulan ke depan.
- 2) Piutang TGR yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam aset lainnya dan dinilai sebesar sisa TGR yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Piutang dari angsuran/cicilan penjualan diukur sesuai dengan masa jatuh temponya:

- 1) Angsuran/cicilan penjualan yang jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan ke depan diakui sebagai aset lancar dan dinilai sebesar angsuran/cicilan yang akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi berikutnya.
- 2) Angsuran/cicilan penjualan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan kedepan diakui sebagai aset lainnya dan dinilai sebesar saldo angsuran/cicilan penjualan yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

### **PENGHAPUSBUKUAN**

Penghapusbukuan piutang pendapatan asli daerah lainnya ini ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas piutang. Atas penghapusbukuan piutang ini perlu dicatat secara *ekstra comptabel* untuk mencatat piutang yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapus tagihan atas piutang secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptabel*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya.

Metode untuk menghapus buku piutang pendapatan asli daerah lainnya ini menggunakan metode langsung tanpa membentuk penyisihan piutang tidak tertagih jika probabilitas tidak tertagihnya piutang sangat kecil dan/atau tidak material. Artinya bahwa kemungkinan tidak tertagihnya piutang tidak dicadangkan terlebih dahulu melainkan langsung dihapuskan berdasarkan Keputusan Bupati Kampar.

Khusus untuk piutang pendapatan denda pajak khususnya untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengukurannya menggunakan konsep nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Pertimbangannya adalah probabilitas tidak terbayarnya denda pajak ini cukup besar sehingga perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih agar menghasilkan nilai piutang yang lebih realistis. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

#### **Akuntansi Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah**

Pencatatan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang sah dalam neraca masuk dalam kategori jurnal penyesuaian dengan menggunakan format jurnal umum. Dasar pencatatan piutang ke dalam jurnal adalah bukti memorial yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid.

#### **1) Pencatatan atas Timbulnya Piutang**

Berikut ini diberikan ilustrasi pencatatan timbulnya piutang dividen yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kampar:

Pada tanggal 25 Juni 2021 telah dilakukan RUPS PT. Bank Riau Kepri. Hasil RUPS memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar berhak mendapatkan dividen tunai sebesar Rp 30.000.000,00. Dividen tersebut dibagikan secara bertahap, tahap pertama dividen akan dibayarkan pada tanggal 15 November 2021 sebesar Rp14.000.000,00 dan sisanya akan dibayarkan pada tanggal 20 Pebruari 2022. Berdasarkan transaksi tersebut, dividen yang menjadi piutang adalah sebesar Rp16.000.000,00.

#### **2) Reklasifikasi Piutang yang Jatuh Tempo dalam 1 (satu) Tahun**

Untuk Piutang TGR dan piutang angsuran/cicilan penjualan, setiap akhir periode akuntansi dilakukan reklasifikasi atas piutang yang jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Berikut ini diberikan contoh: Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah Kabupaten Kampar telah menjual rumah beserta tanah yang



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

telah dibangun dalam bentuk perumahan. Seluruh unit rumah yang dibangun telah terjual dengan sistem angsuran selama 8 tahun.

- 3) Pencatatan Piutang Pendapatan Denda Pajak dilakukan sebagaimana pencatatan untuk Piutang Pajak. Artinya bahwa penyajian piutang pendapatan denda PKB sebesar *net realizable value*-nya yaitu piutang bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih, sedangkan piutang pendapatan denda BBNKB, PBBKB, air permukaan dan pajak ABT disajikan secara bruto tanpa ada penyisihan piutang tak tertagih.

- 4) Jurnal Balik atas Piutang

Pada awal tahun periode berikutnya dilakukan jurnal balik atas piutang yang telah diakui pada akhir periode sebelumnya. Jurnal balik ini hanya dilakukan pada piutang lancar (piutang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, atau dengan kata lain piutang yang masuk dalam kategori aset lancar). Piutang yang bersifat jangka panjang tidak dilakukan jurnal balik

#### **Penyajian Piutang di Neraca**

Piutang pendapatan asli daerah lain yang sah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam kelompok aset lancar, sedangkan piutang yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam aset lainnya. Penyajian piutang pendapatan asli daerah lain yang sah di neraca disajikan secara bruto dan diikuti dengan penyisihan piutang tidak tertagih agar menghasilkan *net realizable value*.

#### **Pengungkapan di CaLK**

Pengungkapan yang perlu dituangkan dalam CaLK agar memberikan informasi yang memadai adalah:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran masing-masing jenis piutang;
- 2) Piutang dividen dirinci sesuai dengan perusahaan yang membagikan dividen;
- 3) Piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, TGR, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, piutang sewa dan piutang dari angsuran / cicilan penjualan dirinci berdasarkan nama debiturnya;
- 4) Menjelaskan tindakan yang telah dilakukan dalam rangka melakukan penagihan piutang; dan
- 5) Piutang yang telah dihapuskan.

#### **KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG TRANSFER**

PSAP Nomor 1 menyebutkan bahwa piutang transfer adalah "hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan". Berdasarkan pengertian tersebut, piutang transfer dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat penyusunan laporan keuangan suatu transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer. Dalam taksonomi pemerintah daerah, piutang transfer ini utamanya bersumber dari dana perimbangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

### **KOMPONEN PIUTANG TRANSFER**

Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, transfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Kampar terdiri dari:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- 2) Piutang Bagi Hasil Pajak;
- 3) Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak;
- 4) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 5) Piutang Dana Alokasi Khusus; dan
- 6) Piutang Dana Penyesuaian.

### **DEFINISI**

Dana bagi hasil pajak/bukan pajak adalah dana perimbangan yang merupakan alokasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Kampar dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

### **PENGAKUAN**

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) pajak/bukan pajak utamanya bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Kampar. Dalam pelaksanaannya, DBH ditransfer berdasarkan realisasi penerimaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak Pemerintah Kabupaten Kampar yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH.

Piutang DAU merupakan dana dengan kepastian penerimaan Pemerintah Kabupaten Kampar yang paling tinggi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menetapkan bahwa jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN yang kemudian dialokasikan untuk masing-masing pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pencairan alokasi DAU tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar menerima 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari total alokasi DAU untuk Pemerintah Kabupaten Kampar.

Pada akhir tahun anggaran apabila masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer ke rekening kas daerah, yaitu sebesar perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dicatat sebagai piutang DAU apabila pemerintah pusat mengakuinya



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

dan menerbitkan dokumen keputusan DAU yang terutang.

Piutang DAK timbul ketika Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengirimkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya namun Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Kampar adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.

Pengakuan piutang dana penyesuaian disesuaikan dengan mekanisme penyaluran dana tersebut dari pemerintah pusat. Bila pencairannya dilakukan secara bertahap tanpa ada persyaratan tertentu, maka sisa dana yang belum ditransfer akan diakui sebagai piutang dana penyesuaian. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan tertentu, maka piutang dana penyesuaian diakui jika persyaratan sudah dipenuhi namun belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.

#### **PENGUKURAN**

Piutang dana bagi hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

- 1) Piutang DAU dan dana penyesuaian dinilai sebesar jumlah yang belum diterima dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat.
- 2) Piutang DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

#### **PENGHAPUS BUKUAN**

Penghapus bukuan piutang transfer ini ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapus bukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas piutang. Atas penghapus bukuan piutang ini perlu dicatat secara *ekstra comptabel* untuk mencatat piutang yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapus tagihan atas piutang secara otomatis akan terjadi penghapus bukuan.

Penghapus bukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptabel*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya.

Metode untuk menghapus buku piutang transfer ini menggunakan metode langsung. Untuk metode penghapusan langsung, kerugian piutang baru diakui pada waktu piutang dihapuskan dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.

#### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

##### **Akuntansi Piutang Transfer**

Dasar pencatatan ke dalam jurnal adalah bukti memorial yang diterbitkan oleh PPKD.

##### **Penyajian di Neraca**

Penyajian dalam neraca untuk piutang transfer tidak memasukkan penyisihan piutang tidak tertagih karena metode penghapusan piutang yang dilakukan adalah metode langsung.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

### **Pengungkapan di CaLK**

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang transfer harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi yang dimaksudkan adalah :

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis piutang dan saldonya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang.

### **PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG**

Dalam pengelolaan piutang dimungkinkan adanya penghapusan, penghapusan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Tujuan penghapusan piutang adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat.

Piutang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak. Penghapusan bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Karena upaya penagihan masih tetap dilakukan, maka atas piutang yang telah dihapus secara bersyarat ini masih dicatat secara *ekstra comptable*. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih.

Prosedur penghapusan piutang merupakan uraian pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

- 1) Fungsi/pihak yang terkait;
- 2) Dokumen yang digunakan;
- 3) Catatan yang digunakan; dan
- 4) Deskripsi Prosedur.

### **FUNGSI/PIHAK YANG TERKAIT**

Fungsi/pihak yang terkait dalam prosedur penghapusan piutang adalah :

- 1) Fungsi Pengelola Piutang pada OPD terkait
  - a) Membuat daftar umur piutang untuk piutang umum;
  - b) Membuat taksiran kerugian piutang sesuai dengan kebijakan akuntansi piutang;
  - c) Mengusulkan piutang untuk ditetapkan menjadi piutang tak tertagih; dan
  - d) Mengadministrasikan dokumen piutang.
- 2) PPK-SKPD
  - a) Memverifikasi usulan penghapusan piutang; dan
  - b) Bertugas membuat draft Surat Usulan Penghapusan Piutang.
- 3) Kepala OPD
  - a) Menetapkan piutang tak tertagih; dan
  - b) Mengusulkan piutang tak tertagih untuk dihapus.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

- 4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - a) Membentuk Tim Penghapusan Piutang yang terdiri dari:
    - (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    - (2) Biro Keuangan;
    - (3) Inspektorat Kabupaten Kampar; dan
    - (4) Biro Hukum Sekretariat Daerah .
  - b) Melakukan analisa piutang tak tertagih untuk dihapus; dan
  - c) Menyampaikan hasil analisa kepada Bupati untuk ditetapkan.

#### **DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

Dokumen yang digunakan dalam prosedur penghapusan piutang adalah :

- 1) Surat usulan penghapusan piutang; dan
- 2) Surat keputusan Bupati tentang penghapusan piutang.

#### **CATATAN YANG DIGUNAKAN**

Catatan yang digunakan dalam prosedur penghapusan piutang adalah :

- 1) Daftar Umur Piutang  
Merupakan daftar yang menunjukkan pengelompokan piutang yang menunggak berdasarkan jangka waktu tertentu.
- 2) Daftar piutang tak tertagih  
Merupakan daftar yang menunjukkan jumlah piutang yang tak tertagih.
- 3) Daftar Piutang yang dihapus  
Merupakan daftar yang menunjukkan jumlah piutang yang dihapus.

#### **DESKRIPSI PROSEDUR**

##### **Deskripsi Prosedur Penghapusan Secara Bersyarat.**

Prosedur penghapusan piutang secara bersyarat adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan data terkait dengan penanggung utang, fungsi pengelola piutang menentukan besarnya piutang tak tertagih dengan membuat daftar piutang tak tertagih yang disertai dengan Berita Acara Penagihan.
- 2) Daftar Piutang Tak Tertagih disampaikan kepada Kepala OPD melalui PPK-SKPD. Sebelum disampaikan kepada Kepala OPD, Daftar Piutang Tak Tertagih terlebih dahulu diverifikasi oleh fungsi akuntansi di PPK-SKPD.
- 3) Berdasarkan hasil verifikasi, PPK-SKPD menyusun Surat Usulan Penghapusan Piutang dan menyerahkannya kepada Kepala OPD dengan dilampiri Daftar Piutang Tak Tertagih.
- 4) Kepala OPD mengesahkan Daftar Piutang Tak Tertagih dan menandatangani Surat Usulan Penghapusan Piutang.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

- 5) Setelah disahkan, Daftar Piutang Tak Tertagih dilampiri dengan dokumen pendukung beserta alasan penghapusan piutang disampaikan kepada Tim Penghapusan Piutang untuk dianalisis dan diberikan pertimbangan.
- 6) Tim Penghapusan Piutang menganalisis daftar piutang tak tertagih dan membuat draft Surat Keputusan Penghapusan Piutang sebagai dasar penghapusan secara bersyarat.
- 7) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menyampaikan draft Surat Keputusan Penghapusan Piutang kepada Bupati untuk disahkan.
- 8) Penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 9) Dalam hal piutang dinyatakan dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- 10) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang, fungsi akuntansi di PPK-SKPD melakukan penjurnalan untuk mengurangi jumlah piutang yang ada di neraca.

**Deskripsi Prosedur Penghapusan Secara Mutlak**

Prosedur penghapusan piutang secara mutlak adalah sebagai berikut :

- 1) Piutang yang telah dihapus secara bersyarat dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan secara mutlak jika:
  - a) Setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau sejak diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang Pajak Daerah;
  - b) Obyek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan lagi;
  - c) Obyek pajak hilang dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang;
  - d) Subyek pajak menutup usaha dan/atau subyek pajak meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris/penanggung jawabnya;
  - e) Obyek pajak dilaporkan telah dijual oleh pemilik lama;
  - f) Obyek pajak dengan alamat tidak jelas berdasarkan hasil penelitian setempat/lapangan;
  - g) Obyek pajak yang nomor registrasinya telah dicabut oleh pihak instansi berwenang;
  - h) Setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi atau sejak diterbitkannya surat teguran;
  - i) Obyek retribusi secara nyata tidak lagi dimanfaatkan atau difungsikan oleh subyek retribusi berdasarkan hasil penelitian setempat/lapangan; dan



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

- j) Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
- 2) PPK-SKPD melakukan analisa piutang yang diusulkan untuk dihapuskan, jika memenuhi salah satu persyaratan diatas maka PPK-SKPD akan membuat daftar usulan penghapusan piutang secara mutlak.
- 3) Daftar usulan penghapusan piutang secara mutlak disampaikan kepada Tim Penghapusan Piutang setelah ditandatangani oleh Kepala OPD.
- 4) Tim Penghapusan Piutang akan memverifikasi daftar usulan penghapusan piutang secara mutlak. Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menyampaikan Surat Keputusan Penghapusan Piutang secara mutlak kepada Bupati untuk disahkan.
- 5) Penghapusan secara mutlak ditetapkan oleh Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 6) Dalam hal piutang dinyatakan dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- 7) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang secara mutlak, fungsi piutang di OPD mencatatnya secara *ekstra comptabel* untuk menghapusstaghikan piutang pajak/retribusi/pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

#### **PENUTUP**

Kebijakan akuntansi piutang yang dibahas dalam peraturan ini adalah kebijakan akuntansi piutang non BLUD. Penyusunan kebijakan akuntansi piutang ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis SAP Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang.

Demikian Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Kabupaten Kampar disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta efisiensi, efektifitas serta tertib administrasi.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**5.1.1 Pendapatan**

Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp2.734.805.625.683,08 atau 97,47% dari target pendapatan sebesar Rp2.805.811.127.502,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp307.302.040.130,37 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.427.503.585.552,71 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1 Pendapatan**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaiakan/(Penurunan)	%
Pendapatan Daerah	2.734.805.625.683,08	2.427.503.585.552,71	307.302.040.130,37	88,76
<b>Jumlah</b>	<b>2.734.805.625.683,08</b>	<b>2.427.503.585.552,71</b>	<b>307.302.040.130,37</b>	<b>88,76</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Asli Daerah	285.540.731.945,00	298.626.546.420,08	104,58	260.416.048.442,71
Pendapatan Transfer	2.518.170.395.557,00	2.434.058.392.989,00	96,66	2.165.922.257.436,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	2.100.000.000,00	2.120.686.274,00	100,00	1.165.279.674,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.805.811.127.502,00</b>	<b>2.734.805.625.683,08</b>	<b>97,47</b>	<b>2.427.503.585.552,71</b>

**5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp298.626.546.420,08 atau 104,58% dari target pendapatan sebesar Rp285.540.731.945,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp38.210.497.977,37 dibandingkan realisasi Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp260.416.048.442,71 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaiakan/(Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah	298.626.546.420,08	260.416.048.442,71	38.210.497.977,37	87,20
<b>Jumlah</b>	<b>298.626.546.420,08</b>	<b>260.416.048.442,71</b>	<b>38.210.497.977,37</b>	<b>87,20</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Daerah	156.820.690.967,00	153.800.441.758,00	98,07	142.366.052.600,00
Retribusi Daerah	13.505.450.000,00	12.315.324.270,00	91,19	8.892.742.152,31
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.273.308.815,00	36.299.309.804,00	155,97	23.550.128.300,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	91.941.282.163,00	96.211.470.588,08	104,64	85.607.125.390,40
<b>Jumlah</b>	<b>285.540.731.945,00</b>	<b>298.626.546.420,08</b>	<b>104,58</b>	<b>260.416.048.442,71</b>

**5.1.1.1.1 Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan undang-undang. Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp153.800.441.758,00 atau 98,07% dari target pendapatan sebesar Rp156.820.690.967,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp11.434.389.158,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp142.366.052.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1 Pajak Daerah**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Daerah	153.800.441.758,00	142.366.052.600,00	11.434.389.158,00	92,57
<b>Jumlah</b>	<b>153.800.441.758,00</b>	<b>142.366.052.600,00</b>	<b>11.434.389.158,00</b>	<b>92,57</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Hotel	1.712.100.000,00	1.130.726.006,00	66,04	1.317.838.134,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.647.597.191,00	7.650.219.886,00	100,03	7.547.202.062,00
Pajak Hiburan	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.150.000.000,00	805.846.853,00	70,07	928.408.797,00
Pajak Penerangan Jalan PLN	77.123.700.000,00	79.019.804.970,00	102,46	74.031.467.239,00
Pajak Parkir	180.500.000,00	76.038.500,00	42,13	107.066.250,00
Pajak Air Tanah	1.805.000.000,00	1.832.497.464,00	101,52	1.741.199.635,00
Pajak Sarang Burung Walet	102.000.000,00	16.525.000,00	16,20	22.840.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.235.000.000,00	6.263.533.561,00	100,46	10.716.512.129,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	24.651.298.704,00	21.765.548.825,00	88,29	15.031.858.569,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	36.213.495.072,00	35.225.200.693,00	97,27	30.921.659.785,00
<b>Jumlah</b>	<b>156.820.690.967,00</b>	<b>153.800.441.758,00</b>	<b>98,07</b>	<b>142.366.052.600,00</b>

**Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan:**

- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

**5.1.1.1.1 Pajak Hotel**

Realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 sebesar Rp1.130.726.006,00 atau 66,04% dari target pendapatan sebesar Rp1.712.100.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp187.112.128,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.317.838.134,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1 Pajak Hotel**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Hotel	1.130.726.006,00	1.317.838.134,00	(187.112.128,00)	116,55
Jumlah	1.130.726.006,00	1.317.838.134,00	(187.112.128,00)	116,55

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Hotel	1.712.100.000,00	1.130.726.006,00	66,04	1.317.838.134,00
Jumlah	1.712.100.000,00	1.130.726.006,00	66,04	1.317.838.134,00

**5.1.1.1.2 Pajak Restoran**

Realisasi Pajak Restoran Tahun 2023 sebesar Rp7.650.219.886,00 atau 100,03% dari target pendapatan sebesar Rp7.647.597.191,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp103.017.824,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp7.547.202.062,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.2 Pajak Restoran**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.650.219.886,00	7.547.202.062,00	103.017.824,00	98,65
Jumlah	7.650.219.886,00	7.547.202.062,00	103.017.824,00	98,65

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.647.597.191,00	7.650.219.886,00	100,03	7.547.202.062,00
Jumlah	7.647.597.191,00	7.650.219.886,00	100,03	7.547.202.062,00

Kenaikan Realisasi Pajak Restoran pada Tahun 2023 disebabkan karena Bapenda aktif turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan daerah kepada wajib pajak melalui pembentukan tim percepatan PAD secara terpadu (lintas sektor).

**5.1.1.1.3 Pajak Hiburan**

Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 sebesar Rp14.500.000,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp14.500.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.3 Pajak Hiburan**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Hiburan	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00
Jumlah	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Hiburan	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame Tahun 2023 sebesar Rp805.846.853,00 atau 70,07% dari target pendapatan sebesar Rp1.150.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp122.561.944,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp928.408.797,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Reklame	805.846.853,00	928.408.797,00	(122.561.944,00)	115,21
<b>Jumlah</b>	<b>805.846.853,00</b>	<b>928.408.797,00</b>	<b>(122.561.944,00)</b>	<b>115,21</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Reklame	1.150.000.000,00	805.846.853,00	70,07	928.408.797,00
Papan/Billboard/Videotron/Megatron				
<b>Jumlah</b>	<b>1.150.000.000,00</b>	<b>805.846.853,00</b>	<b>70,07</b>	<b>928.408.797,00</b>

#### 5.1.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 sebesar Rp79.019.804.970,00 atau 102,46% dari target pendapatan sebesar Rp77.123.700.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.988.337.731,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp74.031.467.239,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Penerangan Jalan	79.019.804.970,00	74.031.467.239,00	4.988.337.731,00	93,69
<b>Jumlah</b>	<b>79.019.804.970,00</b>	<b>74.031.467.239,00</b>	<b>4.988.337.731,00</b>	<b>93,69</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	77.123.700.000,00	79.019.804.970,00	102,46	74.031.467.239,00
<b>Jumlah</b>	<b>77.123.700.000,00</b>	<b>79.019.804.970,00</b>	<b>102,46</b>	<b>74.031.467.239,00</b>

Kenaikan Realisasi Pajak Penerangan Jalan disebabkan karena Tim Percepatan PAD terus melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kampar yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaga dalam melakukan produksi serta dengan melakukan pendataan terhadap wajib pajak yang berada pada sub urban (perumahan-perumahan yang berada di wilayah perbatasan dengan Kota Pekanbaru).



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**5.1.1.1.1.6 Pajak Parkir**

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2023 sebesar Rp76.038.500,00 atau 42,13% dari target pendapatan sebesar Rp180.500.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp31.027.750,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp107.066.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1.6 Pajak Parkir**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Parkir	76.038.500,00	107.066.250,00	(31.027.750,00)	140,81
Jumlah	76.038.500,00	107.066.250,00	(31.027.750,00)	140,81

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Parkir	180.500.000,00	76.038.500,00	42,13	107.066.250,00
Jumlah	180.500.000,00	76.038.500,00	42,13	107.066.250,00

Realisasi Pajak Parkir pada tahun 2023 hanya sebesar 42,13% dari anggarannya disebabkan karena terbatasnya objek parkir yang berada di wilayah Kabupaten Kampar, yaitu hanya (Labersa, Boombara dan Ramayana Bangkinang).

**5.1.1.1.1.7 Pajak Air Tanah**

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2023 sebesar Rp1.832.497.464,00 atau 101,52% dari target pendapatan sebesar Rp1.805.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp91.297.829,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.741.199.635,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1.7 Pajak Air Tanah**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Air Tanah	1.832.497.464,00	1.741.199.635,00	91.297.829,00	95,02
Jumlah	1.832.497.464,00	1.741.199.635,00	91.297.829,00	95,02

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Air Tanah	1.805.000.000,00	1.832.497.464,00	101,52	1.741.199.635,00
Jumlah	1.805.000.000,00	1.832.497.464,00	101,52	1.741.199.635,00

**5.1.1.1.1.8 Pajak Sarang Burung Walet**

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2023 sebesar Rp16.525.000,00 atau 16,20% dari target pendapatan sebesar Rp102.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp6.315.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp22.840.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1.8 Pajak Sarang Burung Walet**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Sarang Burung Walet	16.525.000,00	22.840.000,00	(6.315.000,00)	138,21
Jumlah	16.525.000,00	22.840.000,00	(6.315.000,00)	138,21

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Sarang Burung Walet	102.000.000,00	16.525.000,00	16,20	22.840.000,00
Jumlah	102.000.000,00	16.525.000,00	16,20	22.840.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet tahun 2023 hanya sebesar 16,20% dari target pendapatan disebabkan karena rendahnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan omzet, serta masih banyak pengusaha walet yang belum memproduksi sehingga tidak dapat dikenakan pajak. Saat ini, Pemerintah Daerah masih melakukan pola pendekatan secara persuasif. Namun, sehubungan dengan telah dilakukannya penandatanganan MOU antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dengan Kejaksaan Negeri Bangkinang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar akan melakukan langkah tegas agar wajib pajak Sarang Burung Walet dapat membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya dalam rangka optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah termasuk Pajak Sarang Burung Walet.

**5.1.1.1.1.9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 sebesar Rp6.263.533.561,00 atau 100,46% dari target pendapatan sebesar Rp6.235.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp4.452.978.568,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp10.716.512.129,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.1.9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.263.533.561,00	10.716.512.129,00	(4.452.978.568,00)	171,09
Jumlah	6.263.533.561,00	10.716.512.129,00	(4.452.978.568,00)	171,09

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	6.235.000.000,00	6.263.533.561,00	100,46	10.716.512.129,00
Jumlah	6.235.000.000,00	6.263.533.561,00	100,46	10.716.512.129,00

**5.1.1.1.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**

Realisasi (PBBP2) Tahun 2023 sebesar Rp21.765.548.825,00 atau 88,29% dari target pendapatan sebesar Rp24.651.298.704,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp6.733.690.256,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp15.031.858.569,00 dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**Tabel 5.1.1.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	21.765.548.825,00	15.031.858.569,00	6.733.690.256,00	69,06
<b>Jumlah</b>	<b>21.765.548.825,00</b>	<b>15.031.858.569,00</b>	<b>6.733.690.256,00</b>	<b>69,06</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Bumi dan Bangunan	24.651.298.704,00	21.765.548.825,00	88,29	15.031.858.569,00
<b>Jumlah</b>	<b>24.651.298.704,00</b>	<b>21.765.548.825,00</b>	<b>88,29</b>	<b>15.031.858.569,00</b>

**5.1.1.1.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Realisasi (BPHTB) Tahun 2023 sebesar Rp35.225.200.693,00 atau 97,27% dari target pendapatan sebesar Rp36.213.495.072,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.303.540.908,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp30.921.659.785,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	35.225.200.693,00	30.921.659.785,00	4.303.540.908,00	87,78
<b>Jumlah</b>	<b>35.225.200.693,00</b>	<b>30.921.659.785,00</b>	<b>4.303.540.908,00</b>	<b>87,78</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
BPHTB-Pemindahan Hak	36.213.495.072,00	35.225.200.693,00	97,27	30.921.659.785,00
<b>Jumlah</b>	<b>36.213.495.072,00</b>	<b>35.225.200.693,00</b>	<b>97,27</b>	<b>30.921.659.785,00</b>

**5.1.1.1.2 Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dasar pungutan retribusi daerah tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Peraturan Bupati Kampar Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Umum.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp12.315.324.270,00 atau 91,19% dari target pendapatan sebesar Rp13.505.450.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.422.582.117,69 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp8.892.742.152,31 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.2 Retribusi Daerah**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Daerah	12.315.324.270,00	8.892.742.152,31	3.422.582.117,69	72,21
<b>Jumlah</b>	<b>12.315.324.270,00</b>	<b>8.892.742.152,31</b>	<b>3.422.582.117,69</b>	<b>72,21</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Retribusi Jasa Umum	3.589.450.000,00	3.953.298.500,00	110,14	3.920.484.000,00
Retribusi Jasa Usaha	1.916.000.000,00	2.026.034.770,00	105,74	1.674.410.940,00
Retribusi Perizinan Tertentu	8.000.000.000,00	6.335.991.000,00	79,20	3.297.847.212,31
<b>Jumlah</b>	<b>13.505.450.000,00</b>	<b>12.315.324.270,00</b>	<b>91,19</b>	<b>8.892.742.152,31</b>

#### 5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 sebesar Rp3.953.298.500,00 atau 110,14% dari target pendapatan sebesar Rp3.589.450.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp32.814.500,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.920.484.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Jasa Umum	3.953.298.500,00	3.920.484.000,00	32.814.500,00	99,17
<b>Jumlah</b>	<b>3.953.298.500,00</b>	<b>3.920.484.000,00</b>	<b>32.814.500,00</b>	<b>99,17</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Retribusi Pelayanan Kesehatan	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	15.000.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	248.000.000,00	235.487.500,00	94,95	240.300.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	350.000.000,00	545.700.000,00	155,91	298.250.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	54.000.000,00	84.571.000,00	156,61	76.864.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	600.000.000,00	621.460.000,00	77,68	712.626.000,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	35.000.000,00	37.900.000,00	108,29	35.051.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.000.000,00	15.400.000,00	24,06	63.340.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	700.000.000,00	956.330.000,00	136,62	939.035.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.300.950.000,00	1.418.950.000,00	109,07	1.540.018.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.589.450.000,00</b>	<b>3.953.298.500,00</b>	<b>110,14</b>	<b>3.920.484.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha**

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 sebesar Rp2.026.034.770,00 atau 105,74% dari target pendapatan sebesar Rp1.916.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp351.623.830,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.674.410.940,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Jasa Usaha	2.026.034.770,00	1.674.410.940,00	351.623.830,00	82,64
<b>Jumlah</b>	<b>2.026.034.770,00</b>	<b>1.674.410.940,00</b>	<b>351.623.830,00</b>	<b>82,64</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.079.500.000,00	1.442.407.270,00	133,62	872.182.940,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	66.000.000,00	42.850.000,00	64,92	56.650.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.000.000,00	142.850.000,00	57,14	167.470.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	520.500.000,00	397.927.500,00	76,45	578.108.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.916.000.000,00</b>	<b>2.026.034.770,00</b>	<b>105,74</b>	<b>1.674.410.940,00</b>

**5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu**

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 sebesar Rp6.335.991.000,00 atau 79,20% dari target pendapatan sebesar Rp8.000.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.038.143.787,69 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.297.847.212,31 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Perizinan Tertentu	6.335.991.000,00	3.297.847.212,31	3.038.143.787,69	52,05
<b>Jumlah</b>	<b>6.335.991.000,00</b>	<b>3.297.847.212,31</b>	<b>3.038.143.787,69</b>	<b>52,05</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	3.297.847.212,31
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.000.000.000,00	6.335.991.000,00	79,20	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.000.000.000,00</b>	<b>6.335.991.000,00</b>	<b>79,20</b>	<b>3.297.847.212,31</b>

**5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah yang menjadi deviden bagi pemerintah daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp36.299.309.804,00 atau 155,97% dari target pendapatan sebesar Rp23.273.308.815,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp12.749.181.504,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp23.550.128.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.299.309.804,00	23.550.128.300,00	12.749.181.504,00	64,88
<b>Jumlah</b>	<b>36.299.309.804,00</b>	<b>23.550.128.300,00</b>	<b>12.749.181.504,00</b>	<b>64,88</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	20.978.657.850,00	21.468.259.695,00	102,33	21.895.395.040,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bumi Siak Pusako)	1.555.000.000,00	14.831.050.109,00	953,77	1.654.733.260,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	589.650.965,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.273.308.815,00</b>	<b>36.299.309.804,00</b>	<b>155,97</b>	<b>23.550.128.300,00</b>

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp36.299.309.804,00 terdiri dari:

- BRK Syariah sebesar Rp21.468.259.695,00 dengan RUPS Tanggal 28 April 2023.
- BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris sebesar Rp420.246.440,00 dengan RUPS Tanggal 30 Mei 2023.
- PT Bumi Siak Pusako sebesar Rp14.410.803.669,00 dengan RUPS Tanggal 15 November 2023.

#### **5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp96.211.470.588,08 atau 104,64% dari target pendapatan sebesar Rp91.941.282.163,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp10.604.345.197,68 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp85.607.125.390,40 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	96.211.470.588,08	85.607.125.390,40	10.604.345.197,68	88,98
Jumlah	96.211.470.588,08	85.607.125.390,40	10.604.345.197,68	88,98

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	5.200.000,00	100,00	714.764.500,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	35.000.000,00	17,50	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Jasa Giro	0,00	1.097.368.741,00	100,00	1.159.879.263,00
Pendapatan Bunga	150.000.000,00	292.666.909,00	195,11	328.016.317,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.500.000.000,00	819.225.861,00	32,77	614.021.956,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	66.990.790,38	100,00	153.950.099,55
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	447.250,00	100,00	20.987.287,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	202.527.700,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	477.268.379,00	100,00	517.831.580,00
Pendapatan BLUD	88.791.282.163,00	90.679.753.010,61	102,13	77.541.444.727,87
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00	154.242.052,23	51,41	317.601.572,74
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	2.583.307.574,86	100,00	4.011.100.387,24
Jumlah	91.941.282.163,00	96.211.470.588,08	104,64	85.607.125.390,40

#### 5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil penjualan tanah, hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan gedung dan bangunan, hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi, hasil penjualan aset tetap lainnya, hasil penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang, serta hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud.

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp5.200.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp709.564.500,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp714.764.500,00 dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**Tabel 5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.200.000,00	714.764.500,00	(709.564.500,00)	13.745,47
<b>Jumlah</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>714.764.500,00</b>	<b>(709.564.500,00)</b>	<b>13.745,47</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	714.764.500,00
Hasil Penjualan Alat Kantor dan	0,00	5.200.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>714.764.500,00</b>

**5.1.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil penjualan tanah, hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan gedung dan bangunan, hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi, hasil penjualan aset tetap lainnya, hasil penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang, serta hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud.

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp35.000.000,00 atau 17,50% dari target pendapatan sebesar Rp200.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp35.000.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Hasil dari Bangun Guna Serah	200.000.000,00	35.000.000,00	17,50	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>17,50</b>	<b>0,00</b>

**5.1.1.1.4.3 Hasil Kerja Sama Daerah**

Hasil Kerja Sama Daerah digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil kerja sama daerah.

Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp25.000.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp25.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.3 Hasil Kerja Sama Daerah**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	<b>0,00</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**5.1.1.1.4.4 Jasa Giro**

Realisasi Jasa Giro Tahun 2023 sebesar Rp1.097.368.741,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp62.510.522,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.159.879.263,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.4 Jasa Giro**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jasa Giro	1.097.368.741,00	1.159.879.263,00	(62.510.522,00)	105,70
Jumlah	1.097.368.741,00	1.159.879.263,00	(62.510.522,00)	105,70

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Jasa Giro pada Kas Daerah	0,00	1.097.368.741,00	100,00	1.159.879.263,00
Jumlah	0,00	1.097.368.741,00	100,00	1.159.879.263,00

**5.1.1.1.4.5 Pendapatan Bunga**

Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2023 sebesar Rp292.666.909,00 atau 195,11% dari target pendapatan sebesar Rp150.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp35.349.408,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp328.016.317,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.5 Pendapatan Bunga**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Bunga	292.666.909,00	328.016.317,00	(35.349.408,00)	112,08
Jumlah	292.666.909,00	328.016.317,00	(35.349.408,00)	112,08

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	150.000.000,00	292.666.909,00	195,11	328.016.317,00
Jumlah	150.000.000,00	292.666.909,00	195,11	328.016.317,00

**5.1.1.1.4.6 Penerimaan Komisi , Potongan, atau Bentuk Lain**

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2023 sebesar Rp819.225.881,00 atau 32,77% dari target pendapatan sebesar Rp2.500.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp205.203.925,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp614.021.956,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.6 Penerimaan Komisi , Potongan, atau Bentuk Lain**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	819.225.881,00	614.021.956,00	205.203.925,00	74,95
Jumlah	819.225.881,00	614.021.956,00	205.203.925,00	74,95



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.500.000.000,00	819.225.881,00	32,77	614.021.956,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>819.225.881,00</b>	<b>32,77</b>	<b>614.021.956,00</b>

**5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2023 sebesar Rp66.990.790,38 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp86.959.309,17 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp153.950.099,55 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	66.990.790,38	153.950.099,55	(86.959.309,17)	229,81
<b>Jumlah</b>	<b>66.990.790,38</b>	<b>153.950.099,55</b>	<b>(86.959.309,17)</b>	<b>229,81</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	66.990.790,38	100,00	153.950.099,55
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>66.990.790,38</b>	<b>100,00</b>	<b>153.950.099,55</b>

**5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp447.250,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp20.540.037,00) dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp20.987.287,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda Pajak Daerah**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Denda Pajak Daerah	447.250,00	20.987.287,00	(20.540.037,00)	4.692,52
<b>Jumlah</b>	<b>447.250,00</b>	<b>20.987.287,00</b>	<b>(20.540.037,00)</b>	<b>4.692,52</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00	197.250,00	100,00	20.987.287,00
Pendapatan Denda BPHTB- Pemindahan Hak	0,00	250.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>447.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.987.287,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**5.1.1.1.4.9 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan**

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp202.527.700,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp202.527.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.9 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	202.527.700,00	(202.527.700,00)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>202.527.700,00</b>	<b>(202.527.700,00)</b>	<b>0,00</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	202.527.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.527.700,00</b>

**5.1.1.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian**

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023 sebesar Rp477.268.379,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp40.563.201,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp517.831.580,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan dari Pengembalian	477.268.379,00	517.831.580,00	(40.563.201,00)	108,50
<b>Jumlah</b>	<b>477.268.379,00</b>	<b>517.831.580,00</b>	<b>(40.563.201,00)</b>	<b>108,50</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	477.268.379,00	100,00	510.780.780,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	7.050.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>477.268.379,00</b>	<b>100,00</b>	<b>517.831.580,00</b>

**5.1.1.1.4.11 Pendapatan BLUD**

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2023 sebesar Rp90.679.753.010,61 atau 100,94% dari target pendapatan sebesar Rp89.834.503.809,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp13.138.308.282,74 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp77.541.444.727,87 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.11 Pendapatan BLUD**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan BLUD	90.679.753.010,61	77.541.444.727,87	13.138.308.282,74	85,51
<b>Jumlah</b>	<b>90.679.753.010,61</b>	<b>77.541.444.727,87</b>	<b>13.138.308.282,74</b>	<b>85,51</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uralan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan BLUD RSUD Bangkinang	56.481.399.848,00	62.820.304.308,61	111,22	54.989.793.782,49
Pendapatan BLUD Dinas Kesehatan	33.353.103.963,00	27.859.448.702,00	83,53	22.551.650.945,38
<b>Jumlah</b>	<b>89.834.503.809,00</b>	<b>90.679.753.010,61</b>	<b>100,94</b>	<b>77.541.444.727,87</b>

**Penjelasan Pendapatan BLUD Dinas Kesehatan:**

Uralan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Puskesmas Salo	1.300.000.000,00	1.170.812.741,00	90,06	839.243.000,00
Puskesmas Sawah	1.289.421.548,00	1.200.473.050,00	94,57	871.415.750,00
Puskesmas Tapung	989.261.271,00	948.508.513,00	95,88	705.819.300,00
Puskesmas Petapahan	1.064.800.000,00	734.289.483,00	68,97	699.448.700,00
Puskesmas Pantai Cermin	1.230.728.376,00	899.172.085,00	73,06	695.857.700,00
Puskesmas Gema	474.104.713,00	489.979.027,00	103,35	382.059.200,00
Puskesmas Batu Sasak	376.350.000,00	218.812.867,00	58,14	176.596.200,00
Puskesmas Gunung Sahilan	434.607.555,00	338.601.935,00	77,91	308.463.875,00
Puskesmas Gunung Sari	439.251.000,00	385.226.963,00	87,70	319.867.700,00
Puskesmas Pandau Jaya	1.506.000.000,00	1.026.520.901,00	68,16	788.699.100,00
Puskesmas Kubang Jaya	1.100.000.000,00	904.374.493,00	82,22	676.391.700,00
Puskesmas Pangkalan Baru	706.361.259,00	589.091.150,00	83,40	467.502.300,00
Puskesmas Pantai Raja	951.502.476,00	719.105.524,00	75,58	707.516.500,00
Puskesmas Kota Garo	1.956.527.042,00	1.437.998.556,00	73,50	1.298.741.825,00
Puskesmas Tanah Tinggi	747.132.960,00	721.049.978,00	96,51	528.605.125,00
Puskesmas Suka Ramai	942.597.017,00	819.803.456,00	86,97	647.140.100,00
Puskesmas Sinama Nenek	439.836.994,00	369.356.729,00	83,96	279.441.200,00
Puskesmas Siberuang	890.000.000,00	811.353.249,00	91,16	769.271.900,00
Puskesmas Bangkinang	1.777.480.994,00	1.650.636.786,00	92,86	1.318.502.500,00
Puskesmas Laboy Jaya	1.536.764.978,00	1.400.618.184,00	91,14	1.337.652.000,00
Puskesmas Kuok	1.334.466.092,00	1.042.504.716,00	78,12	762.443.000,00
Puskesmas Air Tiris	2.353.879.270,00	2.225.998.340,00	94,57	1.775.945.500,00
Puskesmas Rumbio	911.957.035,00	717.006.339,00	78,62	659.723.950,00
Puskesmas Kampa	1.355.000.000,00	1.276.855.816,00	94,23	693.536.400,00
Puskesmas Lipat Kain	1.974.664.551,00	1.334.391.252,00	67,57	1.182.738.992,00
Puskesmas Batu Besurat	827.000.000,00	772.631.091,00	93,43	525.837.100,38
Puskesmas Gunung Bungsu	405.769.139,00	340.138.425,00	83,83	414.973.874,00
Puskesmas Pulau Gadang	450.000.000,00	395.028.702,00	87,78	290.773.200,00
Puskesmas Tambang	2.008.931.000,00	1.847.225.790,00	91,95	1.370.460.800,00
Puskesmas Simalinyang	1.076.412.557,00	658.163.895,00	61,14	737.095.600,00
Puskesmas Sungai Pagar	522.316.136,00	413.718.866,00	79,21	319.886.854,00
<b>JUMLAH</b>	<b>33.353.103.963,00</b>	<b>27.859.448.702,00</b>	<b>83,53</b>	<b>22.551.650.945,38</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**5.1.1.1.4.12 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2023 sebesar Rp154.242.052,23 atau 51,41% dari target pendapatan sebesar Rp300.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp163.359.520,51 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp317.601.572,74 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.12 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana	154.242.052,23	317.601.572,74	(163.359.520,51)	205,91
Jumlah	154.242.052,23	317.601.572,74	(163.359.520,51)	205,91

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana	300.000.000,00	154.242.052,23	51,41	317.601.572,74
Jumlah	300.000.000,00	154.242.052,23	51,41	317.601.572,74

**5.1.1.1.4.13 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah**

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp2.583.307.574,86 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.427.792.812,38 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.011.100.387,24 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.1.4.13 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.583.307.574,86	4.011.100.387,24	(1.427.792.812,38)	155,27
Jumlah	2.583.307.574,86	4.011.100.387,24	(1.427.792.812,38)	155,27

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	2.583.307.574,86	100,00	4.011.100.387,24
Jumlah	0,00	2.583.307.574,86	100,00	4.011.100.387,24

**5.1.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN & APBD dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dasar dalam perhitungan pendapatan transfer tersebut berdasarkan Pepres No. 104 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, Pepres No. 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Pepres No. 104 Tahun 2022, dan PMK No. 127/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp2.434.058.392.989,00 atau 96,66% dari target pendapatan sebesar Rp2.518.170.395.557,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp268.136.135.553,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.165.922.257.436,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2. Pendapatan Transfer**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer	2.434.058.392.989,00	2.165.922.257.436,00	268.136.135.553,00	88,98
<b>Jumlah</b>	<b>2.434.058.392.989,00</b>	<b>2.165.922.257.436,00</b>	<b>268.136.135.553,00</b>	<b>88,98</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.221.270.991.417,00	2.133.499.528.840,00	96,05	1.985.226.332.189,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	296.899.404.140,00	300.558.864.149,00	0,00	180.695.925.247,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.518.170.395.557,00</b>	<b>2.434.058.392.989,00</b>	<b>96,66</b>	<b>2.165.922.257.436,00</b>

#### 5.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan Tahun 2023 sebesar Rp2.133.499.528.840,00 atau 96,05% dari target pendapatan sebesar Rp2.221.270.991.417,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp148.273.196.651,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.985.226.332.189,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.133.499.528.840,00	1.985.226.332.189,00	148.273.196.651,00	93,05
<b>Jumlah</b>	<b>2.133.499.528.840,00</b>	<b>1.985.226.332.189,00</b>	<b>148.273.196.651,00</b>	<b>93,05</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dana Perimbangan	1.983.915.009.417,00	1.897.890.486.812,00	95,66	1.764.927.661.865,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	5.205.152.000,00
Dana Desa	231.513.488.000,00	231.442.855.200,00	99,97	215.093.518.324,00
Insentif Fiskal	5.842.494.000,00	4.166.186.828,00	71,31	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.221.270.991.417,00</b>	<b>2.133.499.528.840,00</b>	<b>96,05</b>	<b>1.985.226.332.189,00</b>

#### 5.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No.33 Tahun 2004). Dana Perimbangan ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Lain-Lain, dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, Dana Perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2023 sebesar Rp1.897.890.486.812,00 atau 95,66% dari target pendapatan sebesar Rp1.983.915.009.417,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp132.962.824.947,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.764.927.661.865,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.1 Dana Perimbangan**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Perimbangan	1.897.890.486.812,00	1.764.927.661.865,00	132.962.824.947,00	92,99
<b>Jumlah</b>	<b>1.897.890.486.812,00</b>	<b>1.764.927.661.865,00</b>	<b>132.962.824.947,00</b>	<b>92,99</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	772.847.618.192,00	700.011.657.289,00	90,58	574.829.219.552,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	821.729.594.000,00	821.580.746.999,00	99,98	763.880.955.365,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	29.493.099.000,00	28.407.335.549,00	96,32	126.047.411.232,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	359.844.698.225,00	347.890.746.975,00	96,68	300.170.075.716,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.983.915.009.417,00</b>	<b>1.897.890.486.812,00</b>	<b>95,66</b>	<b>1.764.927.661.865,00</b>

**5.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana DBH merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi DBH Tahun 2023 sebesar Rp700.011.657.289,00 atau 90,58% dari target pendapatan sebesar Rp772.847.618.192,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp125.182.437.737,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp574.829.219.552,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Bagi Hasil (DBH)	700.011.657.289,00	574.829.219.552,00	125.182.437.737,00	82,12
<b>Jumlah</b>	<b>700.011.657.289,00</b>	<b>574.829.219.552,00</b>	<b>125.182.437.737,00</b>	<b>82,12</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	772.847.618.192,00	700.011.657.289,00	90,58	574.829.219.552,00
<b>Jumlah</b>	<b>772.847.618.192,00</b>	<b>700.011.657.289,00</b>	<b>90,58</b>	<b>574.829.219.552,00</b>

**5.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Realisasi Dana Transfer Umum DAU Tahun 2023 sebesar Rp821.580.746.999,00 atau 99,98% dari target pendapatan sebesar Rp821.729.594.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp57.699.791.634,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp763.880.955.365,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Alokasi Umum (DAU)	821.580.746.999,00	763.880.955.365,00	57.699.791.634,00	92,98
<b>Jumlah</b>	<b>821.580.746.999,00</b>	<b>763.880.955.365,00</b>	<b>57.699.791.634,00</b>	<b>92,98</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
DAU	821.729.594.000,00	821.580.746.999,00	99,98	763.880.955.365,00
<b>Jumlah</b>	<b>821.729.594.000,00</b>	<b>821.580.746.999,00</b>	<b>99,98</b>	<b>763.880.955.365,00</b>

**5.1.2.1.1.3 DAK -Fisik**

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi DAK - Fisik Tahun 2023 sebesar Rp28.407.335.549,00 atau 96,32% dari target pendapatan sebesar Rp29.493.099.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp97.640.075.683,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp126.047.411.232,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.1.3 DAK -Fisik**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenalkan/(Penurunan)	%
DAK -Fisik	28.407.335.549,00	126.047.411.232,00	(97.640.075.683,00)	443,71
<b>Jumlah</b>	<b>28.407.335.549,00</b>	<b>126.047.411.232,00</b>	<b>(97.640.075.683,00)</b>	<b>443,71</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.295.878.000,00	1.294.982.000,00	99,93	1.989.439.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	12.799.943.000,00	12.522.227.000,00	97,83	51.546.977.534,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.056.189.000,00	8.013.637.468,00	99,47	6.469.901.200,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	17.670.990.072,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	6.576.489.081,00	0,00	16.169.774.201,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	6.693.217.000,00	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	4.101.620.626,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.598.442.459,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler- Jalan	0,00	0,00	0,00	13.846.304.570,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum- Reguler	0,00	0,00	0,00	8.270.124.870,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	2.383.836.700,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	416.478.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	231.394.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>29.493.099.000,00</b>	<b>28.407.335.549,00</b>	<b>96,32</b>	<b>126.047.411.232,00</b>

#### 5.1.2.1.1.4 DAK -Non Fisik

DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Realisasi DAK - Non Fisik Tahun 2023 sebesar Rp347.890.746.975,00 atau 96,68% dari target pendapatan sebesar Rp359.844.698.225,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp47.720.671.259,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp300.170.075.716,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.1.1.4 DAK -Non Fisik**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
DAK - Non Fisik	347.890.746.975,00	300.170.075.716,00	47.720.671.259,00	86,28
<b>Jumlah</b>	<b>347.890.746.975,00</b>	<b>300.170.075.716,00</b>	<b>47.720.671.259,00</b>	<b>86,28</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
DAK Non Fisik-BOS Reguler	126.813.600.000,00	130.471.612.415,00	102,88	109.685.700.688,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.575.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	161.297.343.000,00	150.807.057.500,00	93,50	143.565.146.290,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.161.250.000,00	1.161.250.000,00	100,00	1.469.518.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.229.879.000,00	5.229.879.000,00	100,00	4.131.815.760,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	11.433.000.000,00	11.298.536.000,00	98,82	10.214.710.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.203.000.000,00	3.203.000.000,00	100,00	2.270.700.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	40.340.790.000,00	43.074.619.904,00	106,78	27.443.327.388,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.146.044.069,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	367.252.980,00	367.252.980,00	100,00	397.200.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	323.666.000,00	323.666.000,00	100,00	366.701.750,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	594.998.176,00	594.998.176,00	100,00	444.252.240,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.358.875.000,00	1.358.875.000,00	100,00	181.003.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>359.844.698.225,00</b>	<b>347.890.746.975,00</b>	<b>96,68</b>	<b>300.170.075.716,00</b>

#### 5.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID)

DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria atau kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi DID Tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp5.205.152.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp5.205.152.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID)**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
DID	0,00	5.205.152.000,00	(5.205.152.000,00)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205.152.000,00</b>	<b>(5.205.152.000,00)</b>	<b>0,00</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
DID	0,00	0,00	0,00	5.205.152.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205.152.000,00</b>

#### 5.1.2.2.2 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Realisasi Dana Desa Tahun 2023 sebesar Rp231.442.855.200,00 atau 99,97% dari target pendapatan sebesar Rp231.513.488.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp16.349.336.876,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp215.093.518.324,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.2 Dana Desa**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Desa	231.442.855.200,00	215.093.518.324,00	16.349.336.876,00	92,94
<b>Jumlah</b>	<b>231.442.855.200,00</b>	<b>215.093.518.324,00</b>	<b>16.349.336.876,00</b>	<b>92,94</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dana Desa	231.513.488.000,00	231.442.855.200,00	99,97	215.093.518.324,00
<b>Jumlah</b>	<b>231.513.488.000,00</b>	<b>231.442.855.200,00</b>	<b>99,97</b>	<b>215.093.518.324,00</b>

#### 5.1.2.2.3 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Realisasi Insentif Fiskal Tahun 2023 sebesar Rp4.166.186.828,00 atau 71,31% dari target pendapatan sebesar Rp5.842.494.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.166.186.828,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.2.3 Insentif Fiskal**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Insentif Fiskal	4.166.186.828,00	0,00	4.166.186.828,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.166.186.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166.186.828,00</b>	<b>0,00</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Insentif Fiskal	5.842.494.000,00	4.166.186.828,00	71,31	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.842.494.000,00</b>	<b>4.166.186.828,00</b>	<b>71,31</b>	<b>0,00</b>

**5.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 sebesar Rp300.558.864.149,00 atau 101,23% dari target pendapatan sebesar Rp296.899.404.140,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp119.862.938.902,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp180.695.925.247,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	300.558.864.149,00	180.695.925.247,00	119.862.938.902,00	60,12
<b>Jumlah</b>	<b>300.558.864.149,00</b>	<b>180.695.925.247,00</b>	<b>119.862.938.902,00</b>	<b>60,12</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Bagi Hasil	192.501.153.932,00	196.200.613.941,00	101,92	153.007.050.247,00
Bantuan Keuangan	104.398.250.208,00	104.358.250.208,00	99,96	27.688.875.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>296.899.404.140,00</b>	<b>300.558.864.149,00</b>	<b>101,23</b>	<b>180.695.925.247,00</b>

**5.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp196.200.613.941,00 atau 101,92% dari target pendapatan sebesar Rp192.501.153.932,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp43.193.563.694,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp153.007.050.247,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Bagi Hasil	196.200.613.941,00	153.007.050.247,00	43.193.563.694,00	77,99
<b>Jumlah</b>	<b>196.200.613.941,00</b>	<b>153.007.050.247,00</b>	<b>43.193.563.694,00</b>	<b>77,99</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	192.501.153.932,00	196.200.613.941,00	101,92	153.007.050.247,00
<b>Jumlah</b>	<b>192.501.153.932,00</b>	<b>196.200.613.941,00</b>	<b>101,92</b>	<b>153.007.050.247,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

#### 5.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp104.358.250.208,00 atau 99,96% dari target pendapatan sebesar Rp104.398.250.208,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp76.669.375.208,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp27.688.875.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.3.2 Bantuan Keuangan**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bantuan Keuangan	104.358.250.208,00	27.688.875.000,00	76.669.375.208,00	26,53
<b>Jumlah</b>	<b>104.358.250.208,00</b>	<b>27.688.875.000,00</b>	<b>76.669.375.208,00</b>	<b>26,53</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	100,00	25.322.000.000,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	104.398.250.208,00	104.358.250.208,00	99,96	2.366.875.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>104.398.250.208,00</b>	<b>104.358.250.208,00</b>	<b>99,96</b>	<b>27.688.875.000,00</b>

#### 5.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp2.120.686.274,00 atau 100,99% dari target pendapatan sebesar Rp2.100.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp955.406.600,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.165.279.674,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	2.120.686.274,00	1.165.279.674,00	955.406.600,00	54,95
<b>Jumlah</b>	<b>2.120.686.274,00</b>	<b>1.165.279.674,00</b>	<b>955.406.600,00</b>	<b>54,95</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Hibah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	20.686.274,00	100,00	1.165.279.674,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.100.000.000,00</b>	<b>2.120.686.274,00</b>	<b>100,99</b>	<b>1.165.279.674,00</b>

#### 5.1.4 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp2.619.084.986.875,00 atau 92,65% dari target anggaran sebesar Rp2.826.856.579.502,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp138.492.801.301,04 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.480.592.185.573,96 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4 Belanja Daerah**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Daerah	2.619.084.986.875,00	2.480.592.185.573,96	138.492.801.301,04	94,71
<b>Jumlah</b>	<b>2.619.084.986.875,00</b>	<b>2.480.592.185.573,96</b>	<b>138.492.801.301,04</b>	<b>94,71</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Operasi	2.047.129.480.192,00	1.900.788.191.664,50	92,85	1.818.618.607.702,14
Belanja Modal	384.479.758.418,00	324.522.994.637,50	84,41	281.509.813.581,82
Belanja Tak Terduga	1.448.219.800,00	66.645.582,00	4,60	846.120.950,00
Transfer	393.799.121.092,00	393.707.154.991,00	99,98	379.617.643.340,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.826.856.579.502,00</b>	<b>2.619.084.986.875,00</b>	<b>92,85</b>	<b>2.480.592.185.573,96</b>

**5.1.4.1 Belanja Operasi**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari - hari pemerintah pusat/dacrah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp1.900.788.191.664,50 atau 92,85% dari target anggaran sebesar Rp2.047.129.480.192,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp82.169.583.962,36 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.818.618.607.702,14 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.1 Belanja Operasi**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Operasi	1.900.788.191.664,50	1.818.618.607.702,14	82.169.583.962,36	95,68
<b>Jumlah</b>	<b>1.900.788.191.664,50</b>	<b>1.818.618.607.702,14</b>	<b>82.169.583.962,36</b>	<b>95,68</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	1.020.218.954.429,00	936.576.698.454,00	91,80	963.391.408.176,00
Belanja Barang dan Jasa	910.545.958.029,00	849.561.732.279,45	93,30	787.240.777.384,22
Belanja Subsidi	550.000.000,00	122.000.000,00	22,18	436.450.000,00
Belanja Hibah	103.269.017.734,00	102.176.510.903,05	98,94	47.872.957.141,92
Belanja Bantuan Sosial	12.545.550.000,00	12.351.250.028,00	98,45	19.677.015.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.047.129.480.192,00</b>	<b>1.900.788.191.664,50</b>	<b>92,85</b>	<b>1.818.618.607.702,14</b>

**5.1.4.1.1 Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp936.576.698.454,00 atau 91,80% dari target anggaran sebesar Rp1.020.218.954.429,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp26.814.709.722,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp963.391.408.176,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.1.1 Belanja Pegawai**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Pegawai	936.576.698.454,00	963.391.408.176,00	(26.814.709.722,00)	102,86
<b>Jumlah</b>	<b>936.576.698.454,00</b>	<b>963.391.408.176,00</b>	<b>(26.814.709.722,00)</b>	<b>102,86</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	565.082.084.292,00	548.461.597.644,00	97,06	568.463.246.667,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dinas Kesehatan	128.176.542.175,00	124.238.610.766,00	96,93	120.397.723.140,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	41.304.215.473,00	39.037.283.616,00	94,51	44.196.364.591,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.208.119.726,00	9.975.481.784,00	97,74	9.922.691.486,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.493.841.782,00	3.367.243.251,00	96,38	3.831.563.513,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.678.013.510,00	3.557.297.911,00	96,72	3.634.623.213,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.101.795.120,00	3.816.339.014,00	93,04	3.697.058.548,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.283.691.496,00	3.128.491.254,00	95,27	3.027.561.598,00
Dinas Sosial	3.358.067.072,00	3.253.526.899,00	96,89	3.409.721.284,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan Anak	4.088.480.551,00	3.975.733.073,00	97,24	3.951.678.156,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.838.459.182,00	2.767.842.853,00	97,51	2.656.681.470,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.382.047.988,00	4.041.883.615,00	92,24	4.590.343.586,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.226.864.610,00	2.747.490.577,00	85,14	2.884.679.205,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.136.904.757,00	2.931.033.044,00	93,44	3.282.546.570,00
Dinas Perhubungan	4.542.565.943,00	4.474.470.765,00	98,50	4.291.232.945,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	4.124.113.922,00	4.013.797.930,00	97,33	3.959.013.239,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.839.663.175,00	5.593.195.079,00	95,78	5.338.909.080,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.477.278.568,00	3.287.242.209,00	94,53	3.311.001.622,00
Dinas Perikanan	4.063.175.804,00	3.994.667.020,00	98,31	3.985.690.826,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.939.025.039,00	2.696.321.146,00	91,73	2.962.144.565,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	14.494.016.259,00	13.291.650.927,00	91,70	15.265.031.577,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.765.393.560,00	6.684.566.380,00	98,81	6.702.007.926,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	3.827.365.341,00	3.667.135.241,00	95,81	3.838.665.112,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.613.912.688,00	3.531.284.682,00	97,71	3.533.488.026,00
Sekretariat Daerah	21.245.636.801,00	20.049.360.270,00	94,37	20.320.526.960,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37.602.797.986,00	37.089.808.012,00	98,64	37.023.329.950,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.114.175.054,00	6.455.948.226,00	90,75	6.485.872.700,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.232.807.359,00	6.518.188.577,00	90,12	7.905.775.570,00
Badan Pendapatan Daerah	12.185.006.731,00	11.222.125.909,00	92,10	11.621.672.469,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	53.456.895.973,00	4.238.111.883,00	7,93	4.088.019.726,00
Inspektorat Kabupaten	13.916.053.106,00	13.042.157.165,00	93,72	11.939.004.767,00
Kecamatan Kampar Kiri	1.698.715.518,00	1.565.374.868,00	92,15	1.765.549.923,00
Kecamatan Tapung Hilir	1.566.133.634,00	1.480.847.493,00	94,55	1.553.218.477,00
Kecamatan Tapung Hulu	1.027.684.981,00	946.314.370,00	92,08	1.026.982.759,00
Kecamatan Tapung	1.379.819.445,00	1.312.823.167,00	95,14	1.440.619.261,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kecamatan Tambang	2.052.399.049,00	2.023.348.371,00	98,58	1.980.529.281,00
Kecamatan Kampar	2.346.310.411,00	2.273.357.227,00	96,89	2.309.146.121,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.462.244.387,00	1.382.268.357,00	94,53	1.502.972.232,00
Kecamatan Siak Hulu	2.331.811.791,00	2.283.876.041,00	97,94	2.317.412.118,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.414.963.413,00	1.213.962.194,00	85,79	1.564.910.436,00
Kecamatan Rumbio Jaya	987.325.779,00	947.246.320,00	95,94	1.015.962.985,00
Kecamatan Kampar Utara	717.169.822,00	605.767.475,00	84,47	639.805.599,00
Kecamatan Kampa	1.028.920.923,00	915.295.947,00	88,96	1.148.426.979,00
Kecamatan Salo	906.927.735,00	779.746.575,00	85,98	839.157.909,00
Kecamatan Bangkinang	1.829.815.537,00	1.686.782.789,00	92,18	1.805.751.747,00
Kecamatan Kuok	1.235.024.864,00	1.104.981.527,00	89,47	1.177.809.853,00
Kecamatan Bangkinang Kota	2.094.310.960,00	1.898.157.989,00	90,63	2.047.202.709,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	1.657.952.096,00	1.606.899.634,00	96,92	1.588.772.470,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.401.512.972,00	1.275.642.259,00	91,02	1.393.627.146,00
Kecamatan Gunung Sahilan	1.006.942.970,00	883.741.666,00	87,76	943.416.145,00
Kecamatan Perhentian Raja	1.389.969.401,00	1.297.143.833,00	93,32	1.301.867.215,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	1.115.757.996,00	1.038.704.907,00	93,09	1.078.499.995,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.770.229.702,00	2.704.528.963,00	97,63	2.431.898.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.020.218.954.429,00</b>	<b>936.576.698.454,00</b>	<b>91,80</b>	<b>963.391.408.176,00</b>

#### 5.1.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan yang bernilai manfaat kurang dari dua belas bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp849.561.732.279,45 atau 93,30% dari target anggaran sebesar Rp910.545.958.029,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp62.320.954.895,23 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp787.240.777.384,22 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Barang dan Jasa	849.561.732.279,45	787.240.777.384,22	62.320.954.895,23	92,66
<b>Jumlah</b>	<b>849.561.732.279,45</b>	<b>787.240.777.384,22</b>	<b>62.320.954.895,23</b>	<b>92,66</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	192.670.802.897,00	190.859.770.087,00	99,06	221.316.642.088,20
Dinas Kesehatan	114.771.445.162,00	96.688.559.824,00	84,24	91.513.454.387,90
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	86.642.719.422,00	82.940.482.732,00	95,73	80.006.749.204,73
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81.673.708.299,00	71.809.421.873,00	87,92	35.170.138.785,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	13.438.785.596,00	13.009.091.010,00	96,80	5.768.957.760,00
Satuan Polisi Pamong Praja	11.684.090.409,00	11.483.844.708,00	98,29	11.500.997.048,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.347.104.315,00	8.517.829.259,00	91,13	5.205.447.308,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14.487.465.415,00	14.079.309.249,00	97,18	9.284.153.752,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dinas Sosial	8.986.516.802,00	8.492.767.055,00	94,51	5.975.323.891,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan Anak	18.195.990.975,00	16.317.022.580,00	89,67	14.906.431.865,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.403.803.803,00	4.187.209.607,00	95,08	4.499.042.837,39
Dinas Lingkungan Hidup	16.389.609.727,00	16.099.860.570,00	98,35	20.654.193.810,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.624.174.797,00	5.508.900.445,00	97,95	5.458.328.799,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.210.471.087,00	5.820.089.290,00	93,71	3.332.545.759,00
Dinas Perhubungan	25.152.903.293,00	25.076.560.110,00	99,70	37.544.665.341,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	15.239.491.295,00	14.921.119.003,00	97,91	8.245.501.064,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.466.696.624,00	5.934.571.845,00	91,77	5.188.768.919,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.796.678.486,00	3.646.894.489,00	96,05	2.538.438.677,00
Dinas Perikanan	7.372.933.219,00	6.307.658.536,00	85,55	5.637.304.384,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.320.727.595,00	6.706.665.758,00	91,61	6.574.700.982,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	10.729.475.810,00	9.467.072.058,00	88,23	9.295.682.502,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.870.200.025,00	9.385.066.177,19	79,06	6.254.939.960,50
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	5.842.971.493,00	5.631.808.773,00	96,39	6.959.387.607,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.855.690.584,00	6.129.561.191,00	89,41	7.016.955.010,00
Sekretariat Daerah	84.616.006.886,00	79.880.478.156,26	94,40	71.739.297.497,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	64.479.216.582,00	59.961.920.550,00	92,99	48.913.096.919,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.111.879.606,00	14.625.379.710,00	96,78	12.314.565.065,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.035.708.116,00	7.477.490.008,00	82,75	7.106.149.088,00
Badan Pendapatan Daerah	9.971.247.362,00	8.860.946.868,00	88,86	8.581.849.924,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.001.760.058,00	4.988.463.739,00	83,12	3.819.165.560,00
Inspektorat Kabupaten	7.430.821.814,00	6.547.790.101,00	88,12	4.691.486.703,50
Kecamatan Kampar Kiri	873.818.594,00	873.758.594,00	99,99	850.813.135,00
Kecamatan Tapung Hilir	895.721.800,00	874.573.900,00	97,64	445.093.092,00
Kecamatan Tapung Hulu	777.442.715,00	756.802.350,00	97,35	523.330.400,00
Kecamatan Tapung	829.482.332,00	794.970.800,00	95,84	632.466.153,00
Kecamatan Tambang	714.200.700,00	712.203.500,00	99,72	555.961.250,00
Kecamatan Kampar	1.420.414.323,00	1.409.358.722,00	99,22	817.453.701,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	664.658.444,00	661.499.368,00	99,52	601.987.414,00
Kecamatan Siak Hulu	847.849.332,00	804.334.102,00	94,87	488.428.209,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	937.959.549,00	932.102.734,00	99,38	763.661.474,00
Kecamatan Rumbio Jaya	701.725.816,00	700.907.689,00	99,88	456.377.342,00
Kecamatan Kampar Utara	760.338.612,00	750.003.511,00	98,64	469.731.287,00
Kecamatan Kampa	648.653.258,00	646.687.758,00	99,70	443.334.377,00
Kecamatan Salo	603.500.324,00	545.891.042,00	90,46	457.045.264,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kecamatan Bangkinang	1.888.083.856,00	1.858.727.608,00	98,45	946.292.674,00
Kecamatan Kuok	580.676.250,00	569.451.400,00	98,07	452.312.080,00
Kecamatan Bangkinang Kota	1.770.170.037,00	1.745.742.825,00	98,62	1.273.803.285,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	677.263.225,00	651.027.502,00	96,13	401.073.426,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.064.666.134,00	1.047.426.054,00	98,38	577.744.297,00
Kecamatan Gunung Sahilan	526.990.648,00	495.250.000,00	93,98	482.689.220,00
Kecamatan Perhentian Raja	644.229.468,00	639.356.403,00	99,24	443.143.211,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	584.253.816,00	559.750.646,00	99,20	459.564.306,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	10.352.763.262,00	10.168.300.610,00	98,22	7.704.109.309,00
<b>Jumlah</b>	<b>910.545.958.029,00</b>	<b>849.561.732.279,45</b>	<b>93,30</b>	<b>787.240.777.384,22</b>

#### 5.1.4.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2023 sebesar Rp122.000.000,00 atau 22,18% dari target belanja sebesar Rp550.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp314.450.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp436.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.3 Belanja Subsidi

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Subsidi	122.000.000,00	436.450.000,00	(314.450.000,00)	357,75
<b>Jumlah</b>	<b>122.000.000,00</b>	<b>436.450.000,00</b>	<b>(314.450.000,00)</b>	<b>357,75</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Subsidi kepada BUMN	550.000.000,00	122.000.000,00	22,18	436.450.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>122.000.000,00</b>	<b>22,18</b>	<b>436.450.000,00</b>

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kampar melaksanakan kegiatan pasar murah pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK bekerja sama dengan Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Kampar dalam hal penanganan implasi sesuai dengan surat Nomor 032/DISPERDAGKOP-DAGPAS/101 dan 002/I/03G00/HK.03/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**5.1.4.1.4 Belanja Hibah**

Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, BUMN/D, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp102.176.510.903,05 atau 98,94% dari target belanja sebesar Rp103.269.017.734,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp54.303.553.761,13 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp47.872.957.141,92 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.1.4 Belanja Hibah**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Hibah	102.176.510.903,05	47.872.957.141,92	54.303.553.761,13	46,85
Jumlah	102.176.510.903,05	47.872.957.141,92	54.303.553.761,13	46,85

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	70.998.965.734,00	70.158.705.763,05	98,82	45.224.790.141,92
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	42.848.232.400,00	42.748.232.400,00	99,77	17.802.400.712,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.327.604.000,00	1.278.085.800,00	96,27	1.687.902.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	26.723.129.334,00	26.032.387.563,05	97,42	25.734.487.429,92
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Dana BOS	29.721.800.000,00	29.469.638.140,00	99,15	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	405.000.000,00	405.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.316.800.000,00	29.064.638.140,00	99,14	0,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik	2.548.252.000,00	2.548.167.000,00	100,00	2.548.167.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.548.252.000,00	2.548.167.000,00	100,00	2.548.167.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>103.269.017.734,00</b>	<b>102.176.510.903,05</b>	<b>98,94</b>	<b>47.872.957.141,92</b>

**5.1.4.1.5 Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pengeluaran pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Realisasi Belanja Sosial Tahun 2023 sebesar Rp12.351.250.028,00 atau 98,45% dari target anggaran sebesar Rp12.545.550.000,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp7.325.764.972,00) dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp19.677.015.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.1.5 Belanja Bantuan Sosial**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Bantuan Sosial	12.351.250.028,00	19.677.015.000,00	-7.325.764.972,00	159,31
<b>Jumlah</b>	<b>12.351.250.028,00</b>	<b>19.677.015.000,00</b>	<b>-7.325.764.972,00</b>	<b>159,31</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	65.550.000,00	51.250.028,00	78,18	3.405.015.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga	20.000.000,00	0,00	0,00	16.200.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	12.460.000.000,00	12.300.000.000,00	98,72	72.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.545.550.000,00</b>	<b>12.351.250.028,00</b>	<b>98,45</b>	<b>19.677.015.000,00</b>

**5.1.4.2 Belanja Modal**

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp324.522.994.637,50 atau 84,41% dari target anggaran sebesar Rp384.479.758.418,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp43.013.181.055,68 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp281.509.813.581,82 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.2 Belanja Modal**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal	324.522.994.637,50	281.509.813.581,82	43.013.181.055,68	86,75
<b>Jumlah</b>	<b>324.522.994.637,50</b>	<b>281.509.813.581,82</b>	<b>43.013.181.055,68</b>	<b>86,75</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Tanah	1.120.279.000,00	1.117.743.930,00	99,77	505.118.496,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.228.102.376,00	54.246.432.888,50	91,59	80.023.194.214,82



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.376.516.079,00	55.491.835.674,00	82,36	64.626.802.305,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	242.693.872.952,00	200.185.637.334,00	82,48	127.694.277.285,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.821.693.011,00	13.242.462.641,00	95,81	8.660.421.281,00
Belanja Modal Aset Lainnya	239.295.000,00	238.882.170,00	99,83	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>384.479.758.418,00</b>	<b>324.522.994.637,50</b>	<b>84,41</b>	<b>281.509.813.581,82</b>

#### 5.1.4.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 sebesar Rp1.117.743.930,00 atau 99,77% dari target anggaran sebesar Rp1.120.279.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp612.625.434,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp505.118.496,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.2.1 Belanja Modal Tanah**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Tanah	1.117.743.930,00	505.118.496,00	612.625.434,00	45,19
<b>Jumlah</b>	<b>1.117.743.930,00</b>	<b>505.118.496,00</b>	<b>612.625.434,00</b>	<b>45,19</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.120.279.000,00	1.117.743.930,00	99,77	505.118.496,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.120.279.000,00</b>	<b>1.117.743.930,00</b>	<b>99,77</b>	<b>505.118.496,00</b>

#### 5.1.4.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp54.246.432.888,50 atau 91,59% dari target anggaran sebesar Rp59.228.102.376,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp25.776.761.326,32 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp80.023.194.214,82 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.246.432.888,50	80.023.194.214,82	-25.776.761.326,32	147,52
<b>Jumlah</b>	<b>54.246.432.888,50</b>	<b>80.023.194.214,82</b>	<b>-25.776.761.326,32</b>	<b>147,52</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	18.674.522.831,00	16.055.682.837,00	85,98	21.215.487.278,82
Dinas Kesehatan	3.253.462.464,00	2.615.076.946,00	80,38	9.965.305.702,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	7.792.092.751,00	7.107.045.681,00	91,21	13.362.620.361,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.151.724.650,00	1.955.190.000,00	90,87	953.312.900,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	802.126.000,00	778.474.000,00	97,05	298.304.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	35.018.000,00	34.600.000,00	98,81	316.337.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	478.583.000,00	401.121.000,00	83,81	1.035.039.169,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	939.236.510,00	921.920.000,00	98,16	136.373.000,00
Dinas Sosial	941.816.000,00	854.958.500,00	90,78	938.052.650,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan Anak	588.928.000,00	488.590.000,00	82,96	1.083.152.600,00
Dinas Ketahanan Pangan	214.850.000,00	203.140.650,00	94,55	122.624.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.260.385.000,00	1.235.849.000,00	98,05	316.070.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.500.992.500,00	1.490.587.000,00	99,31	551.565.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	291.520.000,00	288.356.000,00	98,91	540.999.000,00
Dinas Perhubungan	4.907.121.000,00	4.894.298.000,00	99,74	1.416.248.500,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.524.515.000,00	1.509.416.184,50	99,01	505.262.650,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	408.475.000,00	407.110.000,00	99,67	1.017.384.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	861.903.000,00	860.988.000,00	99,89	143.937.550,00
Dinas Perikanan	720.602.000,00	671.215.750,00	93,15	342.928.800,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	934.021.000,00	898.886.500,00	96,24	145.261.700,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	726.415.000,00	707.390.500,00	97,38	228.980.428,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	240.882.720,00	202.950.000,00	84,25	809.036.800,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	269.889.140,00	269.325.140,00	99,79	1.659.410.018,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.019.207.400,00	939.700.000,00	92,20	673.082.150,00
Sekretariat Daerah	3.571.905.000,00	3.472.173.400,00	97,21	14.239.900.794,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	401.489.000,00	315.838.000,00	78,67	2.493.375.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.339.440.800,00	1.336.849.000,00	99,81	1.708.577.124,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	639.608.000,00	636.533.400,00	99,52	830.957.722,00
Badan Pendapatan Daerah	396.582.000,00	390.137.000,00	98,37	1.458.639.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	421.697.000,00	419.200.200,00	99,41	73.800.000,00
Inspektorat Kabupaten	168.492.000,00	167.206.000,00	99,24	3.000.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	26.749.000,00	26.693.000,00	99,79	63.182.300,00
Kecamatan Tapung Hilir	111.746.000,00	109.721.000,00	98,19	0,00
Kecamatan Tapung Hulu	61.322.000,00	61.322.000,00	100,00	76.873.000,00
Kecamatan Tapung	78.779.000,00	78.727.000,00	99,93	0,00
Kecamatan Tambang	43.381.000,00	43.381.000,00	100,00	44.474.000,00
Kecamatan Kampar	163.348.000,00	163.348.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	0,00	0,00	0,00	40.833.450,00
Kecamatan Siak Hulu	36.064.000,00	36.064.000,00	100,00	31.411.544,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	16.771.000,00	16.771.000,00	100,00	91.017.504,00
Kecamatan Rumbio Jaya	15.381.000,00	15.381.000,00	100,00	36.615.100,00
Kecamatan Kampar Utara	54.213.000,00	54.213.000,00	100,00	4.095.000,00
Kecamatan Kampa	75.716.000,00	75.716.000,00	100,00	7.245.000,00
Kecamatan Salo	18.375.000,00	18.375.000,00	100,00	53.861.820,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kecamatan Bangkinang	45.739.000,00	45.739.000,00	100,00	80.933.400,00
Kecamatan Kuok	0,00	0,00	0,00	22.940.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	22.532.000,00	22.532.000,00	100,00	33.760.800,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	68.706.810,00	68.672.000,00	99,95	19.121.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	104.220.000,00	104.220.000,00	100,00	48.332.800,00
Kecamatan Gunung Sahilan	25.150.000,00	25.080.000,00	99,72	88.240.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	62.670.000,00	62.670.000,00	100,00	13.500.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	37.682.000,00	37.682.000,00	100,00	11.080.600,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	682.055.000,00	650.317.200,00	95,35	670.650.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>59.228.102.376,00</b>	<b>54.246.432.888,50</b>	<b>91,59</b>	<b>80.023.194.214,82</b>

#### 5.1.4.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp55.491.835.674,00 atau 82,36% dari target anggaran sebesar Rp67.376.516.079,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp9.134.966.631,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp64.626.802.305,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.491.835.674,00	64.626.802.305,00	(9.134.966.631,00)	116,46
<b>Jumlah</b>	<b>55.491.835.674,00</b>	<b>64.626.802.305,00</b>	<b>(9.134.966.631,00)</b>	<b>116,46</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	38.545.388.050,00	37.997.682.870,00	98,58	30.406.380.615,00
Dinas Kesehatan	7.286.239.000,00	7.204.253.404,00	98,87	7.669.230.733,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	10.275.500.000,00	174.685.000,00	1,70	14.265.538.201,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.705.465.900,00	6.334.206.669,00	94,46	4.387.749.591,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	239.671.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.000.000,00	59.850.000,00	99,75	211.058.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	24.818.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	679.211.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	49.327.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	1.966.032.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.021.000,00	3.000.000,00	99,30	199.305.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.300.000.000,00	2.172.139.855,00	94,44	349.100.050,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	389.344.945,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	457.481.000,00	457.228.000,00	99,94	492.695.000,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	838.955.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	632.670.900,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	517.864.129,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	449.790.000,00	322.054.176,00	71,60	1.141.448.000,00
Sekretariat Daerah	214.000.000,00	213.075.000,00	99,57	24.938.370,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30.000.000,00	29.803.000,00	99,34	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	201.475.000,00	193.644.885,00	96,11	20.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	464.612.500,00
Kecamatan Kampar Kiri	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Tambang	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bangkinang Kota	163.292.000,00	163.292.000,00	100,00	174.715.900,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	111.000.000,00	110.920.815,00	99,93	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>67.376.516.079,00</b>	<b>55.491.835.674,00</b>	<b>82,36</b>	<b>64.626.802.305,00</b>

**5.1.4.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp200.185.637.334,00 atau 82,48% dari target anggaran sebesar Rp242.693.872.952,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp72.491.360.049,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp127.694.277.285,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	200.185.637.334,00	127.694.277.285,00	72.491.360.049,00	63,79
<b>Jumlah</b>	<b>200.185.637.334,00</b>	<b>127.694.277.285,00</b>	<b>72.491.360.049,00</b>	<b>63,79</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	1.457.247.100,00	1.457.247.100,00	100,00	1.937.808.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	0,00	0,00	0,00	25.122.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	213.502.397.970,00	171.033.154.371,00	80,11	97.857.668.201,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	26.238.836.039,00	26.200.272.000,00	99,85	25.465.957.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.556.000,00	3.556.000,00	100,00	266.700.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	194.628.601,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	100.000.000,00	99.850.000,00	99,85	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	26.489.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	101.755.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	175.866.500,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	197.518.000,00
Badan Pendapatan Daerah	106.452.980,00	106.175.000,00	99,74	0,00
Kecamatan Kampar Kiri	453.802.810,00	453.802.810,00	100,00	87.200.000,00
Kecamatan Kampar	108.452.358,00	108.452.358,00	100,00	206.721.396,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	295.599.864,00	295.599.864,00	100,00	167.963.680,00
Kecamatan Bangkinang	0,00	0,00	0,00	544.356.558,00
Kecamatan Bangkinang Kota	275.749.831,00	275.749.831,00	100,00	183.868.949,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	242.654.400,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	1.778.000,00	1.778.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>242.693.872.952,00</b>	<b>200.185.637.334,00</b>	<b>82,48</b>	<b>127.694.277.285,00</b>

**5.1.4.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp13.242.462.641,00 atau 95,81% dari target anggaran sebesar Rp13.821.693.011,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.582.041.360,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp8.660.421.281,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenalkani/(Penurunan)	%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.242.462.641,00	8.660.421.281,00	4.582.041.360,00	65,40
<b>Jumlah</b>	<b>13.242.462.641,00</b>	<b>8.660.421.281,00</b>	<b>4.582.041.360,00</b>	<b>65,40</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	12.152.846.761,00	12.154.311.161,00	100,01	7.608.408.105,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	390.407.688,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	236.591.250,00	216.213.240,00	91,39	199.808.950,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	17.940.000,00	17.940.000,00	100,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.635.000,00	19.635.000,00	100,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	168.000.000,00	167.913.240,00	99,95	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	345.800.000,00	345.678.000,00	99,96	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.000.000,00	23.850.000,00	99,38	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	179.413.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	237.980.000,00	237.922.000,00	99,98	71.468.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	549.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	15.145.238,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	169.550.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	0,00	0,00	0,00	15.150.000,00
Kecamatan Tambang	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	
<b>Jumlah</b>	<b>13.821.693.011,00</b>	<b>13.242.462.641,00</b>	<b>95,81</b>	<b>8.660.421.281,00</b>

#### 5.1.4.3 Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 sebesar Rp66.645.582,00 atau 4,60% dari target pendapatan sebesar Rp1.448.219.800,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp779.475.368,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp846.120.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.3 Belanja Tak Terduga

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Tak Terduga	66.645.582,00	846.120.950,00	(779.475.368,00)	-92,12
<b>Jumlah</b>	<b>66.645.582,00</b>	<b>846.120.950,00</b>	<b>(779.475.368,00)</b>	<b>-92,12</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Tak Terduga	1.448.219.800,00	66.645.582,00	4,60	846.120.950,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.448.219.800,00</b>	<b>66.645.582,00</b>	<b>4,60</b>	<b>846.120.950,00</b>

#### 5.1.4.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer atau Belanja Bagi Hasil digunakan untuk penganggaran yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya.

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 sebesar Rp393.707.154.991,00 atau 99,98% dari target anggaran sebesar Rp393.799.121.092,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp14.089.511.651,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp379.617.643.340,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4 Belanja Transfer

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Transfer	393.707.154.991,00	379.617.643.340,00	14.089.511.651,00	3,71
<b>Jumlah</b>	<b>393.707.154.991,00</b>	<b>379.617.643.340,00</b>	<b>14.089.511.651,00</b>	<b>3,71</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.414.321.124,00	15.413.749.238,00	100,00	9.190.269.495,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.398.944.888,00	1.394.570.102,00	99,69	1.233.516.252,00
<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>376.985.855.080,00</b>	<b>376.898.835.651,00</b>	<b>99,98</b>	<b>369.193.857.593,00</b>
- Dana Desa	0,00	0,00	0,00	215.093.518.324,00
- Alokasi Dana Desa	0,00	0,00	0,00	129.400.339.269,00
- Bantuan Ambulan	0,00	0,00	0,00	24.700.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	2.789.768.500,00	2.789.768.500,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	231.513.488.000,00	231.442.855.200,00	99,97	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	142.682.598.580,00	142.666.211.951,00	99,99	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>393.799.121.092,00</b>	<b>393.707.154.991,00</b>	<b>99,98</b>	<b>379.617.643.340,00</b>

#### 5.1.4.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp21.771.162.790,96 atau 103,45% dari target anggaran sebesar Rp21.045.452.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp53.088.600.021,25 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp74.859.762.812,21 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Pembiayaan Daerah 5.1.4.5**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pembiayaan Daerah	21.771.162.790,96	74.859.762.812,21	(53.088.600.021,25)	(70,92)
<b>Jumlah</b>	<b>21.771.162.790,96</b>	<b>74.859.762.812,21</b>	<b>(53.088.600.021,25)</b>	<b>(70,92)</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Penerimaan Pembiayaan	21.045.452.000,00	21.771.162.790,96	103,45	74.859.762.812,21
<b>Jumlah</b>	<b>21.045.452.000,00</b>	<b>21.771.162.790,96</b>	<b>103,45</b>	<b>74.859.762.812,21</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**5.1.4.5.1 Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp21.771.162.790,96 atau 103,45% dari target pendapatan sebesar Rp21.045.452.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp53.088.600.021,25 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp74.859.762.812,21 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.5.1 Penerimaan Pembiayaan**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penerimaan Pembiayaan	21.771.162.790,96	74.859.762.812,21	(53.088.600.021,25)	(70,92)
Jumlah	21.771.162.790,96	74.859.762.812,21	(53.088.600.021,25)	(70,92)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	21.045.452.000,00	21.771.162.790,96	103,45	74.859.762.812,21
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	21.045.452.000,00	21.771.162.790,96	103,45	74.859.762.812,21

**5.1.4.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan, penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp137.498.122.384,04 dan mengalami peningkatan sebesar Rp115.726.959.593,08 dibandingkan SILPA Tahun 2022 sebesar Rp21.771.162.790,96. Namun juga terdapat koreksi Silpa Sebesar Rp6.320.785,00 yang merupakan Kas BOS Pusat Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	137.498.122.384,04	21.771.162.790,96	115.726.959.593,08	531,56
Jumlah	137.498.122.384,04	21.771.162.790,96	115.726.959.593,08	531,56

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	137.491.801.599,04	21.771.162.790,96
Koreksi SILPA	6.320.785,00	0,00
Jumlah	137.498.122.384,04	21.771.162.790,96



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

## 5.2 PENJELASAN POS - POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan hanya oleh PPKD yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

### 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp21.771.162.790,96. Sedangkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 sebesar Rp74.859.762.812,21 dan terjadi penurunan sebesar Rp53.088.600.021,25 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Anggaran Lebih Awal	21.771.162.790,96	74.859.762.812,21	(53.088.600.021,25)	(70,92)
<b>Jumlah</b>	<b>21.771.162.790,96</b>	<b>74.859.762.812,21</b>	<b>(53.088.600.021,25)</b>	<b>(70,92)</b>

### 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2022 yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp21.771.162.790,96. Sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp74.859.762.812,21 dan terjadi penurunan sebesar Rp53.088.600.021,25 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	21.771.162.790,96	74.859.762.812,21	(53.088.600.021,25)	(70,92)
<b>Jumlah</b>	<b>21.771.162.790,96</b>	<b>74.859.762.812,21</b>	<b>(53.088.600.021,25)</b>	<b>(70,92)</b>

### 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Akhir Tahun Berjalan

Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) akhir Tahun berjalan Pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp137.491.801.599,04. Sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp21.771.162.790,96 dan terjadi kenaikan sebesar Rp115.720.638.808,08 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Akhir Tahun Berjalan**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	137.491.801.599,04	21.771.162.790,96	115.720.638.808,08	531,53
<b>Jumlah</b>	<b>137.491.801.599,04</b>	<b>21.771.162.790,96</b>	<b>115.720.638.808,08</b>	<b>531,53</b>

### 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**Tabel 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

**5.2.5 Lain-lain**

Lain-lain merupakan koreksi SILPA pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp6.320.785,00 Sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.2.5 Lain-lain**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lain-lain	6.320.785,00	0,00	6.320.785,00	100,00
Jumlah	6.320.785,00	0,00	6.320.785,00	100,00

**5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir**

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp137.498.122.384,04 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp21.771.162.790,96 dan terjadi kenaikan sebesar Rp115.726.959.593,08 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir**

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Anggaran Lebih Akhir	137.498.122.384,04	21.771.162.790,96	115.726.959.593,08	531,56
Jumlah	137.498.122.384,04	21.771.162.790,96	115.726.959.593,08	531,56



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**5.3 PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos-pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

**5.3.1 Pendapatan LO**

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi pendapatan LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Pendapatan LO pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.079.385.505.089,16. Sedangkan pada Tahun 2022 Pendapatan LO sebesar Rp2.499.767.165.654,55 dan terjadi kenaikan sebesar Rp579.618.339.434,61 atau 23,19% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1 Pendapatan LO**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan LO	3.079.385.505.089,16	2.499.767.165.654,55	579.618.339.434,61	23,19
<b>Jumlah</b>	<b>3.079.385.505.089,16</b>	<b>2.499.767.165.654,55</b>	<b>579.618.339.434,61</b>	<b>23,19</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Asli Daerah	318.227.766.667,41	276.334.891.411,05
Pendapatan Transfer	2.561.975.839.182,66	2.218.905.397.994,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	199.181.899.239,09	4.526.876.249,50
<b>Jumlah</b>	<b>3.079.385.505.089,16</b>	<b>2.499.767.165.654,55</b>

**5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO**

Pendapatan Asli Daerah - LO pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp318.227.766.667,41 sedangkan pada Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah - LO sebesar Rp276.334.891.411,05 dan terjadi kenaikan sebesar Rp41.892.875.256,36 atau 15,16% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah - LO	318.227.766.667,41	276.334.891.411,05	41.892.875.256,36	15,16
<b>Jumlah</b>	<b>318.227.766.667,41</b>	<b>276.334.891.411,05</b>	<b>41.892.875.256,36</b>	<b>15,16</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Pajak Daerah	171.085.448.811,00	157.857.684.352,08
Pendapatan Retribusi Daerah	12.481.547.859,00	8.761.742.152,31
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.299.309.804,00	23.550.128.300,00
Lain-lain PAD Yang Sah	98.361.460.193,41	86.165.336.606,66
<b>Jumlah</b>	<b>318.227.766.667,41</b>	<b>276.334.891.411,05</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah**

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp171.085.448.811,00 sedangkan pada Tahun 2022 Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp157.857.684.352,08 dan terjadi kenaikan sebesar Rp13.227.764.458,92 atau 8,38% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Pajak Daerah	171.085.448.811,00	157.857.684.352,08	13.227.764.458,92	8,38
<b>Jumlah</b>	<b>171.085.448.811,00</b>	<b>157.857.684.352,08</b>	<b>13.227.764.458,92</b>	<b>8,38</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Hotel - LO	1.130.726.006,00	1.317.838.134,00
Pajak Restoran - LO	7.853.952.185,00	7.285.011.763,00
Pajak Hiburan-LO	14.500.000,00	0,00
Pajak Reklame - LO	869.517.162,00	719.444.248,08
Pajak Penerangan Jalan - LO	79.019.804.970,00	74.031.467.239,00
Pajak Parkir - LO	76.038.500,00	107.086.250,00
Pajak Air Tanah - LO	1.832.497.464,00	1.741.199.635,00
Pajak Sarang Burung Walet - LO	16.525.000,00	22.840.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	6.263.533.561,00	10.716.512.129,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	38.983.153.270,00	30.994.645.169,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	35.225.200.693,00	30.921.659.785,00
<b>Jumlah</b>	<b>171.085.448.811,00</b>	<b>157.857.684.352,08</b>

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Pajak LRA, LO dan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LO)	171.085.448.811,00
b. Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LRA)	153.800.441.758,00
c. Piutang Pajak Tahun Berjalan (Neraca)	207.511.408.925,00
d. Piutang Pajak Tahun 2022 (Neraca)	191.638.594.152,00
e. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	355.795.494,92
f. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	419.465.803,92
<b>Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)</b>	<b>1.348.521.971,00</b>

Penjelasan selisih antara Pendapatan Pajak LRA, LO dan Neraca Tahun 2023 sebesar Rp1.348.521.971,00 dapat dijelaskan sebagai berikut terdiri dari:

a. Pembayaran Piutang PBB Bapenda Tahun Sebelumnya	1.344.789.672,00
b. Pembayaran pajak Restoran DidikTahun 2022	(4.674.501,00)
c. Pembayaran pajak Restoran Kec Kampar utara Tahun 2022	(6.936.400,00)
d. Koreksi Kas lainnya atas adanya utang PHR yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2023	15.343.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.348.521.971,00</b>

**5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah**

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp12.481.547.859,00 sedangkan pada Tahun 2022 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp8.761.742.152,31 dan terjadi kenaikan sebesar Rp3.719.805.706,69 atau 42,46% dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**Tabel 5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Retribusi Daerah	12.481.547.859,00	8.761.742.152,31	3.719.805.706,69	42,46
Jumlah	12.481.547.859,00	8.761.742.152,31	3.719.805.706,69	42,46

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	37.500.000,00	15.000.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	235.487.500,00	240.300.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	545.700.000,00	397.700.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	249.571.000,00	76.864.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	621.460.000,00	712.626.000,00
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	37.900.000,00	35.051.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	15.400.000,00	63.340.000,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perengkapannya-LO	960.153.589,00	939.035.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian	1.410.100.000,00	1.315.818.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.448.657.270,00	865.932.940,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	42.850.000,00	56.650.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	142.850.000,00	167.470.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	397.927.500,00	578.108.000,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	3.297.847.212,31
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	6.335.991.000,00	0,00
Jumlah	12.481.547.859,00	8.761.742.152,31

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi LRA, LO dan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LO)	12.481.547.859,00
b. Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LRA)	12.315.324.270,00
c. Piutang Retribusi Tahun Berjalan (Neraca)	399.762.900,00
d. Piutang Retribusi Tahun 2022 (Neraca)	408.612.900,00
e. Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f. Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	6.250.000,00
<b>Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)</b>	<b>168.823.589,00</b>

Penjelasan selisih antara Pendapatan Retribusi LRA, LO dan Neraca Tahun 2023 sebesar Rp168.823.589,00 dapat dijelaskan sebagai berikut terdiri dari:

a. Piutang BGS 2023 Dinas Pasar	165.000.000,00
b. (Koreksi atas kekurangan penyeteroran pendapatan retribusi tera yang tidak diketahui identitas penyeterornya)	3.823.589,00
Jumlah	168.823.589,00

**5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp36.299.309.804,00 sedangkan pada Tahun 2022 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp23.550.128.300,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp12.749.181.504,00 atau 54,14% dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**Tabel 5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.299.309.804,00	23.550.128.300,00	12.749.181.504,00	54,14
<b>Jumlah</b>	<b>36.299.309.804,00</b>	<b>23.550.128.300,00</b>	<b>12.749.181.504,00</b>	<b>54,14</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD Bank Riau - LO	21.468.259.695,00	21.827.902.698,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD PT. Bumi Siak Pusako - LO	14.831.050.109,00	1.654.733.260,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD BPR Syari'ah Fadilah Air Tiris - LO	0,00	67.492.342,00
<b>Jumlah</b>	<b>36.299.309.804,00</b>	<b>23.550.128.300,00</b>

Perbedaan jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA, LO dan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LO)	36.299.309.804,00
b. Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LRA)	36.299.309.804,00
c. Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d. Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 (Neraca)	0,00
e. Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f. Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	0,00
<b>Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)</b>	<b>0,00</b>

#### 5.3.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp98.361.460.193,41 sedangkan pada Tahun 2022 Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp86.165.336.606,66 dan terjadi kenaikan sebesar Rp12.196.123.586,75 atau 14,15%. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lain-Lain PAD yang Sah	98.361.460.193,41	86.165.336.606,66	12.196.123.586,75	14,15
<b>Jumlah</b>	<b>98.361.460.193,41</b>	<b>86.165.336.606,66</b>	<b>12.196.123.586,75</b>	<b>14,15</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	5.200.000,00	714.764.500,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	36.059.000,00	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	0,00	100.000.000,00
Jasa Giro - LO	1.102.421.960,00	1.159.879.263,00
Jasa Dana Bergulir - LO	2.367.775.810,33	3.595.807.442,92
Pendapatan Bunga Deposito - LO	287.680.865,00	319.889.119,34
Penerimaan Kornisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	819.225.881,00	614.021.956,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	66.990.790,38	153.950.099,56
Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	447.250,00	20.987.287,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	0,00	202.527.700,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	477.268.379,00	517.831.580,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	90.460.840.630,61	76.141.049.231,87
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	154.242.052,23	317.601.572,74
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	2.583.307.574,86	2.307.026.854,24
<b>Jumlah</b>	<b>98.361.460.193,41</b>	<b>86.165.336.606,66</b>

Adapun perbedaan jumlah Lain-Lain PAD yang Sah LRA, LO dan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LO)	98.361.460.193,41
b. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	96.211.470.588,08
c. Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	24.733.278.582,00
d. Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca)	24.801.231.040,34
e. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
<b>Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)</b>	<b>2.217.942.063,67</b>

Perbedaan Lain-Lain PAD yang Sah LRA,LO dan Neraca sebesar Rp2.217.942.063,67 terdiri dari:

a. Piutang BGS 2023 Dinas Pasar	(165.000.000,00)
b. Penyesuaian Dana Bergulir Tahun 2023	2.367.775.810,33
c. Penerimaan Remunerasi TDF 2022	14.040.078,34
d. Penerimaan Bunga Bos Didik Tahun 2022	(4.986.044,00)
e. (Koreksi atas kekurangan penyoloran pendapatan sewa pada Sekretariat Daerah tahun 2023 )	1.059.000,00
f. Koreksi atas pendapatan jasa giro yang belum disetor ke Kas Daerah Dinas Pendidikan	4.984.283,00
g. Koreksi atas pendapatan jasa giro yang belum disetor ke Kas Daerah Dinas Perindustrian	56.170,00
h. Koreksi atas pendapatan jasa giro yang belum disetor ke Kas Daerah Damkar	12.766,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.217.942.063,67</b>

### 5.3.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer - LO pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.561.975.839.182,66 sedangkan pada Tahun 2022 Pendapatan Transfer - LO sebesar Rp2.218.905.397.994,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp343.070.441.188,66 atau 15,46% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.2 Pendapatan Transfer - LO**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer - LO	2.561.975.839.182,66	2.218.905.397.994,00	343.070.441.188,66	15,46
<b>Jumlah</b>	<b>2.561.975.839.182,66</b>	<b>2.218.905.397.994,00</b>	<b>343.070.441.188,66</b>	<b>15,46</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.024.799.385.323,00	1.822.817.632.354,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	235.595.001.949,66	220.298.670.324,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	301.561.451.910,00	175.789.095.316,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.561.975.839.182,66</b>	<b>2.218.905.397.994,00</b>

#### 5.3.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.024.799.385.323,00 sedangkan pada Tahun 2022 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp1.822.817.632.354,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp201.981.752.969,00 atau 11,08% dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**Tabel 5.3.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.024.799.385.323,00	1.822.817.632.354,00	201.981.752.969,00	11,08
<b>Jumlah</b>	<b>2.024.799.385.323,00</b>	<b>1.822.817.632.354,00</b>	<b>201.981.752.969,00</b>	<b>11,08</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Dana Bagi Hasil</b>	<b>826.920.555.800,00</b>	<b>632.719.190.041,00</b>
DBH PBB-LO	298.769.766.800,00	285.439.079.617,00
DBH PPh Pasal 21-LO	17.701.050.000,00	16.665.801.375,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN-LO	1.066.120.000,00	513.384.781,00
DBH CHT-LO	0,00	32.285,00
DBH SDA Minyak Bumi-LO	426.085.368.000,00	286.137.604.991,00
DBH SDA Gas Bumi-LO	26.897.189.000,00	25.868.706.286,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	1.238.632,00	319.611.116,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	7.989.583.388,00	3.799.514.322,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	44.854.388.000,00	11.805.391.057,00
DBH SDA Kehutanan-DR-LO	2.242.296.000,00	0,00
DBH SDA Perikanan-LO	1.313.556.000,00	2.170.064.211,00
<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>621.580.746.999,00</b>	<b>763.880.955.365,00</b>
DAU-LO	762.166.288.999,00	763.880.955.365,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	1.600.000.000,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	57.814.458.000,00	0,00
<b>Dana Alokasi Khusus - Fisik</b>	<b>28.407.335.549,00</b>	<b>126.047.411.232,00</b>
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	1.294.982.000,00	1.989.439.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	12.522.227.000,00	51.546.977.534,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	8.013.637.468,00	6.469.901.200,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	0,00	17.670.990.072,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	6.576.489.081,00	16.169.774.201,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	4.101.620.626,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	0,00	3.598.442.459,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	13.846.304.570,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	0,00	8.270.124.870,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	0,00	2.383.836.700,00
<b>Dana Alokasi Khusus - Non Fisik</b>	<b>347.890.746.975,00</b>	<b>300.170.075.716,00</b>
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	130.471.612.415,00	109.685.700.688,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	150.807.057.500,00	143.565.146.290,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.161.250.000,00	1.469.518.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	5.229.879.000,00	4.131.815.760,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	11.298.536.000,00	10.214.710.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	3.203.000.000,00	2.270.700.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	43.074.619.904,00	27.443.327.388,00
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	367.252.980,00	397.200.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	323.666.000,00	366.701.750,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	594.998.176,00	444.252.240,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.358.875.000,00	181.003.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.024.799.385.323,00</b>	<b>1.822.817.632.354,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA, LO dan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (LO)	2.024.799.385.323,00
b. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (LRA)	1.897.890.486.812,00
c. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
e. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
<b>Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)</b>	<b>126.908.898.511,00</b>

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA, LO dan Neraca sebesar Rp126.908.898.511,00 terdiri dari:

a. Dana TDF Tahun 2023	184.798.869.000,00
b. Dana TDF Tahun 2022	(57.889.970.489,00)
<b>Jumlah</b>	<b>126.908.898.511,00</b>

**5.3.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp235.595.001.949,66 sedangkan pada Tahun 2022 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp220.298.670.324,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp15.296.331.625,66 atau 6,94% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	235.595.001.949,66	220.298.670.324,00	15.296.331.625,66	6,94
<b>Jumlah</b>	<b>235.595.001.949,66</b>	<b>220.298.670.324,00</b>	<b>15.296.331.625,66</b>	<b>6,94</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205.152.000,00</b>
Dana Insentif Daerah	0,00	5.205.152.000,00
<b>Dana Desa</b>	<b>231.442.855.200,00</b>	<b>215.093.518.324,00</b>
Dana Desa-LO	231.442.855.200,00	215.093.518.324,00
<b>Insentif Fiskal - LO</b>	<b>4.152.146.749,66</b>	<b>0,00</b>
Insentif Fiskal - LO	4.152.146.749,66	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>235.595.001.949,66</b>	<b>220.298.670.324,00</b>

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LRA, LO dan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Berjalan (LO)	235.595.001.949,66
b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	235.609.042.028,00
c. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
e. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
<b>Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)</b>	<b>(14.040.078,34)</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LRA, LO dan Neraca sebesar Rp-14.040.078,34 terdiri dari:

a. Remunerasi Bunga TDF Tahun 2022	(14.040.078,34)
<b>Jumlah</b>	<b>(14.040.078,34)</b>

**5.3.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp301.581.451.910,00 sedangkan pada Tahun 2022 Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp175.789.095.316,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp125.792.356.594,00 atau 71,56% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	301.581.451.910,00	175.789.095.316,00	125.792.356.594,00	71,56
<b>Jumlah</b>	<b>301.581.451.910,00</b>	<b>175.789.095.316,00</b>	<b>125.792.356.594,00</b>	<b>71,56</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	48.197.378.315,00	32.405.308.207,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	46.626.074.409,00	30.714.610.274,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	67.822.398.801,00	58.302.561.724,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	2.199.774.918,00	1.684.443.849,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	32.377.575.259,00	24.993.296.262,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	25.322.000.000,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	104.358.250.208,00	2.366.875.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>301.581.451.910,00</b>	<b>175.789.095.316,00</b>

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA,LO dan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (LO)	301.581.451.910,00
b. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	300.558.864.149,00
c. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	19.453.665.494,00
d. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)	18.748.141.653,99
e. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
<b>Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)</b>	<b>317.063.920,99</b>

Perbedaan Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA, LO dan Neraca sebesar Rp317.063.920,99 terdiri dari:

a. Koreksi Ekuitas - Piutang Transfer Tahun 2017 salah penyajian	317.063.920,99
<b>Jumlah</b>	<b>317.063.920,99</b>

**5.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2023 sebesar Rp199.181.899.239,09 sedangkan pada Tahun 2022 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp4.526.876.249,50 dan terjadi kenaikan sebesar Rp194.655.022.989,59 atau 4299,99% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	199.181.899.239,09	4.526.876.249,50	194.655.022.989,59	4.299,99
<b>Jumlah</b>	<b>199.181.899.239,09</b>	<b>4.526.876.249,50</b>	<b>194.655.022.989,59</b>	<b>4.299,99</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	47.134.553.204,00	1.548.414.079,50
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	151.976.035.761,09	1.773.182.496,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	50.624.000,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	20.686.274,00	1.205.279.674,00
<b>Jumlah</b>	<b>199.181.899.239,09</b>	<b>4.526.876.249,50</b>

Adapun perbedaan jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA, LO dan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (LO)	199.181.899.239,09
b. Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	2.120.886.274,00
c. Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d. Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
e. Lain - Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f. Lain - Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
<b>Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)</b>	<b>197.061.212.965,09</b>

Perbedaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA, LO dan Neraca sebesar Rp197.061.212.965,09 terdiri dari:

a. Penerimaan Hibah Tanah Dinkes	6.887.926.800,00
b. Penerimaan Hibah Tanah Dinas Sosial	50.624.000,00
c. Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00
d. Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin Sekretariat Daerah	70.000.000,00
e. Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin Satuan Polisi Pamong Praja	45.234.525,00
f. Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin Badan Penanggulangan Bencana Daerah	440.875.000,00
g. Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin Dinas Perhubungan	5.876.077.524,00
h. Penerimaan Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	159.224.352.463,09
i. Penerimaan Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.172.259.320,00
j. Penerimaan Hibah Dalam Bentuk KDP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.293.863.333,00
<b>Jumlah</b>	<b>197.061.212.965,09</b>

### 5.3.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

#### 5.3.2.1 Beban - LO

Beban - LO pada Tahun 2023 sebesar Rp2.623.827.032.560,35 sedangkan pada Tahun 2022 Beban Operasi - LO sebesar Rp2.528.880.828.016,03 dan terjadi kenaikan sebesar Rp94.946.204.544,32 atau 3,75% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2.1 Beban - LO**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenalkan/(Penurunan)	%
Beban - LO	2.623.827.032.560,35	2.528.880.828.016,03	94.946.204.544,32	3,75
<b>Jumlah</b>	<b>2.623.827.032.560,35</b>	<b>2.528.880.828.016,03</b>	<b>94.946.204.544,32</b>	<b>3,75</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Pegawai	961.174.813.512,00	987.316.514.741,80
Beban Persediaan	183.332.658.536,36	158.898.962.925,77



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Beban Jasa	456.432.745.192,26	428.458.779.424,70
Beban Pemeliharaan	43.006.921.006,00	62.017.726.716,00
Beban Perjalanan Dinas	112.505.439.105,00	103.902.057.516,00
Beban Subsidi	122.000.000,00	436.450.000,00
Beban Hibah	108.089.718.403,05	47.790.625.141,92
Beban Bantuan Sosial	12.351.250.026,00	19.677.015.000,00
Beban Penyisihan Piutang	14.119.532.834,64	13.347.270.253,93
Beban Penyusutan dan Amortisasi	334.552.998.738,04	336.590.923.282,91
Beban Transfer	393.707.154.991,00	379.598.382.063,00
Beban Lain-lain	4.432.800.212,00	846.120.950,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.623.827.032.560,35</b>	<b>2.528.880.828.016,03</b>

#### 5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Tahun 2023 sebesar Rp961.174.813.512,00 sedangkan pada Tahun 2022 Beban Pegawai sebesar Rp987.316.514.741,80 dan terjadi penurunan sebesar Rp26.141.701.229,80 atau 2,65% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2.1.1 Beban Pegawai**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pegawai	961.174.813.512,00	987.316.514.741,80	(26.141.701.229,80)	(2,65)
<b>Jumlah</b>	<b>961.174.813.512,00</b>	<b>987.316.514.741,80</b>	<b>(26.141.701.229,80)</b>	<b>(2,65)</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	548.461.597.644,00	588.463.246.667,00
Dinas Kesehatan	124.238.610.766,00	120.397.723.140,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	63.635.388.674,00	68.121.471.156,80
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9.975.481.784,00	9.922.691.485,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	3.367.243.251,00	3.831.563.513,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.557.297.911,00	3.634.623.213,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.816.339.014,00	3.697.058.548,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3.128.491.254,00	3.027.561.598,00
Dinas Sosial	3.253.526.699,00	3.409.721.284,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.975.733.073,00	3.951.676.156,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.787.842.853,00	2.656.681.470,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.041.883.615,00	4.590.343.586,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.747.490.577,00	2.884.679.205,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.931.033.044,00	3.282.546.570,00
Dinas Perhubungan	4.474.470.765,00	4.291.232.945,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	4.013.797.930,00	3.959.013.239,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.593.195.079,00	5.338.909.060,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.287.242.209,00	3.311.001.622,00
Dinas Perikanan	3.994.667.020,00	3.985.690.826,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.896.321.146,00	2.962.144.565,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	13.291.650.927,00	15.265.031.577,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	6.684.586.380,00	6.702.007.926,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	3.667.135.241,00	3.838.665.112,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	3.531.284.682,00	3.533.488.026,00
Sekretariat Daerah	20.049.360.270,00	20.320.526.960,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37.089.808.012,00	37.023.329.950,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.455.948.226,00	6.485.672.700,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	6.518.188.577,00	7.905.775.570,00
Badan Pendapatan Daerah	11.222.125.909,00	11.621.672.469,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.238.111.883,00	4.088.019.726,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Inspektorat Kabupaten	13.042.157.185,00	11.939.004.767,00
Kecamatan Kampar Kiri	1.565.374.868,00	1.765.549.923,00
Kecamatan Tapung Hilir	1.480.847.493,00	1.553.218.477,00
Kecamatan Tapung Hulu	946.314.370,00	1.026.982.759,00
Kecamatan Tapung	1.312.823.167,00	1.440.619.261,00
Kecamatan Tambang	2.023.348.371,00	1.980.529.281,00
Kecamatan Kampar	2.273.357.227,00	2.309.146.121,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.382.268.357,00	1.502.972.232,00
Kecamatan Siak Hulu	2.283.876.041,00	2.317.412.118,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.213.962.194,00	1.564.910.436,00
Kecamatan Rumbio Jaya	947.246.320,00	1.015.962.985,00
Kecamatan Kampar Utara	605.767.475,00	639.805.599,00
Kecamatan Kampa	915.295.947,00	1.148.426.979,00
Kecamatan Salo	779.746.575,00	839.157.909,00
Kecamatan Bangkineng	1.686.782.769,00	1.805.751.747,00
Kecamatan Kuok	1.104.981.527,00	1.177.809.853,00
Kecamatan Bangkineng Kota	1.898.157.969,00	2.047.202.709,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	1.606.899.634,00	1.588.772.470,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.275.642.259,00	1.393.627.146,00
Kecamatan Gunung Sahilan	863.741.666,00	943.416.145,00
Kecamatan Perhentian Raja	1.297.143.833,00	1.301.667.215,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	1.038.704.907,00	1.078.499.995,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.704.528.963,00	2.431.698.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>961.174.813.512,00</b>	<b>987.316.514.741,80</b>

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai LRA, Beban Pegawai LO dan Utang Belanja Pegawai Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Beban Pegawai Tahun Berjalan (LO)	961.174.813.512,00
b. Belanja Pegawai Tahun Berjalan (LRA)	936.576.698.454,00
c. Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan (Neraca)	15.927.035.000,00
d. Utang Belanja Pegawai Tahun 20NN-1 (Neraca)	15.401.639.608,00
<b>Selisih (a-b)-(c-d)</b>	<b>24.072.719.666,00</b>

Perbedaan Belanja Pegawai LRA, Beban Pegawai LO dan Utang Belanja Pegawai Neraca sebesar Rp24.072.719.666,00 terdiri dari:

a. Beban Barang jasa BLUD reklas menjadi Beban Jasa Pegawai RSUD	24.072.719.666,00
<b>Jumlah</b>	<b>24.072.719.666,00</b>

#### 5.3.2.1.2 Beban Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Beban Persediaan pada Tahun 2023 sebesar Rp183.332.658.538,36 sedangkan pada Tahun 2022 Beban Persediaan sebesar Rp158.898.962.925,77 dan terjadi kenaikan sebesar Rp24.433.695.612,59 atau 15,38% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2.1.2 Beban Persediaan**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Persediaan	183.332.658.538,36	158.898.962.925,77	24.433.695.612,59	15,38
<b>Jumlah</b>	<b>183.332.658.538,36</b>	<b>158.898.962.925,77</b>	<b>24.433.695.612,59</b>	<b>15,38</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	28.405.951.713,00	34.868.130.476,00
Dinas Kesehatan	21.459.081.153,36	17.965.812.719,90
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	34.994.194.384,48	29.900.237.222,30
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	28.309.313.204,00	28.779.200.265,01
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	7.674.360.420,00	432.046.133,00
Satuan Polisi Pamong Praja	477.053.927,00	448.343.415,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.369.566.480,00	553.379.376,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1.546.324.222,00	686.325.600,00
Dinas Sosial	997.067.870,00	494.068.042,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.849.086.415,00	1.776.407.212,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.905.967.159,00	2.295.836.824,39
Dinas Lingkungan Hidup	3.808.288.197,00	3.380.719.534,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.628.709.810,33	2.051.642.100,67
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	467.220.000,00	439.114.250,00
Dinas Perhubungan	3.771.548.649,00	2.290.486.916,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	1.999.946.166,00	1.386.613.658,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.268.877.130,00	699.113.470,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	730.543.290,00	283.559.226,00
Dinas Perikanan	636.243.750,00	788.508.621,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	695.469.840,00	696.320.388,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	3.154.501.300,00	3.152.124.789,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2.296.929.421,19	1.620.022.935,50
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	1.575.808.383,00	1.236.337.201,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	925.625.416,00	816.110.135,00
Sekretariat Daerah	9.093.624.579,00	7.878.965.951,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3.905.021.769,00	4.794.685.023,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.779.594.450,00	1.921.957.037,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.492.663.526,00	1.412.620.071,00
Badan Pendapatan Daerah	2.524.251.148,00	2.115.305.989,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	380.287.850,00	236.489.265,00
Inspektorat Kabupaten	419.456.580,00	377.973.824,00
Kecamatan Kampar Kiri	148.498.950,00	145.597.238,00
Kecamatan Tapung Hilir	154.790.400,00	78.756.802,00
Kecamatan Tapung Hulu	183.384.600,00	130.843.100,00
Kecamatan Tapung	184.841.501,00	120.281.481,00
Kecamatan Tambang	169.187.000,00	89.690.600,00
Kecamatan Kampar	509.484.200,00	151.901.716,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	223.138.400,00	199.720.172,00
Kecamatan Siak Hulu	191.863.100,00	100.273.058,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	163.514.450,00	85.906.205,00
Kecamatan Rumbio Jaya	188.251.100,00	89.864.279,00
Kecamatan Kampar Utara	158.039.500,00	101.931.498,00
Kecamatan Kampa	148.070.450,00	82.955.677,00
Kecamatan Salo	106.233.400,00	80.189.071,00
Kecamatan Bangkinang	1.011.966.201,00	133.849.978,00
Kecamatan Kuok	134.826.000,00	97.863.580,00
Kecamatan Bangkinang Kota	277.864.650,00	185.658.839,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	158.404.770,00	130.038.400,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	108.951.774,00	120.239.539,00
Kecamatan Gunung Sahilan	83.430.000,00	78.536.050,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kecamatan Perhentian Raja	135.768.600,00	76.551.150,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	137.144.600,00	73.268.364,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.052.436.730,00	586.808.499,00
<b>Jumlah</b>	<b>183.332.658.538,36</b>	<b>158.898.962.925,77</b>

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang & Jasa terkait Persediaan LRA, Beban Persediaan LO dan Persediaan Barang Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Beban Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LO)	795.276.763.841,62
b. Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LRA)	849.561.732.279,45
c. Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	23.447.508.598,00
d. Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	14.620.679.368,00
e. Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	86.000.000,00
f. Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	217.400.000,00
g. Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	23.319.644.013,33
h. Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	31.813.823.630,50
<b>Selisih a-b+c-d</b>	<b>-71.737.377.265,00</b>

Perbedaan Belanja Barang & Jasa terkait Persediaan LRA, Beban Persediaan LO dan Persediaan Barang Neraca sebesar (Rp71.737.377.265,00) terdiri dari:

a. Beban Menjadi Aset Disediakan Karena Salah Penganggaran	-16.830.404.780,00
b. Aset menjadi Beban Disediakan Karena Salah Penganggaran	227.679.252,00
c. Aset menjadi Beban Disediakan Karena Salah Penganggaran	3.182.189.520,00
d. Mutasi Persediaan Dinkes ke RSUD Karena Salah Penganggaran	-959.323.630,19
e. Beban Menjadi Aset RSUD Karena Salah Penganggaran	-645.889.000,00
f. Beban Menjadi Aset PUPR Karena Salah Penganggaran	-16.031.699.138,00
g. Beban Menjadi Aset Dinkes Karena Salah Penganggaran	-2.891.695.908,00
h. Aset Menjadi Beban Dinkes Karena Salah Penganggaran	30.185.753,00
i. Reklas Beban Jasa Blud Menjadi Beban Pegawai Blud RSUD	-24.072.719.666,00
j. Mutasi Persediaan Dinkes ke RSUD Karena Salah Penganggaran	959.323.630,19
k. Aset Menjadi Beban Blud RSUD Karena Salah Penganggaran	26.481.600,00
l. Aset Menjadi Beban Blud RSUD Karena Salah Penganggaran	63.544.750,00
m. Beban Menjadi Aset PUPR Karena Salah Penganggaran	-115.873.450,00
n. Aset menjadi Beban PUPR Karena Salah Penganggaran	8.080.000,00
o. Beban Menjadi Aset PERKIM Karena Salah Penganggaran	-154.327.000,00
p. Aset menjadi Beban Satpol PP Karena Salah Penganggaran	17.940.000,00
q. Aset Menjadi Beban BPBD Karena Salah Penganggaran	5.769.000,00
r. Beban Menjadi Aset BPBD Karena Salah Penganggaran	-80.749.000,00
s. Beban Menjadi Aset DAMKAR Karena Salah Penganggaran	-145.420.000,00
t. Beban Menjadi Aset DAMKAR Karena Salah Penganggaran	-1.879.122.000,00
u. Beban Menjadi Aset DINGSOS Karena Salah Penganggaran	-871.074.800,00
v. Beban Menjadi Aset DINGSOS Karena Salah Penganggaran	-279.145.950,00
w. Aset Menjadi Beban Dinas KB Karena Salah Penganggaran	327.681.000,00
x. Beban Menjadi Aset Dinas KB Karena Salah Penganggaran	-152.580.000,00
y. Aset Menjadi Beban Diskepang Karena Salah Penganggaran	219.263.240,00
z. Beban Menjadi Aset Diskepang Karena Salah Penganggaran	-23.670.000,00
aa. Aset Menjadi Beban DLH Karena Salah Penganggaran	476.977.000,00
ab. Beban Menjadi Aset DLH Karena Salah Penganggaran	-230.953.000,00
ac. Beban Menjadi Aset DLH Karena Salah Penganggaran	-89.245.000,00
ad. Beban Menjadi Aset CAPIL Karena Salah Penganggaran	-328.965.000,00
ae. Beban Menjadi Aset PEMDES Karena Salah Penganggaran	-49.931.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

af.	Beban Menjadi Aset Dishub Karena Salah Penganggaran	-710.966.000,00
ag.	Aset Menjadi Beban Dishub Karena Salah Penganggaran	765.433.000,00
ah.	Beban Menjadi Aset KB Karena Salah Penganggaran	-182.266.021,00
ai.	Beban Menjadi Aset PEMDES Karena Salah Penganggaran	-367.630.680,00
aj.	Beban Menjadi Aset Perikanan Karena Salah Penganggaran	-760.613.000,00
ak.	Aset Menjadi Beban P2TSP Karena Salah Penganggaran	1.868.000,00
al.	Beban Menjadi Aset P2TSP Karena Salah Penganggaran	-220.053.301,00
am.	Aset Menjadi Beban Perpustakaan Karena Salah Penganggaran	100.920.000,00
an.	Beban Menjadi Aset Perpustakaan Karena Salah Penganggaran	-100.019.850,00
ao.	Beban Menjadi Aset Dinas Pariwisata Karena Salah Penganggaran	177.937.000,00
ap.	Beban Menjadi Aset Dinas Perindustrian Karena Salah Penganggaran	-502.192.960,00
aq.	Aset Menjadi Beban Pariwisata Karena Salah Penganggaran	-217.665.000,00
ar.	Beban Menjadi Aset Dinas Pariwisata Karena Salah Penganggaran	-54.504.000,00
as.	Beban Menjadi Aset Dinas Disbun Karena Salah Penganggaran	-181.004.910,00
at.	Beban Menjadi Aset Dinas Disbun Karena Salah Penganggaran	-943.920.328,00
au.	Beban Menjadi Aset Bapenda Karena Salah Penganggaran	-225.787.100,00
av.	Beban Menjadi Aset Dinas Pertanian Karena Salah Penganggaran	-532.474.550,00
aw.	Beban Menjadi Aset Diskop Karena Salah Penganggaran	22.758.000,00
ax.	Beban Menjadi Aset Diskop Karena Salah Penganggaran	-49.782.000,00
ay.	Aset Menjadi Beban Diskop Karena Salah Penganggaran	-36.600.000,00
az.	Beban Menjadi Aset Disperindag Karena Salah Penganggaran	-180.856.000,00
ba.	Beban Menjadi Aset Diskominfo Karena Salah Penganggaran	-1.172.650.788,00
bb.	Aset Menjadi Beban Setda Karena Salah Penganggaran	90.946.450,00
bc.	Beban Menjadi Aset Setda Karena Salah Penganggaran	-128.702.500,00
bd.	Beban Menjadi Aset Setda Karena Salah Penganggaran	-304.403.700,00
be.	Beban Menjadi Aset Setwan Karena Salah Penganggaran	-2.609.004.000,00
bf.	Beban Menjadi Aset Setwan Karena Salah Penganggaran	-1.242.815.000,00
bg.	Beban Menjadi Aset Bappeda Karena Salah Penganggaran	-175.000.000,00
bh.	Beban Menjadi Aset BPKAD Karena Salah Penganggaran	-402.206.000,00
bi.	Beban Menjadi Aset Inspektorat Karena Salah Penganggaran	-329.075.000,00
bj.	Beban Menjadi Aset Kecamatan Kamkir Karena Salah Penganggaran	-21.640.000,00
bk.	Aset Menjadi Beban Setwan Karena Salah Penganggaran	14.375.000,00
bl.	Beban Menjadi Aset Kecamatan XIII Koto Kampar Karena Salah Penganggaran	-84.280.000,00
bm.	Beban Menjadi Aset Kecamatan Rumbio Jaya Karena Salah Penganggaran	-30.780.000,00
bn.	Beban Menjadi Aset Kecamatan Kampar Utara Karena Salah Penganggaran	-17.082.000,00
bo.	Beban Menjadi Aset Kecamatan Kakihil Karena Salah Penganggaran	-294.000.000,00
bp.	Beban Menjadi Aset Bappeda Karena Salah Penganggaran	-400.119.000,00
bq.	Aset Menjadi Beban BPKAD Karena Salah Penganggaran	5.025.000,00
br.	Beban Menjadi Aset Setwan Karena Salah Penganggaran	-19.800.000,00
bs.	Beban Menjadi Aset Inspektorat Karena Salah Penganggaran	-20.650.000,00
bt.	Beban Menjadi Aset Kec Tapung Karena Salah Penganggaran	-16.628.000,00
bu.	Beban Menjadi Aset Kec Siak Hulu Karena Salah Penganggaran	-53.500.000,00
bv.	Beban Menjadi Aset Kec Rumja Karena Salah Penganggaran	-4.000.000,00
bw.	Aset Menjadi Beban Kec Bangkot Karena Salah Penganggaran	38.187.450,00
bx.	Beban Menjadi Aset Kec Gungsai Karena Salah Penganggaran	-29.900.000,00
bz.	Beban Menjadi Aset Kec Koto Kampar Hulu Karena Salah Penganggaran	-14.018.000,00
ca.	Beban Menjadi Aset Kesbangpol Karena Salah Penganggaran	-50.563.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>-71.737.377.265,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**5.3.2.1.3 Beban Jasa**

Beban Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang bernilai manfaat kurang dari dua belas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Beban operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Beban Jasa pada Tahun 2023 sebesar Rp456.432.745.192,26 sedangkan pada Tahun 2022 Beban Jasa sebesar Rp428.458.779.424,70 dan terjadi kenaikan sebesar Rp27.973.965.767,56 atau 6,53% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2.1.3 Beban Jasa**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Jasa	456.432.745.192,26	428.458.779.424,70	27.973.965.767,56	6,53
Jumlah	456.432.745.192,26	428.458.779.424,70	27.973.965.767,56	6,53

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	139.948.134.392,00	137.423.989.169,20
Dinas Kesehatan	59.450.638.708,00	53.791.985.173,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	34.031.483.713,00	28.081.367.578,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12.127.960.954,00	12.090.870.931,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	3.663.631.350,00	3.465.858.020,00
Satuan Polisi Pamong Praja	10.259.294.781,00	10.174.786.621,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.136.511.547,00	2.857.828.768,00
Dinas Pemadam Kobakaran Dan Penyelamatan	9.477.089.602,00	7.896.663.484,00
Dinas Sosial	4.537.985.821,00	4.023.784.351,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8.925.458.187,00	8.986.433.658,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.523.162.300,00	1.502.447.820,00
Dinas Lingkungan Hidup	11.043.391.419,00	11.432.175.776,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.692.172.505,00	1.947.914.902,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.508.044.165,00	1.870.505.683,00
Dinas Perhubungan	17.729.054.160,00	32.582.115.484,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	9.416.480.035,00	5.031.423.190,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.197.219.570,00	3.005.794.460,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.964.110.604,00	1.417.325.309,00
Dinas Perikanan	2.704.159.970,00	2.110.045.635,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	4.884.137.459,00	4.130.302.447,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	3.911.913.503,00	3.822.853.038,00
Dinas Perkebunan, Pelemakan Dan Kesehatan Hewan	4.587.484.772,00	3.346.787.480,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	2.482.125.276,00	3.340.732.423,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	2.908.648.995,00	3.471.572.388,00
Sekretariat Daerah	45.666.598.758,26	38.572.947.374,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17.028.819.796,00	12.768.216.979,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.459.263.220,00	4.443.976.715,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.833.854.615,00	3.743.876.517,00
Badan Pendapatan Daerah	3.705.391.187,00	3.380.320.212,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.226.053.895,00	2.750.016.839,00
Inspektorat Kabupaten	2.450.886.020,00	1.734.416.201,50
Kecamatan Kampar Kiri	541.336.812,00	542.291.312,00
Kecamatan Tapung Hilir	584.580.500,00	306.807.642,00
Kecamatan Tapung Hulu	415.524.849,00	247.754.080,00
Kecamatan Tapung	482.481.899,00	398.583.818,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kecamatan Tambang	382.337.789,00	316.563.866,00
Kecamatan Kampar	666.884.980,00	522.825.474,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	272.381.956,00	249.439.074,00
Kecamatan Siak Hulu	432.659.170,00	324.273.685,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	627.900.785,00	618.731.745,00
Kecamatan Rumbio Jaya	364.188.846,00	239.436.943,00
Kecamatan Kampar Utara	415.469.680,00	281.326.678,00
Kecamatan Kampa	382.419.800,00	285.327.000,00
Kecamatan Salo	328.672.456,00	255.187.179,00
Kecamatan Bangkinang	730.393.907,00	688.054.313,00
Kecamatan Kuok	350.815.085,00	304.213.007,00
Kecamatan Bangkinang Kota	1.117.759.590,00	914.178.996,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	354.649.460,00	195.159.586,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	534.599.990,00	362.018.680,00
Kecamatan Gunung Sahilan	308.931.596,00	284.498.794,00
Kecamatan Perhentian Raja	408.100.431,00	301.801.593,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	328.145.046,00	286.456.479,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.921.359.276,00	5.354.514.956,00
<b>Jumlah</b>	<b>456.432.745.192,26</b>	<b>428.458.779.424,70</b>

#### 5.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai kondisi yang bisa diterima.

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2023 sebesar Rp43.005.921.006,00 sedangkan pada Tahun 2022 Beban Pemeliharaan sebesar Rp52.017.726.716,00 dan terjadi penurunan sebesar Rp9.011.805.710,00 atau 17,32% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaiakan/(Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan	43.005.921.006,00	52.017.726.716,00	(9.011.805.710,00)	(17,32)
<b>Jumlah</b>	<b>43.005.921.006,00</b>	<b>52.017.726.716,00</b>	<b>(9.011.805.710,00)</b>	<b>(17,32)</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	6.115.789.198,00	7.426.873.593,00
Dinas Kesehatan	182.204.750,00	880.707.544,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	1.883.772.029,00	3.620.806.710,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10.868.541.302,00	6.167.648.347,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	287.547.057,00	459.533.261,00
Satuan Polisi Pamong Praja	317.700.000,00	362.564.972,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.342.902.165,00	1.033.999.675,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	322.502.500,00	359.970.500,00
Dinas Sosial	531.597.500,00	288.316.337,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	69.927.756,00	518.641.770,00
Dinas Ketahanan Pangan	95.187.156,00	39.187.438,00
Dinas Lingkungan Hidup	642.617.980,00	2.606.471.740,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	117.001.000,00	339.888.210,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	65.726.339,00	245.115.057,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dinas Perhubungan	2.577.306.000,00	1.669.179.750,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	460.874.590,00	524.837.789,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	76.290.000,00	591.213.812,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	20.606.000,00	243.484.515,00
Dinas Perikanan	217.317.174,00	1.321.091.238,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	104.554.000,00	192.489.400,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	45.452.255,00	289.785.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	201.208.900,00	363.599.365,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	265.889.006,00	990.899.200,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	129.159.500,00	873.001.612,00
Sekretariat Daerah	12.711.474.303,00	14.123.373.378,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.124.913.362,00	2.359.169.624,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	304.591.092,00	1.752.060.894,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	221.542.004,00	567.890.612,00
Badan Pendapatan Daerah	723.950.821,00	922.546.748,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40.396.000,00	23.530.116,00
Inspektorat Kabupaten	165.743.500,00	293.528.038,00
Kecamatan Kampar Kiri	35.920.832,00	21.691.795,00
Kecamatan Tapung Hilir	13.450.000,00	8.742.500,00
Kecamatan Tapung Hulu	13.204.200,00	17.627.500,00
Kecamatan Tapung	12.570.000,00	8.320.200,00
Kecamatan Tambang	20.399.000,00	39.658.300,00
Kecamatan Kampar	49.556.223,00	31.368.511,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	12.535.232,00	11.863.435,00
Kecamatan Siak Hulu	21.072.232,00	7.032.466,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	8.046.499,00	14.496.724,00
Kecamatan Rumbio Jaya	30.820.976,00	15.043.200,00
Kecamatan Kampar Utara	32.173.932,00	25.424.742,00
Kecamatan Kampa	10.509.508,00	12.845.700,00
Kecamatan Salo	21.393.600,00	19.876.213,00
Kecamatan Bangkinang	2.841.500,00	6.665.663,00
Kecamatan Kuok	8.295.000,00	10.789.900,00
Kecamatan Bangkinang Kota	288.666.837,00	48.401.563,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	26.807.500,00	5.300.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	11.776.700,00	16.926.078,00
Kecamatan Gunung Sahilan	472.500,00	19.951.600,00
Kecamatan Perhentian Raja	11.830.000,00	10.964.100,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	20.443.000,00	35.518.070,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	148.870.496,00	187.712.221,00
<b>Jumlah</b>	<b>43.005.921.006,00</b>	<b>52.017.726.716,00</b>

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang & Jasa terkait Belanja Pemeliharaan LRA, Beban Pemeliharaan LO dan Utang Belanja Pemeliharaan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Beban Pemeliharaan ( LO )	43.005.921.006,00
b. Belanja Pemeliharaan ( LRA )	60.040.135.405,00
c. Utang Belanja Pemeliharaan Tahun Berjalan (Neraca)	59.870.825,00
d. Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 20NN-1 (Neraca)	27.054.000,00
<b>Selisih a-b+c-d</b>	<b>-17.067.031.224,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Perbedaan Belanja Barang & Jasa terkait Belanja Pemeliharaan LRA, Beban Pemeliharaan LO dan Utang Belanja Pemeliharaan Neraca sebesar Rp17.067.031.224,00 terdiri dari:

<b>Mutasi Tambah</b>	
a. Reklas Beban Pemeliharaan dari Belanja Bos Disdik	5.802.374.776,00
b. Reklas Beban Pemeliharaan dari Belanja Blud RSUD	1.691.281.704,00
c. Reklas Salah penganggaran Aset menjadi Beban Pemeliharaan RSUD	62.964.750,00
d. Reklas Salah penganggaran Aset menjadi Beban Pemeliharaan PUPR	8.080.000,00
e. Reklas Salah penganggaran Aset menjadi Beban Pemeliharaan Dinas KB	7.056.000,00
f. Reklas Salah penganggaran Aset menjadi Beban Pemeliharaan Diskebang	30.990.000,00
g. Reklas Salah penganggaran Aset menjadi Beban Pemeliharaan DisHub	765.433.000,00
h. Reklas Salah penganggaran Beban persediaan menjadi Beban Pemeliharaan P2TSP	20.960.000,00
i. Reklas Salah penganggaran Beban persediaan menjadi Beban Pemeliharaan Pariwisata	177.937.000,00
j. Reklas Salah penganggaran Beban persediaan menjadi Beban Pemeliharaan Kec Bangkot	38.187.450,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
a. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi aset Dinsos	(199.620.000,00)
b. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi aset Dishub	(407.470.000,00)
c. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi aset Diskominfo	(544.416.900,00)
d. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi aset RSUD	(30.000.000,00)
e. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi aset Disdik	(10.530.367.000,00)
f. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi aset PUPR	(9.882.346.003,00)
g. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi aset Damkar	(1.704.152.000,00)
h. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi aset DPMTSP	(195.053.301,00)
i. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi aset Perikanan	(748.613.000,00)
j. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi aset Pertanian	(198.321.000,00)
k. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi aset Dikepang	(12.480.000,00)
l. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi aset Diskebang	(49.782.000,00)
m. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi aset Perindustrian	(196.751.000,00)
n. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi aset Setda	(244.574.700,00)
o. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi aset BPKAD	(169.709.000,00)
p. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi aset Inspektorat	(329.075.000,00)
q. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi aset Kamkir	(21.640.000,00)
r. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi aset Pariwisata	(207.915.000,00)
<b>Selisih a-b+c-d</b>	<b>-17.067.031.224,00</b>

### 5.3.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah kegiatan operasional dalam bepergian ke suatu tempat tertentu dalam rangka melaksanakan tugas kewajiban kantor.

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2023 sebesar Rp112.505.439.105,00 sedangkan pada Tahun 2022 Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp103.902.057.516,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp8.603.381.589,00 atau 8,28% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas	112.505.439.105,00	103.902.057.516,00	8.603.381.589,00	8,28
<b>Jumlah</b>	<b>112.505.439.105,00</b>	<b>103.902.057.516,00</b>	<b>8.603.381.589,00</b>	<b>8,28</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	2.969.378.776,00	2.357.212.205,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dinas Kesehatan	18.235.564.341,00	20.913.164.571,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	702.884.132,00	938.812.729,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.325.188.086,00	2.227.946.687,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	1.249.376.303,00	1.411.379.236,00
Satuan Polisi Pamong Praja	447.736.000,00	552.887.040,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	583.869.067,00	760.239.489,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	708.850.925,00	341.194.168,00
Dinas Sosial	1.273.504.980,00	1.111.144.864,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.465.385.201,00	3.626.217.100,00
Dinas Kelahanan Pangan	858.486.232,00	716.998.870,00
Dinas Lingkungan Hidup	762.377.184,00	898.736.154,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	422.812.827,00	350.719.463,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	727.244.924,00	780.158.000,00
Dinas Perhubungan	1.072.044.077,00	1.128.731.009,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	1.507.578.950,00	1.356.859.958,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.177.135.739,00	893.129.073,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	932.534.745,00	597.458.030,00
Dinas Perikanan	1.984.889.631,00	1.446.509.265,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	725.498.259,00	813.270.245,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1.822.730.450,00	2.030.919.695,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1.183.510.733,00	820.919.963,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	1.244.362.128,00	1.391.416.783,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	1.483.078.320,00	1.856.270.875,00
Sekretariat Daerah	12.080.588.834,00	11.291.724.427,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34.065.721.623,00	28.991.025.293,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.506.811.948,00	4.196.570.419,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.517.010.480,00	1.379.017.181,00
Badan Pendapatan Daerah	1.684.460.487,00	2.171.769.182,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.342.474.972,00	819.324.159,00
Inspektorat Kabupaten	3.161.979.021,00	2.279.721.070,00
Kecamatan Kampar Kiri	126.362.000,00	141.232.790,00
Kecamatan Tapung Hilir	104.712.000,00	50.515.290,00
Kecamatan Tapung Hulu	142.881.800,00	127.787.200,00
Kecamatan Tapung	135.077.400,00	104.308.000,00
Kecamatan Tambang	138.146.000,00	110.450.000,00
Kecamatan Kampar	183.433.319,00	111.358.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	153.443.780,00	146.474.772,00
Kecamatan Siak Hulu	105.239.600,00	33.750.000,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	68.361.000,00	36.810.000,00
Kecamatan Rumbio Jaya	102.167.000,00	112.052.000,00
Kecamatan Kampar Utara	127.238.399,00	65.143.469,00
Kecamatan Kampa	105.688.000,00	82.206.000,00
Kecamatan Salo	89.591.586,00	105.579.411,00
Kecamatan Bangkinang	113.526.000,00	117.483.000,00
Kecamatan Kuok	75.895.050,00	39.610.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	99.639.198,00	125.563.887,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	110.628.000,00	70.640.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	98.097.590,00	78.570.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	71.552.800,00	99.930.880,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kecamatan Perhentian Raja	83.619.000,00	53.220.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	60.000.000,00	62.850.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.995.070.208,00	1.575.073.634,00
<b>Jumlah</b>	<b>112.505.439.105,00</b>	<b>103.902.057.516,00</b>

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang & Jasa terkait Belanja Perjalanan Dinas LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Beban Perjalanan Dinas ( LO )	112.505.439.105,00
b. Belanja Perjalanan Dinas ( LRA )	110.272.278.784,00
<b>Selisih a-b+c-d</b>	<b>2.233.160.321,00</b>

Perbedaan Belanja Barang & Jasa terkait Belanja Perjalanan Dinas LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO sebesar Rp2.233.160.321,00 terdiri dari:

<b>Mutasi Tambah</b>	
a. Reklas Beban Bos menjadi Beban Perjalanan Dinas Disdikpora	1.879.141.600,00
b. Reklas Beban BLUD menjadi Beban Perjalanan Dinas RSUD	354.018.721,00
<b>Selisih a-b+c-d</b>	<b>2.233.160.321,00</b>

#### 5.3.2.1.6 Beban Subsidi

Beban Subsidi pada Tahun 2023 sebesar Rp122.000.000,00 sedangkan pada Tahun 2022 Beban Subsidi sebesar Rp436.450.000,00 dan terjadi penurunan sebesar Rp314.450.000,00 atau 72,05% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2.1.6 Beban Subsidi**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenalkan/(Penurunan)	%
Beban Subsidi	122.000.000,00	436.450.000,00	-314.450.000,00	(72,05)
<b>Jumlah</b>	<b>122.000.000,00</b>	<b>436.450.000,00</b>	<b>-314.450.000,00</b>	<b>(72,05)</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Perhubungan	22.000.000,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	100.000.000,00	436.450.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>122.000.000,00</b>	<b>436.450.000,00</b>

Tidak terdapat perbedaan jumlah Belanja Subsidi LRA dan Utang Belanja Subsidi Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Beban Subsidi Tahun Berjalan (LO)	122.000.000,00
b. Belanja Subsidi Tahun Berjalan (LRA)	122.000.000,00
c. Utang Belanja Subsidi Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d. Utang Belanja Subsidi Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
<b>Selisih a-b-c+d</b>	<b>0,00</b>

#### 5.3.2.1.7 Beban Hibah

Beban Hibah pada Tahun 2023 sebesar Rp108.089.718.403,05 sedangkan pada Tahun 2022 Beban Hibah sebesar Rp47.790.625.141,92 dan terjadi kenaikan sebesar Rp60.299.093.261,13 atau 126,17% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2.1.7 Beban Hibah**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenalkan/(Penurunan)	%
Beban Hibah	108.089.718.403,05	47.790.625.141,92	60.299.093.261,13	126,17
<b>Jumlah</b>	<b>108.089.718.403,05</b>	<b>47.790.625.141,92</b>	<b>60.299.093.261,13</b>	<b>126,17</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	44.048.886.000,00	21.985.409.900,00
Dinas Kesehatan	1.400.000.000,00	1.300.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.913.207.500,00	3.901.370.403,00
Dinas Sosial	1.688.700.000,00	2.475.133.803,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	12.500.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	100.000.000,00	100.000.000,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.278.085.800,00	916.312.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.590.576.803,05	4.519.856.985,92
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.415.999.900,00	0,00
Dinas Perikanan	7.366.863.000,00	6.379.120.650,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0,00	797.754.400,00
Sekretariat Daerah	2.619.000.000,00	2.405.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.658.399.400,00	2.998.167.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>108.089.718.403,05</b>	<b>47.790.625.141,92</b>

Adapun perbedaan jumlah Belanja Hibah LRA, Beban Hibah LO, Belanja Hibah Tahun berjalan dan Utang Belanja Hibah Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Beban Hibah Tahun Berjalan (LO)	108.089.718.403,05
b. Belanja Hibah Tahun Berjalan (LRA)	102.176.510.903,05
c. Utang Belanja Hibah Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d. Utang Belanja Hibah Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
<b>Selisih a-b-c+d</b>	<b>5.913.207.500,00</b>

Perbedaan Belanja Hibah LRA, Beban Hibah LO dan Utang Belanja Hibah Neraca sebesar Rp5.913.207.500,00 terdiri dari:

a. Beban Hibah PUPR ke Masyarakat	5.913.207.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.913.207.500,00</b>

#### 5.3.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2023 sebesar Rp12.351.250.028,00 sedangkan pada Tahun 2022 Beban Bantuan Sosial sebesar Rp19.677.015.000,00 dan terjadi penurunan sebesar Rp7.325.764.972,00 atau 37,23% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2.1.8 Beban Bantuan Sosial**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Bantuan Sosial	12.351.250.028,00	19.677.015.000,00	(7.325.764.972,00)	(37,23)
<b>Jumlah</b>	<b>12.351.250.028,00</b>	<b>19.677.015.000,00</b>	<b>(7.325.764.972,00)</b>	<b>(37,23)</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12.300.000.000,00	16.200.000.000,00
Dinas Sosial	51.250.028,00	865.220.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	1.209.800.000,00
Dinas Perikanan	0,00	243.000.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0,00	703.800.000,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	455.395.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.351.250.028,00</b>	<b>19.677.015.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Tidak terdapat perbedaan jumlah Belanja Bantuan Sosial LRA, Beban Bantuan Sosial LO dan Utang Belanja Bantuan Sosial Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Beban Bantuan Sosial Tahun Berjalan (LO)	12.351.250.028,00
b. Belanja Bantuan Sosial Tahun Berjalan (LRA)	12.351.250.028,00
c. Utang Belanja Bantuan Sosial Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d. Utang Belanja Bantuan Sosial Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
<b>Selisih a-b-c+d</b>	<b>0,00</b>

#### 5.3.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2023 sebesar Rp14.119.532.834,64 sedangkan pada Tahun 2022 Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp13.347.270.253,93 dan terjadi kenaikan sebesar Rp772.262.580,71 atau 5,79% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyisihan Piutang	14.119.532.834,64	13.347.270.253,93	772.262.580,71	5,79
<b>Jumlah</b>	<b>14.119.532.834,64</b>	<b>13.347.270.253,93</b>	<b>772.262.580,71</b>	<b>5,79</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyisihan Piutang Pajak Badan Pendapatan Daerah	13.939.546.674,64	13.116.908.978,43
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	51.036.160,00	89.311.275,50
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	128.950.000,00	141.050.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.119.532.834,64</b>	<b>13.347.270.253,93</b>

Adapun perbedaan jumlah Beban Penyisihan Piutang LO dan Penyisihan Piutang Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Beban Penyisihan Piutang Tahun Berjalan (LO)	14.119.532.834,64
b. Penyisihan Piutang Tahun Berjalan (Neraca)	-163.387.835.553,04
c. Penyisihan Piutang Tahun 20NN-1 (Neraca)	-149.844.806.314,01
<b>Selisih a-(b-c)</b>	<b>576.503.595,61</b>

Perbedaan Beban Penyisihan Piutang LO dan Penyisihan Piutang Neraca sebesar Rp576.503.595,61 terdiri dari:

a. Kurang Saji Penyisihan Piutang Dishub Tahun 2022	-497.250,00
b. Penyisihan terhadap piutang Diskominfo yang telah diangsur	5.900.000,00
c. Penyisihan Piutang atas pembayaran piutang PBB Tahun Sebelumnya	571.100.845,61
<b>Jumlah</b>	<b>576.503.595,61</b>

#### 5.3.2.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp334.552.998.738,04 sedangkan pada Tahun 2022 Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp336.590.923.282,91 dan terjadi penurunan sebesar Rp2.037.924.544,87 atau 0,61%.

**Tabel 5.3.2.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	334.552.998.738,04	336.590.923.282,91	-2.037.924.544,87	(0,61)
<b>Jumlah</b>	<b>334.552.998.738,04</b>	<b>336.590.923.282,91</b>	<b>-2.037.924.544,87</b>	<b>(0,61)</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	113.526.331.516,62	112.558.707.632,95
Beban penyusutan Gedung dan Bangunan	39.776.038.818,62	37.985.683.159,70
Beban penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	181.193.931.102,80	185.851.693.990,26
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	56.697.500,00	194.638.500,00
Jumlah	<b>334.552.998.738,04</b>	<b>336.590.923.282,91</b>

**3.2.1.10.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp113.526.331.516,62 sedangkan pada Tahun 2022 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp112.558.707.632,95 dan terjadi kenaikan sebesar Rp967.623.883,67 atau 0,86% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2.1.10.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	113.526.331.516,62	112.558.707.632,95	967.623.883,67	0,86
Jumlah	<b>113.526.331.516,62</b>	<b>112.558.707.632,95</b>	<b>967.623.883,67</b>	<b>0,86</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	39.822.431.131,18	43.493.685.779,04
Dinas Kesehatan	13.711.258.205,60	13.048.631.346,54
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	23.060.559.712,84	22.192.224.683,23
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.478.082.008,00	1.993.308.974,66
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	359.297.545,49	249.997.195,48
Satuan Polisi Pamong Praja	248.406.988,80	471.351.172,35
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	563.374.377,64	707.687.868,56
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	466.585.078,57	163.305.792,86
Dinas Sosial	533.515.837,50	528.609.029,17
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	795.473.515,18	861.001.845,16
Dinas Ketahanan Pangan	162.178.495,00	187.524.240,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.711.914.223,29	1.557.911.633,98
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	719.912.071,43	445.378.901,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	361.362.585,72	282.535.547,22
Dinas Perhubungan	5.374.832.336,24	3.404.298.381,44
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	1.361.910.128,65	1.085.672.026,15
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.065.751.354,57	1.080.032.426,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	409.592.646,66	345.205.622,67
Dinas Perikanan	1.331.679.272,01	1.403.197.317,03
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	354.413.291,43	234.675.591,43
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	235.435.129,83	129.400.068,40
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	399.092.218,03	394.722.462,24
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	533.127.463,44	543.072.572,30
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	494.027.921,91	378.181.836,19
Sekretariat Daerah	10.385.846.810,82	10.604.536.027,24
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.952.700.361,00	2.537.609.882,43
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.226.433.646,50	995.750.473,51
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	666.633.979,01	1.066.194.029,47
Badan Pendapatan Daerah	920.936.750,59	708.102.802,25



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	241.428.903,57	191.305.358,58
Inspektorat Kabupaten	272.235.377,85	279.086.502,85
Kecamatan Kampar Kiri	64.575.753,88	65.796.220,55
Kecamatan Tapung Hilir	30.259.250,00	1.450.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	49.439.418,40	35.608.918,40
Kecamatan Tapung	19.493.400,00	1.644.500,00
Kecamatan Tambang	36.631.155,05	27.477.405,05
Kecamatan Kampar	62.678.150,00	27.560.250,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	38.989.800,00	52.749.800,00
Kecamatan Siak Hulu	23.320.930,23	15.804.930,23
Kecamatan XIII Koto Kampar	50.645.150,05	52.432.400,05
Kecamatan Rumbio Jaya	19.171.484,75	18.381.131,42
Kecamatan Kampar Utara	14.415.400,00	3.202.000,00
Kecamatan Kampa	28.122.787,50	14.238.087,50
Kecamatan Salo	29.276.792,00	24.683.042,00
Kecamatan Bangkinang	48.869.678,58	38.767.228,57
Kecamatan Kuk	6.760.000,00	6.870.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	50.928.388,00	46.289.088,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	34.207.116,67	20.782.450,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	68.362.480,00	45.700.560,00
Kecamatan Gunung Sahilan	32.892.750,00	24.021.750,00
Kecamatan Perhentian Raja	20.231.116,67	5.772.916,87
Kecamatan Koto Kampar Hulu	20.230.791,42	16.671.727,15
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	554.400.395,07	448.805.847,93
<b>Jumlah</b>	<b>113.526.331.516,62</b>	<b>112.558.707.632,95</b>

Adapun perbedaan jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin LO dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (LO)	113.526.331.516,62
b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	(980.804.893.081,77)
c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)	(868.079.949.595,15)
<b>Selisih a-(b-c)</b>	<b>801.388.031,00</b>

Perbedaan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin LO dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp801.388.031,00 terdiri dari:

a. Penghapusan Aset pada Selda	704.450.000,00
b. Penghapusan Aset pada Kec Tapung Hilir	23.900.000,00
c. Penghapusan Aset pada Kec Kampar Utara	13.800.000,00
d. Penghapusan Aset pada Kec Kampa	19.712.000,00
e. Penghapusan Aset pada Kec Kampar Kiri Hulu	39.526.031,00
<b>Jumlah</b>	<b>801.388.031,00</b>

### 3.2.1.10.2 Beban penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 sebesar Rp39.776.038.618,62 sedangkan pada Tahun 2022 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp37.985.683.159,70 dan terjadi kenaikan sebesar Rp1.790.355.458,92 atau 4,71% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2.1.10.2 Beban penyusutan Gedung dan Bangunan**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39.776.038.618,62	37.985.683.159,70	1.790.355.458,92	4,71
<b>Jumlah</b>	<b>39.776.038.618,62</b>	<b>37.985.683.159,70</b>	<b>1.790.355.458,92</b>	<b>4,71</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	15.333.347.383,88	14.463.571.414,85
Dinas Kesehatan	2.991.554.148,08	2.573.440.232,07
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	1.631.842.914,34	1.701.160.070,34
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	948.462.995,63	650.484.425,22
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	11.023.389.595,67	11.020.330.055,67
Satuan Polisi Pamong Praja	15.728.100,00	15.728.100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.081.333,24	24.884.333,25
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	871.200,00	871.200,00
Dinas Sosial	168.613.251,84	147.838.880,67
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	43.430.535,42	40.400.215,00
Dinas Kelahanan Pangan	162.393.991,06	162.393.991,06
Dinas Lingkungan Hidup	1.111.872.883,99	1.001.799.196,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.972.049,60	4.412.849,60
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.531.143,40	11.531.143,40
Dinas Perhubungan	470.320.379,27	465.619.680,99
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	57.927.670,86	53.818.666,12
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	134.033.204,70	89.211.010,60
Dinas Perikanan	701.004.867,85	686.706.895,67
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	477.696.989,84	474.768.261,09
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	148.540.415,01	138.228.544,02
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	410.518.092,76	393.308.036,87
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	297.961.365,07	296.965.716,07
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	750.375.438,70	738.665.658,00
Sekretariat Daerah	1.841.327.256,43	1.833.306.924,44
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	31.960.550,59	120.312.235,85
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	61.642.037,63	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	39.512.452,70	27.947.085,00
Badan Pendapatan Daerah	101.749.141,42	102.221.593,52
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.689.934,40	53.689.934,40
Inspektorat Kabupaten	12.833.951,31	8.449.258,54
Kecamatan Kampar Kiri	123.152.561,50	122.281.257,16
Kecamatan Tapung Hilir	11.182.600,00	11.182.600,00
Kecamatan Tapung Hulu	49.760.620,00	49.760.620,00
Kecamatan Tapung	13.111.760,00	13.111.760,00
Kecamatan Tambang	22.426.000,00	21.946.000,00
Kecamatan Kampar	110.110.161,43	110.110.161,43
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	23.210.658,00	23.210.658,00
Kecamatan Siak Hulu	33.794.253,00	33.962.996,13
Kecamatan XIII Koto Kampar	36.412.755,96	36.412.755,96
Kecamatan Rumbio Jaya	38.176.122,72	39.649.891,90
Kecamatan Kampar Utara	5.952.200,00	5.610.560,00
Kecamatan Kampa	22.037.035,88	22.037.035,87
Kecamatan Salo	10.151.073,17	10.151.073,17
Kecamatan Bangkinang	8.581.740,00	8.581.740,00
Kecamatan Kuok	44.740.497,78	44.740.497,78
Kecamatan Bangkinang Kota	41.232.315,35	37.866.475,35
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	11.105.750,79	11.105.750,79
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	23.259.504,00	20.379.504,00
Kecamatan Gunung Sahilan	40.990.908,52	40.990.908,52
Kecamatan Perhentian Raja	18.425.105,53	18.425.105,53
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.218.416,30	2.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>39.776.038.618,62</b>	<b>37.985.683.159,70</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Tidak terdapat perbedaan jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan LO dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LO)	39.776.038.618,62
b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	-540.628.193.356
c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)	-500.852.154.737
<b>Selisih a-(b-c)</b>	<b>0,00</b>

**3.2.1.10.3 Beban penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2023 sebesar Rp181.193.931.102,80 sedangkan pada Tahun 2022 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp185.851.893.990,26 dan terjadi penurunan sebesar Rp4.657.962.887,46 atau 2,51% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2.1.10.3 Beban penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	181.193.931.102,80	185.851.893.990,26	-4.657.962.887,46	(2,51)
<b>Jumlah</b>	<b>181.193.931.102,80</b>	<b>185.851.893.990,26</b>	<b>-4.657.962.887,46</b>	<b>(2,51)</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	252.882.292,60	186.330.665,10
Dinas Kesehatan	210.538.083,50	210.538.083,50
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	31.953.375,00	12.034.475,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	151.304.731.202,00	159.946.827.495,86
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	23.786.039.792,85	19.071.322.101,53
Satuan Polisi Pamong Praja	1.663.333,33	1.663.334,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.197.776.318,35	1.197.776.318,36
Dinas Sosial	3.502.159,00	3.502.159,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6.255.786,07	6.255.786,08
Dinas Ketahanan Pangan	2.768.238,12	2.768.238,12
Dinas Lingkungan Hidup	885.799.383,84	885.799.383,83
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	985.050,00	2.182.378,00
Dinas Perhubungan	537.441.763,33	617.713.063,33
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	1.250.000,00	1.250.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	646.530,15	646.530,15
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	75.255,00	75.255,00
Dinas Perikanan	936.758.883,05	1.553.224.313,05
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	243.749.375,00	239.051.225,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	460.191.808,56	460.191.808,57
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	120.149.919,24	197.573.620,75
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	471.474.427,50	471.474.427,50
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	130.552.272,78	263.559.024,00
Sekretariat Daerah	63.051.608,75	63.051.608,76
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17.943.066,67	17.943.066,66
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	13.718.223,13	13.718.223,12
Badan Pendapatan Daerah	5.341.020,84	5.341.020,83
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.210.375,00	3.210.375,00
Inspektorat Kabupaten	4.955.000,00	4.955.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	74.975.490,60	33.595.209,60
Kecamatan Tapung Hilir	71.666,67	231.666,66
Kecamatan Tambang	500.000,00	500.000,00
Kecamatan Kampar	63.873.593,85	61.162.284,90
Kecamatan XIII Koto Kampar	117.104.546,40	108.220.049,80



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kecamatan Rumbio Jaya	112.500,00	112.500,00
Kecamatan Kampar Utara	450.000,00	450.000,00
Kecamatan Kampa	165.750,00	165.750,00
Kecamatan Salo	155.000,00	155.000,00
Kecamatan Bangkinang	102.044.861,30	102.044.861,30
Kecamatan Kuok	825.000,00	825.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	47.047.620,62	33.962.158,19
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	492.916,67	492.916,67
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	88.236.779,70	69.486.779,71
Kecamatan Gunung Sahilan	283.333,33	283.333,33
Kecamatan Koto Kampar Hulu	187.500,00	187.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>181.193.931.102,80</b>	<b>185.851.893.990,26</b>

Adapun perbedaan jumlah Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan LO dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LO)	181.193.931.102,80
b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)	(4.348.973.535.384,60)
c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)	(4.167.782.004.281,80)
<b>Selisih a-(b-c)</b>	<b>2.400.000,00</b>

Perbedaan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan LO dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Neraca sebesar Rp2.400.000,00 terdiri dari:

a. Penghapusan Aset pada Kec Tapung Hilir	2.400.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.400.000,00</b>

#### 3.2.1.10.4 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Tahun 2023 sebesar Rp56.697.500,00 sedangkan pada Tahun 2022 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp194.638.500,00 dan terjadi penurunan sebesar Rp137.941.000,00 atau 70,87% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2.1.10.4 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	56.697.500,00	194.638.500,00	(137.941.000,00)	(70,87)
<b>Jumlah</b>	<b>56.697.500,00</b>	<b>194.638.500,00</b>	<b>(137.941.000,00)</b>	<b>(70,87)</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	12.430.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	0,00	38.976.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	24.962.500,00	12.475.000,00
Sekretariat Daerah	31.735.000,00	52.882.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	44.825.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	33.050.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>56.697.500,00</b>	<b>194.638.500,00</b>

#### 5.3.2.1.11 Beban Transfer

Beban Transfer atau beban bagi hasil digunakan untuk penganggaran yang bersumber dari Pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau Pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Beban Transfer pada Tahun 2023 sebesar Rp393.707.154.991,00 sedangkan pada Tahun 2022 Beban Transfer adalah sebesar Rp379.598.382.063,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp14.108.772.928,00 atau 3,72% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2.1.11 Beban Transfer**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Transfer	393.707.154.991,00	379.598.382.063,00	14.108.772.928,00	3,72
<b>Jumlah</b>	<b>393.707.154.991,00</b>	<b>379.598.382.063,00</b>	<b>14.108.772.928,00</b>	<b>3,72</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.413.749.238,00	9.190.269.495,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Desa	1.384.570.102,00	1.233.516.252,00
Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	376.898.835.651,00	369.174.596.316,00
<b>Jumlah</b>	<b>393.707.154.991,00</b>	<b>379.598.382.063,00</b>

Tidak terdapat perbedaan jumlah Beban Transfer dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi Tahun Berjalan (LAK)	2.294.581.992.237,50
b. Belanja Operasi Tahun Berjalan (LRA)	1.900.788.191.664,50
c. Belanja Tidak Terduga Tahun Berjalan (LRA)	66.645.582,00
d. Transfer Daerah Tahun Berjalan (LRA)	393.707.154.991,00
<b>Selisih a-(b-c)</b>	<b>0,00</b>

#### 5.3.2.1.12 Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain Tahun 2023 sebesar Rp4.432.800.212,00 sedangkan pada Tahun 2022 Beban Lain-Lain sebesar Rp846.120.950,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp3.586.679.262,00 atau 423,90% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2.1.12 Beban Lain-Lain**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Lain-Lain	4.432.800.212,00	846.120.950,00	3.586.679.262,00	423,90
<b>Jumlah</b>	<b>4.432.800.212,00</b>	<b>846.120.950,00</b>	<b>3.586.679.262,00</b>	<b>423,90</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	4.432.800.212,00	846.120.950,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.432.800.212,00</b>	<b>846.120.950,00</b>

Beban lain-lain pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp4.432.800.212,00 terdiri dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp66.645.582,00 yang merupakan belanja dapur umum yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu terdapat utang transfer sebesar Rp4.366.154.630,00 yang merupakan sisa dana yang kegiatan Kabupaten Kampar yang bersumber dari dana bagi hasil Provinsi Riau yang sisanya masih ada per 31 Desember 2023.

#### 5.3.2.2 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan pos luar biasa. Surplus/Defisit - LO pada Tahun 2023 sebesar Rp455.558.472.528,81 sedangkan pada Tahun 2022 Surplus/Defisit LO adalah sebesar (Rp29.113.662.361,48) dan terjadi kenaikan sebesar Rp484.672.134.890,29 atau 1664,76%.

**Tabel 5.3.2.2 Surplus/Defisit - LO**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Surplus/Defisit - LO	455.558.472.528,81	-29.113.662.361,48	484.672.134.890,29	(1.664,76)
<b>Jumlah</b>	<b>455.558.472.528,81</b>	<b>-29.113.662.361,48</b>	<b>484.672.134.890,29</b>	<b>(1.664,76)</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan - LO	3.079.385.505.080,16	2.499.767.165.654,55
Beban	2.623.827.032.560,35	2.528.890.828.016,03
Jumlah	455.558.472.528,81	-29.113.662.361,48



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

#### 5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Terdapat dampak perubahan kebijakan/kesalahan mendasar karena perubahan basis akuntansi dengan rincian sebagai berikut.

##### 5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp4.400.842.206.289,49 sedangkan pada Tahun 2022 Ekuitas Awal adalah sebesar Rp4.431.693.225.708,45 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1 Ekuitas Awal**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas Awal	4.400.842.206.289,49	4.431.693.225.708,45	(30.851.019.418,96)	(0,70)
<b>Jumlah</b>	<b>4.400.842.206.289,49</b>	<b>4.431.693.225.708,45</b>	<b>(30.851.019.418,96)</b>	<b>(0,70)</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	4.400.842.206.289,49	4.431.693.225.708,45
<b>Jumlah</b>	<b>4.400.842.206.289,49</b>	<b>4.431.693.225.708,45</b>

##### 5.4.2 Surplus / Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO Tahun 2023 yaitu sebesar Rp455.558.472.528,81 sedangkan pada Tahun 2022 Surplus/Defisit - LO adalah sebesar (Rp29.113.662.361,48) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2 Surplus / Defisit - LO**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Surplus / Defisit - LO	455.558.472.528,81	(29.113.662.361,48)	484.672.134.890,29	(1.665)
<b>Jumlah</b>	<b>455.558.472.528,81</b>	<b>(29.113.662.361,48)</b>	<b>484.672.134.890,29</b>	<b>(1.665)</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus / Defisit - LO	455.558.472.528,81	(29.113.662.361,48)
<b>Jumlah</b>	<b>455.558.472.528,81</b>	<b>(29.113.662.361,48)</b>

##### 5.4.3 Lain-Lain

Lain-lain pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp157.797.085.893,40 sedangkan pada Tahun 2022 Lain-Lain adalah sebesar (Rp1.737.357.057,48) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Kelebihan Penetapan Pendapatan Tahun 2022 Diskominfo	0,00	(50.000,00)
Koreksi Nilai Aset Tanah Tahun 2023 Dinsos	0,00	1.491.698,00
Pelunasan dan Pemutihan Piutang PBB Bependa	0,00	(16.788.994.275,00)
Penyisihan Pelunasan dan Pemutihan Piutang PBB Bependa	0,00	12.530.171.977,76
Ansuran TGR yang telah disetor tahun sebelumnya	0,00	(4.990.002,00)
Penyesuaian Ekuitas BUMD Tahun 2023	0,00	(6.283.849.192,24)
Penjualan Aset BPKAD	0,00	(25.446.848,00)
Koreksi Kap Terkait Pengakuan Piutang Bpjs Tahun 2020-2021	0,00	3.203.896.534,00
Koreksi Kap Terkait Pengakuan Piutang Jamsosda Tahun 2022	0,00	494.233.500,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Koreksi Kap Terkait Pengakuan Piutang Covid 19 Tahun 2020-2021	0,00	5.138.219.960,00
Koreksi Aset Yang Merupakan Aset Ekstrakomtable Tahun Sebelumnya Disdik	0,00	(2.838.000,00)
Penyusutan Aset Yang Merupakan Aset Ekstrakomtable Tahun Sebelumnya	0,00	567.600,00
Penghapusan Nilai Buku Aset Jaringan Air Minum	(2.400.000,00)	0,00
Kurang Saji Penyisihan Piutang Dishub Tahun 2022	(497.250,00)	0,00
Penyisihan terhadap piutang Diskominfo yang telah di ansur	5.900.000,00	0,00
Pembayaran Piutang PBB Bapenda Tahun Sebelumnya	(1.344.789.672,00)	0,00
Penyisihan Piutang atas pembayaran piutang PBB Tahun Sebelumnya	571.100.845,61	0,00
Hibah Tanah Pemda Ke Pihak ketiga Setda Kampar	(2.052.681.933,00)	0,00
Koreksi Utang yang telah dibayar di tahun 2017 PUPR	6.112.337,00	0,00
Penyesuaian Ekitas BUMD Tahun 2023	157.755.555.725,78	0,00
Koreksi Piutang DBH Propinsi 2017	(317.063.920,99)	0,00
Koreksi Kas Bos Disdik tahun sebelumnya	6.320.785,00	0,00
Penghapusan Aset Dinas Pendidikan Dinkes	(1.622.973.574,00)	0,00
Aset Tanah kurang saji yang belum ada nilai Dinkes	1.186.429.050,00	0,00
Aset Tanah kurang sji yang belum ada nilai Disdik	3.606.073.500,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>157.797.065.893,40</b>	<b>(1.737.357.057,48)</b>

#### 5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Tahun 2023 yaitu sebesar Rp5.014.197.764.711,70 sedangkan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp4.400.842.206.289,49.

Tabel 5.4.4 Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas Akhir	5.014.197.764.711,70	4.400.842.206.289,49	613.355.558.422,21	13,94
<b>Jumlah</b>	<b>5.014.197.764.711,70</b>	<b>4.400.842.206.289,49</b>	<b>613.355.558.422,21</b>	<b>13,94</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

### 5.5 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas, masing masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.5.1 Aset

Aset pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp5.060.810.726.805,94 sedangkan pada Tahun 2022 jumlah Aset sebesar Rp4.440.387.101.319,73 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>ASET</b>	<b>5.060.810.726.805,94</b>	<b>4.440.387.101.319,73</b>
KEWAJIBAN	46.612.962.094,24	39.544.895.030,24
EKUITAS	5.014.197.764.711,70	4.400.842.206.289,49
<b>JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS</b>	<b>5.060.810.726.805,94</b>	<b>4.440.387.101.319,73</b>

#### 5.5.2 Kas di Kas Daerah

Jumlah saldo menurut Buku Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp121.796.246.150,22 dan jumlah saldo menurut Buku Bank sebesar Rp121.808.807.156,22 sedangkan Tahun 2022 jumlah saldo menurut buku Kas Daerah sebesar Rp15.895.443.741,75 dan saldo menurut buku bank sebesar Rp15.894.437.884,75.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Saldo Brk Syariah 109 - 02 - 15200	109.250.849.671,70	3.629.062.309,23
Saldo Bank BPR Sari Madu 00102702893	12.557.957.484,52	12.265.355.575,52
Jumlah saldo menurut bank	121.808.807.156,22	15.894.437.884,75
Jumlah saldo menurut buku Kas Daerah	121.796.246.150,22	15.895.443.741,75
Selisih buku bank dan buku Kasda	12.561.006,00	1.005.857,00

Selisih buku bank dan buku Kas Daerah Sebesar Rp12.561.006,00 disebabkan adanya pajak JKN Tambahan Penghasilan yang merupakan pajak tahun 2023 yang baru disetor tanggal 5 January 2024, sehingga pencatatannya di reklas ke kelompok kas lainnya di neraca per 31 Desember 2023.

#### 5.5.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2022 Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp2.615.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	2.615.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615.000,00</b>

Penjelasan lebih lanjut menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

#### 5.5.4 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp4.882.589,00 sedangkan pada Tahun 2022 Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Bendahara Penerima	4.882.589,00	0,00
Jumlah	4.882.589,00	0,00

#### 5.5.5 Kas di Bendahara BLUD

Kas di Bendahara BLUD pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp8.135.180.027,82 sedangkan pada Tahun 2022 Kas di Bendahara BLUD adalah sebesar Rp5.868.742.544,21 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	6.778.908.773,69	4.825.520.898,08
Dinas Kesehatan	1.356.271.254,13	1.043.221.646,13
Jumlah	8.135.180.027,82	5.868.742.544,21

#### Penjelasan Kas BLUD RSUD Bangkinang:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	6.778.908.773,69	4.825.520.898,08
Yang terdiri dari :		
Bank BSI	6.732.500.628,02	4.795.781.817,41
Uang Tunai Di Bendahara Pengeluaran	3.612.450,67	23.917,67
Uang Tunai Di Bendahara Penerima	42.795.695,00	29.715.163,00
Cek Batal Cair	0,00	0,00

Kas di BLUD dapat langsung digunakan untuk membiayai operasional di BLUD tanpa harus disetor terlebih dahulu ke rekening Kas Bendahara umum Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 060/ORG/303/2011 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD ) secara penuh tanggal 19 Desember 2011. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kampar sebanyak 31 Puskesmas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060-417/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

#### Penjelasan Kas di Bendahara BLUD Dinas Kesehatan:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Puskesmas Salo	54.930.330,00	108.066.652,00
Puskesmas Sawah	12.627.111,00	18.788.220,00
Puskesmas Tapung	5.447.039,00	8.923.233,00
Puskesmas Petapahan	685.487,00	8.091.124,00
Puskesmas Pantai Cermin	48.458.098,00	15.022.046,00
Puskesmas Gema	155.518.518,00	21.426.739,00
Puskesmas Batu Sasak	1.848.118,95	3.141.972,95
Puskesmas Gunung Sahilan	3.343.841,00	6.027.555,00
Puskesmas Gunung Sari	72.999,00	3.251.000,00
Puskesmas Pandau Jaya	0,00	8.913.000,00
Puskesmas Kubang Jaya	43.400,00	8.952.953,00
Puskesmas Pangkalan Baru	46.663,00	8.629.259,00
Puskesmas Pantai Raja	76.562.059,00	94.342.476,00
Puskesmas Kota Garo	223.455.925,00	237.407.042,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Puskesmas Tanah Tinggi	2.138.508,00	6.132.980,00
Puskesmas Suka Ramai	73.809.286,00	11.159.017,00
Puskesmas Sinama Nenek	4.307.835,00	6.256.994,00
Puskesmas Siberuang	15.220.027,00	22.347.800,00
Puskesmas Bangkinang	57.008.307,00	6.082.002,00
Puskesmas Laboy Jaya	81.545,00	23.014.096,00
Puskesmas Kuok	54.327.134,00	6.582.236,00
Puskesmas Air Tiris	203.910.315,80	175.979.269,80
Puskesmas Rumbio	254.747.493,00	25.837.035,00
Puskesmas Kampa	9.881.784,00	11.627.122,00
Puskesmas Lipat Kain	7.536.887,00	3.682.327,00
Puskesmas Batu Besurat	32.642.207,38	45.892.054,38
Puskesmas Gunung Bungsu	2.292.164,00	44.819.979,00
Puskesmas Pulau Gadang	842.456,00	5.573.654,00
Puskesmas Tambang	38.069.424,00	44.317.789,00
Puskesmas Simalinyang	3.171.705,00	44.532.557,00
Puskesmas Sungai Pagar	13.244.787,00	10.421.480,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.356.271.254,13</b>	<b>1.043.221.646,13</b>

#### 5.5.6 Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp22.843.669,00 sedangkan pada Tahun 2022 Kas di Bendahara BOS adalah sebesar Rp9.849.569,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Bendahara Bos SD	3.322.479,00	8.496.459,00
Kas di Bendahara Bos SMP	19.521.190,00	1.353.110,00
<b>Jumlah</b>	<b>22.843.669,00</b>	<b>9.849.569,00</b>

#### 5.5.7 Kas di Bendahara BOK Puskesmas

Kas di Bendahara BOK Puskemas pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp7.543.852.537,00 sedangkan pada Tahun 2022 Kas di Bendahara BOK Puskemas adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Kesehatan	7.543.852.537,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.543.852.537,00</b>	<b>0,00</b>

#### Penjelasan Kas di BOK Puskesmas Dinas Kesehatan:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Puskesmas Salo	170.646.518,00	0,00
Puskesmas Sawah	51.353.757,00	0,00
Puskesmas Tapung Perawalan	245.503.637,00	0,00
Puskesmas Petapahan	305.509.028,00	0,00
Puskesmas Pantai Cermin	209.036.441,00	0,00
Puskesmas Gema	172.416.608,00	0,00
Puskesmas Batu Sasek	259.749.474,00	0,00
Puskesmas Gunung Sahilan	265.872.841,00	0,00
Puskesmas Gunung Sari	144.284.557,00	0,00
Puskesmas Pandau Jaya	124.015.626,00	0,00
Puskesmas Kubang Jaya	68.590.626,00	0,00
Puskesmas Pangkalan Baru	190.202.580,00	0,00
Puskesmas Perhentian Raja	171.899.329,00	0,00
Puskesmas Kota Garo	510.734.607,00	0,00
Puskesmas Tanah Tinggi	209.087.271,00	0,00
Puskesmas Suka Ramai	315.619.409,00	0,00
Puskesmas Sinama Nenek	496.004.262,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Puskesmas Siberuang	248.820.226,00	0,00
Puskesmas Bangkinang	303.506.295,00	0,00
Puskesmas Laboy Jaya	152.635.958,00	0,00
Puskesmas Kuok	38.620.477,00	0,00
Puskesmas Air Tiris	119.001.427,00	0,00
Puskesmas Rumbio Jaya	324.359.816,00	0,00
Puskesmas Kampa	166.975.772,00	0,00
Puskesmas Lipat Kain	535.870.068,00	0,00
Puskesmas Batu Bersurat	178.523.016,00	0,00
Puskesmas Pulau Gadang	225.628.314,00	0,00
Puskesmas Gunung Bungsu	233.064.289,00	0,00
Puskesmas Tambang	338.367.911,00	0,00
Puskesmas Simalinyang	509.011.807,00	0,00
Puskesmas Sungai Pagar	258.942.610,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>7.543.852.537,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.5.8 Kas Lainnya

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp35.891.627,00 sedangkan pada Tahun 2022 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp41.003.084,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	6.416.283,00	23.483.994,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.561.006,00	0,00
Kecamatan Kampar Utara	0,00	17.453.888,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	65.202,00
Kecamatan Salo	597.500,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.766,00	0,00
Dinas Kesehatan	16.247.902,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	56.170,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>35.891.627,00</b>	<b>41.003.084,00</b>

Kas lainnya tersebut diatas dapat dijelaskan secara terperinci:

#### Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

a. Utang PPN Pusat dari UPT SD Negeri 026 Danau Lancang	1.432.000,00
b. Pendapatan bunga bank atas Rekening Dana BOS	4.984.283,00

#### Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a. Utang JKN Tambahan Penghasilan	12.561.006,00
-----------------------------------	---------------

#### Kecamatan Salo :

a. Utang PPh 21	597.500,00
-----------------	------------

#### Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan :

a. Jasa Giro Pada Kas Bendahara	12.766,00
---------------------------------	-----------

#### Dinas Kesehatan :

a. Utang PPh 21	141.202,00
b. Utang PPh 23	763.500,00
c. Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.343.200,00

#### Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian :

a. Jasa Giro Pada Kas Bendahara	56.170,00
---------------------------------	-----------

<b>Jumlah</b>	<b>35.891.627,00</b>
---------------	----------------------



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

#### 5.5.9 Piutang Pajak

Piutang Pajak pada Tahun 2023 merupakan piutang pajak PBB sebesar Rp207.511.408.925,00, sedangkan pada Tahun 2022 Piutang Pajak PBB adalah sebesar Rp191.638.594.152,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp15.872.814.773,00 atau 8,28%.

**Tabel 5.5.9 Piutang Pajak**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak	207.511.408.925,00	191.638.594.152,00	15.872.814.773,00	8,28
Jumlah	207.511.408.925,00	191.638.594.152,00	15.872.814.773,00	8,28

Diantara saldo Piutang di atas terdapat Piutang PBB yang telah diserahkan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Kampar tanggal 15 Januari 2013 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-019/WPJ.02/KP.12/2013. Saldo Piutang PBB pada saat serah terima sebesar Rp64.446.063.383,00.

#### 5.5.10 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp399.762.900,00 sedangkan pada Tahun 2022 Piutang Retribusi adalah sebesar Rp408.612.900,00 dan terjadi penurunan sebesar Rp885.000.000,00 atau 2,17%.

**Tabel 5.5.10 Piutang Retribusi**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Retribusi	399.762.900,00	408.612.900,00	(8.850.000,00)	(2,17)
Jumlah	399.762.900,00	408.612.900,00	(8.850.000,00)	(2,17)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian menara telekomuni Kasi Diskominfo	300.312.900,00	309.162.900,00
Piutang Retribusi Tempat Parkir Dinas Perhubungan	99.450.000,00	99.450.000,00
Jumlah	399.762.900,00	408.612.900,00

#### 5.5.11 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 yaitu sebesar Rp24.733.278.582,00 sedangkan pada Tahun 2022 Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp24.801.231.040,34 dan terjadi penurunan sebesar Rp67.952.458,34 atau 0,27%.

**Tabel 5.5.11 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	24.733.278.582,00	24.801.231.040,34	(67.952.458,34)	(0,27)
Jumlah	24.733.278.582,00	24.801.231.040,34	(67.952.458,34)	(0,27)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang Penempatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah (TDF)	0,00	14.040.078,34
Piutang Pendapatan BLUD	23.430.778.582,00	23.649.690.962,00
Piutang Hasil Kerjasama Daerah	1.302.500.000,00	1.137.500.000,00
Jumlah	24.733.278.582,00	24.801.231.040,34



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**5.5.12 Piutang Transfer Antar Daerah**

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Tahun 2023 yaitu sebesar Rp19.453.665.494,00 sedangkan pada Tahun 2022 Piutang Transfer pemda lainnya sebesar Rp18.748.141.653,99 sampai dengan tahun 2023 terjadi kenaikan Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp705.523.840,01 atau 3,76%.

**Tabel 5.5.12 Piutang Transfer Antar Daerah**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Transfer Antar Daerah	19.453.665.494,00	18.748.141.653,99	705.523.840,01	3,76
<b>Jumlah</b>	<b>19.453.665.494,00</b>	<b>18.748.141.653,99</b>	<b>705.523.840,01</b>	<b>3,76</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.126.202.059,00	0,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.769.604.356,00	6.052.135.058,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.360.460.582,00	12.378.942.675,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	197.398.497,00	317.063.920,99
<b>Jumlah</b>	<b>19.453.665.494,00</b>	<b>18.748.141.653,99</b>

**5.5.13 Penyisihan Piutang**

Penyisihan Piutang pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp163.387.835.553,04 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp149.844.806.314,01 dan terjadi kenaikan sebesar Rp13.543.029.239,03 atau 9,04%.

**Tabel 5.5.13 Penyisihan Piutang**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(162.230.554.103,04)	(148.871.556.024,01)	(13.358.998.079,03)	8,97
Penyisihan Piutang Retribusi	(1.157.281.450,00)	(973.250.290,00)	(184.031.160,00)	18,91
<b>Jumlah</b>	<b>(163.387.835.553,04)</b>	<b>(149.844.806.314,01)</b>	<b>(13.543.029.239,03)</b>	<b>9,04</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah	(162.230.554.103,04)	(148.871.556.024,01)
Penyisihan Piutang Restribusi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	0,00	(213.875.290,00)
Piutang Retribusi Kios Ramayana Disperindag Koperasi	(1.157.281.450,00)	(759.375.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(163.387.835.553,04)</b>	<b>(149.844.806.314,01)</b>

**5.5.14 Beban Dibayar Dimuka**

Terdapat penyajian Beban Dibayar Dimuka pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp86.000.000,00 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp217.400.000,00 dan terjadi penurunan sebesar Rp131.400.000,00 atau 60,44%.

**Tabel 5.5.14 Beban Dibayar Dimuka**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka	86.000.000,00	217.400.000,00	(131.400.000,00)	(60,44)
<b>Jumlah</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>217.400.000,00</b>	<b>(131.400.000,00)</b>	<b>(60,44)</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Sekretariat Daerah Sewa Mes Mahasiswa	0,00	55.000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dinas Kesehatan Sewa Rumah Singgah	86.000.000,00	162.400.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>217.400.000,00</b>

**5.5.15 Persediaan**

Persediaan adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah Persediaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp23.319.644.013,33 sedangkan pada Tahun 2022 Persediaan sebesar Rp31.813.823.630,50 dan terjadi penurunan sebesar Rp8.494.179.617,17 atau 26,70%.

**Tabel 5.5.15 Persediaan**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenalkani/(Penurunan)	%
Persediaan	23.319.644.013,33	31.813.823.630,50	(8.494.179.617,17)	(26,70)
<b>Jumlah</b>	<b>23.319.644.013,33</b>	<b>31.813.823.630,50</b>	<b>(8.494.179.617,17)</b>	<b>(26,70)</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Kesehatan	7.507.695.039,19	13.891.057.952,74
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	14.093.023.164,14	16.538.365.415,43
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	99.867.000,00	99.867.000,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	0,00	141.120,00
Dinas Sosial	6.805.750,00	854.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.336.000,00	600.300,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.308.909.940,00	970.932.073,33
Dinas Perhubungan	171.754.600,00	166.696.250,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	5.694.000,00	4.895.870,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.683.250,00	2.980.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	117.878.670,00	126.871.557,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	805.000,00	5.366.617,00
Badan Pendapatan Daerah	1.062.000,00	3.956.075,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.129.600,00	1.439.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.319.644.013,33</b>	<b>31.813.823.630,50</b>

Adapun rincian jenis barang persediaan adalah sebagai berikut:

Uraian Sisa Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Bahan Bangunan dan Konstruksi	168.689.040,00	21.281.800,00
Bahan Kimia	12.051.900,00	104.768.625,00
Bahan Lainnya	3.578.116.844,00	1.480.218.434,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	2.271.317.195,85	3.093.824.786,85
Suku Cadang Alat Bengkel	3.980.000,00	7.840.000,00
Alat Tulis Kantor	73.782.737,00	759.465.878,33
Bahan Cetak	342.541.661,00	425.321.556,00
Bahan Komputer	677.687.000,00	0,00
Perabot Kantor	1.260.000,00	1.800.000,00
Alat Listrik	351.133.885,00	327.222.352,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	684.890.075,00	726.614.287,00
Obat	5.189.454.246,39	13.198.044.403,06
Obat-obatan Lainnya	9.850.611.229,09	11.461.964.408,26
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	99.867.000,00	99.867.000,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.100.000,00	0,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	113.161.200,00	105.590.100,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.319.644.013,33</b>	<b>31.813.823.630,50</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**5.5.16 Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp350.351.977.414,83 sedangkan pada Tahun 2022 Investasi Jangka Panjang sebesar Rp190.228.645.878,72 Sampai dengan Tahun 2023 terjadi kenaikan Investasi Jangka Panjang sebesar Rp160.123.331.536,11 atau 84,17%.

**Tabel 5.5.16 Investasi Jangka Panjang**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Jangka Panjang	350.351.977.414,83	190.228.645.878,72	160.123.331.536,11	84,17
Jumlah	350.351.977.414,83	190.228.645.878,72	160.123.331.536,11	84,17

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	21.460.215.593,72	19.092.439.783,39
Investasi Jangka Panjang Permanen	328.891.761.821,11	171.136.206.095,33
Jumlah	350.351.977.414,83	190.228.645.878,72

**5.5.16.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp21.460.215.593,72 sedangkan pada Tahun 2022 Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp19.092.439.783,39 Sampai dengan Tahun 2023 terjadi kenaikan Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp2.367.775.810,33 atau 12,40%." disebabkan adanya pembayaran angsuran atau pelunasan oleh nasabah yang berada dimasyarakat

**Tabel 5.5.16.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	21.460.215.593,72	19.092.439.783,39	2.367.775.810,33	12,40
Jumlah	21.460.215.593,72	19.092.439.783,39	2.367.775.810,33	12,40

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dana Bergulir	169.150.000.000,00	169.150.000.000,00
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(147.689.784.406,28)	(150.057.560.216,61)
Jumlah	21.460.215.593,72	19.092.439.783,39

**5.5.16.1.1 Dana Bergulir**

Dana Bergulir pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp169.150.000.000,00 sedangkan pada Tahun 2022 Dana Bergulir sebesar Rp169.150.000.000,00 Sampai dengan Tahun 2022 tidak ada penambahan Dana Bergulir.

**Tabel 5.5.16.1.1 Dana Bergulir**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Bergulir	169.150.000.000,00	169.150.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	169.150.000.000,00	169.150.000.000,00	0,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Bagian Perekonomian Selda Kampar	165.000.000.000,00	165.000.000.000,00
Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPPKP)	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
Dinas Koperasi dan UKM	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
Baitul Maal wa Tamwil ( BMT )	400.000.000,00	400.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>169.150.000.000,00</b>	<b>169.150.000.000,00</b>

Dana bergulir Kabupaten Kampar sebesar Rp169.150.000.000,00 terdiri dari:

1. Melalui kerja sama dengan PD. BPR Sarimadu yang disajikan Rp167.600.000.000,00
2. Dikelola sendiri oleh Dinas Koperasi dan UKM (tanpa kerjasama) Rp1.150.000.000,00
3. Terdapat penambahan atas reklasifikasi dari investasi permanen sebanyak 11 BMT sebesar Rp400.000.000,00 menjadi investasi non permanen dana bergulir.

#### 5.5.17 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih Tahun 2023 yaitu sebesar (Rp147.689.784.406,28) sedangkan pada Tahun 2022 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih sebesar (Rp150.057.560.216,61) dan terjadi penurunan sebesar Rp2.367.775.810,33 atau (1,58%).

**Tabel 5.5.17 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyisihan dana bergulir tidak tertagih	(147.689.784.406,28)	(150.057.560.216,61)	2.367.775.810,33	(1,58)
<b>Jumlah</b>	<b>(147.689.784.406,28)</b>	<b>(150.057.560.216,61)</b>	<b>2.367.775.810,33</b>	<b>(1,58)</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Penyisihan dana bergulir tidak tertagih	(147.689.784.406,28)	(150.057.560.216,61)
<b>Jumlah</b>	<b>(147.689.784.406,28)</b>	<b>(150.057.560.216,61)</b>

#### 5.5.18 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp328.891.761.821,11 sedangkan pada Tahun 2022 Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp171.136.206.095,33 Sampai dengan Tahun 2023 terjadi kenaikan Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp157.755.555.725,78 yang merupakan penyesuaian terhadap ekuitas kepemilikan pemerintah daerah sesuai laporan keuangan BUMD.

**Tabel 5.5.18 Investasi Jangka Panjang Permanen**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Jangka Panjang Permanen	328.891.761.821,11	171.136.206.095,33	157.755.555.725,78	92,18
<b>Jumlah</b>	<b>328.891.761.821,11</b>	<b>171.136.206.095,33</b>	<b>157.755.555.725,78</b>	<b>92,18</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Penyertaan Modal	328.091.761.821,11	170.336.206.095,33
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	800.000.000,00	800.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>328.891.761.821,11</b>	<b>171.136.206.095,33</b>

##### 5.5.18.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2023 penyesuaian terhadap ekuitas laporan keuangan BUMD yaitu sebesar Rp328.091.761.821,11 sedangkan pada Tahun 2022 penyesuaian ekuitas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp170.336.206.095,33 dan terjadi kenaikan terhadap penyesuaian modal sebesar Rp157.755.555.725,78 atau 92,61%. Adapun penurunan atau peningkatan dipengaruhi laba/rugi dari laporan keuangan BUMD dan disesuaikan dengan persentase kepemilikan, dan penyajian berdasarkan laporan keuangan BUMD Audited dan Unaudited.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**Tabel 5.5.18.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyerajaan Modal Pemerintah Daerah	328.091.761.821,11	170.336.206.095,33	157.755.555.725,78	92,61
Jumlah	328.091.761.821,11	170.336.206.095,33	157.755.555.725,78	92,61

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	NILAI DASAR HUKUM	Tahun 2023	Tahun 2022
PT. Bank Riau	105.181.200.000,00	105.181.200.000,00	105.181.200.000,00
PDAM Tirta Kampar	10.155.763.850,00	5.485.686.415,32	4.476.699.504,98
Riau Air Line	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
BPR Sari Madu	32.000.000.000,00	17.979.828.844,00	22.942.418.302,04
BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris	3.400.000.000,00	6.934.265.631,96	6.232.908.224,51
PT. Kamparicom	10.225.000.000,00	6.302.043.576,82	6.302.043.576,82
PT. Bumi Siak Pusako	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
PD Kampar Aneka Karya	15.263.049.530,00	166.208.739.353,00	5.200.936.487,00
Jumlah	196.225.013.180,00	328.091.761.821,11	170.336.206.095,33

**- PT Bank Riau Kepri**

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PT Bank Riau Kepri per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp105.181.200.000,00 dengan persentase kepemilikan senilai 9,71%. Dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PT Bank Riau Kepri untuk Tahun 2023, PT Bank Riau Kepri membagikan dividen tunai senilai Rp21.468.259.695,00.

**- PDAM Tirta Kampar**

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PDAM Tirta Kampar per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp5.485.686.415,32 naik sebesar Rp1.008.986.910,37 yang diakibatkan adanya koreksi penyesuaian ekuitas PDAM Tirta Kampar. Penilaian penyertaan modal pada PDAM Tirta Kampar dengan menggunakan metode ekuitas. Pemerintah Kabupaten Kampar mengakui kepemilikan PDAM Tirta Kampar sebesar 100%. Berdasarkan laporan keuangan PDAM Tirta Kampar terdapat bantuan pemerintah pusat sebesar Rp5.476.335.502,00 yang belum jelas statusnya, sehingga berdasarkan hasil perhitungan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kampar pada PDAM Tirta Kampar hanya sebesar 64,97%.

**- Riau Airline**

PT Riau Airlines (RAL) merupakan perusahaan penerbangan yang merupakan milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau. RAL dibentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 Lembaran Daerah No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan PT Riau Airlines oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Pada tanggal 12 Maret 2002, Riau Airlines resmi berdiri dengan ditandatanganinya akta pendirian No. 14 oleh Gubernur Riau. Pemerintah Kabupaten Kampar merupakan salah satu pemegang saham PT RAL dengan dengan nilai nominal Rp5.000.000.000,00 (6,23 %) pada Tahun 2007.

Terhitung sejak tanggal 5 April 2011 PT. Riau Airlines tidak beroperasi lagi dan menyatakan berhenti sementara dari kegiatan operasi penerbangan berdasarkan Surat Direktur Utama PT Riau Airlines tanggal 3 April 2011.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Izin terbang PT. Riau Airlines sudah dibekukan berdasarkan Surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor AU.009/3/13.DRJU-2012 tanggal 16 April 2012 perihal Surat Izin Usaha Udara Angkutan Niaga PT. RAL yang menyatakan bahwa terhitung tanggal 7 April 2012 Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Nomor: SKEP/137/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002 tidak berlaku dan tidak terdaftar lagi sebagai pemegang surat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak memberikan perpanjangan Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal PT RAL.

Bahwa sejak Tahun 2011 hingga saat ini PT RAL sudah tidak beroperasi, sedangkan hal-hal yang terkait dengan proses penanganan PT RAL hingga saat ini masih terus berjalan dan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau.

**- BPR Sari Madu**

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada BPR Sari Madu per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp17.979.826.844,00 turun atau rugi senilai Rp4.962.591.458,04 dari Tahun 2022 senilai Rp22.942418.302,04 berdasarkan laba/rugi dan ekuitas akhir laporan keuangan BUMD BPR Sari Madu. Persentase kepemilikan senilai 100% sehingga disajikan dengan metode ekuitas.

**- BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris**

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp6.934.265.631,96 naik sebesar Rp701.357.407,45 yang merupakan laba. Penilaian penyertaan modal pada BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris dengan menggunakan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan senilai 76,41%. Dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada untuk Tahun 2023, BPR Syariah Fadhilah Air Tiris membagikan dividen tunai senilai Rp420.246.440,00.

**- PT Kamparicom**

PT Kamparicom adalah perusahaan yang didirikan pada Tahun 2007, yang diawal dengan penandatanganan MOU Nomor 04/SKB/III/007, Nomor 18/HK/44/2007 dan Nomor 001/SKB-BC/BDKP/III/2007 Tanggal 21 Maret 2007 antara Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Provinsi Riau dan PT Benecom Budidaya Kampar. Pada Bulan September 2007, MOU kerjasama ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama para pihak Nomor 180/HK/06/2007, Nomor 320/DU-SPR/XI/2007 dan Nomor 011/SKR-BC-BDKP/IX/2007 Tanggal 21 September 2007 dengan pokok kesepakatan untuk membangun Pabrik Pengolahan Ikan Patin Terpadu sepakat dilaksanakan oleh Perusahaan Konsersium.

Perusahaan PT Kamparicom dibentuk dengan Akta Notaris YARLINDA SALEH, SH Nomor 09 Terhitung sejak Tahun 2012 hingga saat ini PT Kamparicom sudah tidak beroperasi lagi, dan untuk membahas kelanjutan kerjasama tersebut direncanakan akan dilaksanakan pertemuan antara Pemda Kampar dengan pemegang saham lainnya untuk membahas dan menyepakati kelanjutan kerjasama PT Kamparicom.

**- PT Bumi Siak Pusako**

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PT Bumi Siak Pusako per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp15.000.000.000,000. Dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PT Bumi Siak Pusako Tahun 2023 membagikan dividen tunai senilai Rp14.410.803.669,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 6,02% PT Bumi Siak Pusako dalam penyajian dalam laporan keuangan pemerintah menggunakan metode biaya.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**- PD Kampar Aneka Karya**

Saldo penyertaan modal pada Pemerintah Kabupaten Kampar PD Kampar Aneka Karya per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp166.208.739.353,00 atau naik sebesar Rp161.007.802.866,00. Dengan kepemilikan saham 100% PD Kampar Aneka karya penyajiannya menggunakan metoda ekuitas yang disesuaikan dengan laporan keuangan BUMD yang telah di audit KAP terakhir Tahun 2013 dan baru ditahun 2021 PD Kampar Aneka Karya kembali menyampaikan Laporan Keuangan sehingga dilakukan penyesuaian Ekuitas Akhir di Laporan Keuangan kPemerintah Daerah. Terjadinya Kenaikan penyertaan modal ini disebabkan adanya penerimaan yang berasal dari partisipating interest Blok Migas di Wilayah Kerja Rokan yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan, Namun yang berhubungan langsung dengan PT Pertamina Hulu Rokan adalah anak Perusahaan BUMD Provinsi yaitu PT Riau Petroleum Rokan sedangkan posisi BMUD Kabupaten Kampar sebagai pemegang saham pada PT Petroleum Rokan .

**5.3.18.2 Investasi Pemberian Pinjaman Daerah**

Investasi Permanen Lainnya Tahun 2023 yaitu sebesar Rp800.000.000,00, sedangkan pada Tahun 2022 investasi Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp800.000.000,00.

Tabel 5.3.18.2 Investasi Pemberian Pinjaman Daerah

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi permanen lainnya	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Koperasi UKM	800.000.000,00	800.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>

**5.5.19 Aset Tetap**

Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp4.223.890.262.335,56 sedangkan pada Tahun 2022 Aset Tetap sebesar Rp4.000.596.189.356,01 dan terjadi kenaikan sebesar Rp223.294.072.979,55 atau 5,58%.

Tabel 5.5.19 Aset Tetap

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap	4.223.890.262.335,56	4.000.596.189.356,01	223.294.072.979,55	5,58
<b>Jumlah</b>	<b>4.223.890.262.335,56</b>	<b>4.000.596.189.356,01</b>	<b>223.294.072.979,55</b>	<b>5,58</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Tanah	496.480.881.945,60	492.502.693.398,60
Peralatan dan Mesin	1.208.868.467.760,46	1.137.307.671.422,96
Gedung dan Bangunan	2.043.696.251.529,03	1.958.197.419.026,03
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.025.996.013.004,57	5.709.461.513.019,48
Aset Tetap Lainnya	159.977.668.557,34	147.225.590.396,34
Konstruksi Dalam Pengerjaan	159.278.601.361,00	92.615.410.708,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.870.406.621.822,44)	(5.536.714.108.615,40)
<b>Jumlah</b>	<b>4.223.890.262.335,56</b>	<b>4.000.596.189.356,01</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**5.5.19.1 Tanah**

Aset Tetap Tanah pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp496.480.881.945,60 sedangkan pada Tahun 2022 Aset Tetap Tanah sebesar Rp492.502.693.398,60 dan terjadi kenaikan sebesar Rp3.978.188.547,00 atau 0,81%.

**Tabel 5.5.19.1 Tanah**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	496.480.881.945,60	492.502.693.398,60	3.978.188.547,00	0,81
Jumlah	496.480.881.945,60	492.502.693.398,60	3.978.188.547,00	0,81

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	123.011.687.945,00	119.405.614.445,00
Dinas Kesehatan	27.197.293.287,00	16.190.014.237,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	2.613.926.130,00	12.434.776.130,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	188.901.116.641,60	187.783.372.711,60
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.044.149.000,00	2.044.149.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	36.830.000,00	36.830.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.135.500,00	27.135.500,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	272.140.000,00	272.140.000,00
Dinas Sosial	1.285.852.700,00	1.235.228.700,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.984.985.264,00	4.984.985.264,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.297.000.000,00	4.239.300.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48.375.000,00	48.375.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	700.000.000,00	700.000.000,00
Dinas Perhubungan	3.795.501.000,00	3.795.501.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	240.600.000,00	240.600.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	664.000.000,00	664.000.000,00
Dinas Perikanan	3.495.200.000,00	3.495.200.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	206.762.500,00	206.762.500,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	280.630.000,00	280.630.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.143.530.000,00	3.143.530.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	2.421.402.335,00	2.421.402.335,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.918.068.000,00	2.918.068.000,00
Sekretariat Daerah	110.051.612.123,00	112.034.294.056,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	572.267.000,00	1.629.967.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	310.210.000,00	310.210.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	124.521.320,00	124.521.320,00
Badan Pendapatan Daerah	386.645.000,00	386.645.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	419.600.000,00	419.600.000,00
Inspektoral Kabupaten	220.400.000,00	220.400.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	628.800.000,00	628.800.000,00
Kecamatan Tapung Hilir	170.200.000,00	170.200.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	251.000.000,00	251.000.000,00
Kecamatan Tapung	295.000.000,00	295.000.000,00
Kecamatan Tambang	973.800.000,00	973.800.000,00
Kecamatan Kampar	135.430.000,00	135.430.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	631.300.000,00	631.300.000,00
Kecamatan Siak Hulu	4.054.835.000,00	4.054.835.000,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	273.001.200,00	273.001.200,00
Kecamatan Rumbio Jaya	80.000.000,00	80.000.000,00
Kecamatan Kampar Utara	200.000.000,00	200.000.000,00
Kecamatan Kampa	800.000.000,00	800.000.000,00
Kecamatan Kuok	513.125.000,00	513.125.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	716.800.000,00	716.800.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	190.875.000,00	190.875.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	260.400.000,00	260.400.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kecamatan Gunung Sahilan	100.000.000,00	100.000.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	465.000.000,00	465.000.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	59.875.000,00	59.875.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>496.480.881.945,60</b>	<b>492.502.693.398,60</b>

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap tanah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Aset Tetap Tanah Tahun Berjalan (Neraca)	496.480.881.945,60
Aset Tetap Tanah 20NN - 1 (Neraca)	492.502.693.398,60
<b>Selisih</b>	<b>3.978.188.547,00</b>
Penjelasan terhadap selisih :	
<b>Mutasi tambah</b>	<b>16.909.420.480,00</b>
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Berjalan (LRA)	1.117.743.930,00
Kurang Saji Aset Tanah Dinkes yang belum dinilai	3.606.073.500,00
Kurang Saji Aset Tanah Dinkes yang belum dinilai	1.186.429.050,00
Mutasi Dinas Kesehatan dari PUPR	9.820.850.000,00
Mutasi DLH dari Setwan	1.057.700.000,00
Penerimaan Hibah tanah pada Sekretariat Daerah	70.000.000,00
Hinah pada Dinas Sosial	50.624.000,00
<b>Mutasi kurang</b>	<b>(12.931.231.933,00)</b>
Penghapusan aset Sekretariat Daerah	(2.052.681.933,00)
Mutasi PUPR ke Dinas Kesehatan	(9.820.850.000,00)
Mutasi Setwan ke DLH	(1.057.700.000,00)
<b>JUMLAH SELISIH</b>	<b>3.978.188.547,00</b>

Tahun sebelumnya Penetapan status penggunaan dan nilai perolehan tanah berdasarkan:

1. Keputusan Bupati Kampar Nomor 028/BPKAD-Aset/IV/437 tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Status dan Nilai Perolehan Tanah di Bawah Badan Jalan dan Tanah Bahu Jalan Pemerintah Kabupaten Kampar.
2. Keputusan Bupati Kampar Nomor 038/BPKAD-Aset/IV/438 tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan dan Nilai Perolehan Tanah pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
3. Keputusan Bupati Kampar Nomor 028/BPKAD-Aset/IV/439 tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan dan Nilai Perolehan Tanah pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kampar.

Pada nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp492.502.693.398,60, belum termasuk nilai tanah lima sekolah pada Dinas Pendidikan yang Berdiri di dalam kawasan HGU PT Subur Harum Makmur, PT Siwangai dan PT Arara Abadi dengan luas tanah 100.000 M2 Dengan nilai NJOP Rp2.000.000.000,00.

#### 5.5.19.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.208.868.467.760,46 sedangkan pada Tahun 2022 Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.137.307.671.422,96 dan terjadi kenaikan sebesar Rp71.560.796.337,50 atau 6,29%.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**Tabel 5.5.19.2 Peralatan dan Mesin**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Peralatan dan Mesin	1.208.868.467.760,46	1.137.307.671.422,96	71.560.796.337,50	6,29
<b>Jumlah</b>	<b>1.208.868.467.760,46</b>	<b>1.137.307.671.422,96</b>	<b>71.560.796.337,50</b>	<b>6,29</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	337.686.839.936,85	321.854.625.271,85
Dinas Kesehatan	135.371.994.222,00	127.154.030.895,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	193.818.891.599,00	186.555.659.028,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	29.061.503.693,00	27.024.655.693,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	7.621.343.086,00	6.841.519.086,00
Satuan Polisi Pamong Praja	7.090.680.624,00	7.010.846.099,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.213.211.304,00	7.292.679.304,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2.470.857.000,00	799.093.000,00
Dinas Sosial	7.341.673.596,00	6.418.115.096,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10.689.006.104,00	10.325.132.104,00
Dinas Kelangkaan Pangan	8.635.048.119,42	8.439.587.469,42
Dinas Lingkungan Hidup	27.411.628.572,15	26.217.833.572,15
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.676.331.421,00	2.864.739.421,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.903.762.199,00	2.541.625.199,00
Dinas Perhubungan	50.329.009.571,59	40.135.225.047,59
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	9.034.001.965,50	6.925.370.463,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.664.261.415,65	9.256.019.415,65
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6.671.564.218,00	5.780.446.218,00
Dinas Perikanan	17.893.905.474,00	17.210.689.724,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	4.220.569.527,55	3.393.383.027,55
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	10.927.682.885,00	10.220.292.385,00
Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	13.110.755.241,00	12.717.621.277,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	6.050.773.324,00	5.767.606.184,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	5.977.775.168,00	4.889.639.168,00
Sekretariat Daerah	200.881.876.169,28	196.846.821.619,28
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30.861.599.617,00	27.732.037.617,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.198.228.817,78	13.436.260.817,78
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	5.833.152.311,00	5.181.843.911,00
Badan Pendapatan Daerah	13.423.612.094,00	13.033.475.094,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.144.236.435,69	3.725.036.235,69
Inspektorat Kabupaten	4.148.110.987,00	3.960.254.987,00
Kecamatan Kampar Kiri	724.512.105,00	697.819.105,00
Kecamatan Tapung Hilir	492.567.150,00	390.118.150,00
Kecamatan Tapung Hulu	580.858.042,00	519.536.042,00
Kecamatan Tapung	944.943.000,00	866.216.000,00
Kecamatan Tambang	420.699.914,00	353.318.914,00
Kecamatan Kampar	589.452.880,00	426.104.880,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	634.816.800,00	634.816.800,00
Kecamatan Siak Hulu	657.459.444,00	617.395.444,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	941.563.762,00	920.292.762,00
Kecamatan Rumbio Jaya	624.346.208,00	604.965.208,00
Kecamatan Kampar Utara	382.539.807,00	342.126.807,00
Kecamatan Kampa	398.816.035,00	342.812.035,00
Kecamatan Salo	799.804.716,00	781.429.716,00
Kecamatan Bangkinang	698.057.857,00	652.318.857,00
Kecamatan Kuok	907.232.389,00	907.232.389,00
Kecamatan Bangkinang Kota	964.254.690,00	941.722.690,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	681.926.075,00	613.254.075,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	808.174.050,00	703.954.050,00
Kecamatan Gunung Sahilan	461.605.000,00	406.625.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kecamatan Perhentian Raja	699.567.725,00	636.897.725,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	456.015.204,00	442.063.235,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.835.368.208,00	2.934.487.108,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.208.868.467.760,46</b>	<b>1.137.307.671.422,96</b>

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap peralatan dan mesin pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	1.208.868.467.760,46
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)	1.137.307.671.422,96
<b>Selisih</b>	<b>71.560.796.337,50</b>
Penjelasan terhadap selisih :	
<b>Mutasi tambah</b>	<b>76.317.210.697,50</b>
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)	54.246.432.888,50
Kapitalisasi Belanja pada Didik	503.826.780,00
Reklas Antar Aset Tetap pada Didik	59.100.000,00
Hibah pada Dinkes	6.887.926.800,00
Reklas Antar Aset Tetap pada Dinkes	50.565.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinkes	32.853.908,00
Reklas Antar Aset Tetap pada RSUD Bangkinang	450.489.480,00
Kapitalisasi Belanja pada RSUD	30.000.000,00
Reklas Antar Aset Tetap pada PUPR	89.738.000,00
Kapitalisasi Belanja pada PERKIM	1.350.000,00
Hibah Pada Kantor Satpol PP	45.234.525,00
Hibah pada Dinas BPBD	440.875.000,00
Reklas Antar Aset Tetap pada BPBD	3.556.000,00
Kapitalisasi Belanja pada BPBD	80.749.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Damkar	1.849.572.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinas Sosial	88.600.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinas DPPKBP3A	183.330.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinas Ketahanan Pangan	23.670.000,00
Kapitalisasi Belanja pada DLH	89.245.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Disduk Capil	301.005.000,00
Kapitalisasi Belanja pada DPMD	49.931.000,00
Reklas Antar Aset Tetap pada DPMD	23.850.000,00
Hibah pada Dinas Perhubungan	5.876.077.524,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinas Perhubungan	188.842.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Diskominfo	599.215.318,00
Reklas Antar Aset Tetap pada DPMPSTP	3.000.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinas Pariwisata	18.300.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinas Perkebunan	190.183.954,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinas Perdagangan	36.600.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinas Parindustrian	148.436.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Sekretariat Daerah	258.549.800,00
Kapitalisasi Belanja pada Setwan	2.826.099.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinas BAPPEDA	425.119.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinas BPKAD	19.800.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Inspektorat	20.650.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Kecamatan Tapung Hilir	16.628.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Kecamatan Siak Hulu	4.000.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Kecamatan Rumbio Jaya	4.000.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Kecamatan Gunung Sahilan	29.900.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Kecamatan Koto Kampar Hulu	14.018.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Kebangpol	50.583.900,00
Kapitalisasi Belanja pada Perpustakaan	31.050.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinas Perikanan	12.000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kapitalisasi Belanja pada Kecamatan XIII Koto Kampar	4.500.000,00
Reklas Antar Aset Tetap pada Kecamatan Koto Kampar Hulu	1.778.000,00
Reklas Antar Aset Tetap pada Kecamatan Tambang	24.000.000,00
<b>Mutasi kurang</b>	<b>(4.756.414.360,00)</b>
Penghapusan aset tetap Dinkes	(1.338.273.574,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada Dinkes	(30.185.753,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada Disdik	(786.394.952,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada RSUD Bangkinang	(324.302.600,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada PUPR	(8.080.000,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada BPBD	(5.769.000,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada DPPKB3A	(308.046.000,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada Dinas Ketahanan Pangan	(31.350.000,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada DLH	(131.299.000,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada Dinas Perhubungan	(765.433.000,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada DPMPSTSP	(1.868.000,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada Perpustakaan	(920.000,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada Dinas Pariwisata	(90.000.000,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada Dinas Perdagangan	(22.758.000,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada Sekretariat Daerah	(90.946.450,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada Setwan	(14.375.000,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada BPKAD	(5.025.000,00)
Aset yang dimusnahkan pada Sekretariat Daerah	(704.450.000,00)
Aset yang dimusnahkan pada Kecamatan Tapung Hilir	(23.900.000,00)
Aset yang dimusnahkan pada Kecamatan Kampar Utara	(13.800.000,00)
Aset yang dimusnahkan pada Kecamatan Kampa	(19.712.000,00)
Aset yang dimusnahkan pada Kecamatan Koto Kampar Hulu	(39.526.031,00)
<b>JUMLAH SELISIH</b>	<b>71.560.796.337,50</b>

### 5.5.19.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.043.695.251.529,03 sedangkan Tahun 2022 Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.958.197.419.026,03 dan terjadi kenaikan sebesar Rp85.497.832.503,00 atau 4,37%.

Tabel 5.5.19.3 Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenalkan/(Penurunan)	%
Gedung dan Bangunan	2.043.695.251.529,03	1.958.197.419.026,03	85.497.832.503,00	4,37
<b>Jumlah</b>	<b>2.043.695.251.529,03</b>	<b>1.958.197.419.026,03</b>	<b>85.497.832.503,00</b>	<b>4,37</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	803.220.104.865,80	754.907.778.815,80
Dinas Kesehatan	143.351.219.384,30	127.964.239.610,30
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	79.946.556.317,00	85.058.003.517,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	48.176.639.473,00	33.213.272.842,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	548.694.135.455,55	548.541.158.455,55
Satuan Polisi Pamong Praja	786.405.000,00	786.405.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.309.472.542,21	1.249.622.542,21
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	43.560.000,00	43.560.000,00
Dinas Sosial	8.685.230.655,00	7.603.609.905,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.096.706.021,00	1.945.190.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	8.233.329.450,00	8.233.329.450,00
Dinas Lingkungan Hidup	51.750.991.372,89	50.220.603.772,89
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	248.602.480,00	220.642.480,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	584.081.100,00	584.081.100,00
Dinas Perhubungan	23.862.030.231,29	23.414.720.231,29
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	941.066.150,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.950.561.401,00	2.730.508.100,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6.774.652.755,00	4.533.543.050,00
Dinas Perikanan	35.038.682.312,23	34.290.069.312,23
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	23.323.853.012,89	23.175.290.012,89
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	7.831.165.886,00	7.086.691.336,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	20.706.228.705,32	19.771.487.431,32
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	14.982.230.382,00	14.932.448.382,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	37.665.930.297,00	37.006.145.600,00
Sekretariat Daerah	114.569.233.706,39	114.201.602.106,39
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.931.691.283,00	6.207.405.883,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.244.199.009,00	3.064.396.009,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.974.457.885,00	1.378.607.000,00
Badan Pendapatan Daerah	5.618.937.926,00	5.410.000.626,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.857.510.000,00	2.857.510.000,00
Inspektorat Kabupaten	807.034.000,00	477.959.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	6.391.714.740,00	6.338.074.740,00
Kecamatan Tapung Hilir	590.630.000,00	590.630.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	2.488.031.000,00	2.488.031.000,00
Kecamatan Tapung	698.680.000,00	698.680.000,00
Kecamatan Tambang	1.121.300.000,00	1.097.300.000,00
Kecamatan Kampar	6.422.377.619,00	6.422.377.619,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.386.228.900,00	1.386.228.900,00
Kecamatan Siak Hulu	1.833.347.000,00	1.783.847.000,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.955.434.898,16	1.955.434.898,16
Kecamatan Rumbio Jaya	2.061.470.000,00	2.030.690.000,00
Kecamatan Kampar Utara	347.010.000,00	329.928.000,00
Kecamatan Salo	569.794.000,00	569.794.000,00
Kecamatan Bangkinang	586.367.000,00	586.367.000,00
Kecamatan Kuok	2.382.151.000,00	2.382.151.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	2.380.811.855,00	2.217.519.855,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	671.198.900,00	671.198.900,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.162.975.200,00	1.018.975.200,00
Kecamatan Gunung Sahlan	2.277.144.000,00	2.277.144.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	1.051.578.000,00	1.051.578.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	210.920.815,00	100.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.043.695.251.529,03</b>	<b>1.958.197.419.026,03</b>

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	2.043.695.251.529,03
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)	1.958.197.419.026,03
<b>Selisih</b>	<b>85.497.832.503,00</b>
Penjelasan terhadap selisih :	
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>100.609.554.062,00</b>
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA)	55.491.835.674,00
Reklas Antar Aset Tetap pada Dikes	120.587.170,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinkes	2.858.842.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Disdik	14.108.507.000,00
Kapitalisasi Belanja pada RSUD	416.700.000,00
Kapitalisasi Belanja pada PUPR	11.808.105.662,00
Kapitalisasi Belanja pada PERKIM	152.977.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinas Sosial	1.081.620.750,00
Kapitalisasi Belanja pada Disduk Capil	27.960.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinas Pariwisata	148.563.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinas Perindustrian	514.612.980,00
Kapitalisasi Belanja pada DLH	230.953.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kapitalisasi Belanja pada Dishub	447.310.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Kecamatan Siak Hulu	49.600.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Diskominfo	941.086.150,00
Mutasi pada Dinas Kesehatan dari RSUD Bangkinang	5.702.832.200,00
Kapitalisasi Belanja pada P2TSP	220.053.301,00
Kapitalisasi Belanja pada Perpustakaan	68.969.650,00
Kapitalisasi Belanja pada KB	151.516.021,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinas Perikanan	748.613.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinas Pertanian	532.474.550,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinas Perkebunan	934.741.274,00
Kapitalisasi Belanja pada Dinas Koperasi	49.782.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Setda	174.556.600,00
Kapitalisasi Belanja pada Setwan	1.023.720.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Bappeda	150.000.000,00
Kapitalisasi Belanja pada BPKAD	402.206.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Bapenda	208.937.300,00
Kapitalisasi Belanja pada Inspektorat	329.075.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Kecamatan Kamkir	21.640.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Kecamatan Rumbio Jaya	30.780.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Kecamatan Kampar Utara	17.082.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Kecamatan Kakirihil	144.000.000,00
Mutasi pada DLH dari Setwan	1.299.434.600,00
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>(15.111.721.559,00)</b>
Penghapusan Aset tetap Dinkes	(284.700.000,00)
Reklas Antar Aset Tetap pada Dinkes	(214.835.000,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada Disdik	(2.610.783.820,00)
Reklas Antar Aset Tetap pada Disdik	(1.183.080.000,00)
Reklas Antar Aset Tetap pada DPMPSTP	(3.000.000,00)
Reklas Antar Aset Tetap pada Dinas Pariwisata	(369.291.000,00)
Reklas Antar Aset Tetap pada Dinas Perindustrian	(176.882.439,00)
Hibah Bantuan Sosial Pada PUPR	(3.089.207.500,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada Dinas Pariwisata	(87.937.000,00)
Mutasi RSUD Bangkinang ke Dinas Kesehatan	(5.702.832.200,00)
Mutasi Setwan ke DLH	(1.299.434.600,00)
Koreksi Belanja Menjadi KDP pada PUPR	(89.738.000,00)
<b>JUMLAH SELISIH</b>	<b>85.497.832.503,00</b>

#### 5.5.19.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp6.025.996.013.004,57 sedangkan pada Tahun 2022 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.709.461.513.019,48 dan terjadi kenaikan sebesar Rp316.534.499.985,09 atau 5,54%.

**Tabel 5.5.19.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.025.996.013.004,57	5.709.461.513.019,48	316.534.499.985,09	5,54
<b>Jumlah</b>	<b>6.025.996.013.004,57</b>	<b>5.709.461.513.019,48</b>	<b>316.534.499.985,09</b>	<b>5,54</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	8.316.062.603,00	5.653.997.503,00
Dinas Kesehatan	6.540.259.240,00	6.540.259.240,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	442.546.500,00	243.357.500,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.584.097.565.650,27	5.306.755.081.737,18
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	267.320.248.579,47	232.947.717.259,47
Satuan Polisi Pamong Praja	49.900.000,00	49.900.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.234.585.357,79	21.234.585.357,79



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dinas Sosial	175.107.950,00	175.107.950,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	228.317.637,00	228.317.637,00
Dinas Ketahanan Pangan	127.242.357,58	127.242.357,58
Dinas Lingkungan Hidup	32.575.965.642,86	32.575.965.642,86
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	41.524.780,00	41.524.780,00
Dinas Perhubungan	23.039.255.353,30	23.039.255.353,30
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	62.500.000,00	62.500.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.861.206,02	25.861.206,02
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.257.650,00	2.257.650,00
Dinas Perikanan	35.514.320.329,95	35.514.320.329,95
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.634.624.200,00	2.646.698.200,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	16.456.839.950,00	16.456.839.950,00
Dinas Perkebunan, Pelembagaan Dan Kesehatan Hewan	4.206.963.044,33	4.206.963.044,33
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	4.899.513.800,00	4.899.513.800,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	7.978.459.639,00	7.781.577.200,00
Sekretariat Daerah	1.983.698.475,00	1.983.698.475,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	538.292.000,00	538.292.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	159.043.925,00	159.043.925,00
Badan Pendapatan Daerah	335.332.300,00	212.307.500,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	128.415.000,00	128.415.000,00
Inspektorat Kabupaten	198.200.000,00	198.200.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	812.221.906,00	358.419.096,00
Kecamatan Tapung Hilir	2.150.000,00	6.950.000,00
Kecamatan Tambeng	15.000.000,00	15.000.000,00
Kecamatan Kampar	1.007.767.154,00	899.314.796,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.587.553.122,00	1.232.173.258,00
Kecamatan Rumbio Jaya	4.500.000,00	4.500.000,00
Kecamatan Kampar Utara	18.000.000,00	18.000.000,00
Kecamatan Kampa	6.630.000,00	6.630.000,00
Kecamatan Selo	4.650.000,00	4.650.000,00
Kecamatan Bangkinang	1.054.053.863,00	1.054.053.863,00
Kecamatan Kuok	38.000.000,00	38.000.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	717.566.634,00	480.004.253,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	17.187.500,00	17.187.500,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.114.829.655,00	814.829.655,00
Kecamatan Gunung Sahilan	8.500.000,00	8.500.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	74.500.000,00	74.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.025.996.013.004,57</b>	<b>5.709.461.513.019,48</b>

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)	6.025.996.013.004,57
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)	5.709.461.513.019,48
<b>Selisih</b>	<b>316.534.499.985,09</b>
Penjelasan terhadap selisih:	
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>372.651.922.862,09</b>
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LRA)	200.185.637.334,00
Reklas Antar Aset Tetap pada Dtsdik	1.204.818.000,00
Reklas Antar Aset Tetap pada RSUD	199.189.000,00
Hibah pada PUPR	159.224.352.463,09
Kapitalisasi Belanja pada PUPR	3.054.228.506,00
Hibah pada Perkim	8.172.259.320,00
Reklas Antar Aset Tetap pada Dinas Pariwisata	187.926.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Perindustrian	20.000.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Bapenda	16.849.800,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kapitalisasi Belanja pada Kecamatan XIII Koto Kampar	59.780.000,00
Kapitalisasi Belanja pada Kecamatan Kekirihil	150.000.000,00
Reklas Antar Aset Tetap pada Dinas Perindustrian	176.882.439,00
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>(56.117.422.877,00)</b>
Hibah pada PUPR	(2.824.000.000,00)
Reklas Antar Aset Tetap pada BPBD	(3.556.000,00)
Reklas Antar Aset Tetap pada Diskominfo	(99.850.000,00)
Koreksi Belanja Menjadi KDP pada PUPR	(46.701.244.350,00)
Koreksi Double Catat tahun Sebelumnya pada PUPR	(6.444.007.077,00)
Aset yg dimusnahkan pada Kecamatan Tapung Hilir	(4.800.000,00)
Reklas Antar Aset Tetap pada Kecamatan Koto Kampar Hulu	(1.778.000,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada Kecamatan Bangkinang Kota	(38.187.450,00)
<b>JUMLAH SELISIH</b>	<b>316.534.499.985,09</b>

#### 5.5.19.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp159.977.668.557,34 sedangkan pada Tahun 2022 Aset Tetap Lainnya sebesar Rp147.225.590.396,34 dan terjadi kenaikan sebesar Rp12.752.078.161,00 atau 8,66%.

**Tabel 5.5.19.5 Aset Tetap Lainnya**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Lainnya	159.977.668.557,34	147.225.590.396,34	12.752.078.161,00	8,66
<b>Jumlah</b>	<b>159.977.668.557,34</b>	<b>147.225.590.396,34</b>	<b>12.752.078.161,00</b>	<b>8,66</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	132.742.021.318,00	120.600.400.157,00
Dinas Kesehatan	2.708.967.700,00	2.426.402.700,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	10.093.400,00	10.093.400,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	14.633.500,00	14.633.500,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	202.150.000,00	202.150.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	35.440.000,00	35.440.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	632.780.000,00	632.780.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	174.970.000,00	0,00
Dinas Sosial	49.400.000,00	49.400.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	20.500.000,00	20.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	535.088.959,00	535.088.959,00
Dinas Lingkungan Hidup	10.995.664.466,29	10.995.664.466,29
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	119.402.000,00	119.402.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10.840.000,00	10.840.000,00
Dinas Perhubungan	962.465.125,00	962.465.125,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	194.555.000,00	194.555.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	121.398.333,33	121.398.333,33
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.383.092.600,00	2.245.170.600,00
Dinas Perikanan	638.236.874,00	638.236.874,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	442.143.250,00	427.143.250,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	272.450.000,00	272.450.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	4.218.687.000,00	4.218.687.000,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	20.019.500,00	20.019.500,00
Sekretariat Daerah	905.438.913,72	905.438.913,72
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	609.940.720,00	609.940.720,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	646.174.897,00	646.174.897,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	196.050.000,00	196.050.000,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.000.000,00	3.000.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	2.625.000,00	2.625.000,00
Kecamatan Tapung	5.550.000,00	5.550.000,00
Kecamatan Tambang	6.600.000,00	6.600.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	3.700.000,00	3.700.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kecamatan Kampar Utara	7.000.000,00	7.000.000,00
Kecamatan Kampa	400.000,00	400.000,00
Kecamatan Salo	7.880.000,00	7.880.000,00
Kecamatan Bangkinang	1.320.000,00	1.320.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	20.680.000,00	20.680.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	1.000.000,00	1.000.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	40.000.000,00	40.000.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	3.740.000,00	3.740.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	3.420.000,00	3.420.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	6.850.001,00	6.850.001,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.300.000,00	1.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>159.977.668.557,34</b>	<b>147.225.590.396,34</b>

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap lainnya pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	159.977.668.557,34
Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 - 1 (Neraca)	147.225.590.396,34
<b>Selisih</b>	<b>12.752.078.161,00</b>
<b>Penjelasan terhadap selisih :</b>	
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	13.481.344.811,00
Reklas Antar Aset Tetap pada Dinkes	212.585.000,00
Reklas Antar Aset Tetap pada Dinkes	(168.902.170,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada Disdik	(12.690.000,00)
Reklas Antar Aset Tetap pada RSUD Bangkinang	(216.213.240,00)
Reklas Antar Aset Tetap pada DPMD	(23.850.000,00)
Kapitalisasi Belanja pada DAMKAR	174.970.000,00
Reklas Antar Aset Tetap pada Kecamatan Tambang	(24.000.000,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada Satpol PP	(17.940.000,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada DPPKBP3A	(19.635.000,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada Dinas Ketahanan Pangan	(187.913.240,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada DLH	(345.678.000,00)
Tidak Termasuk Klasifikasi Aset Tetap pada Dinas Perpustakaan	(100.000.000,00)
<b>JUMLAH SELISIH</b>	<b>12.752.078.161,00</b>

#### 5.5.19.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp159.278.601.361,00 sedangkan pada Tahun 2022 Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp92.615.410.708,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp66.663.190.653,00 atau 71,98%.

**Tabel 5.5.19.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	159.278.601.361,00	92.615.410.708,00	66.663.190.653,00	71,98
<b>Jumlah</b>	<b>159.278.601.361,00</b>	<b>92.615.410.708,00</b>	<b>66.663.190.653,00</b>	<b>71,98</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	2.529.780.350,00	392.547.350,00
Dinas Kesehatan	220.853.000,00	220.853.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	73.715.694.220,00	73.715.694.220,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	77.985.723.101,00	13.831.250.448,00
Dinas Lingkungan Hidup	99.773.190,00	99.773.190,00
Dinas Perhubungan	84.808.000,00	9.994.000,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	4.631.969.500,00	4.345.298.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>159.278.601.361,00</b>	<b>92.615.410.708,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**5.5.19.7 Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan pada Tahun 2023 yaitu sebesar (Rp5.870.406.621.822,44) sedangkan pada Tahun 2022 Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp5.536.714.108.615,40) dan terjadi kenaikan sebesar (Rp333.692.513.207,04) atau 6,03% yang disebabkan adanya mutasi Aset pada Aset lainnya.

**Tabel 5.5.19.7 Akumulasi Penyusutan**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan	(5.870.406.621.822,44)	(5.536.714.108.615,40)	(333.692.513.207,04)	6,03
<b>Jumlah</b>	<b>(5.870.406.621.822,44)</b>	<b>(5.536.714.108.615,40)</b>	<b>(333.692.513.207,04)</b>	<b>6,03</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	(496.933.197.721,49)	(441.524.536.913,83)
Dinas Kesehatan	(145.150.046.401,26)	(125.616.007.572,08)
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(167.746.385.483,53)	(145.842.717.873,35)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(4.142.870.729.841,40)	(3.989.139.453.635,77)
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	(314.841.270.809,83)	(279.670.543.875,82)
Satuan Polisi Pamong Praja	(6.689.611.599,70)	(6.423.813.177,57)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(14.118.527.495,82)	(12.329.295.466,59)
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	(768.198.328,57)	(300.742.050,00)
Dinas Sosial	(7.466.323.135,31)	(6.760.691.886,97)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(9.660.532.634,48)	(8.815.372.797,81)
Dinas Ketahanan Pangan	(10.582.018.308,31)	(10.254.677.584,13)
Dinas Lingkungan Hidup	(45.100.843.221,65)	(40.872.379.890,53)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(3.036.689.398,03)	(2.310.820.227,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(1.926.560.081,03)	(1.553.666.351,91)
Dinas Perhubungan	(52.225.785.578,29)	(46.843.191.099,45)
Dinas Komun/Kasi, Informatika Dan Persandian	(6.710.790.241,24)	(5.328.808.789,59)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(8.052.356.463,17)	(6.928.030.907,59)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	(6.428.772.915,03)	(5.885.071.808,67)
Dinas Perikanan	(45.187.452.776,61)	(42.218.009.763,70)
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	(8.404.513.287,65)	(7.328.653.631,38)
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	(23.396.311.778,31)	(22.552.144.424,91)
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	(19.842.355.828,66)	(18.912.595.598,63)
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	(9.793.417.296,32)	(8.490.854.049,31)
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	(19.763.792.953,78)	(18.388.837.320,39)
Sekretariat Daerah	(209.838.197.866,52)	(198.262.422.190,52)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(25.562.158.080,79)	(23.078.430.942,53)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(13.329.398.269,63)	(12.041.322.585,60)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	(4.613.782.285,72)	(3.893.917.630,88)
Badan Pendapatan Daerah	(12.603.916.780,12)	(11.775.889.867,27)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(4.719.492.380,55)	(4.421.163.167,58)
Inspektorat Kabupaten	(4.055.928.808,71)	(3.785.904.479,55)
Kecamatan Kampar Kiri	(2.950.915.542,95)	(2.688.211.736,97)
Kecamatan Tapung Hilir	(596.532.800,00)	(581.319.283,33)
Kecamatan Tapung Hulu	(1.166.109.462,00)	(1.086.909.423,60)
Kecamatan Tapung	(1.169.185.700,00)	(1.136.580.540,00)
Kecamatan Tambang	(855.085.957,48)	(793.528.802,43)
Kecamatan Kampar	(3.076.128.692,46)	(2.839.466.787,18)
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	(1.053.599.490,00)	(991.399.032,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kecamatan Siak Hulu	(1.434.750.552,59)	(1.377.635.369,36)
Kecamatan XIII Koto Kampar	(1.671.247.147,78)	(1.467.084.695,37)
Kecamatan Rumbio Jaya	(1.312.618.085,43)	(1.255.157.997,96)
Kecamatan Kampar Utara	(420.432.647,00)	(413.415.047,00)
Kecamatan Kampa	(728.642.208,25)	(698.028.634,87)
Kecamatan Salo	(953.946.705,85)	(914.363.840,68)
Kecamatan Bangkinang	(1.030.662.859,39)	(871.166.579,51)
Kecamatan Kuok	(1.673.721.477,89)	(1.621.395.980,11)
Kecamatan Bangkinang Kota	(1.820.854.819,07)	(1.681.646.495,10)
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	(855.393.425,93)	(809.587.641,80)
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	(1.225.361.201,87)	(1.045.502.458,17)
Kecamatan Gunung Sahilan	(1.138.468.292,42)	(1.064.301.300,57)
Kecamatan Perhentian Raja	(937.620.737,20)	(898.964.515,00)
Kecamatan Koto Kampar Hulu	(463.021.729,71)	(482.129.469,29)
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(2.254.964.235,66)	(1.696.345.424,29)
<b>Jumlah</b>	<b>(5.870.406.621.822,44)</b>	<b>(5.536.714.108.615,40)</b>

#### 5.5.20 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah Aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Saldo Aset Lainnya Tahun 2023 yaitu sebesar Rp236.913.666.094,22 sedangkan pada Tahun 2022 Aset Lainnya sebesar Rp109.961.615.083,22 dan terjadi kenaikan sebesar Rp126.952.051.011,00 atau 115,45%.

**Tabel 5.5.20 Aset Lainnya**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lainnya	236.913.666.094,22	109.961.615.083,22	126.952.051.011,00	115,45
<b>Jumlah</b>	<b>236.913.666.094,22</b>	<b>109.961.615.083,22</b>	<b>126.952.051.011,00</b>	<b>115,45</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Tagihan Jangka Panjang		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.965.044.393,14	3.965.044.393,14
Kemitraan Pihak Ketiga	2.246.500.000,00	2.246.500.000,00
Aset Tidak Berwujud	3.420.636.195,00	3.320.786.195,00
Aset Lain-lain	520.763.061.859,21	523.240.518.714,21
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.169.961.695,00)	(3.113.264.195,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(475.110.483.658,13)	(477.587.940.513,13)
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility ( TDF )	184.798.869.000,00	57.889.970.489,00
<b>Jumlah</b>	<b>236.913.666.094,22</b>	<b>109.961.615.083,22</b>

#### 5.5.20.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jumlah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.965.044.393,14 Sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp3.965.044.393,14 dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.965.044.393,14 Sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp3.965.044.393,14 dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**Tabel 5.5.20.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.965.044.393,14	3.965.044.393,14	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.965.044.393,14</b>	<b>3.965.044.393,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.5.20.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan Kerjasama pemanfaatan dengan melakukan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan Aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Jumlah kerjasama pemanfaatan pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.246.500.000,00 sama dengan Tahun 2022 sebesar Rp2.246.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.20.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.246.500.000,00	2.246.500.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.246.500.000,00</b>	<b>2.246.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kerjasama Bagunan Guna Serah (BGS) Pasar Inpres Bangkinang	2.246.500.000,00	2.246.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.246.500.000,00</b>	<b>2.246.500.000,00</b>

Nilai Aset yang dikendalikan bersama dengan menggunakan Aset atau Hak Usaha (Kemitraan dengan Pihak Ketiga) yang bersumber dari kerjasama Bangunan Guna Serah Pasar Inpres Bangkinang sebesar Rp2.246.500.000,00

Hak yang diperoleh oleh PT Makmur Permata Putra diantaranya sebagai berikut: Pihak kedua diperbolehkan mengagunkan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah hak pengelolaan milik pertama selama jangka waktu berlakunya HGB, dapat mengalihkan sebagian HGB di atas tanah hak pengelolaan milik pihak pertama dan hak pemakaian atas unit toko, kios dan LOS kepada pihak ketiga, khusus untuk bangunan KANTO (Kantor Toko) pihak pertama memberikan izin pemecahan langsung HGB di atas tanah hak pengelolaan milik pihak pertama kepada pihak ketiga.

Kewajiban dari PT Makmur Permata Putra diantaranya: Berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Kampar selama pengelolaan pasar/pusat perbelanjaan dan fasilitasnya, pada tahun I sebesar Rp100.000.000,00, tahun II sebesar Rp100.000.000,00, tahun III sebesar Rp150.000.000,00, tahun IV sebesar Rp200.000.000,00, dan tahun V sebesar Rp200.000.000,00.

**5.5.20.3 Aset Tidak Berwujud**

Aset Tidak Berwujud adalah Aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, mensyaratkan bahwa Aset Tidak Berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.420.636.195,00 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp3.320.786.195,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp99.850.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.20.3 Aset Tidak Berwujud**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	3.420.636.195,00	3.320.786.195,00	99.850.000,00	3,01
<b>Jumlah</b>	<b>3.420.636.195,00</b>	<b>3.320.786.195,00</b>	<b>99.850.000,00</b>	<b>3,01</b>

Dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	226.735.000,00	226.735.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	1.094.904.000,00	1.094.904.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	99.850.000,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	233.084.000,00	233.084.000,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	32.827.364,00	32.827.364,00
Sekretariat Daerah	518.253.331,00	518.253.331,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	320.650.000,00	320.650.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	389.000.000,00	389.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	461.332.500,00	461.332.500,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44.000.000,00	44.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.420.636.195,00</b>	<b>3.320.786.195,00</b>

#### 5.5.20.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan, Aset Lain-lain pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp520.763.061.859,21 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp523.240.518.714,21 dan terjadi penurunan sebesar (Rp2.477.456.855,00) atau (0,47%) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.20.4 Aset Lain-Lain**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikani/(Penurunan)	%
Aset Lain-Lain	520.763.061.859,21	523.240.518.714,21	(2.477.456.855,00)	(0,47)
<b>Jumlah</b>	<b>520.763.061.859,21</b>	<b>523.240.518.714,21</b>	<b>(2.477.456.855,00)</b>	<b>(0,47)</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	18.607.404.557,00	18.607.404.557,00
Dinas Kesehatan	2.621.851.903,00	2.621.851.903,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	568.717.531,00	568.717.531,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	405.878.936.877,46	405.878.936.877,46
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	42.289.323.727,00	42.289.323.727,00
Satuan Polisi Pamong Praja	483.158.607,00	483.158.607,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	719.967.749,00	719.967.749,00
Dinas Sosial	9.814.766.842,82	9.814.766.842,82
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	428.042.074,00	428.042.074,00
Dinas Ketahanan Pangan	124.611.555,00	124.611.555,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.247.065.000,00	1.247.065.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.613.128.016,00	3.613.128.016,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.263.654.002,00	1.263.654.002,00
Dinas Perhubungan	2.431.024.310,02	2.431.024.310,02
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	175.457.500,00	175.457.500,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	407.300.000,00	407.300.000,00
Dinas Perikanan	2.885.548.662,23	2.885.548.662,23
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.180.343.971,00	3.180.343.971,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	10.696.970.344,00	10.696.970.344,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	769.895.812,00	966.895.812,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	25.514.020,00	25.514.020,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	72.846.887,00	72.846.887,00
Sekretariat Daerah	2.954.834.459,00	4.582.254.849,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.404.023.936,91	1.404.023.936,91
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.714.963.267,00	1.714.963.267,00
Badan Pendapatan Daerah	1.264.866.772,00	1.264.866.772,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	940.752.844,77	940.752.844,77
Inspektorat Kabupaten	966.459.491,00	966.459.491,00
Kecamatan Kampar Kiri	112.795.156,00	112.795.156,00
Kecamatan Tapung Hilir	19.500.000,00	68.548.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	191.542.500,00	191.542.500,00
Kecamatan Tapung	222.239.000,00	222.239.000,00
Kecamatan Tambang	728.479.166,00	729.479.166,00
Kecamatan Kampar	9.800.000,00	159.150.800,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	228.669.205,00	371.845.005,00
Kecamatan Siak Hulu	238.869.000,00	238.869.000,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	84.895.001,00	107.669.401,00
Kecamatan Rumbio Jaya	216.550.000,00	319.297.400,00
Kecamatan Kampar Utara	155.300.000,00	263.135.000,00
Kecamatan Kampa	96.500.000,00	173.605.065,00
Kecamatan Selo	23.418.000,00	23.418.000,00
Kecamatan Bangkinang	132.785.550,00	132.785.550,00
Kecamatan Kuok	212.535.162,00	212.535.162,00
Kecamatan Bangkinang Kota	73.000.000,00	73.000.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	111.175.901,00	111.175.901,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	59.265.000,00	59.265.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	184.200.000,00	184.200.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	98.300.000,00	98.300.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	11.812.500,00	11.812.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>520.763.061.859,21</b>	<b>523.240.518.714,21</b>

**5.5.20.4.1 Aset lain-lain Peralatan dan Mesin**

Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan, Aset Lain-lain peralatan dan mesin pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp58.941.246.437,75 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp61.418.703.292,75 dan terjadi penurunan pada Tahun 2023 sebesar (Rp2.477.456.855,00) atau (4,03%), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.20.4.1 Aset lain-lain Peralatan dan Mesin**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset lain-lain Peralatan dan Mesin	58.941.246.437,75	61.418.703.292,75	(2.477.456.855,00)	(4,03)
<b>Jumlah</b>	<b>58.941.246.437,75</b>	<b>61.418.703.292,75</b>	<b>(2.477.456.855,00)</b>	<b>(4,03)</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	8.526.684.144,00	8.526.684.144,00
Dinas Kesehatan	2.621.851.903,00	2.621.851.903,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	568.717.531,00	568.717.531,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.862.102.747,00	5.862.102.747,00
Satuan Polisi Pamong Praja	483.158.607,00	483.158.607,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.384.296.691,82	1.384.296.691,82
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	124.611.555,00	124.611.555,00
Dinas Sosial	1.247.065.000,00	1.247.065.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	719.967.749,00	719.967.749,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.613.128.016,00	3.613.128.016,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.263.654.002,00	1.263.654.002,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	428.042.074,00	428.042.074,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.446.557.310,02	1.446.557.310,02
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	175.457.500,00	175.457.500,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	407.300.000,00	407.300.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	10.696.970.344,00	10.696.970.344,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Dinas Perikanan	769.895.812,00	966.895.812,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.180.343.971,00	3.180.343.971,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	2.885.548.662,23	2.885.548.662,23
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	25.514.020,00	25.514.020,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	72.846.887,00	72.846.887,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	966.459.491,00	966.459.491,00
Sekretariat Daerah	1.714.963.267,00	1.714.963.267,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.284.866.772,00	1.284.866.772,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	940.752.844,77	940.752.844,77
Badan Pendapatan Daerah	2.954.834.459,00	4.582.254.849,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.404.023.936,91	1.404.023.936,91
Inspektorat Kabupaten	11.812.500,00	11.812.500,00
Kecamatan Kampar Kiri	112.795.156,00	112.795.156,00
Kecamatan Tapung Hilir	19.500.000,00	68.548.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	191.542.500,00	191.542.500,00
Kecamatan Tapung	222.239.000,00	222.239.000,00
Kecamatan Tambang	728.479.166,00	729.479.166,00
Kecamatan Kampar	9.800.000,00	159.150.800,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	228.669.205,00	371.845.005,00
Kecamatan Siak Hulu	238.869.000,00	238.869.000,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	84.895.001,00	107.669.401,00
Kecamatan Rumbio Jaya	216.550.000,00	319.297.400,00
Kecamatan Kampar Utara	155.300.000,00	263.135.000,00
Kecamatan Kampa	98.500.000,00	173.605.065,00
Kecamatan Salo	23.418.000,00	23.418.000,00
Kecamatan Bangkinang	132.785.550,00	132.785.550,00
Kecamatan Kuok	212.535.162,00	212.535.162,00
Kecamatan Bangkinang Kota	73.000.000,00	73.000.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	111.175.901,00	111.175.901,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	59.265.000,00	59.265.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	184.200.000,00	184.200.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	98.300.000,00	98.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>58.941.246.437,75</b>	<b>61.418.703.292,75</b>

**5.5.20.4.2 Aset lain-lain Gedung dan Bangunan**

Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan, Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp61.089.108.641,00 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp61.089.108.641,00 dan tidak ada kenaikan atau penurunan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.20.4.2 Aset lain-lain Gedung dan Bangunan**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset lain-lain Gedung dan Bangunan	61.089.108.641,00	61.089.108.641,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>61.089.108.641,00</b>	<b>61.089.108.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	10.080.720.413,00	10.080.720.413,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	439.299.000,00	439.299.000,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	42.289.323.727,00	42.289.323.727,00
Dinas Sosial	8.195.083.501,00	8.195.083.501,00
Dinas Perhubungan	84.682.000,00	84.682.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>61.089.108.641,00</b>	<b>61.089.108.641,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**5.5.20.4.3 Aset lain-lain Jalan Irigasi dan Jaringan**

Aset Lain-lain Jalan Irigasi dan Jaringan dimaksudkan dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan, Aset Lain-lain Jalan Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp399.577.535.130,46 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp399.577.535.130,46 dan tidak ada kenaikan atau penurunan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.20.4.3 Aset lain-lain Jalan Irigasi dan Jaringan**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset lain-lain Jalan Irigasi dan Jaringan	399.577.535.130,46	399.577.535.130,46	0,00	0,00
Jumlah	399.577.535.130,46	399.577.535.130,46	0,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	399.577.535.130,46	399.577.535.130,46
Jumlah	399.577.535.130,46	399.577.535.130,46

**5.5.20.4.4 Aset lain-lain Aset Tetap Lainnya**

Aset Lain-lain Aset Tetap Lainnya dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan, Aset Lain-lain Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp255.386.650,00 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp255.386.650,00 dan tidak ada kenaikan atau penurunan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.20.4.4 Aset lain-lain Aset Tetap Lainnya**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset lain-lain Aset Tetap Lainnya	255.386.650,00	255.386.650,00	0,00	0,00
Jumlah	255.386.650,00	255.386.650,00	0,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Sosial	255.386.650,00	255.386.650,00
Jumlah	255.386.650,00	255.386.650,00

**5.5.20.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.169.961.695,00 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp3.113.264.195,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp56.697.500,00 atau 1,82% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.20.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.169.961.695,00)	(3.113.264.195,00)	(56.697.500,00)	1,82
Jumlah	(3.169.961.695,00)	(3.113.264.195,00)	(56.697.500,00)	1,82

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	(226.735.000,00)	(226.735.000,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(1.016.952.000,00)	(1.016.952.000,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	(24.962.500,00)	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(233.084.000,00)	(233.084.000,00)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(32.827.364,00)	(32.827.364,00)
Sekretariat Daerah	(486.518.331,00)	(454.783.331,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(320.650.000,00)	(320.650.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(389.000.000,00)	(389.000.000,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Badan Pendapatan Daerah	(395.232.500,00)	(395.232.500,00)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(44.000.000,00)	(44.000.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(3.169.961.695,00)</b>	<b>(3.113.264.195,00)</b>

**5.5.20.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2023 yaitu sebesar Rp475.110.483.658,13 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp477.587.940.513,13 dan terjadi penurunan sebesar Rp2.477.456.855,00 atau 0,52% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.20.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(475.110.483.658,13)	(477.587.940.513,13)	2.477.456.855,00	(0,52)
<b>Jumlah</b>	<b>(475.110.483.658,13)</b>	<b>(477.587.940.513,13)</b>	<b>2.477.456.855,00</b>	<b>(0,52)</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahrag	(18.604.504.557,00)	(18.604.504.557,00)
Dinas Kesehatan	(2.578.989.236,33)	(2.578.989.236,33)
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(568.717.531,00)	(568.717.531,00)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(403.428.750.512,18)	(403.428.750.512,18)
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	(9.582.252.083,60)	(9.582.252.083,60)
Satuan Polisi Pamong Praja	(468.458.607,00)	(468.458.607,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(713.067.749,00)	(713.067.749,00)
Dinas Sosial	(2.424.938.647,92)	(2.424.938.647,92)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(428.042.074,00)	(428.042.074,00)
Dinas Ketahanan Pangan	(124.611.555,00)	(124.611.555,00)
Dinas Lingkungan Hidup	(1.247.065.000,00)	(1.247.065.000,00)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(3.598.557.766,00)	(3.598.557.766,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(1.141.400.075,57)	(1.141.400.075,57)
Dinas Perhubungan	(1.451.638.230,02)	(1.451.638.230,02)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(175.457.500,00)	(175.457.500,00)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	(407.300.000,00)	(407.300.000,00)
Dinas Perikanan	(2.882.820.662,23)	(2.882.820.662,23)
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	(1.297.216.856,60)	(1.297.216.856,60)
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	(10.695.220.344,00)	(10.695.220.344,00)
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	(769.895.812,00)	(968.895.812,00)
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	(25.514.020,00)	(25.514.020,00)
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	(72.846.887,00)	(72.846.887,00)
Sekretariat Daerah	(2.954.834.459,00)	(4.582.254.849,00)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(1.404.023.936,91)	(1.404.023.936,91)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(1.714.963.267,00)	(1.714.963.267,00)
Badan Pendapatan Daerah	(1.238.512.772,00)	(1.238.512.772,00)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(940.752.844,77)	(940.752.844,77)
Inspektorat Kabupaten	(968.459.491,00)	(968.459.491,00)
Kecamatan Kampar Kiri	(112.795.156,00)	(112.795.156,00)
Kecamatan Tapung Hilir	(19.500.000,00)	(68.548.000,00)
Kecamatan Tapung Hulu	(191.542.500,00)	(191.542.500,00)
Kecamatan Tapung	(222.239.000,00)	(222.239.000,00)
Kecamatan Tambang	(727.579.166,00)	(728.579.166,00)
Kecamatan Kampar	(7.800.000,00)	(157.150.800,00)
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	(227.619.245,00)	(370.795.045,00)
Kecamatan Siak Hulu	(238.889.000,00)	(238.889.000,00)
Kecamatan XIII Koto Kampar	(83.565.001,00)	(106.339.401,00)
Kecamatan Rumbio Jaya	(216.550.000,00)	(319.297.400,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kecamatan Kampar Utara	(155.300.000,00)	(263.135.000,00)
Kecamatan Kampa	(96.500.000,00)	(173.605.065,00)
Kecamatan Salo	(23.418.000,00)	(23.418.000,00)
Kecamatan Bangkinang	(132.785.550,00)	(132.785.550,00)
Kecamatan Kuok	(212.535.162,00)	(212.535.162,00)
Kecamatan Bangkinang Kota	(73.000.000,00)	(73.000.000,00)
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	(108.635.901,00)	(108.635.901,00)
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	(59.265.000,00)	(59.265.000,00)
Kecamatan Gunung Sahilan	(184.060.000,00)	(184.060.000,00)
Kecamatan Perhentian Raja	(98.300.000,00)	(98.300.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(11.812.500,00)	(11.812.500,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(475.110.483.658,13)</b>	<b>(477.587.940.513,13)</b>

**5.5.20.7 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility ( TDF )**

Penyaluran Remunerasi DBH dan/atau DAU secara Natural melalui Fasilitas Treasury Deposite Facilities (TDF) berdsarkan PMK Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Tahun 2022

Jumlah kerjasama pemanfaatan pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp184.798.869.000,00 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp57.889.970.489,00 dengan rincian sebagai berikut :

Penyaluran Remunerasi DBH dan/atau DAU secara Natural melalui Fasilitas Treasury Deposite Facilities (TDF) berdsarkan PMK Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU. Tahun 2023 Jumlah kerjasama pemanfaatan pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp184.798.869.000,00 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp57.889.970.489,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.20.7 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility ( TDF )**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (	184.798.869.000,00	57.889.970.489,00	126.908.898.511,00	219,22
<b>Jumlah</b>	<b>184.798.869.000,00</b>	<b>57.889.970.489,00</b>	<b>126.908.898.511,00</b>	<b>219,22</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
DBH PBB-LO		28.564.260.442,00
DBH PPh Pasal 21-LO	2.900.703.000,00	1.834.616.375,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	534.629.000,00	56.514.781,00
DBH CHT-LO		32.285,00
PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	55.832.357.000,00	0,00
PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	558.966.000,00	0,00
DBH SDA Minyak Bumi 15%-LO	111.018.638.000,00	24.186.001.354,00
DBH SDA Minyak Bumi 0,5%-LO	3.068.921.000,00	0,00
DBH SDA Gas Bumi 0,5%-LO	67.751.000,00	1.571.626.357,00
DBH SDA Gas Bumi 30%-LO	4.069.148.000,00	0,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent luaran Tetap-LO	265.000,00	0,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent Royalti-LO	4.505.195.000,00	313.204.627,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	2.242.296.000,00	1.151.961.057,00
DBH SDA Perikanan-LO		211.753.211,00
<b>Jumlah</b>	<b>184.798.869.000,00</b>	<b>57.889.970.489,00</b>

**5.5.21 Kewajiban**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kewajiban adalah utang pemerintah daerah yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa, di masa akan datang. Jumlah kewajiban pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp46.471.245.662,24 Sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp39.544.895.030,24 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.21 Kewajiban**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kewajiban	46.612.962.094,24	39.544.895.030,24	7.068.067.064,00	17,87
Jumlah	46.612.962.094,24	39.544.895.030,24	7.068.067.064,00	17,87

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kewajiban Jangka Pendek	46.612.962.094,24	39.544.895.030,24
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah	46.612.962.094,24	39.544.895.030,24

**5.5.21.1 Kewajiban Jangka Pendek**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga merupakan utang PFK yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran OPD dan BUD telah disetorkan ke Kas negara/Daerah. Utang PFK pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp46.612.962.094,24 Sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp39.544.895.030,24 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.21.1 Kewajiban Jangka Pendek**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	46.612.962.094,24	39.544.895.030,24	7.068.067.064,00	17,87
Jumlah	46.612.962.094,24	39.544.895.030,24	7.068.067.064,00	17,87

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	15.495.208,00	29.894.203,00
Pendapatan Diterima Dimuka	355.795.494,92	425.715.803,92
Utang Belanja	46.241.671.391,32	39.069.285.023,32
Jumlah	46.612.962.094,24	39.544.895.030,24

**5.5.21.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Pendapatan Diterima Dimuka pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp15.495.208,00 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp29.894.203,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.21.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	15.495.208,00	29.894.203,00	(14.398.995,00)	(48,17)
Jumlah	15.495.208,00	29.894.203,00	(14.398.995,00)	(48,17)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	1.432.000,00	13.823.449,00
Dinas Kesehatan	904.702,00	0,00
Kecamatan Salo	597.500,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ( BUD )	12.561.006,00	5.488.064,00
Kecamatan Kampar Utara	0,00	10.517.488,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	65.202,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Jumlah	15.495.208,00	29.894.203,00
--------	---------------	---------------

**5.5.21.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp355.795.494,92 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp425.715.803,92 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.21.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenalkani/(Penurunan)	%
Pendapatan Diterima Dimuka	355.795.494,92	425.715.803,92	(69.920.309,00)	(16,42)
<b>Jumlah</b>	<b>355.795.494,92</b>	<b>425.715.803,92</b>	<b>(69.920.309,00)</b>	<b>(16,42)</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah	355.795.494,92	419.485.803,92
Sewa Mesin ATM Sekretariat Daerah	0,00	6.250.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>355.795.494,92</b>	<b>425.715.803,92</b>

**5.5.21.1.3 Utang Belanja**

Utang Belanja pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp46.241.671.391,32 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp39.089.285.023,32 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.21.1.3 Utang Belanja**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenalkani/(Penurunan)	%
Utang Belanja	46.241.671.391,32	39.089.285.023,32	7.152.386.368,00	18,30
<b>Jumlah</b>	<b>46.241.671.391,32</b>	<b>39.089.285.023,32</b>	<b>7.152.386.368,00</b>	<b>18,30</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	61.669.000,00	61.669.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	37.959.290.906,00	27.538.127.553,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.866.072.034,32	9.470.990.637,32
Dinas Sosial	7.385.809,00	3.844.193,00
Dinas Lingkungan Hidup	63.346.298,00	61.575.388,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	24.975.743,00	6.237.179,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.926.937,00	6.849.799,00
Dinas Perhubungan	1.116.505.025,00	1.082.510.899,00
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	11.330.037,00	16.289.701,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.916.370,00	9.077.225,00
Dinas Perikanan	14.166.466,00	18.601.477,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	2.774.200,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	517.864.129,00	517.864.129,00
Sekretariat Daerah	208.048.485,00	269.080.417,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.899.172,00	5.459.994,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.366.154.630,00	0,00
Kecamatan Tapung Hilir	0,00	413.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	0,00	1.806.901,00
Kecamatan Tambang	0,00	2.133.711,00
Kecamatan Rumbio Jaya	0,00	699.767,00
Kecamatan Kuck	1.465.350,00	1.085.605,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	0,00	537.772,00
Kecamatan Gunung Sahilan	0,00	963.104,00
Kecamatan Perhentian Raja	655.000,00	693.372,00
<b>Jumlah</b>	<b>46.241.671.391,32</b>	<b>39.089.285.023,32</b>



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

5.5.22 Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah Aset dan jumlah Kewajiban pemerintah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Ekuitas pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp5.014.197.764.711,70 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp4.400.842.206.289,49 dan terjadi kenaikan sebesar Rp613.355.558.422,21 atau 13,94%.

Tabel 5.5.22 Ekuitas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	5.014.197.764.711,70	4.400.842.206.289,49	613.355.558.422,21	13,94
Jumlah	5.014.197.764.711,70	4.400.842.206.289,49	613.355.558.422,21	13,94

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	910.542.358.249,16	881.251.167.742,82
Dinas Kesehatan	186.792.565.129,03	170.019.334.375,76
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	192.325.371.915,94	233.030.945.263,80
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.786.060.433.548,43	1.572.561.875.823,97
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	543.747.826.954,59	543.613.362.688,60
Satuan Polisi Pamong Praja	1.324.344.024,30	1.510.307.921,43
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.307.557.208,18	18.114.407.237,41
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2.193.341.437,43	814.050.950,00
Dinas Sosial	17.460.189.901,59	16.107.607.765,93
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.373.997.127,52	3.703.766.943,19
Dinas Ketahanan Pangan	11.933.875.841,69	12.085.555.915,87
Dinas Lingkungan Hidup	82.969.169.724,54	83.415.785.665,66
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.396.050.729,97	1.983.128.598,33
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.389.450.207,40	2.398.284.074,52
Dinas Perhubungan	49.971.424.357,89	45.686.991.088,73
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	3.631.885.787,26	1.937.310.452,41
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.941.092.772,83	5.440.258.922,41
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	10.066.794.307,97	7.340.345.709,33
Dinas Perikanan	47.381.453.747,57	48.914.632.999,48
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	29.138.535.617,19	28.746.274.773,46
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	12.174.206.942,69	11.778.509.246,09
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	25.661.686.831,99	25.272.564.711,02
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	18.456.813.415,68	19.390.377.522,69
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	34.800.339.409,22	34.226.612.147,61
Sekretariat Daerah	218.398.407.035,87	227.582.572.582,87
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.951.632.539,21	13.641.827.277,47
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.089.414.454,15	5.415.719.138,28
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	678.817.718.357,83	289.031.135.693,42
Badan Pendapatan Daerah	51.979.186.866,92	49.710.520.751,80
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.626.499.483,14	2.708.377.474,11
Inspektorat Kabupaten	1.317.816.178,29	1.090.909.507,45
Kecamatan Kampar Kiri	5.606.333.209,05	5.334.901.205,03
Kecamatan Tapung Hilir	659.014.350,00	576.165.866,67
Kecamatan Tapung Hulu	2.156.404.580,00	2.192.475.717,40
Kecamatan Tapung	774.987.300,00	728.865.460,00
Kecamatan Tambang	1.683.213.956,52	1.851.256.400,57
Kecamatan Kampar	5.080.898.960,54	5.045.760.507,82
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.583.496.170,00	1.645.696.628,00
Kecamatan Siak Hulu	5.110.890.891,41	5.078.442.074,64
Kecamatan XIII Koto Kampar	3.087.635.834,38	2.915.147.422,79



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Kecamatan Rumbio Jaya	1.457.898.122,57	1.464.297.443,04
Kecamatan Kampar Utara	534.117.160,00	490.576.160,00
Kecamatan Kampa	1.596.791.369,75	1.571.400.943,13
Kecamatan Salo	428.182.010,15	449.389.875,32
Kecamatan Bangkinang	1.289.135.860,61	1.402.893.140,49
Kecamatan Kuok	2.165.321.561,11	2.218.026.803,89
Kecamatan Bangkinang Kota	2.979.258.359,93	2.695.090.302,90
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	709.334.049,07	685.830.051,20
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	2.161.017.703,13	1.792.656.446,83
Kecamatan Gunung Sehilan	1.712.660.707,58	1.730.884.595,43
Kecamatan Perhentian Raja	1.281.289.987,80	1.257.237.838,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	134.218.475,29	101.158.766,71
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.602.624.787,34	1.349.441.683,71
<b>Jumlah</b>	<b>5.014.197.764.711,70</b>	<b>4.400.842.206.289,49</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

### 5.6 LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Laporan Arus Kas meliputi arus kas dari Aktivitas Operasi, arus kas dari Aktivitas Investasi (Investasi Non Keuangan), arus kas dari Aktivitas Pendanaan (Pembiayaan), dan arus kas dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.6.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp440.243.633.445,58 meliputi arus kas masuk sebesar Rp2.734.805.625.683,08 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp2.294.561.992.237,50 sedangkan pada Tahun 2022 arus kas bersih sebesar Rp228.421.213.560,57 meliputi arus kas masuk sebesar Rp2.427.503.585.552,71 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp2.199.082.371.992,14 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Arus Kas Masuk:</b>	<b>2.734.805.625.683,08</b>	<b>2.427.503.585.552,71</b>
Penerimaan Pajak Daerah	153.800.441.758,00	142.366.052.600,00
Penerimaan Retribusi Daerah	12.315.324.270,00	8.892.742.152,31
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.299.309.804,00	23.550.128.300,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang Sah	96.211.470.588,08	85.607.125.390,40
Penerimaan Dana Bagi Hasil	700.011.657.289,00	574.829.219.552,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	821.580.746.999,00	763.880.955.365,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	28.407.335.549,00	126.047.411.232,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	347.890.746.975,00	300.170.075.716,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	5.205.152.000,00
Penerimaan Dana Desa	231.442.855.200,00	215.093.518.324,00
Insentif Fiskal	4.166.186.828,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	196.200.613.941,00	153.007.050.247,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	104.358.250.208,00	27.688.875.000,00
Penerimaan Hibah	2.100.000.000,00	1.165.279.674,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	20.686.274,00	0,00
<b>Arus Kas Keluar:</b>	<b>2.294.561.992.237,50</b>	<b>2.199.082.371.992,14</b>
Pembayaran Pegawai	936.576.698.454,00	963.391.408.176,00
Pembayaran Barang dan Jasa	849.561.732.279,45	787.240.777.384,22
Pembayaran Subsidi	122.000.000,00	436.450.000,00
Pembayaran Belanja Hibah	102.176.510.903,05	47.872.957.141,92
Pembayaran belanja Bantuan Sosial	12.351.250.028,00	19.677.015.000,00
Pembayaran Tak Terduga	66.645.582,00	846.120.950,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	393.707.154.991,00	379.617.643.340,00
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>440.243.633.445,58</b>	<b>228.421.213.560,57</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

### 5.6.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi (Investasi non keuangan) adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Jumlah arus kas bersih dari Aktivitas investasi (Investasi non keuangan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp324.522.994.637,50 meliputi arus kas masuk sebesar Rp0,00 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp324.522.994.637,50 sedangkan pada Tahun 2022 arus kas bersih sebesar Rp281.509.813.581,82 meliputi arus kas masuk sebesar Rp0,00 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp281.509.813.581,82 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Arus Masuk Kas:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>324.522.994.637,50</b>	<b>281.509.813.581,82</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	1.117.743.930,00	505.118.496,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	54.246.432.888,50	80.023.194.214,82
Perolehan Gedung dan Bangunan	55.491.835.674,00	64.626.802.305,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	200.185.637.334,00	127.694.277.285,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	13.242.462.641,00	8.660.421.281,00
Perolehan Modal Aset Lainnya	238.882.170,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIFITAS OPERASI</b>	<b>-324.522.994.637,50</b>	<b>-281.509.813.581,82</b>

### 5.6.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas Transitoris (non anggaran) adalah aktivitas penerimaan kas dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Jumlah arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris (non anggaran) per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.488.064,00 meliputi arus kas masuk sebesar Rp151.361.160.649,00 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp151.366.648.713,00 sedangkan pada Tahun 2022 arus kas bersih sebesar Rp5.488.064,00 meliputi arus kas masuk sebesar Rp142.335.345.719,00 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp142.329.857.655,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Arus Masuk Kas:</b>	<b>151.361.160.649,00</b>	<b>142.335.345.719,00</b>
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	151.361.160.649,00	142.335.345.719,00
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>151.366.648.713,00</b>	<b>142.329.857.655,00</b>
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	151.366.648.713,00	142.329.857.655,00
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>(5.488.064,00)</b>	<b>5.488.064,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**5.6.4 SALDO AKHIR KAS**

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp137.491.801.599,04 terdiri dari kenaikan/penurunan Kas sebesar (-Rp115.715.150.744,08) ditambah saldo awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp21.776.650.854,96. Sedangkan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.776.650.854,96 terdiri dari kenaikan/penurunan Kas sebesar (Rp53.083.111.957,25) ditambah saldo awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp74.859.762.812,21 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kenaikan/Penurunan Kas	115.715.150.744,08	(53.083.111.957,25)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluara	21.776.650.854,96	74.859.762.812,21
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluara	137.503.004.973,04	21.776.650.854,96
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	4.882.589,00	0,00
<b>SALDO AKHIR KAS</b>	<b>137.491.801.599,04</b>	<b>21.776.650.854,96</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

**BAB – VI**

**PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN**

Beberapa hal lain yang perlu diungkap dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diuraikan berikut ini :

**1. Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 belum Optimal.**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 sudah berdasarkan hasil kompilasi laporan realisasi keuangan dari masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Kampar, namun masih terdapat beberapa kendala seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti :

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (pemda) sering kali menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi kualitas dan ketepatan waktu pelaporan. Beberapa kendala umum meliputi:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Banyak SKPD yang menghadapi kekurangan tenaga ahli di bidang akuntansi dan keuangan yang kompeten untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- b. Sistem Informasi yang Kurang Memadai: Infrastruktur teknologi informasi yang kurang memadai seringkali menjadi hambatan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan secara efektif dan efisien.
- c. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): Masih banyak SKPD yang mengalami kesulitan dalam menerapkan SAP dengan benar, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum optimal dalam memenuhi standar yang ditetapkan.
- d. Perubahan Kebijakan dan Regulasi: Perubahan dalam peraturan atau kebijakan akuntansi yang terjadi dari waktu ke waktu dapat menyebabkan kebingungan dan keterlambatan dalam penyesuaian sistem dan prosedur keuangan.
- e. Pengelolaan Aset dan Inventaris: Kesulitan dalam mengelola aset dan inventaris daerah dengan baik dapat mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akurat atau tidak lengkap.
- f. Tingkat Kepatuhan yang Rendah: Kepatuhan terhadap aturan dan prosedur keuangan yang ditetapkan seringkali masih rendah, baik dari segi pelaporan maupun pengelolaan keuangan sehari-hari.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi yang memadai, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta penerapan pengawasan internal yang ketat dan efektif. Selain itu, penting untuk selalu memperbarui dan menyelaraskan kebijakan serta prosedur dengan peraturan yang berlaku.

Kondisi tersebut membawa konsekuensi adanya proses adaptasi dan pembelajaran yang harus dilakukan oleh semua jajaran aparatur di Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menyusun Laporan Keuangan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

**2. Pemerintah Kabupaten Kampar Telah Memberlakukan Kebijakan Akuntansi yang Bersifat Formal dan Baku**

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 ini telah mengacu dan berpedoman kepada kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan praktik-praktik yang selama ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 sudah mengacu pada kebijakan tersebut dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai dasar penerapan akuntansi bagi seluruh SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

**3. Penjelasan Tambahan atas Penyajian Nilai Aset Tetap**

Penyajian nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Tahun 2023 merupakan prolehan aset tetap yang berasal dari APBD Kabupaten Kampar dan penerimaan hibah Tahun Anggaran 2023. Sedangkan untuk aset yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Kabupaten Kampar yang perolehannya mulai Tahun Anggaran 2023 dan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kampar membukukan aset sesuai dengan data yang tercantum dalam daftar inventaris aset pada Bidang Aset BPKAD Kabupaten Kampar.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

---

**BAB – VII**  
**PENUTUP**

Pemerintah Kabupaten Kampar telah berusaha melaporkan seluruh kegiatan dan program yang telah dilaksanakan sebagaimana direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023, dan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023.

Segala upaya yang telah dilakukan selama ini oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar terangkum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar, yang dapat dijadikan barometer untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada seluruh komponen masyarakat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai negeri berbudaya, berdaya dalam lingkungan masyarakat. Kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar dapat dilihat dari laporan keuangannya, seberapa besar kontribusi setiap pelaksanaan kegiatan guna mendukung pencapaian kinerja sasaran stategis Kabupaten Kampar sekaligus dapat meningkatkan kinerja makro.

Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2023, kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar mengalami peningkatan. Indikator-indikator yang menggambarkan kualitas pembangunan manusia Kabupaten Kampar seperti derajat kesehatan masyarakat dan tingkat pendidikan dinilai mengalami kenaikan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil di kedua bidang tersebut telah mampu menggerakkan sebagian besar sistem kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Kampar. Ini juga tidak terlepas dari koordinasi yang terus menerus dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Kampar, masyarakat luas, dan dunia usaha.

Sementara itu, penurunan yang terjadi pada beberapa indikator tidak menyurutkan semangat Pemerintah Kabupaten Kampar untuk terus-menerus memperbaiki kinerjanya. Disadari bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar tidak mungkin dapat bekerja sendiri. Karena itu dalam masa ke depan akan dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan seluruh komponen masyarakat Kampar.

Pj. BUPATI KAMPAR

  
HAMBALI